



LAPORAN KINERJA 2023

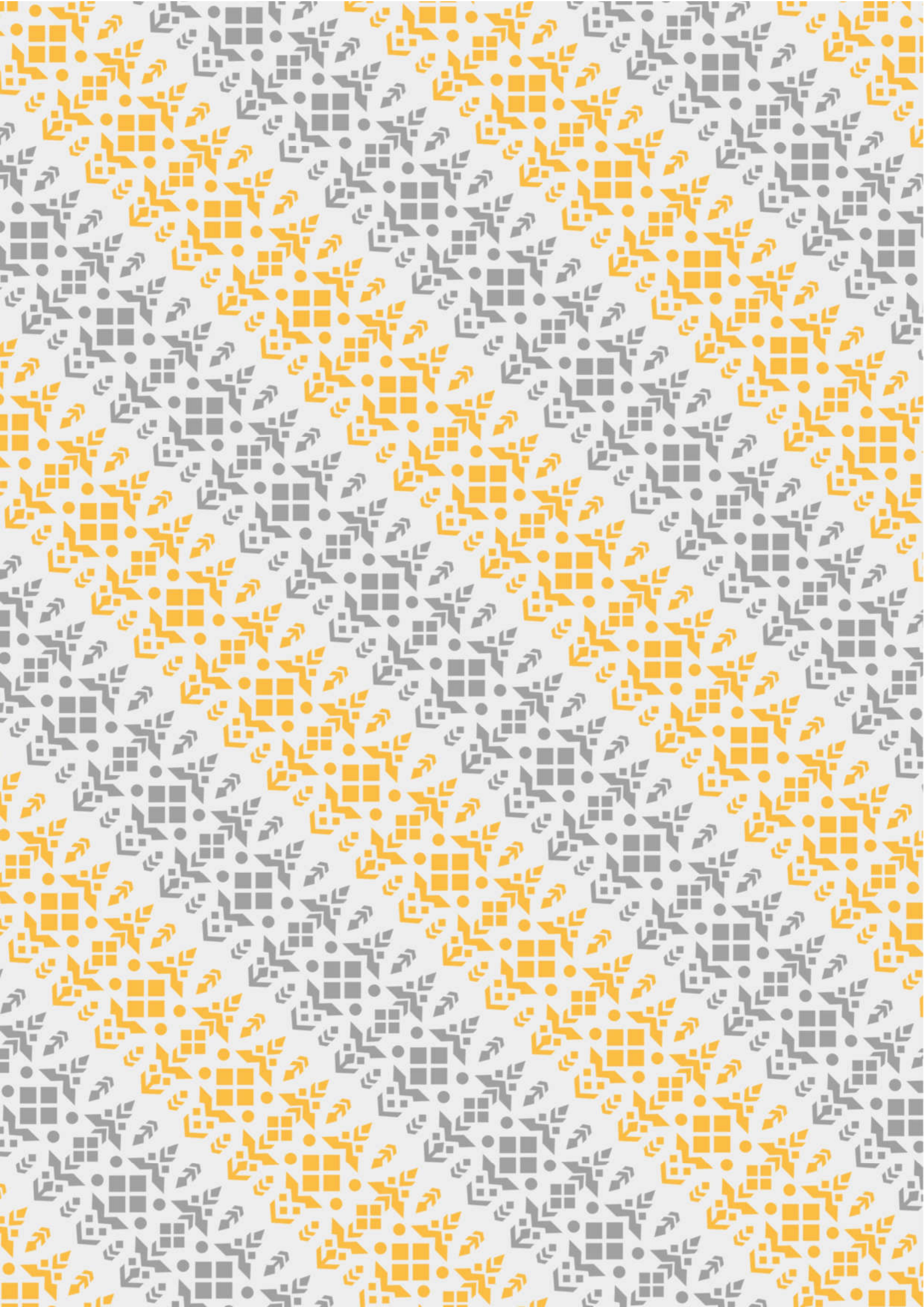
Balai Besar POM di Mataram

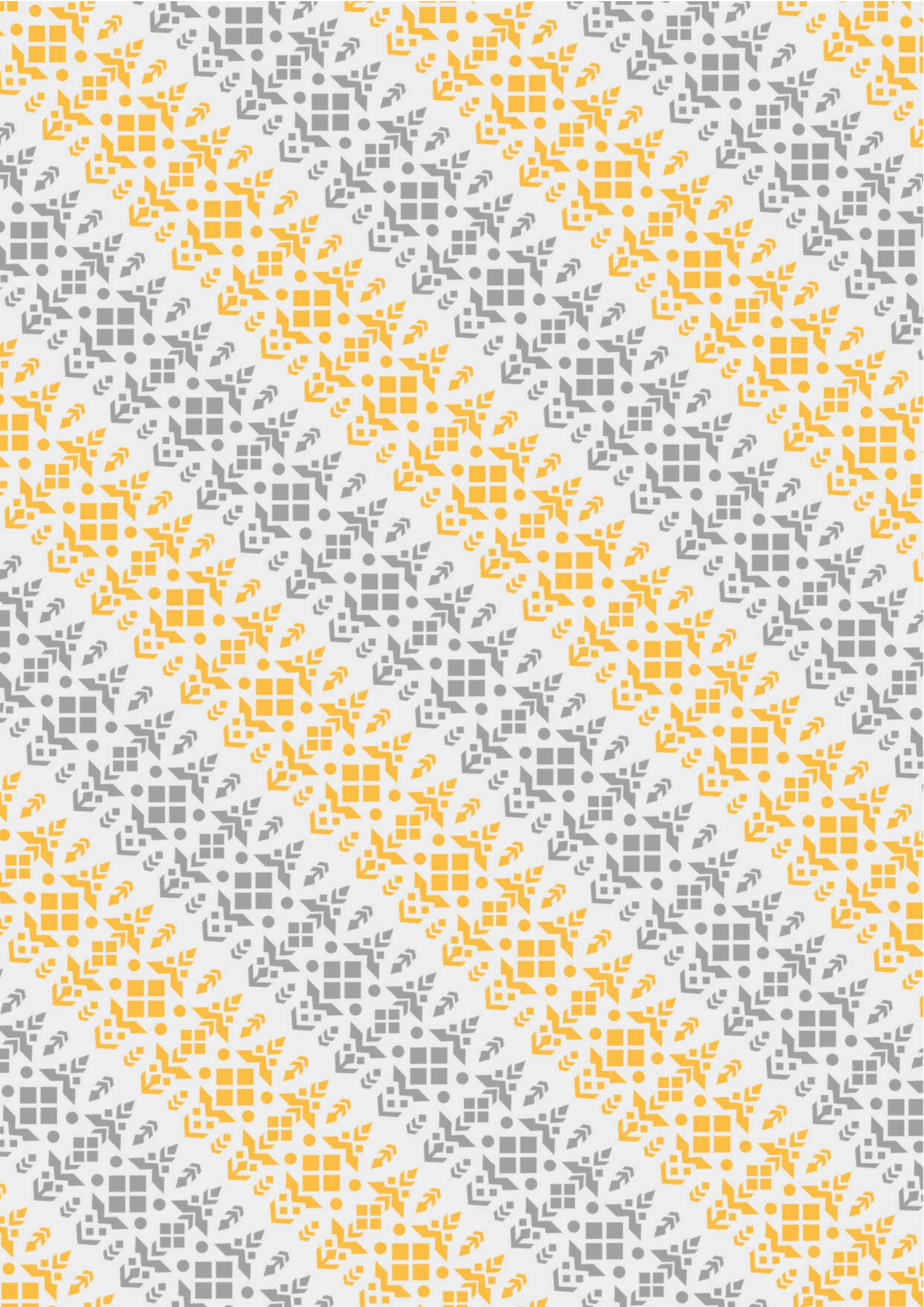
Jl. Catur Warga, Mataram 83121 NTB

Telp. (0370) Ka. 622297, TU/ULPK: 621926

Fax. (0370) 628033, Email: bpom_mataram@pom.go.id

Website: mataram.pom.go.id







PENDAHULUAN



**PERENCANAAN
KINERJA**



**AKUNTABILITAS
KINERJA**



PENUTUP

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI MATARAM
TAHUN 2023**

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Besar POM di Mataram

KETUA

Firman Rakhman, S.Si., Apt

SEKRETARIS

IGA Natari Panca Hayati, S.Si., Apt

ANGGOTA



**Drs. I Nyoman Sumasada, Apt,
MH**



Syamsul Hady, SH



**Hardiono Adisaputra, S.Farm,
Apt**



Muhammad Romadhoni, S.Si



IPN Apri Susilawan, S.Si., M.Si



Mohammad Ibnu Fajri, S.Si



**Abdillah Wibisono, S.Farm, Apt,
M.LabQAMgt**



Mohammad Gusti Airlangga, S.M



Eka Rahmi Paramita, S.Farm, Apt



**I Gusti Made Aryama Jelantik,
S.Si**



**Sri Dewi Puspita Susilawati,
S.Si., Farm**

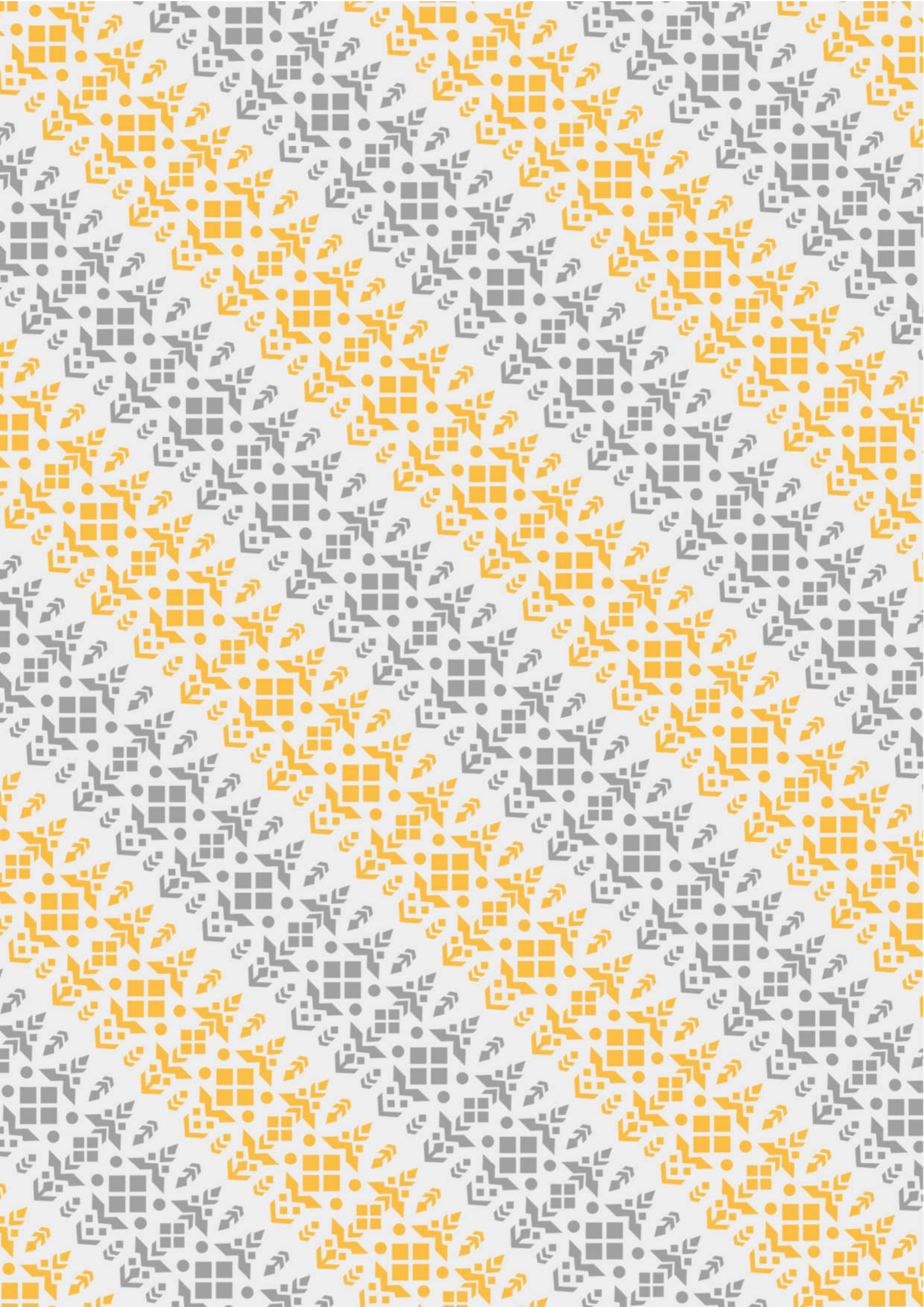


**Kadek Bagus Krisna Candra,
A.Md**



Wayan Krisnayanti, S,Farm., Apt







KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.


Laporan Kinerja Tahunan merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja dan merupakan bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun oleh Kepala BBPOM di Mataram dan disahkan oleh Kepala Badan POM. Penyusunan dan pengesahan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dilakukan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja. Pencapaian target kinerja dilakukan melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja. Hal tersebut selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2023 memuat perjanjian kinerja dan indikator kinerja mengacu pada Reviu Rencana Strategis BBPOM di Mataram Tahun 2020-2024. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap target, realisasi dan capaian kinerja Tahun 2023 serta membandingkan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi dan capaian kinerja Tahun sebelumnya, target akhir periode renstra, serta unit kerja lain dalam satu klaster. Pengukuran kinerja Tahun 2023 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

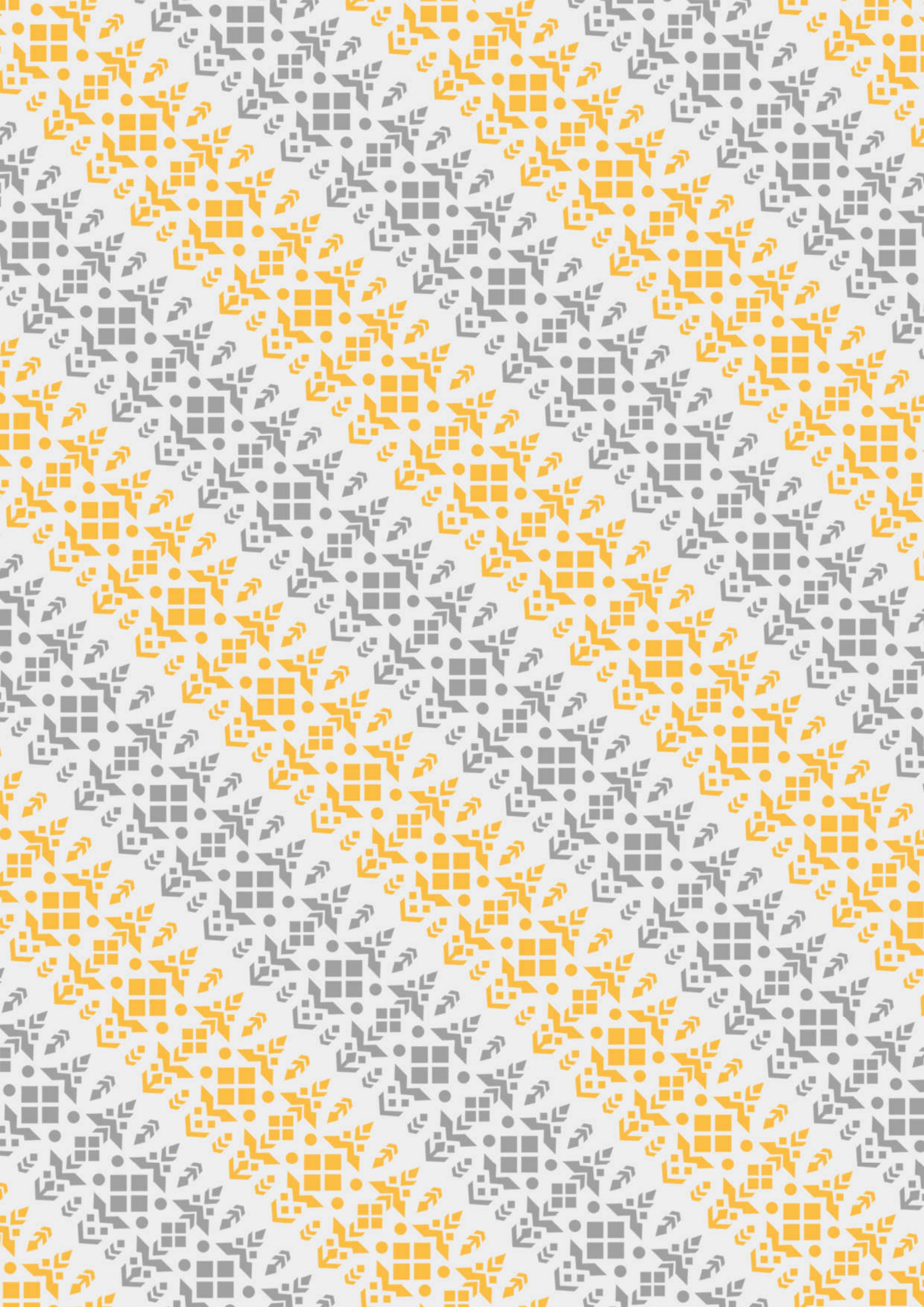
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*). Rekomendasi perbaikan kinerja saat ini menjadi dasar upaya tindak lanjut untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram pada tahun berikutnya.

Mataram, 28 Februari 2024

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Mataram,


Yosef Dwi Iwan Prakasa S, S.Si, Apt







PENDAHULUAN



PERENCANAAN KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA



PENUTUP

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dasar Hukum

DASAR HUKUM

- Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Permenpan RB No 53.Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penantian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tala Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Permenpan RB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Keputusan Kepala BPOM No 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM

Pengukuran Kinerja

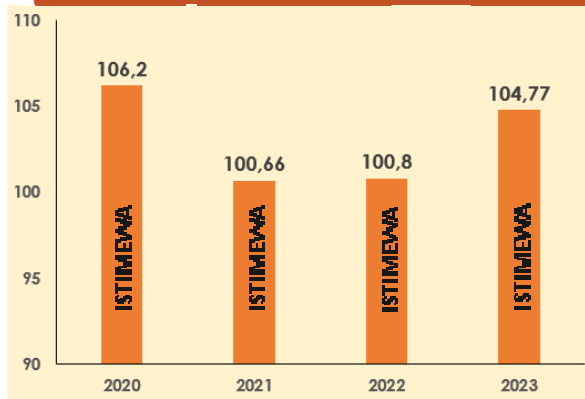
Capaian indikator tujuan Renstra 2020-2024

Analisis efisiensi kegiatan yang mendukung Program Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024

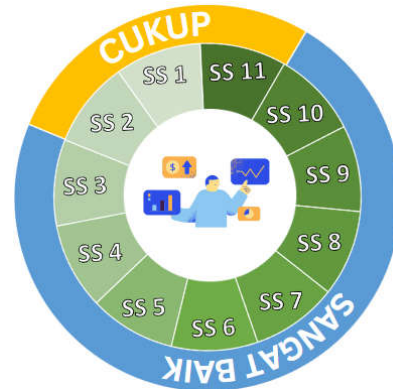
Nilai pencapaian ke-11 Sasaran Kegiatan, diukur dari persentase capaian ke-29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja utama (IKU)

Capaian Realisasi Anggaran

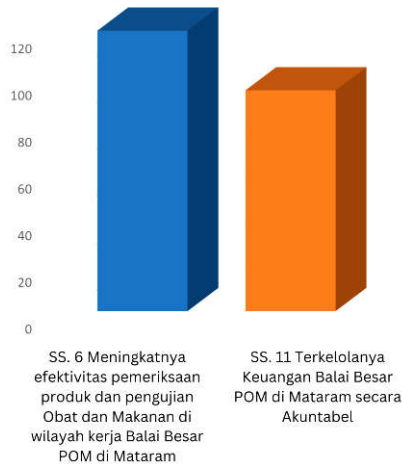
NPSS/Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2023



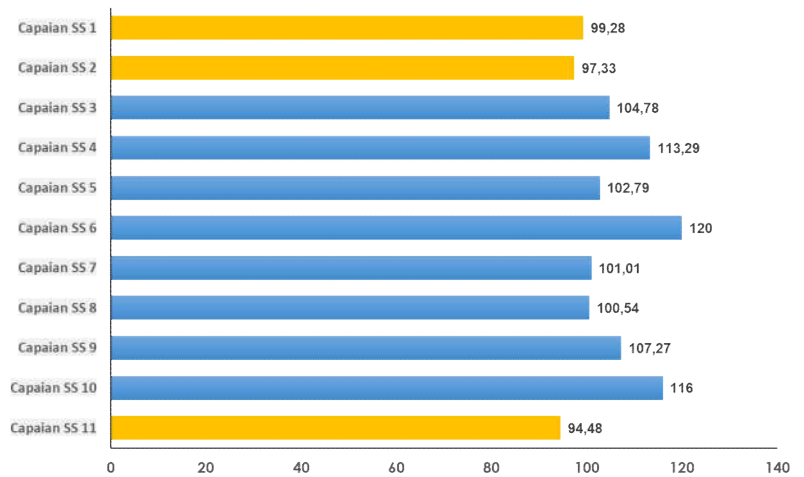
Pencapaian Sasaran Strategis



Rentang Capaian Sasaran Strategi Tahun 2023



Capaian Sasaran Strategis





PENDAHULUAN



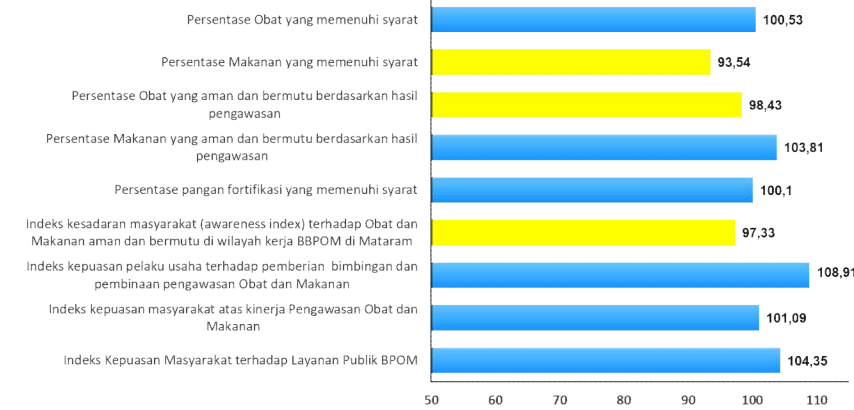
PERENCANAAN KINERJA



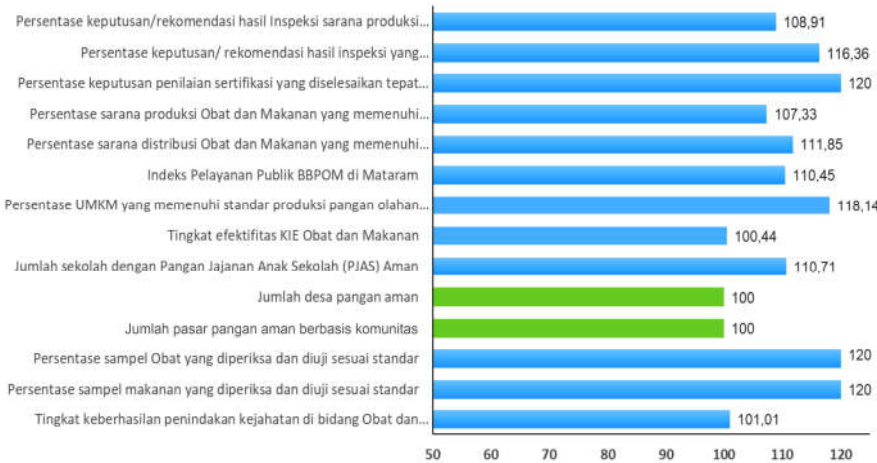
AKUNTABILITAS KINERJA



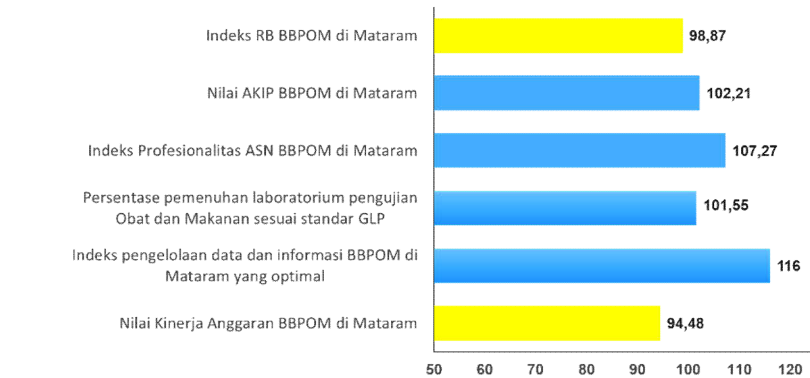
PENUTUP



Capaian Stakeholder Perspective



Capaian Internal Process Perspective



Capaian Learning and Growth Perspective



Rincian DIPA

DIPA Awal : Rp 23.995.139.000,00
 DIPA Revisi : Rp 23.849.625.000,00
 Realisasi : Rp 23.825.109.279,00

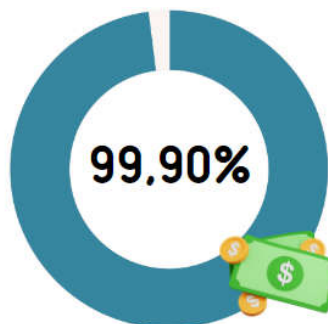
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja Pegawai : 99,97%

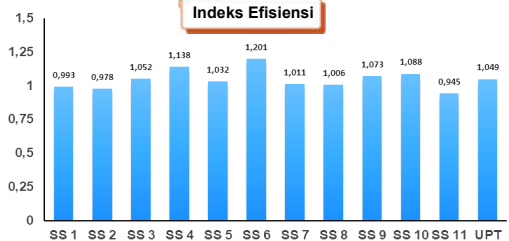
Belanja Barang : 99,83%

Belanja Modal : 99,83%

Realisasi Anggaran



Indeks Efisiensi



Tingkat Efisiensi





PENDAHULUAN



**PERENCANAAN
KINERJA**



**AKUNTABILITAS
KINERJA**



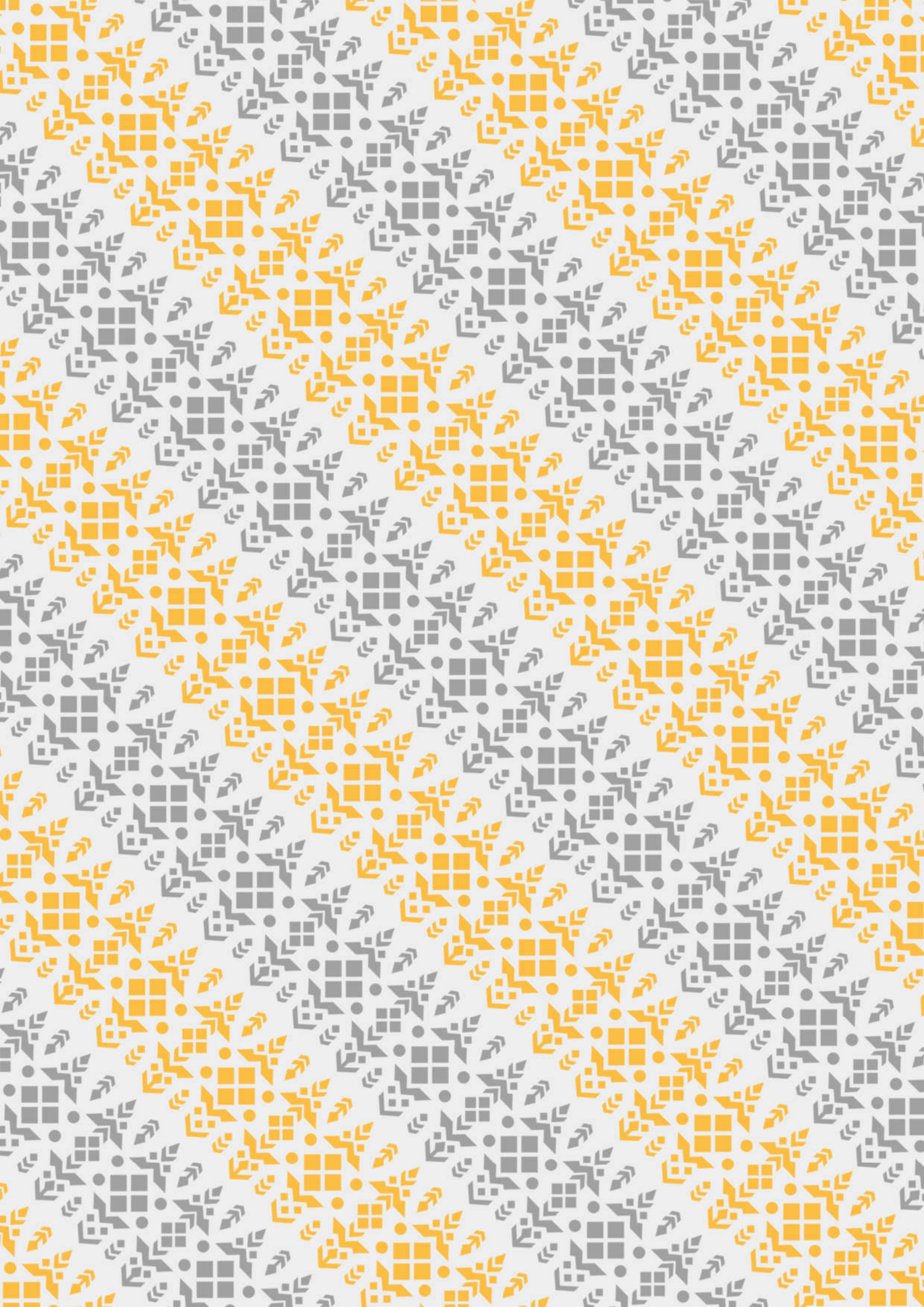
PENUTUP

Dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring evaluasi kinerja secara berkala telah dilakukan namun masih terdapat 3 sasaran strategis yang tidak tercapai. Hal ini antara lain disebabkan karena relative tingginya target dari beberapa indicator sasaran strategis. Selanjutnya akan dilakukan reviu terhadap target indicator tersebut.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran menjadi fokus perbaikan kinerja di periode berikutnya.

BBPOM di Mataram berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja , sehingga komitmen dan tanggung jawab pimpinan dan seluruh pegawai BBPOM di Mataram sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.







PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

HIGHLIGHT

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB, BBPOM di Mataram secara terencana, berkesinambungan dan penuh komitmen dengan seluruh jajarannya melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dengan kesungguhan demi tercapainya visi dan misi organisasi. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang telah diraih BBPOM di Mataram, di antaranya:

**“TERBAIK KEDUA”
UPT Berkinerja Terbaik Tahun 2023
dengan nilai 97,96 (Memuaskan)**

BBPOM di Mataram meraih penghargaan terbaik kedua UPT Berkinerja Terbaik Tahun 2023 dengan nilai 97,96 (**MEMUASKAN**)



**Penyelenggara Pelayanan Publik
“PELAYANAN PRIMA”**

BBPOM di Mataram berhasil menjadi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2023 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori **“PELAYANAN PRIMA”**.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA



PENUTUP

Tersertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
ISO 37001:2016

BBPOM di Mataram Tahun 2023 telah tersertifikasi **Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016** dari Sucofindo International Certification Services



Laboratorium BBPOM di Mataram
Peringkat 1 Penilaian Standar Kemampuan Laboratorium

Laboratorium BBPOM di Mataram berhasil menduduki **Peringkat 1 Penilaian Standar Kemampuan Laboratorium** (Standar Laboratorium, Peralatan dan Kompetensi) tahun 2023 dari P3OMN dengan nilai **93,43**

BBPOM di Mataram Raih Peringkat ke 2 Nilai AKIP
Kategori A "Memuaskan"

BBPOM di Mataram berhasil meraih **peringkat ke 2** nilai AKIP kategori UPT BPOM tahun 2023 dengan nilai **83.81 (A "Memuaskan")**





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP



Peringkat 4 Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Badan POM Tahun 2023 dengan nilai 96.11

BBPOM di Mataram berhasil meraih **peringkat 4** Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Badan POM tahun 2023 dengan nilai **96.11** dan dibandingkan semua Balai POM di seluruh Indonesia

Peringkat 1 dan 2
Kategori Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2023

MTsN 3 Mataram dan MAN 1 Mataram Meraih **Peringkat 1 dan 2 Kategori Sekolah dengan PJAS Aman**



Juara 2 Desa Pangan Aman Tingkat Nasional

Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, meraih **Juara 2 Desa Pangan Aman tingkat Nasional**



Terbaik III Nasional Pemerintah Daerah
Pengawasan Pangan Olahan Sesuai Standar

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur meraih penghargaan **Terbaik III Nasional** Pemerintah Daerah yang melakukan pengawasan pangan dan olahan sesuai standar





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP



Nilai Kinerja Anggaran Peringkat ke-6 Terbaik

BBPOM di Mataram berhasil meraih **peringkat 6** Terbaik Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 pada kategori BB/BPOM dengan nilai **91,65**

No	Satuan Kerja	EKA	IKPA	NKA
1	MANOKWARI	88,86	99,70	93,20
2	MAMUJU	88,83	99,68	93,17
3	JAKARTA	89,11	97,58	92,50
4	PEKAN BARU	86,61	99,69	91,84
5	KUPANG	88,08	97,09	91,68
6	MATARAM	87,44	97,97	91,65
7	BATAM	87,01	98,29	91,52
8	PANGKAL PINANG	87,02	98,04	91,43
9	SEMARANG	88,23	96,11	91,38
10	PALANGKARAYA	86,83	97,79	91,21
11	SERANG	87,58	96,66	91,21
12	BENGKULU	87,50	96,51	91,10
13	KENDARI	86,97	96,25	90,68
14	JAMBI	87,19	95,81	90,64
15	DENPASAR	86,34	96,59	90,44
16	AMBON	86,06	96,90	90,40
17	SURABAYA	86,46	95,91	90,24

Menyukseskan implementasi Reformasi Birokrasi serta sebagai upaya menghadapi perubahan lingkungan strategis yang dinamis, BBPOM di Mataram telah membuat inovasi-inovasi untuk mendukung peningkatan kinerja, antara lain:

• **One Hour Service (OHS) dan One Day Service (ODS) Weekend**

Sebagai satuan kerja yang memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima, Balai Besar POM di Mataram melakukan terobosan melalui pengembangan inovasi ODS (One Day Service). ODS adalah layanan pengujian pihak ketiga atau eksternal khususnya sampel obat dan NAPPZA yang selesai uji dalam waktu 1 (satu) hari.

OHS (One Hour Service) dan ODS (One Day Service) Weekend merupakan 2 (dua) inovasi turunan inovasi ODS yang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat dalam hal pengujian sampel kasus dari kepolisian dan BNN (Badan Narkotika Nasional) di wilayah Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat). Layanan OHS memusatkan pelayanan pengujian khusus sampel shabu yang selesai uji dalam waktu kurang dari 1 (satu) jam dan berlaku di hari Jumat. Sementara pelayanan pengujian sampel NAPPZA yang dilakukan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional merupakan bentuk dari layanan ODS Weekend.





Balai Besar POM di Mataram merupakan satu-satunya lembaga pemerintahan di NTB yang menyediakan layanan pengujian sampel kasus dari kepolisian dan BNN khususnya di bidang obat dan NAPPZA. Sehingga percepatan layanan pengujian melalui inovasi OHS dan ODS Weekend diharapkan dapat menunjang percepatan penyelesaian kasus peredaran dan penyalahgunaan obat dan NAPPZA di wilayah NTB dan meningkatkan kepuasan para pelanggan sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima di Balai Besar POM di Mataram.

- **GAS PAMAN**

Inovasi Keluarga Sadar Pangan Aman (GAS-PAMAN) merupakan inovasi yang memanfaatkan pedagang sayur keliling sebagai agen penyebar informasi kepada ibu rumah tangga dengan harapan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesadaran praktik keamanan pangan sampai ke tingkat keluarga.



Inovasi GAS PAMAN diawali dengan Penyuluhan Keamanan Pangan kepada pedagang sayur Kader GAS PAMAN. Hingga tahun 2021 telah terdapat 30 Kader di Kabupaten Lombok Tengah dan 20 Kader di Kota Mataram. Inovasi ini tetap berlanjut di tahun 2022 dengan mengoptimalkan peran 20 kader di Kota Mataram kepada target keluarga yang berbeda dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2023 terdapat penambahan 10 kader di Kabupaten Lombok Barat dan 10 kader di Kabupaten Lombok Tengah. Adapun pelaksanaan inovasi ini disinergikan bersama program pasar pangan aman berbasis komunitas.

- **GEMILANG PRO UMKM**



GEMILANG Pro-UMKM (Gerakan Lintas Lembaga Mengawal Daya Saing Produk UMKM) Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan mensinergikan program pendampingan UMKM yang ada di lintas lembaga khususnya UMKM Pangan Olahan Obat Tradisional dan Kosmetika sehingga dapat menambah cakupan. Pada tahun 2023 dengan inovasi Gemilang Pro-UMKM, dilakukan pendampingan secara jemput bola

untuk penerbitan sertifikat / izin penerapan / rekomendasi kepada 43 pelaku usaha sehingga berhasil terbit 58 rekomendasi dan 291 nomor izin edar.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

• PERCEPAT

PERCEPAT (Persediaan Cepat dan Tepat) merupakan digitalisasi pengelolaan persediaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan persediaan menjadi lebih baik. Aplikasi Percepat dibangun pada tahun 2022 dan diimplementasikan mulai tahun 2023 untuk pengelolaan persediaan barang berupa reagensia dan akan dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk pengelolaan suku cadang dan alat tulis kantor. Melalui Aplikasi Percepat, keluar masuk barang persediaan akan tercatat secara real time, sehingga mampu tertelusur dan mencegah terjadinya perbedaan data fisik barang dengan kartu stok. Aplikasi Percepat menjadi alat bantu pencatatan transaksi barang persediaan, adapun fungsinya sebagai berikut:



- ✓ Sebelum diinput ke dalam aplikasi SAKTI karena masih menunggu proses kelengkapan administrasi sebagai data dukung input data namun barang tersebut sudah dibutuhkan oleh user, maka Surat Permintaan Barang (SPB) persediaan diajukan melalui Aplikasi Percepat, sehingga dapat mencegah terjadinya kehilangan dokumen (tercecer) yang merupakan data dukung dalam pencatatan pengeluaran barang.
- ✓ Melalui Aplikasi Percepat, pihak laboratorium (*user*) dapat melihat saldo stok persediaan reagensia yang fisiknya berada di gudang sebelum mengajukan permintaan reagensia, selain itu bisa menjadi data dukung dalam menyusun kebutuhan reagensia berikutnya.

• REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPOM di Mataram secara kontinu dan konsisten melaksanakan kegiatan antara lain:

- ✓ Internalisasi dan Workshop Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Zona Integritas untuk Meraih WBBM Tahun 2023 dalam upaya mewujudkan konsistensi *good government* dan *clean governance* di lingkungan BBPOM di Mataram.
- ✓ Pembinaan seluruh Pegawai BBPOM di Mataram dalam rangka memberikan informasi, pemahaman dan persamaan persepsi kepada semua ASN BBPOM di Mataram, sehingga Reformasi Birokrasi dapat dilakukan secara menyeluruh secara Luring maupun daring.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA

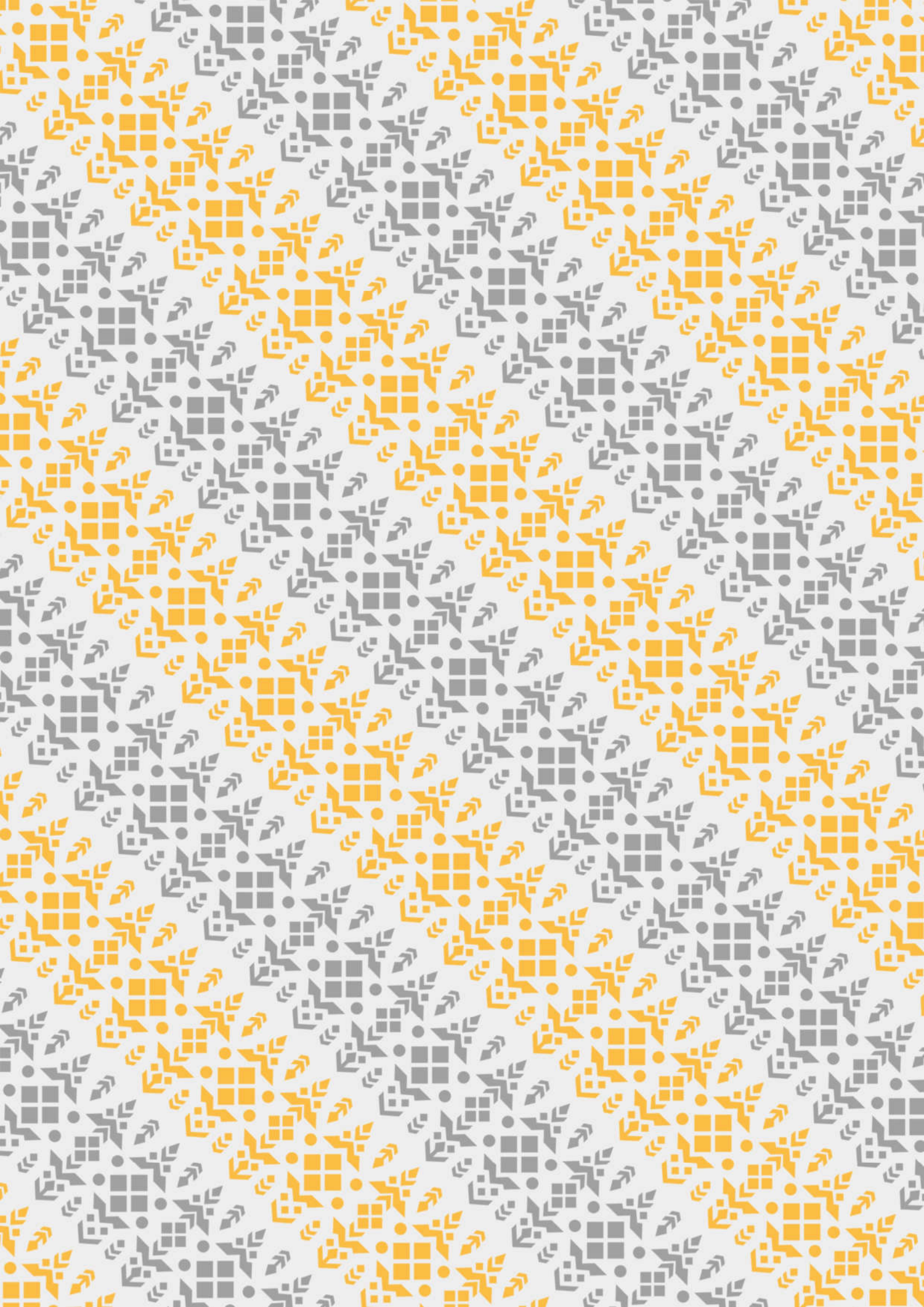


PENUTUP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii	BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
IKHTISAR EKSEKUTIF	v	3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	37
HIGHLIGHT	ix	Analisis Akuntabilitas Kinerja SS1	44
DAFTAR ISI	xv	Analisis Akuntabilitas Kinerja SS2	76
DAFTAR GAMBAR	xv	Analisis Akuntabilitas Kinerja SS3	84
DAFTAR TABEL	xix	Analisis Akuntabilitas Kinerja SS4	104
BAB I : PENDAHULUAN		Analisis Akuntabilitas Kinerja SS5	148
1.1 LATAR BELAKANG	1	Analisis Akuntabilitas Kinerja SS6	175
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2	Analisis Akuntabilitas Kinerja SS7	188
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	3	Analisis Akuntabilitas Kinerja SS8	196
1.4 ISU STRATEGIS	4	Analisis Akuntabilitas Kinerja SS9	212
1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	12	Analisis Akuntabilitas Kinerja SS10	219
BAB II : PERENCANAAN KINERJA		Analisis Akuntabilitas Kinerja SS11	231
2.1 RENCANA STRATEGIS	17	3.2 REALISASI ANGGARAN	237
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	27	BAB IV : PENUTUP	
2.3 PERJANJIAN KINERJA	28	4.1 KESIMPULAN	245
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	31	4.2 SARAN	247
2.5 METODE PENGUKURAN	33	LAMPIRAN	249







DAFTAR GAMBAR

1.1	Empat Inti Kegiatan Fungsi BBOM di Mataram	2
1.2	Struktur Organisasi BBPOM di Mataram	4
1.3	Peta Wilayah Kerja UPT BPOM di Provinsi NTB	15
1.4	Grafik Sarana Produksi di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram Tahun 2023	16
1.5	Grafik Sarana Distribusi di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram Tahun 2023	16
3.1	Perbandingan NPSS/Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	39
3.2	Perbandingan, Realisasi, dan %Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	47
3.3	Perbandingan, Realisasi dan %Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	48
3.4	Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	52
3.5	Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	54
3.6	Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	59
3.7	Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	61
3.8	Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	66
3.9	Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster	67
3.10	Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	71
3.11	Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	73
3.12	Indikator Pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat	78
3.13	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	78
3.14	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	80
3.15	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dan 2020	86



**PENDAHULUAN****PERENCANAAN
KINERJA****AKUNTABILITAS
KINERJA****PENUTUP**

3.16	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	87
3.17	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	93
3.18	Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	94
3.19	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BBPOM di Mataram Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	100
3.20	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik pada Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	101
3.21	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	107
3.22	Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	108
3.23	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	112
3.24	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	114
3.25	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	118
3.26	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	119
3.27	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	124
3.28	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	125
3.29	Perbandingan Target, Realisasi, %Capaian Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 dengan tahun 2022	130
3.30	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	131
3.31	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	137



**PENDAHULUAN****PERENCANAAN
KINERJA****AKUNTABILITAS
KINERJA****PENUTUP**

3.32	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	138
3.33	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2022	143
3.34	Perbandingan Target, Realisasi, dan % Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik Yang Baik Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	144
3.35	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan makanan Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	150
3.36	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Tingkat Efektivitas KIE Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	151
3.37	Perbandingan Target, Realisasi, dan % CapaianJumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020	156
3.38	Perbandingan Target, Realisasi, %Capaian Indikator Sekolah dengan PJAS Aman BBPOM di Mataram Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	157
3.39	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	163
3.40	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	164
3.41	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	170
3.42	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2022 dengan Balai Lain dalam satu klaster	171
3.43	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	177
3.44	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	178
3.45	Perbandingan target, capaian, dan realisasi Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	183
3.46	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022 dengan Balai lain yang setara	184
3.47	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase Tingkat Keberhasilan Penindakan Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	190
3.48	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase Tingkat Keberhasilan Penyidikan Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	191
3.49	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indeks RB BBPOM di Mataram Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	199
3.50	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indeks RB BBPOM di Mataram Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	200



**PENDAHULUAN****PERENCANAAN
KINERJA****AKUNTABILITAS
KINERJA****PENUTUP**

3.51	Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Nilai AKIP BBPOM di Mataram Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	205
3.52	Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Nilai AKIP BBPOM di Mataram Tahun 2022 dengan Balai Lain dalam Satu Klaster	206
3.53	Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase IP ASN BBPOM di Mataram Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	214
3.54	Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian indikator Persentase IP ASN BBPOM di Mataram Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	215
3.55	Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	221
3.56	Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Pemenuhan laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	222
3.57	Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Mataram yang Optimal Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	227
3.58	Perbandingan target, realisasi dan %Capaian Presentase Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Mataram yang Optimal Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	228
3.59	Rincian nilai EKA Tahun 2023	232
3.60	Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian NKA BBPOM di Mataram Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	233
3.61	Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Presentase Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Mataram yang Optimal Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	234
3.62	Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020	238





DAFTAR TABEL

1.1	Kebutuhan SDM BBPOM di Mataram Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2023	12
2.1	Indikator dan Target Sasaran Strategis 1	20
2.2	Indikator dan Target Sasaran Strategis 3	22
2.3	Indikator dan Target Sasaran Strategis 4	22
2.4	Indikator dan Target Sasaran Strategis 5	23
2.5	Indikator dan Target Sasaran Strategis 6	24
2.6	Indikator dan Target Sasaran Strategis 8	25
2.7	Indikator dan Target Sasaran Strategis 10	27
2.8	Indikator dan Target Sasaran Strategis 11	27
2.9	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPOM di Mataram Tahun 2023	27
2.10	Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2023	29
2.11	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Mataram Tahun 2023	31
2.12	Kategori capaian indikator kinerja	34
3.1	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 11 Sasaran Strategis BBPOM di Mataram	37
3.2	Perbandingan Capaian Sasaran Strategis BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster	39
3.3	Target, Realisasi dan %Capaian IKU BBPOM di Mataram Tahun 2023	40
3.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategi 1 BBPOM di Mataram Tahun 2023	44
3.5	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	45
3.6	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Obat, Obat Tradisional (OT), Suplemen Kesehatan (SK) dan Kosmetik dengan Metode Sampling Random/ Acak pada Tahun 2023	46
3.7	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat	49
3.8	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	51
3.9	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Makanan dengan Metode Sampling Random/Acak Sampai Tahun 2023	52
3.10	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	55
3.11	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	58



**PENDAHULUAN****PERENCANAAN
KINERJA****AKUNTABILITAS
KINERJA****PENUTUP**

3.12	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Obat, Obat Tradisional (OT), Suplemen Kesehatan (SK) dan Kosmetik dengan Metode Sampling Targeted Sampai Tahun 2023	58
3.13	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	62
3.14	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	65
3.15	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Makanan dengan Metode Sampling Targeted Sampai Tahun 2023	65
3.16	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	68
3.17	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	70
3.18	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Pangan Fortifikasi Tahun 2023	71
3.19	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	74
3.20	Target, realisasi dan capaian Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Mataram	77
3.21	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	81
3.22	Capaian Kinerja Sasaran Strategi 3 BBPOM di Mataram Tahun 2023	84
3.23	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	85
3.24	Perbandingan Nilai IKEPU Per Unsur Tahun 2023 dan 2022	86
3.25	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	89
3.26	Hasil Survei Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP) Tahun 2023	90
3.27	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	92
3.28	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	95
3.29	Target, realisasi dan capaian Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Mataram	98
3.30	Nilai SKM Per Unsur Pelayanan Tahun 2023	99
3.31	Nilai SKM Per Unsur Pelayanan berdasarkan Jenis Layanan 2023	99
3.32	Nilai SKM Per Unsur Pelayanan Tahun 2021, 2022 dan 2023	100



**PENDAHULUAN****PERENCANAAN
KINERJA****AKUNTABILITAS
KINERJA****PENUTUP**

3.33	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	102
3.34	Capaian Kinerja Sasaran Strategi 4 BBPOM di Mataram Tahun 2023	104
3.35	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	105
3.36	Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	106
3.37	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	109
3.38	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rrekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	111
3.39	Rincian Tindak Lanjut Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Berdasarkan Jenis Keputusan/Rekomendasi	112
3.40	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM Di Mataram	115
3.41	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023	117
3.42	Jumlah Keputusan Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023	117
3.43	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	121
3.44	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	123
3.45	Rincian Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan Tahun 2023	123
3.46	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	126
3.47	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	128
3.48	Rincian Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2023	129
3.49	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	132
3.50	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik untuk Masing-Masing Komponen	136
3.51	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Indeks pelayanan publik (IPP)	136
3.52	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks pelayanan publik (IPP)	139
3.53	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik	142



**PENDAHULUAN****PERENCANAAN
KINERJA****AKUNTABILITAS
KINERJA****PENUTUP**

3.54	Realisasi UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Berdasarkan Jenis Komoditi Tahun 2023	142
3.55	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	146
3.56	Capaian Kinerja Sasaran Strategi 5 BBPOM di Mataram Tahun 2023	148
3.57	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada Tahun 2023	149
3.58	Nilai Indeks Per Kriteria Tahun 2023	150
3.59	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	152
3.60	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023	155
3.61	Realisasi Tahapan Kegiatan Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	155
3.62	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	158
3.63	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023	161
3.64	Realisasi Tahapan Kegiatan Jumlah Desa Pangan Aman	162
3.65	Rincian Jumlah Desa Pangan Aman yang Diintervensi	162
3.66	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Jumlah Desa Pangan Aman	165
3.67	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023	168
3.68	Realisasi Tahapan Kegiatan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	169
3.69	Rincian Jumlah Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang Diintervensi	169
3.70	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	174
3.71	Capaian Kinerja Sasaran Strategi 6 BBPOM di Mataram Tahun 2023	175
3.72	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023	175
3.73	Rincian Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperikasa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023	176
3.74	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	179
3.75	Target, Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	181
3.76	Rincian Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023	183



**PENDAHULUAN****PERENCANAAN
KINERJA****AKUNTABILITAS
KINERJA****PENUTUP**

3.77	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	185
3.78	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023	188
3.79	Target dan Realisasi Perkara serta Keberhasilan Penindakan Tahun 2023	189
3.80	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram	192
3.81	Capaian Kinerja Sasaran Strategi 8 BBPOM di Mataram Tahun 2023	197
3.82	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Indeks RB BBPOM di Mataram	197
3.83	Penilaian Evaluasi RB BBPOM di Mataram Tahun 2023 dan 2022	198
3.84	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks RB BBPOM di Mataram	201
3.85	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Nilai AKIP BBPOM di Mataram	204
3.86	Hasil Penilaian AKIP Tahun 2021-2023	204
3.87	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Nilai AKIP BBPOM di Mataram	208
3.88	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Mataram	213
3.89	Nilai Masing-Masing Komponen Penyusun Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Mataram	213
3.90	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IP ASN BBPOM di Mataram	216
3.91	Capaian Kinerja Sasaran Strategi 10 BBPOM di Mataram Tahun 2023	219
3.92	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	219
3.93	Hasil Penilaian Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	220
3.94	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	223
3.95	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Mataram yang Optimal	226
3.96	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Mataram yang Optimal	229
3.97	Indikator dan Target Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Kesebelas	231
3.98	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan NKA BBPOM di Mataram	231
3.99	Rincian Nilai IKPA Tahun 2023	232
3.100	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Mataram	235
3.101	Realisasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023	238





PENDAHULUAN



**PERENCANAAN
KINERJA**



**AKUNTABILITAS
KINERJA**



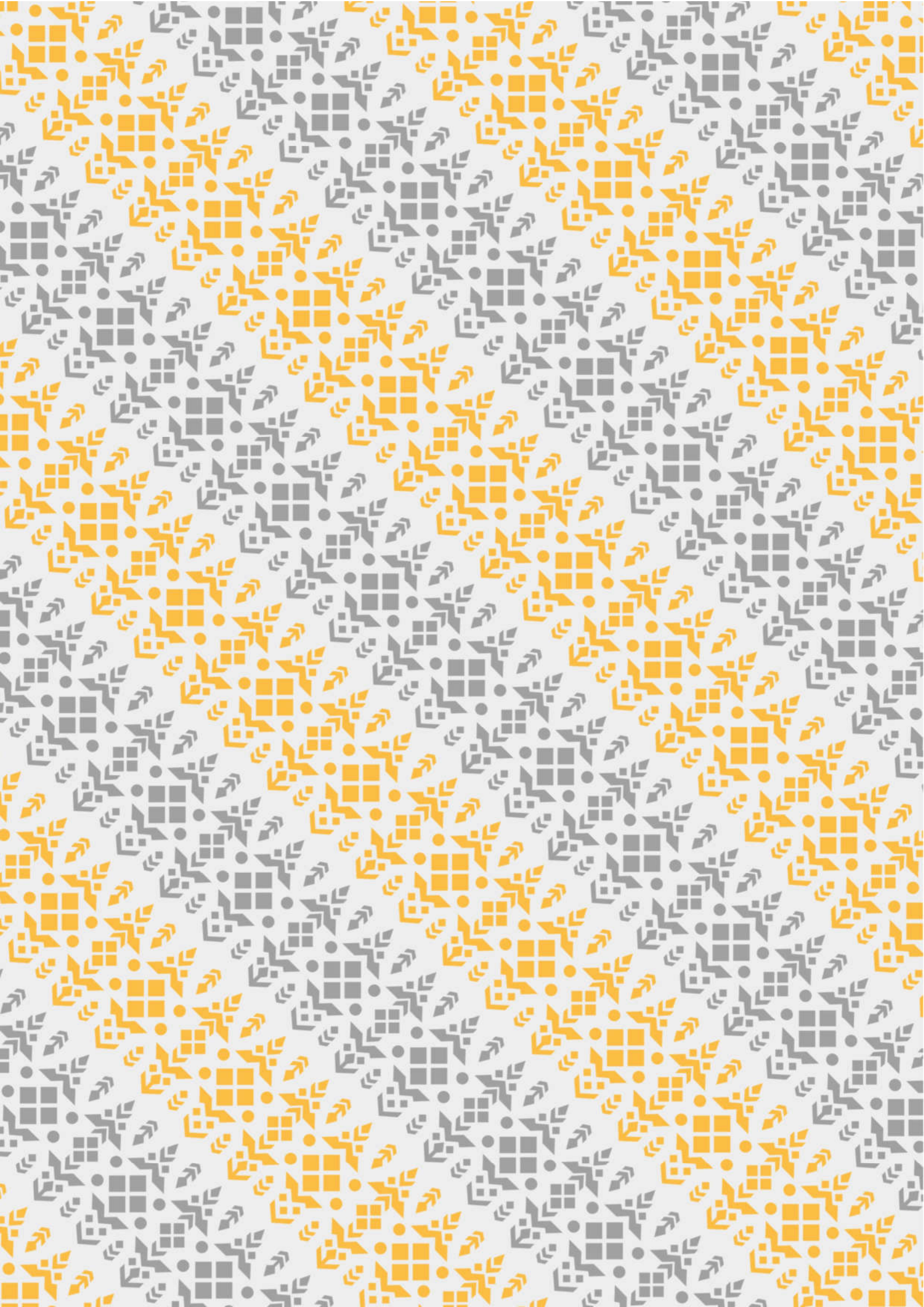
PENUTUP

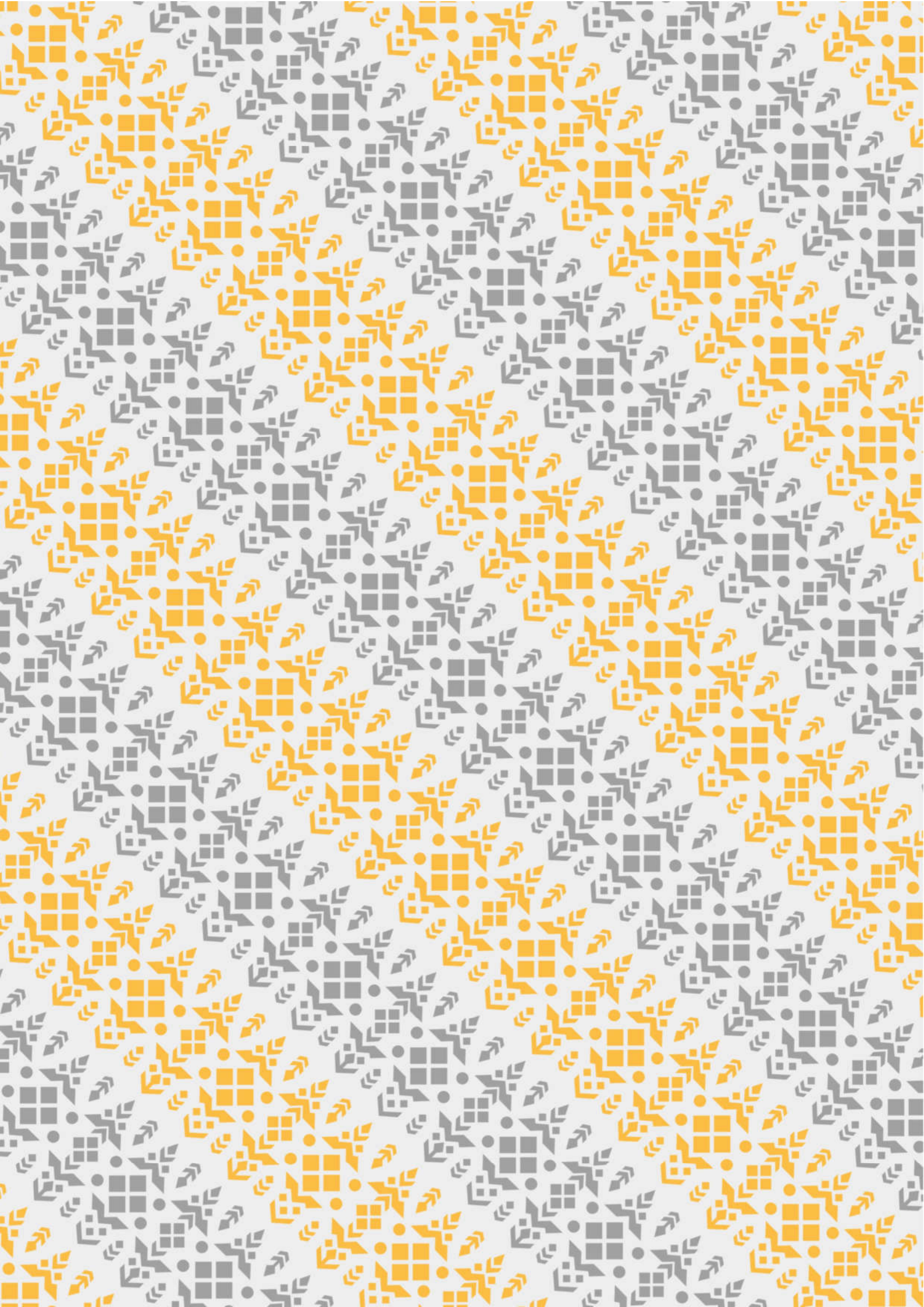
3.102	Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis BBPOM di Mataram Tahun 2023	239
3.103	Nilai Efisiensi Masing-masing Sasaran Strategis BBPOM di Mataram Tahun 2023	242

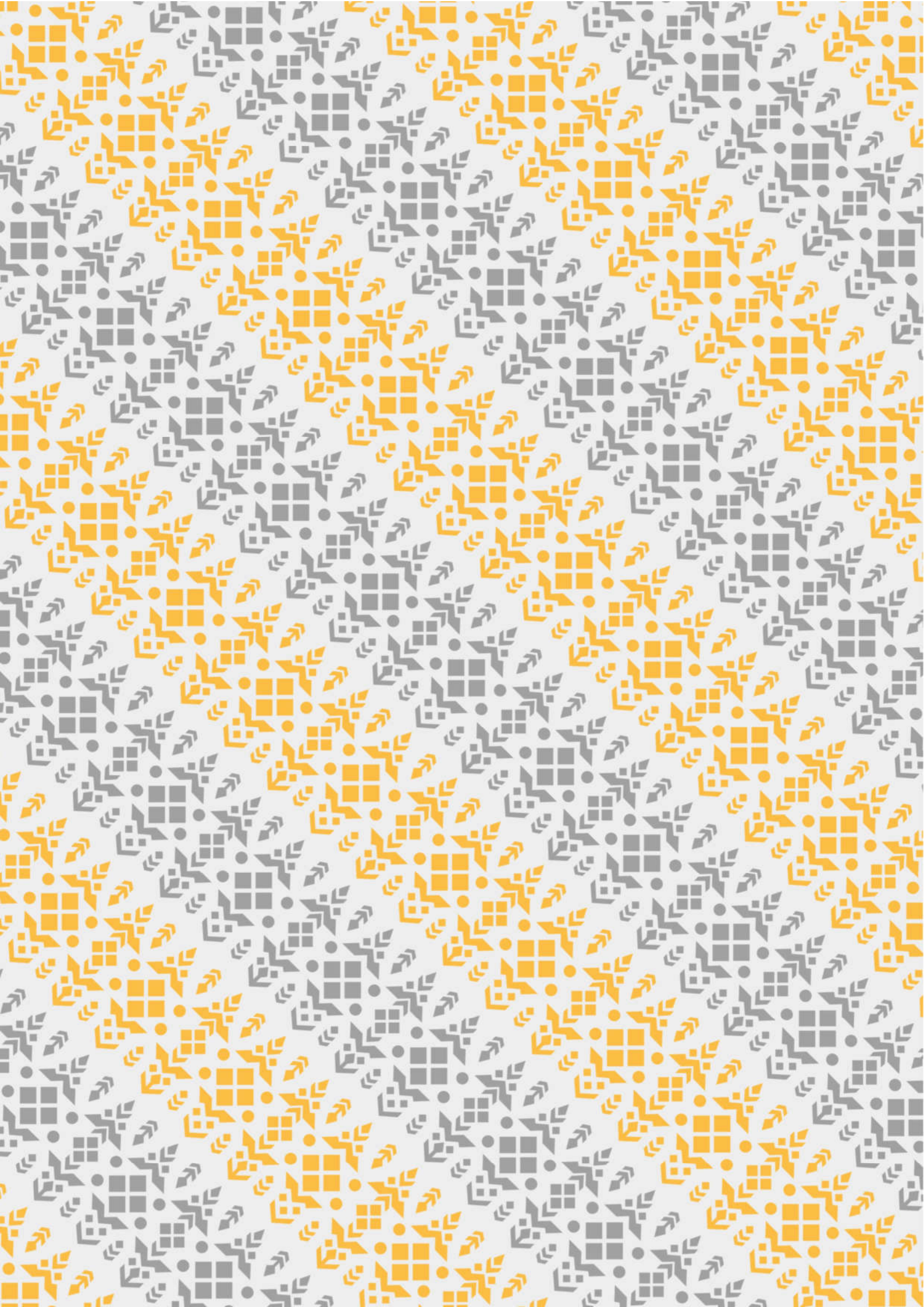




BAB I PENDAHULUAN









BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan berjalannya waktu tantangan Pengawasan Obat dan Makanan semakin meningkat antara lain adanya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, postmarket, dan penguatan dalam penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan. Sebagai upaya peningkatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan oleh BBPOM di Mataram perlu didukung dengan peningkatan kerjasama dengan berbagai lintas sektor terkait, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Selain itu sejalan dengan salah satu misi Badan POM, BBPOM di Mataram senantiasa mendorong pelaku usaha untuk selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.



Berbagai kerjasama telah dilakukan oleh BBPOM di Mataram antara lain terbentuknya Surat Keputusan Gubernur NTB tentang Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan terpadu yang diikuti dengan pembentukan tim di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB. Selain itu BBPOM di Mataram juga menjalin hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan pengembangan kompetensi SDM dan

sebaliknya memberikan fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Badan POM. Untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. BBPOM di Mataram berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak diskriminatif, transparan, tepat waktu dan adanya kepastian biaya berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini ditandai dengan diperolehnya Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Pelopor Perubahan yang dianugerahkan oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2021. Selain itu pada bulan Januari 2024 BBPOM di Mataram telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 dari PT SGS Indonesia.





1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

BBPOM di Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai peraturan tersebut UPT BPOM diklasifikasikan menjadi 21 (dua puluh satu) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, 21 (dua puluh satu) Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan 34 (tiga puluh empat) Loka Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan PerUndang-Undangan (UU) yang menjadi landasan teknis tugas dan fungsi BBPOM di Mataram antara lain (i) UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika; (ii) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (iii) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (iv) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;(v) UU Nomor 18 Tahun



2012 tentang Pangan; (vi) Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (vii); PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi; (viii) PP Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian; (ix) PP Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;(x) PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi kesehatan; (xi) PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (xii) PP Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan; dan (xiii) PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

BBPOM di Mataram secara garis besar memiliki empat inti kegiatan dilihat dari fungsinya, yaitu:



Gambar 1.1 Empat Inti Kegiatan Fungsi BBOM di Mataram





PENDAHULUAN



PERENCANAAN KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA



PENUTUP

BBPOM di Mataram sebagai UPT Badan POM memiliki tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi BBPOM di Mataram antara lain:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
- Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Mataram disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Mataram telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut saat ini struktur organisasi hanya terdiri dari Kepala, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini Kepala BBBPOM di Mataram didukung oleh 1 (satu) orang Kepala Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 14 (empat belas) orang Ketua Tim terdiri dari 7 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, serta 51 (lima puluh satu) orang Anggota Tim.





PENDAHULUAN



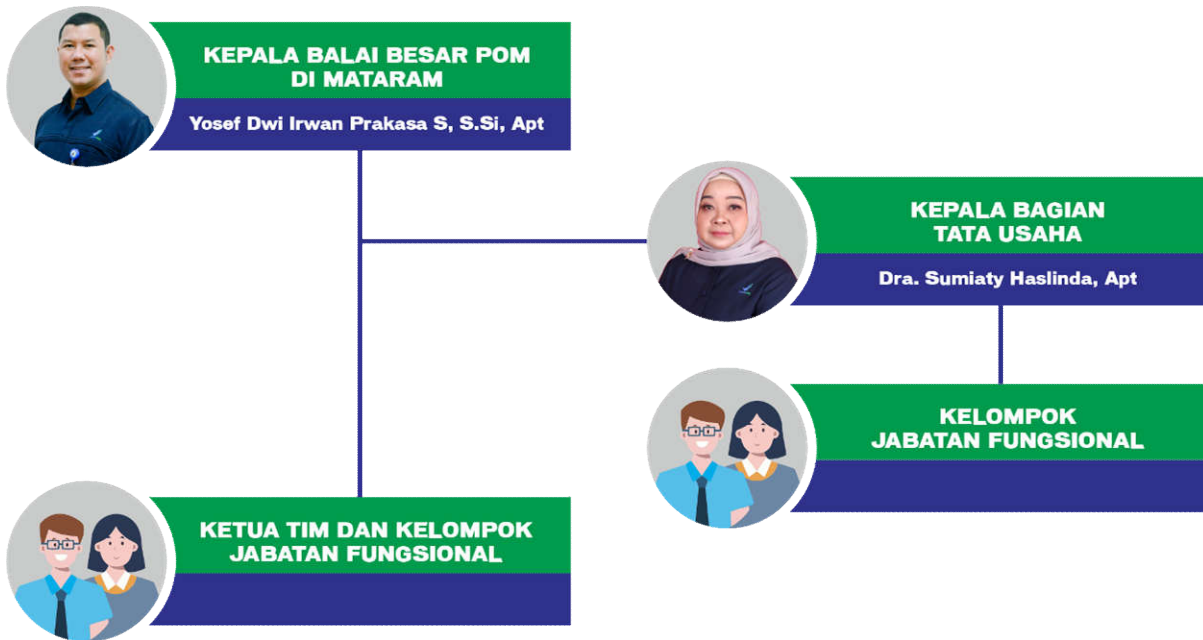
**PERENCANAAN
KINERJA**



**AKUNTABILITAS
KINERJA**



PENUTUP



Gambar 1.2 Struktur Organisasi BBPOM di Mataram

1.4 ISU STRATEGIS

IMPLEMENTASI INPRES No. 3 TAHUN 2017

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 bahwa Badan POM sebagai Koordinator Pengawasan Obat dan Makanan Nasional dan guna mendukung implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/6206/SJ tanggal 22 September 2022 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.



Salah satu langkah konkrit dalam implementasi Inpres No.3 Tahun 2017 yang telah dilaksanakan yaitu melalui penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) yang telah diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sejak tahun 2020. Pada tahun 2023 Provinsi NTB menduduki peringkat ke-8 secara nasional dalam realisasi anggaran (87.62%) dan

capaian output (94.56%) DAK NF BOK POM Tahun Anggaran 2023. Dalam rangkaian HUT ke-23 BPOM, Kabupaten Lombok Timur juga meraih Penghargaan Terbaik III kategori Pemerintah Daerah yang melakukan pengawasan pangan olahan sesuai standar.





PENDAHULUAN



**PERENCANAAN
KINERJA**



**AKUNTABILITAS
KINERJA**



PENUTUP

Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota. TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM). Hingga tahun 2023 terdapat 3 (tiga) kabupaten yang memiliki SK TKPPOM yang telah sesuai dengan SE Mendagri No 700/6206/SJ yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat.

KASUS STUNTING DI NTB

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dimana biasa disebut pendek. Kondisi ini merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. *Stunting* ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak antara lain pertumbuhan fisik yang tidak optimal, berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa serta memiliki dampak ekonomi yaitu berpotensi menimbulkan kerugian setiap tahunnya: 2-3 % GDP. Percepatan penurunan stunting pada Balita adalah program prioritas Pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14%.

Terdapat 12 provinsi di Indonesia yang diprioritaskan dalam rangka penanganan *stunting* yaitu Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, **Nusa Tenggara Barat (NTB)**, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatra Utara. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Badan Litbangkes



Kemenkes Tahun 2023, angka stunting di NTB berada pada 32,7% naik 1,3% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 31,4%. Angka stunting ini berada di atas angka nasional sebesar 21,6% turun sebesar 2,8% dibandingkan tahun 2021 sebesar 24,4%. Sebagai upaya percepatan penurunan *stunting*, BBPOM di Mataram mempunyai peran strategis melalui beberapa program antara lain pengawasan pangan fortifikasi (Sampling dan pengujian, serta pendampingan pelaku usaha),





PENDAHULUAN



PERENCANAAN KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA



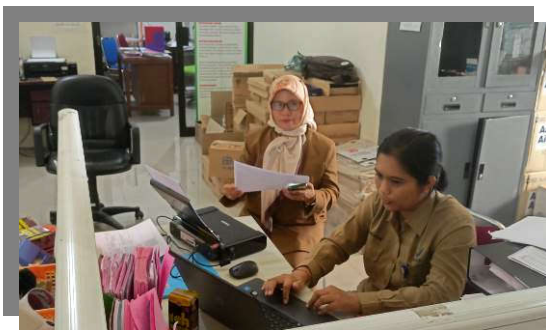
PENUTUP

intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN) DAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan penggunaan obat yang rasional; serta (l) upaya kemandirian dibidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.



Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Besarnya kebutuhan obat JKN

memungkinkan terjadinya *overcapacity* pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya

Balai Besar POM di Mataram melaksanakan pengawasan terhadap Produk Obat JKN sebagai bentuk antisipasi dari dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN yaitu dengan melaksanakan pengawasan/inspeksi sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan





PENDAHULUAN



PERENCANAAN KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA



PENUTUP

pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

PERUBAHAN IKLIM (*CLIMATE CHANGE*)

Salah satu isu utama yang saat ini mempengaruhi seluruh dunia termasuk Indonesia, adalah perubahan iklim. Perubahan iklim saat ini merupakan salah satu ancaman bagi bumi dan seisinya. Berbagai aspek kehidupan terkena dampak langsung dari perubahan iklim. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Dampak dari perubahan iklim ini dapat dirasakan oleh semua sektor, diantaranya sektor pertanian dan ketahanan pangan. Begitu luasnya dampak perubahan iklim terhadap berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dampaknya terhadap kesehatan masyarakat sehingga diperlukan langkah-langkah pengendalian, penanggulangan dan adaptasi yang komprehensif sehingga dampak yang lebih buruk bisa dihindari. Sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM turut mengawal industri Obat dan Makanan untuk mematuhi peraturan terkait kelestarian lingkungan hidup sesuai prinsip Triple Bottom Line (TBL). Prinsip TBL mengukur dan mengevaluasi kinerja bisnis dalam 3 dimensi utama yang berkelanjutan, yaitu sosial (people), lingkungan (planet), dan ekonomi (profit).

Sekaitan dengan hal tersebut BPOM melakukan serangkaian program inisiatif kepedulian terhadap lingkungan dan apresiasi kepada industri Obat dan Makanan yang telah menerapkan program environmental sustainability. Dalam mengawal komitmen dan kepedulian pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan terhadap isu lingkungan, Badan POM telah menggulirkan *BPOM Nett Zero Carbon Programme* dimana BBPOM di Mataram juga turut melaksanakan program tersebut.



Melalui program tersebut BPOM mendukung percepatan konservasi mangrove karena kegiatan ini memiliki berbagai manfaat seperti perlindungan abrasi dan resiko bencana alam, pengendalian pencemaran air dan polusi udara, pengurangan emisi gas rumah kaca, potensi bahan baku alam, serta keseimbangan ekosistem dan kesehatan. Selain itu konservasi mangrove telah terbukti mampu memenuhi setidaknya 6 target SDGs termasuk mitigasi perubahan iklim. Mangrove merupakan sebagai salah satu ekosistem paling efektif menangkap karbon di bumi, kontribusi terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Selain itu BPOM juga mendorong industri pangan untuk menggunakan kemasan pangan yang ramah lingkungan yaitu wadah yang dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah terurai tanah, bisa didaur ulang, dan tidak berbahaya bagi lingkungan serta manusia.





PENDAHULUAN



**PERENCANAAN
KINERJA**



**AKUNTABILITAS
KINERJA**



PENUTUP

REVOLUSI INDUSTRI 4.0 dan SOCIETY 5.0

Industri nasional perlu terus mempersiapkan diri menghadapi era lanjutan dari 4.0 atau era Society 5.0. Era Society 5.0 ialah sebuah konsep dimana manusia berkolaborasi dengan teknologi (internet) untuk menyelesaikan masalah sosial yang terintegrasi pada ruang dunia maya dan nyata. Pada Society 5.0, internet bukan hanya digunakan untuk bertukar informasi tetapi untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, seperti penggunaan *autonomous vehicle*, *smart farming*, *home automation*, *edge computing*, *big data analytics*, serta *internet of every things*.

Era revolusi industri 4.0 menekankan pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan lain sebagainya. Hal itu turut mempengaruhi pola distribusi produk obat dan makanan secara online, sehingga peredaran produk obat dan makanan di wilayah Indonesia semakin masif dan luas. Sebagian besar pengguna internet di Indonesia melakukan pembelian barang maupun jasa secara online atau praktik e-commerce. Kondisi ini menjadikan tantangan pengawasan menjadi semakin besar seiring risiko peredaran produk palsu dan ilegal di jalur online maupun offline

Revolusi industri 4.0 telah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih luas oleh masyarakat untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari, termasuk obat dan makanan. Jalur promosi dan distribusi produk kini berkembang, tidak hanya melalui toko fisik tetapi juga sarana penjualan online. Perubahan ini menjadi celah yang disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menciptakan modus baru kejahatan obat dan makanan. Keberagaman produk tersebut membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan. Hal ini menjadi tantangan bagi BPOM termasuk BBPOM di Mataram untuk meningkatkan kapasitas laboratorium pengujian, baik pemenuhan instrumen pengujian dan metode analisis yang diperlukan serta kompetensi penguji yang memadai.

BPOM termasuk BBPOM di Mataram harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan. Terkait dengan hal ini, BBPOM di Mataram dalam pelaksanaan pengawasan dan penyebaran informasi tentang Obat dan Makanan harus lebih mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi terutama berbagai aplikasi yang dikembangkan oleh Badan POM maupun hasil inovasi BBPOM di Mataram sendiri. Selain itu, BBPOM di Mataram juga melakukan patroli siber untuk mengantisipasi dan menjawab tantangan kemajuan teknologi yang mengakibatkan pergeseran pola promosi, pola konsumsi, dan pola distribusi dalam peredaran Obat dan Makanan.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA



PENUTUP

REFORMASI BIROKRASI

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Mataram menuju *good government and clean governance* serta pelayanan publik yang berkualitas, berpedoman pada Road Map-RB BPOM tahun 2020-2024. Pada Tahun 2021 BBPOM di Mataram telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan hingga tahun 2023 berupaya mempertahankan predikat WBK dan bertekad meraih predikat WBBM di tahun 2024, sehingga diperlukan upaya sosialisasi program pengawasan Obat dan Makanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kemudahan akses informasi publik. Pelayanan publik Balai Besar POM di Mataram kategori Layanan Prima dan nilai SAKIP Balai Besar POM di Mataram berpredikat A di lingkungan Badan POM.

INDUSTRIALISASI DAN PENGUATAN UMKM DI NTB GEMILANG

Berdasarkan data BPS, ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan IV-2023 terhadap Triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen baik secara kumulatif maupun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini tidak lepas dari kontribusi UMKM dalam kemampuan menyerap tenaga kerja yang ada serta menghimpun investasi.

Salah satu Lapangan Usaha yang menyumbang pertumbuhan ekonomi berasal dari Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 34,97 persen. Jika dilihat menurut kelompok industri berdasarkan KBLI dua digit maka industri makanan (KBLI 10) merupakan usaha terbesar kedua di bawah Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur), barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya (KBLI 16).

Jumlah UMKM di NTB dari tahun ke tahun terus berkembang, namun demikian secara umum UMKM masih menghadapi kendala klasik seperti permodalan, perizinan, bahan baku, pemasaran produk, pengelolaan keuangan dan inovasi. Selain itu, data hasil pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan menemukan sebanyak 25% sarana UMKM Tidak Memenuhi Ketentuan. Ketidaksesuaian di atas disebabkan oleh: (1) kurangnya komitmen pelaku usaha pangan dalam penjaminan mutu dan keamanan pangan; (2) keterbatasan kapasitas yaitu kemampuan dan pengetahuan serta kesadaran pelaku usaha pangan terhadap mutu dan keamanan pangan; (3) keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang mutu dan keamanan pangan; dan (4) keterbatasan kelembagaan pangan terkait pengawasan mutu dan keamanan pangan.

Salah satu upaya Pemerintah Daerah Provinsi NTB meningkatkan daya saing UMKM yaitu melakukan program strategis industrialisasi, yang di antaranya bertumpu pada industri pengolahan (pertanian, peternakan, lingkungan, kehutanan, dan kelautan). Jenis industri yang dikembangkan di NTB adalah industri rumah tangga atau industri berskala mikro maupun kecil dengan pertimbangan ketersediaan





PENDAHULUAN



PERENCANAAN KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA



PENUTUP

bahan baku dan pangsa pasar yang berkaitan dengan jumlah penduduk. Dalam konteks industrialisasi, yang menjadi sasarannya adalah peningkatan nilai tambah terutama pada komoditas pertanian sehingga pendapatan masyarakat juga ikut meningkat.



Sejalan dengan hal tersebut, BBPOM di Mataram juga berkontribusi bersinergi dengan OPD terkait melalui program pembinaan kepada UMKM agar memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk sehingga meningkatkan daya saing UMKM. Dukungan yang diberikan oleh BPOM terhadap UMKM antara lain diwujudkan dengan memberikan kemudahan melalui berbagai upaya percepatan,

penyederhanaan, dan pendampingan kepada UMKM. Pada tahun 2023 BBPOM di Mataram melakukan revitalisasi inovasi **GEMILANG Pro-UMKM** yang telah melakukan pendampingan UMKM dan berhasil menerbitkan 291 sertifikat / izin penerapan / rekomendasi kepada 43 pelaku usaha.

PENGARUS UTAMAAN GENDER (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah Jalan Menuju Kesetaraan. Hal yang sering disalah artikan di masyarakat adalah menyatakan bahwa gender sama dengan jenis kelamin, atau mengartikan gender pasti selalu terkait dengan Perempuan. Dalam kehidupan sosial, seringkali ditemui permasalahan mengenai isu gender yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak yaitu perempuan atau laki-laki. Hal ini tentunya dapat meyebabkan akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan akan terciptanya kondisi yang tidak adil gender. Maka dari itu, dipandang perlu dalam menangani isu gender memerlukan sebuah alat untuk menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel baik bagi pihak perempuan atau laki-laki yaitu berupa PUG. PUG atau yang memiliki kepanjangan berupa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi untuk mengintegrasikan sebuah kepentingan dalam program. Strategi ini untuk meyakinkan bahwa isu gender diperhatikan dan diimplementasikan dalam program dan perencanaan. Konstruksi budaya yang terkait dengan laki-laki dan perempuan adalah konsep gender. Integrasi konsep gender dalam kebijakan/ program/kegiatan pembangunan telah dinyatakan secara eksplisit dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Setiap Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Gubernur, dan Bupati/Walikota diamanatkan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA



PENUTUP

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pada tahun 2012 telah ditetapkan Strategi Nasional (STRANAS) tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) melalui Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) No.270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4379A/2012 dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. SE 46/MPP-PA/11/2012. Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama tersebut, pada tanggal 29 Juli 2013 ditetapkanlah Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender BPOM melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.07.13.3789 dan pada 31 Desember 2014 ditetapkan pula Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BPOM melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.05.14.3494. Pada tanggal 7 Desember Tahun 2015, ditandatangani Kesepakatan Bersama antara BPOM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10/Men.PP.PA/12/2015 dan HK.08.1.44.12.15.5350 Tahun 2015 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Di tahun 2022, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 71 Tahun 2022 tentang Arah Kebijakan BPOM Tahun 2023 secara eksplisit disebutkan bahwa peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan keadilan dan kesetaraan gender.

PEREDARAN OBAT ILEGAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT



Sejak Tahun 2016, di beberapa daerah termasuk di Provinsi NTB merebak isu penyalahgunaan PCC, Carnophen, Somadril, tramadol dan trihexyphenidil. Sudah banyak pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Badan POM dan kepolisian terkait produksi dan peredaran gelap obat-obatan tersebut. Di Provinsi NTB peredaran gelap Tramadol sangat memprihatinkan, Tramadol bukan hanya menasar

orang dewasa termasuk remaja juga menjadi target sasaran. Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada generasi penerus di masa mendatang. Sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2022 kasus peredaran gelap tramadol, trihexyphenidyl, dextromethorphan dan obat tertentu (OOT) lainnya di Provinsi NTB tercatat mencapai 140 kasus

Adanya temuan produk ilegal mengindikasikan bahwa *supply* dan *demand* terhadap sediaan farmasi ilegal masih tinggi. Hal ini disebabkan karena mudahnya akses pembelian (secara online) menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena kepraktisannya. Disisi lain, temuan ini juga mengindikasikan bahwa Badan POM dan Polri secara terus menerus berkomitmen untuk





PENDAHULUAN



PERENCANAAN KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA



PENUTUP

memberantas peredaran obat dan makanan ilegal untuk melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman.

Adanya ancaman peredaran dan penyalahgunaan obat ilegal yang sangat serius menyebabkan Presiden RI mencanangkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat pada Oktober 2017, agar secara serentak aksi nasional lintas sektor dilaksanakan di 34 Provinsi termasuk di Provinsi NTB, bersama dengan Pemerintah Daerah dan OPD terkait. Dalam Aksi Nasional ini koordinasi dan kerjasama terpadu diperluas dengan pemangku kepentingan di daerah, masyarakat, dan pelaku usaha, melalui strategi di bidang Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Hukum untuk memberikan efek jera.

Akhir-akhir ini trend dan modus kejahatan Obat dan makanan terlihat mengikuti perkembangan melalui *media online*, jika ini tidak diantisipasi akan menyebabkan tidak optimalnya/gagalnya operasi penyidikan pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan makanan. BBPOM di Mataram juga menyadari bahwa penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan tidak dapat ditangani sendiri karena produksi dan peredaran Obat dan Makanan ilegal begitu cepat dan luas, sehingga perlu dikoordinasikan dengan lintas sektor terkait terutama dalam jaringan "*Criminal Justice Sistem (CJS)*" dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan serta ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia) dan idEA (*Indonesian E-Commerce Association*) . Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan, harus dimulai dari semangat dan persamaan persepsi antar penegak hukum bahwa tindak pidana di bidang Obat dan Makanan adalah termasuk kejahatan kemanusiaan yang dapat merusak tatanan kehidupan saat ini serta berpengaruh besar terhadap kehidupan generasi penerus di masa mendatang.

1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL

1) Anggaran

Anggaran kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB sesuai DIPA awal tahun 2023 sebesar Rp. 23,995,139,000,-. Telah dilakukan revisi DIPA dengan DIPA akhir sebesar Rp. 23,849,625,000 bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2023 SP DIPA-063.01.2.432960/2022

2) Sumber Daya Manusia

Tabel 1.1. Kebutuhan SDM BBPOM di Mataram Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2023

No.	Jabatan Fungsional/Struktural	Existing	ABK 2023	GAP
1	Jabatan Struktural	2	2	0
2	Jabatan Fungsional Ketata Usahaan	14	31	16
3	Jabatan Fungsional PFM	62	78	27
Total		78	111	43





PENDAHULUAN



PERENCANAAN KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA



PENUTUP

Per Desember 2023, SDM yang dimiliki BBPOM di Mataram untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan sejumlah 78 orang dengan proporsi 65,38% perempuan dan 34,62% laki-laki. Jumlah SDM tersebut sudah termasuk personel Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 8 (delapan) orang. Jumlah tersebut tentunya belum memadai untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB secara optimal.

Berdasarkan analisa beban kerja, untuk mendukung upaya penguatan tugas pokok dan fungsi, BBPOM di Mataram memerlukan SDM sebanyak 111 orang sehingga masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 33 orang. Selain jumlah, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Tingkat pendidikan sebagian besar pegawai BBPOM di Mataram adalah S1 dan Profesi (apoteker). BBPOM di Mataram sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 maupun S3 yang lebih banyak dari saat ini.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Mataram harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Dengan peningkatan kompetensi SDM, diharapkan BBPOM di Mataram akan mampu menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks dengan semakin berkembang dan beragamnya modus pelanggaran di bidang Obat dan makanan.

3) Sarana Prasarana



Kantor BBPOM di Mataram memiliki bangunan Gedung seluas 3.514 m² dengan luas tanah 3.922 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM. BBPOM di Mataram memiliki laboratorium pengujian kimia, dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi

ISO/IEC 17025:2017. Selain itu BBPOM di Mataram dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya. Rumah dinas BBPOM di Mataram memiliki bangunan Gedung seluas 200 m² dengan luas tanah 250 m². Dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja pegawai, BBPOM di Mataram Tahun 2022 telah tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018 dan dalam rangka komitmen anti penyusutan Balai Besar POM di Mataram telah tersertifikasi ISO 37001:2016 pada tanggal 28 Desember 2023 dari PT. Sucofindo International Certification Services.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA



PENUTUP

4) Sarana Komunikasi

Untuk merespon pengaduan maupun permintaan informasi dari masyarakat, BBPOM di Mataram menyediakan berbagai sarana komunikasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, baik itu melalui telepon, e-mail, hingga media sosial.

Sarana Komunikasi dan Media Sosial

08787-1500533 (Informasi dan Pengaduan) bpom_mataram@pom.go.id
 08786-4374887 (Informasi Pengujian) Kantor BBPOM di Mataram
 0370-621926 Jl. Caturwarga, Mataram

[bpom.mataram](https://www.facebook.com/bpom.mataram) [bpom.mataram](https://www.instagram.com/bpom.mataram) [Balai Besar POM di Mataram](https://www.youtube.com/Balai%20Besar%20POM%20di%20Mataram) [bpommataram](https://twitter.com/bpommataram) [bbpomdimataram](https://www.tiktok.com/@bbpomdimataram)

5) Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian BBPOM di Mataram



Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BPOM, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat

yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Untuk menjawab tuntutan ini BBPOM di Mataram telah memiliki instrumen yang menggunakan teknologi yang canggih, seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS, PCR. Namun pemeliharaan dan kebutuhan operasional untuk instrumen tersebut membutuhkan biaya yang relatif tinggi dan memerlukan kompetensi pengujian yang andal dalam menggunakan instrumen tersebut.

Keunggulan laboratorium BBPOM di Mataram:

- Standar Pemenuhan Laboratorium sesuai GLP dengan nilai tertinggi dibanding BB/BPOM lainnya
- Laboratorium utama di NTB untuk pengujian sampel barang bukti narkotika/psikotropika.

EKSTERNAL

1) Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°5' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:





PENDAHULUAN



PERENCANAAN KINERJA



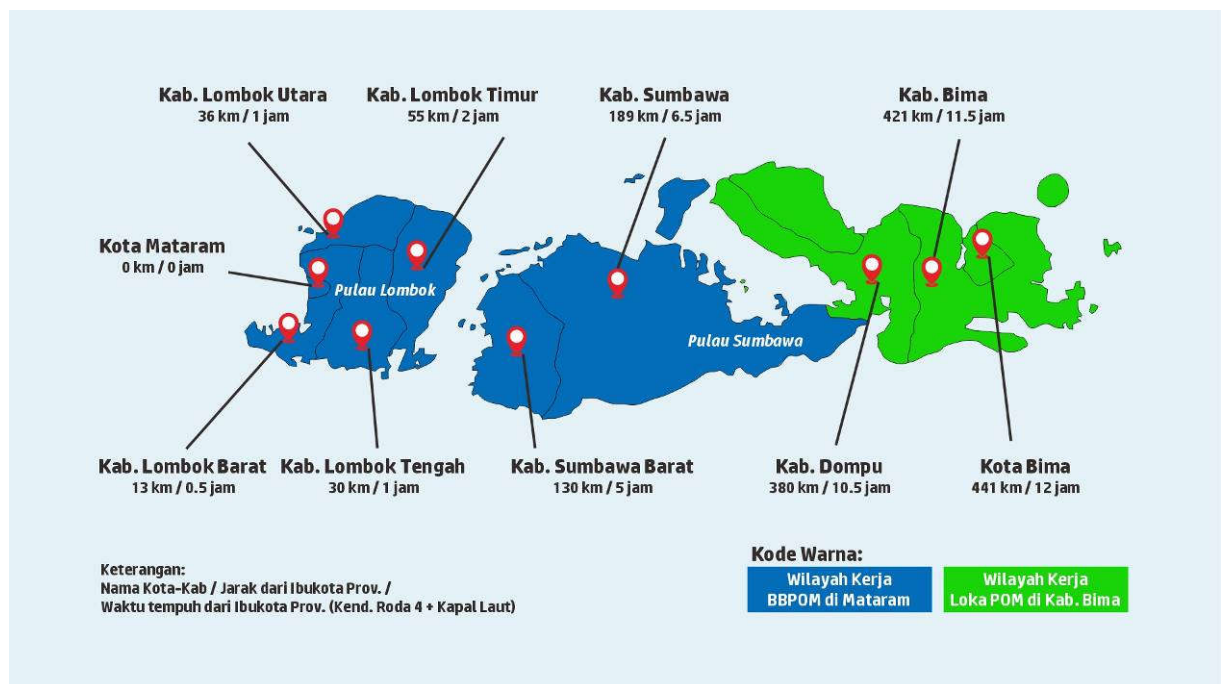
AKUNTABILITAS KINERJA



PENUTUP

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Provinsi Bali
- Sebelah Timur : Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi NTB terdiri atas 2 pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 Km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (76,49 %) dan luas Pulau Lombok seluas 4.738,70 Km² (23,51%).



Gambar 1.3 Peta Wilayah Kerja UPT BBPOM di Provinsi NTB

Dinas PMPD DUKCAPIL Provinsi NTB sesuai Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2023 mencatat jumlah penduduk NTB sebanyak 5,58 juta jiwa, dengan perbandingan 49,87% jenis kelamin laki-laki dan 50,13% jenis kelamin perempuan.

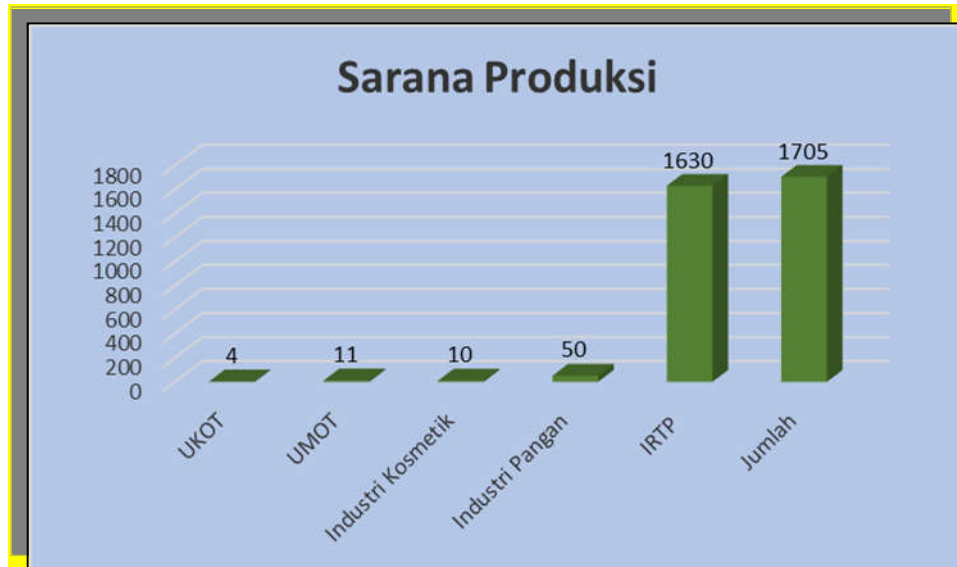
2) Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah kerja BBPOM di Mataram meliputi industri kosmetik, usaha kecil obat tradisional (UKOT), usaha mikro obat tradisional (UMOT), industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan.

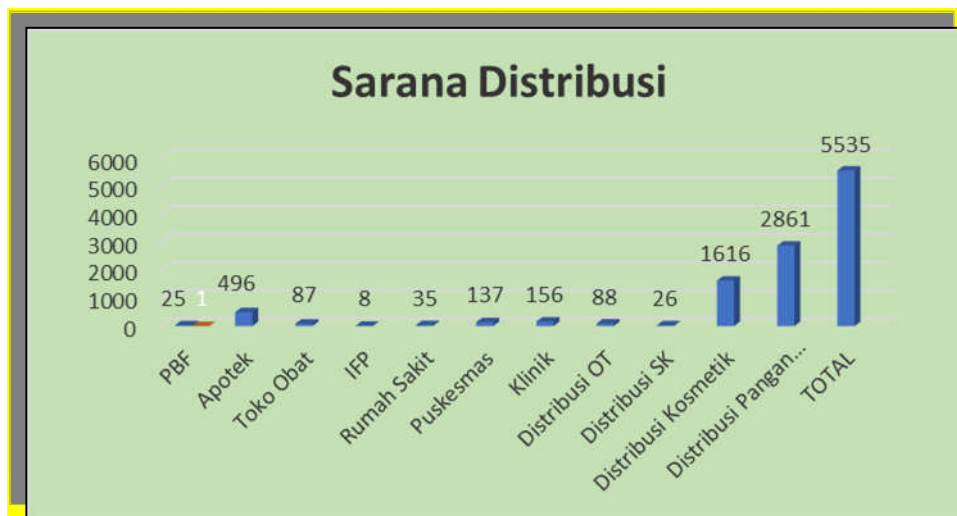




Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah kerja BBPOM di Mataram sebagaimana pada gambar 1.5 dan gambar 1.6.



Gambar 1.4 Grafik Sarana Produksi di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram Tahun 2023



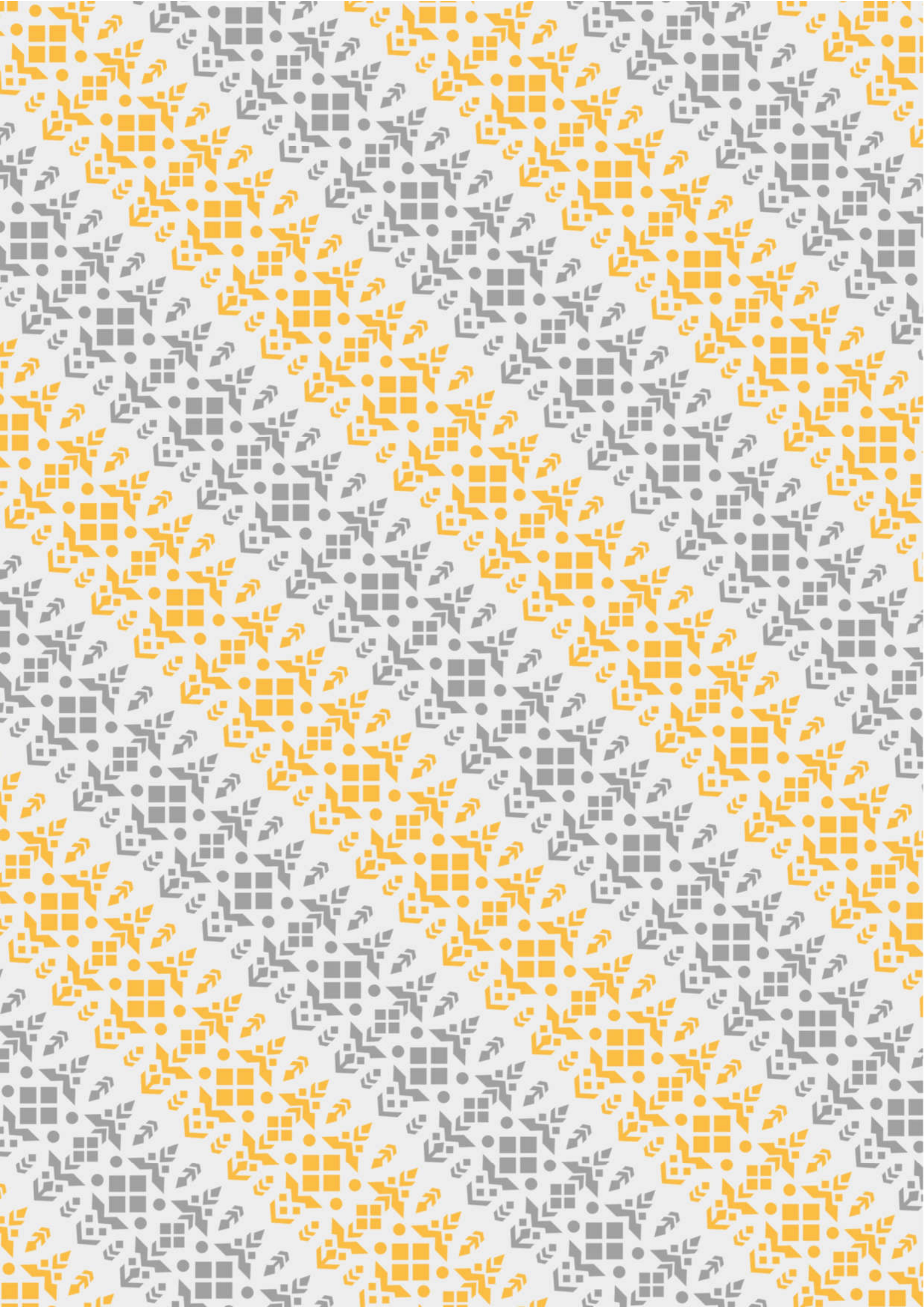
Gambar 1.5 Grafik Sarana Distribusi di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram Tahun 2023

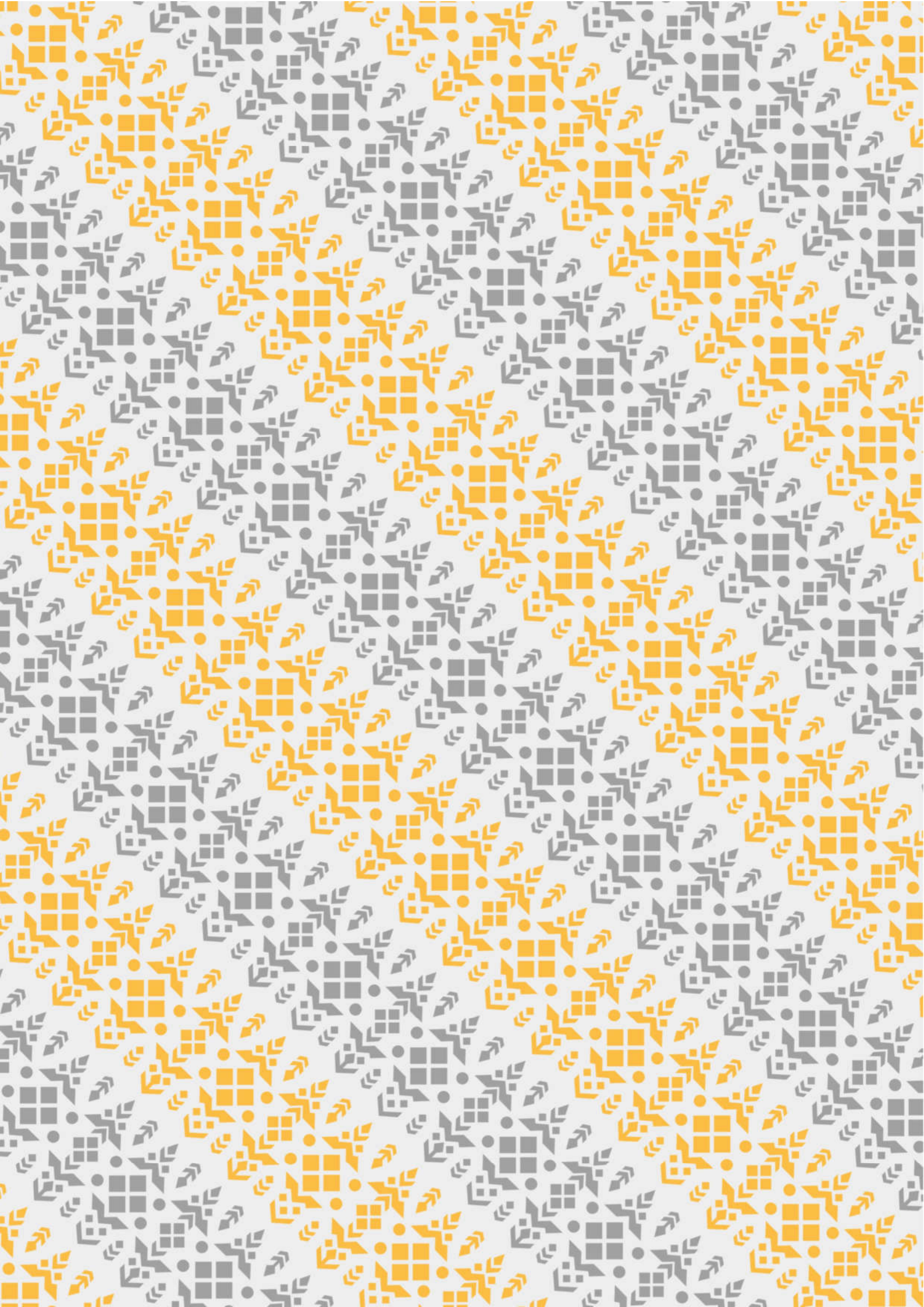
Total terdapat 1705 sarana produksi dan 5535 sarana distribusi di wilayah Kerja BBPOM di Mataram. Sebaran sarana masih terkonsentrasi di Pulau Lombok dan sisanya di Pulau Sumbawa. Dalam pelaksanaan pengawasan, BBPOM di Mataram memanfaatkan sarana transportasi darat, laut dan udara.

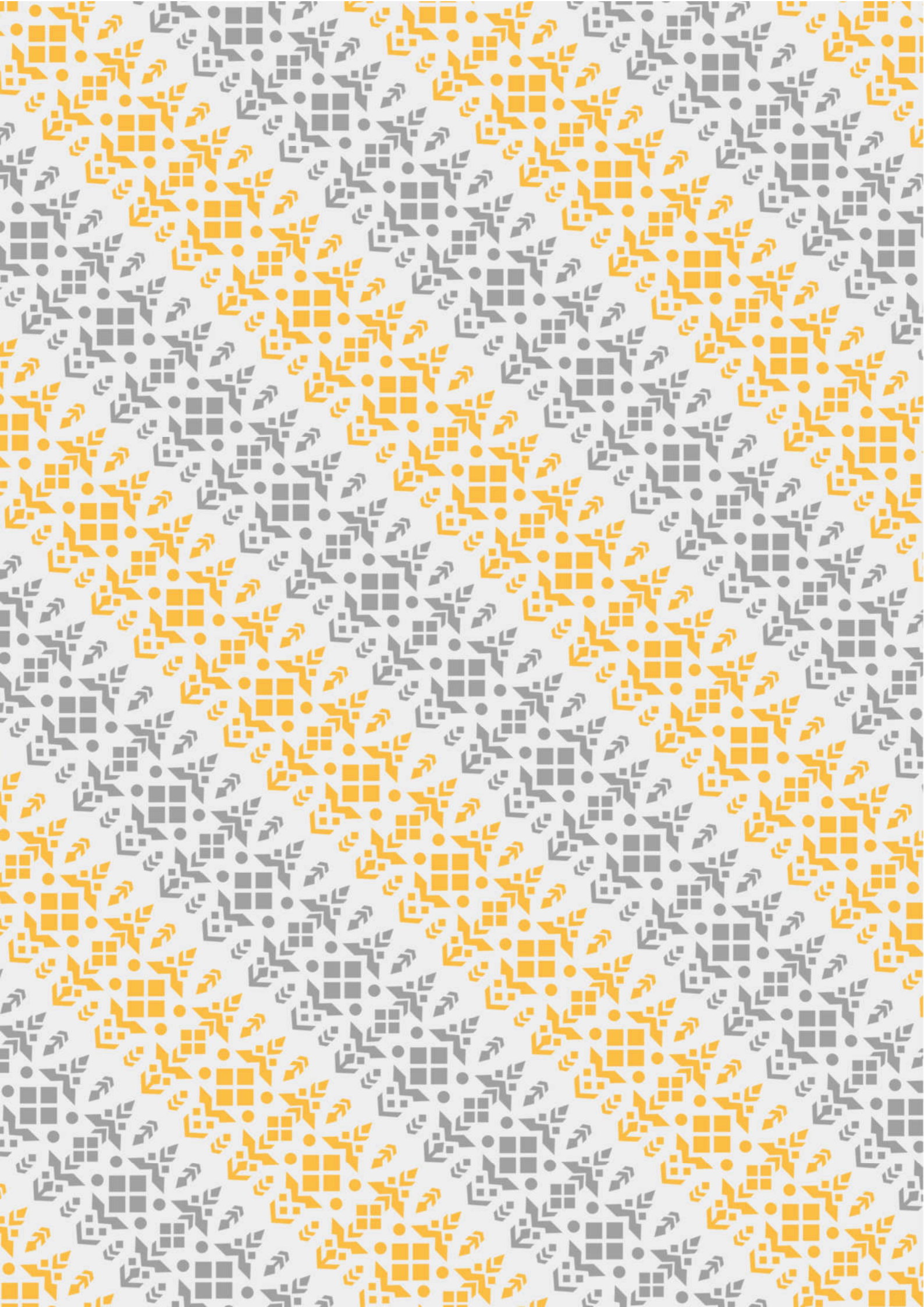




BAB II **PERENCANAAN** **KINERJA**









BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Sebagai pedoman pelaksanaan pencapaian indikator program kerja, BBPOM di Mataram telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Renstra BBPOM di Mataram Tahun 2020-2024 ditetapkan dalam Keputusan Kepala BBPOM di Mataram Nomor HK.07.117.1171.05.20.5465 Tahun 2020. Rencana Strategis 2020-2024 memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan serta program dan kegiatan yang mengacu kepada Renstra BPOM Tahun 2020-2024 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: **Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.**

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024 fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.”

Pada tahun 2021 telah dilakukan Reviu Rencana Strategis BBPOM di Mataram yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BBPOM di Mataram Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021. Dalam menentukan indikator program dan kegiatan, BBPOM di Mataram telah mempertimbangkan permasalahan internal dan eksternal, potensi, peluang serta kendala yang ada di Provinsi NTB yang mungkin akan terjadi dalam kurun waktu tersebut.

VISI BBPOM DI MATARAM

BBPOM di Mataram dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sejalan dengan visi Badan POM 2020-2024, yaitu :

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

MISI BBPOM DI MATARAM

Dalam rangka mencapai visi, BBPOM di Mataram menjalankan misi Badan POM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.





2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

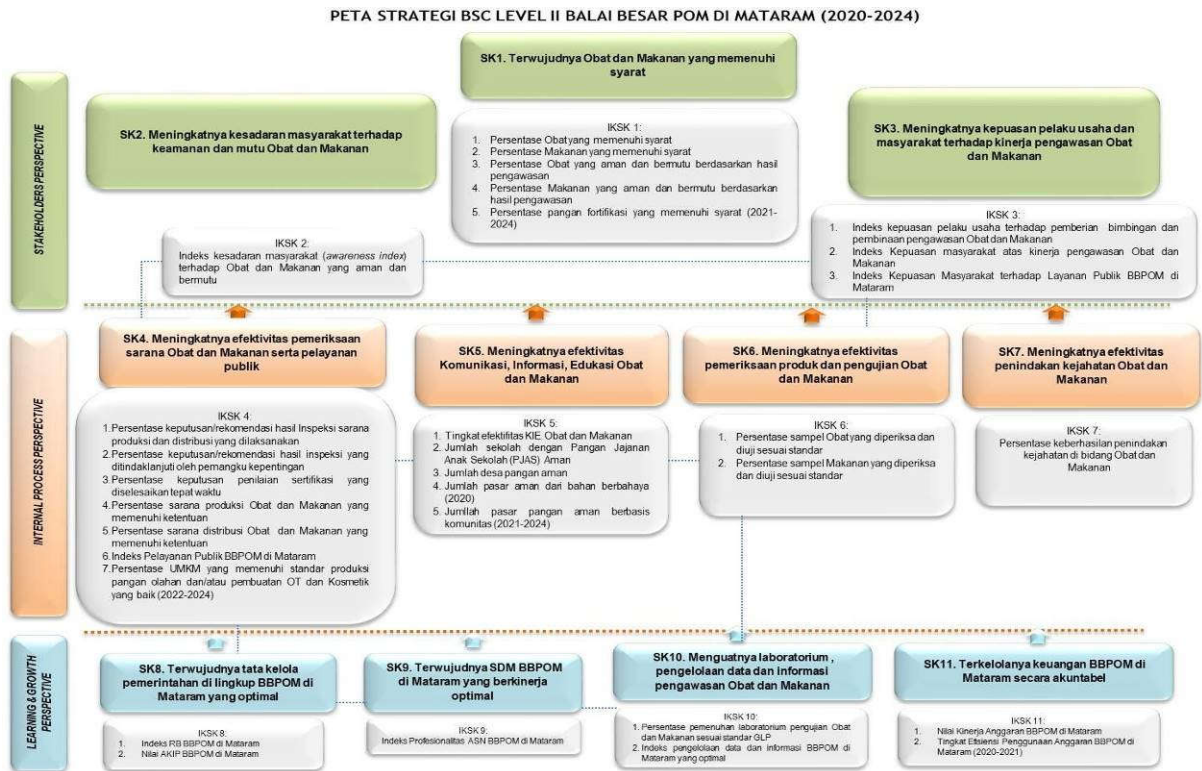
- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi BBPOM di Mataram yang dituangkan dalam Peta Strategis Level Balai Besar POM di Mataram dengan mempertimbangkan tantangan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai Rencana Strategis.

Berdasarkan pertimbangan dari 3 (tiga) perspektive dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Mataram berdasarkan Renstra 2020-2024 dan Reviu Renstra 2020-2024 sebagaimana bagan peta strategis berikut:





Gambar 2.1 Peta Strategis Level II BBPOM di Mataram

Berdasarkan reuiu Rencana Strategis 2020-2024, BBPOM di Mataram telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

1. SASARAN STRATEGIS-1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI MATARAM

BBPOM di Mataram mengawasi komoditas dengan risiko tinggi dimana tidak ada toleransi terhadap standar keamanan, khasiat, dan mutu. Pengawasan harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik, tidak hanya parsial kepada produk yang telah beredar di masyarakat. Seluruh mata rantai pengawasan dari hulu ke hilir harus dideteksi secara dini dan diantisipasi sesegera mungkin apabila ditemukan penurunan mutu, produk substandar, dan hal-hal lain yang dapat merugikan Kesehatan masyarakat selaku konsumen.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Mataram merupakan suatu proses komprehensif yang terdiri dari:

- a. Pertama, penilaian sebelum beredar (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar untuk dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. BBPOM di Mataram melakukan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka penerbitan surat rekomendasi





pemenuhan standar produksi yang baik sebagai kelengkapan untuk memperoleh nomor izin edar produk Obat dan Makanan.

- b. Kedua, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan cara sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan nasional secara terpadu, konsisten, dan terstandar.
- c. Ketiga, pengujian laboratorium. Sampling produk dilaksanakan melalui gabungan antara metode purposive target dengan pendekatan analisis risiko dan acak/random, kemudian diuji laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan apakah produk memenuhi syarat atau tidak.
- d. Keempat, penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Penegakan hukum dilaksanakan melalui pemberian sanksi administratif maupun pidana. Pemberian sanksi administratif seperti penarikan dari peredaran, pencabutan izin edar, dan penyitaan untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran cukup bukti masuk ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah dan fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan, sehingga diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis 1, maka ditetapkan 5 (lima) indikator beserta target yang ingin dicapai (tabel 2.1).

Tabel 2.1. Indikator dan Target Sasaran Strategis 1

No.	Indikator	Target 2023 (%)
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00
2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	84,00
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00





2. SASARAN STRATEGIS KE-2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI MATARAM

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun konsumen (masyarakat). Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BBPOM di Mataram bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan dan ditingkatkan terus. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya BBPOM di Mataram dalam peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) yaitu **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target 82,0 pada tahun 2023.**

3. SASARAN STRATEGIS KE-3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI MATARAM

Sebagai UPT BPOM di Provinsi NTB, BBPOM di Mataram berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BBPOM di Mataram, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BBPOM di Mataram bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional khususnya perekonomian di wilayah Provinsi NTB.





Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ingin dicapai seperti pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Indikator dan Target Sasaran Strategis 3

No.	Indikator	Target 2023
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,80
2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,75
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Mataram	94,00

4. SASARAN STRATEGIS KE-4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI MATARAM

BBPOM di Mataram dituntut untuk mampu mengawal berbagai kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing produk di Provinsi NTB. Dengan pengawalan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ingin dicapai seperti pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Indikator dan Target Sasaran Strategis 4

No.	Indikator	Target 2023
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,0
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76,0
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,0
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,0
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,0
6	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Mataram	4,40
7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,0





5. SASARAN STRATEGIS KE-5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI MATARAM

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Mataram mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Mataram, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Mengatasi hal tersebut, pengawasan Obat dan Makanan harusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram akan meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di Mataram mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat multi dan lintas sektor. BBPOM di Mataram perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ingin dicapai seperti pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Indikator dan Target Sasaran Strategis 5

No.	Indikator	Target 2023
1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,3
2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	84,0
3	Jumlah desa pangan aman	25,0
4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8,0

6. SASARAN STRATEGIS KE-6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI MATARAM

BBPOM di Mataram berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam Visi BPOM, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan menjadi salah satu prioritas BBPOM di Mataram ke depan, agar UMKM Obat dan Makanan di Provinsi NTB dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ingin dicapai seperti pada tabel 2.5.



**Tabel 2.5.** Indikator dan Target Sasaran Strategis 6

No.	Indikator	Target 2023
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,0
2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,0

7. SASARAN STRATEGIS KE-7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI MATARAM

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang tidak menimbulkan efek jera dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BBPOM di Mataram menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BBPOM di Mataram melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Provinsi NTB.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) **Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 99,0 di tahun 2023.**

8. SASARAN STRATEGIS KE-8. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI MATARAM YANG OPTIMAL

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra BPOM 2020-2024, BBPOM di Mataram berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM di Mataram akan terus meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan





pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BBPOM di Mataram.

Pada tahun 2020-2024, BBPOM di Mataram berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian supra sistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BBPOM di Mataram agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya BBPOM di Mataram yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BBPOM di Mataram, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Mataram. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ingin dicapai seperti pada tabel 2.6.

Tabel 2.6. Indikator dan Target Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Target 2023
1	Indeks RB BBPOM di Mataram	89,0
2	Nilai AKIP BBPOM di Mataram	82,0

9. SASARAN STRATEGIS KE-9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI MATARAM YANG BERKINERJA OPTIMAL

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv)





pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, telah ditetapkan indikator kinerja **Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Mataram, dengan target 84,0 ditahun 2023.**

10. SASARAN STRATEGIS KE-10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensinya pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan adalah adanya laboratorium pengujian yang andal yang didukung oleh tersedianya peralatan laboratorium serta personil laboratorium yang kompeten. Laboratorium Pengujian BBPOM Mataram telah terakreditasi SNI ISO 17025:2017, sehingga mampu menghasilkan data yang valid dan reliable, tidak terbantahkan serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maupun hukum.

Selain hal tersebut, aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Pemanfaatan teknologi informasi telah melingkupi segala bidang. Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi karena aspek-aspek otomatisasi yang canggih dan mampu membuat segala pekerjaan menjadi lebih praktis. Perkembangan suatu organisasi saat ini sangat bergantung pada teknologi informasi yang diaplikasikan. Teknologi informasi menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi suatu organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat.

kemajuan pesat di bidang teknologi menuntut perubahan total orientasi pimpinan organisasi terhadap peranan informasi dalam mengambil keputusan

Penerapan teknologi dalam organisasi dapat memberikan dampak yang signifikan pada efektifitas dan efisiensi serta meningkatkan daya saing karena teknologi informasi mampu memberikan sejumlah data mengenai jalannya organisasi tersebut secara cepat dan akurat sehingga organisasi dapat memperoleh data-data yang diperlukan secara cepat pula sebagai dasar mereka dalam mengambil keputusan strategis.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ingin dicapai seperti pada tabel 2.7.



**Tabel 2.7.** Indikator dan Target Sasaran Strategis 10

No.	Indikator	Target 2023
1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	92,0
2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Mataram yang optimal	2,50

11. SASARAN STRATEGIS KE-11. TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI MATARAM SECARA AKUNTABEL

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BBPOM di Mataram dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang ingin dicapai seperti pada tabel 2.8.

Tabel 2.8. Indikator dan Target Sasaran Strategis 11

No.	Indikator	Target 2022
1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Mataram	96,0

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 telah disusun dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala BBPOM di Mataram Nomor HK.02.02.18A.18A5.07.22.112 tanggal 12 Juli 2022 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan program, kegiatan dan anggaran tahun 2023.

Tabel 2.9. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPOM di Mataram Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,0
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,0
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,0
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74,0
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82,0
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan	82,0
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,8





NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,75
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Mataram	94,0
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,0
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76,0
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,0
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,0
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,0
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Mataram	4,55
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,0
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,3
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	84,0
		Jumlah desa pangan aman	25,0
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8,0
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,0
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,0
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99,0
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Mataram yang optimal	Indeks RB BBPOM di Mataram	89,0
		Nilai AKIP BBPOM di Mataram	82,0
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Mataram yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Mataram	84,0
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	92,0
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Mataram yang optimal	2,50
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Mataram secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Mataram	97,0

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 BBPOM di Mataram tanggal 20 Desember 2022 digunakan sebagai dasar pelaksanaan seluruh kegiatan BBPOM di Mataram tahun 2023 yang mengacu kepada Renstra BBPOM di Mataram tahun 2020-2024.





Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2023 memuat penugasan pencapaian target kinerja pada tahun berjalan dari Kepala Badan POM RI kepada Kepala BBPOM di Mataram, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.10. Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,0
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,0
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,0
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	80,0
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan	79,0
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,7
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77,5
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Mataram	93,0
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,0
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,0
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,0
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,0
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,0



**PENDAHULUAN****PERENCANAAN
KINERJA****AKUNTABILITAS
KINERJA****PENUTUP**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Mataram	4,51
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,0
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,9
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	62
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	18
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,0
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,0
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98,0
24	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB BBPOM di Mataram	88,0
25	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP BBPOM di Mataram	81,0
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Mataram	83,75
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87,0
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Mataram yang optimal	2,25
29	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Mataram	96,0



**2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)**

Untuk kelengkapan evaluasi dan monitoring Perjanjian kinerja pada tahun berjalan, maka dokumen perjanjian kinerja juga dilengkapi dengan rencana aksi perjanjian kinerja (RAPK) tiap triwulan, sebagai berikut:

Tabel 2.11. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Mataram Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Mataram	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	-	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
		2. Persentase makanan yang memenuhi syarat	-	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
		4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	1. Indeks kesadaran masyarakat terhadap (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,0
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,8
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,75
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,0
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Mataram	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
		6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	4,40	4,40	4,40	4,40
		7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4		31			53			74			79,0
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10%	20%	20%	25%	25%	30%	42,5%	60%	62,5%	65%	80%	84,0
		3. Jumlah desa pangan aman	10%	20%	25%	40%	48%	66%	66%	71%	83%	85%	95%	25,0
		4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5%	10%	20%	25%	55%	55%	75%	75%	85%	100%	100%	8,0
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	8	15	25	40	50	55	60	70	80	90,0	100,0
		2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	8	15	25	40	50	55	60	70	80	90,0	100,0
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	1. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95,0	99,0
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Mataram yang optimal	1. Indeks RB BBPOM di Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,0
		2. Nilai AKIP BBPOM di Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,0
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Mataram yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,0
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,0





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Mataram yang optimal	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Mataram secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Mataram	-	50	55	62	65	67	69	71	73	75	80	97,0

2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah disepakati pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja mengacu kepada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan.

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja.

Formula menghitung NPSS:

$$NPSS = \frac{\sum NP}{\sum P}$$

Ket: NP : Nilai Perspektif P : Perspektif

Untuk mengukur Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau Nilai Kinerja Organisasi digunakan skala penilaian seperti ditunjukkan pada bagan berikut :

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	<50	

Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) merupakan nilai rata-rata dari capaian seluruh indikator.





$$NPS = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3}{3}$$

Untuk mengukur penilaian capaian sasaran strategis maupun indikator kinerja digunakan skala penilaian seperti ditunjukkan pada bagan berikut :

Tabel 2.12. Kategori capaian indikator kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM Nomor PR.04.02,21.01.24.12 tanggal 8 Januari 2024 hal Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang pencapaiannya dapat dikonversi menjadi 120% jika realisasinya sama dengan target yaitu 100% sebagai berikut :

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Mataram adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Mataram yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Mataram menunjuk penanggungjawab data disetiap bagian/kelompok substansi dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Mataram
3. Penanggung jawab data disetiap bagian/kelompok substansi menginput data kinerja pada data pada *google spreadsheet* secara online rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data BBPOM di Mataram.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



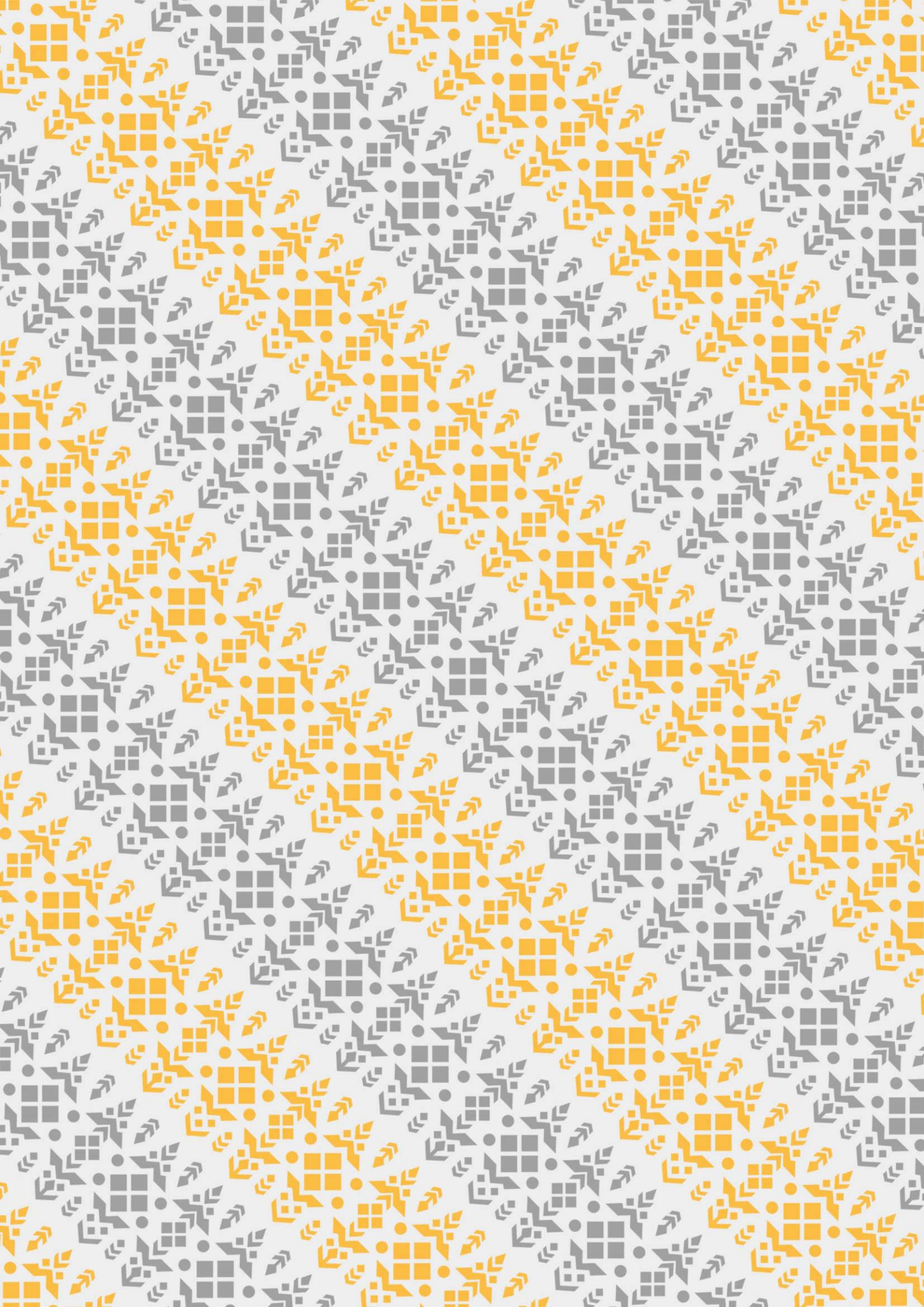
AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

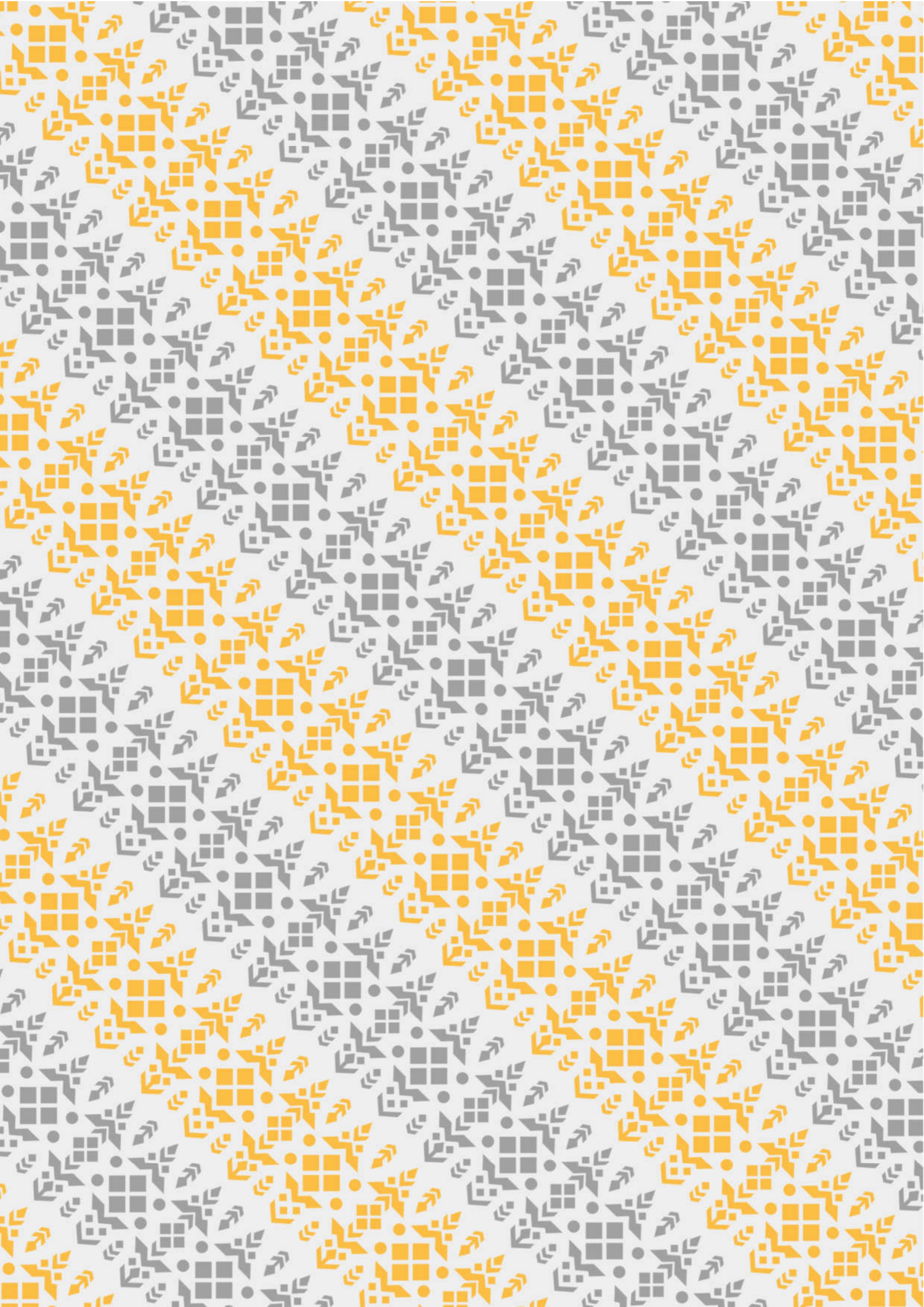
4. Data kinerja yang telah diverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, money Bappenas, link Capaian RHPK BPOM, BPOM Operational Center (BOC) dan pada aplikasi SIMETRIS (*e-performance*).
5. Evaluasi pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

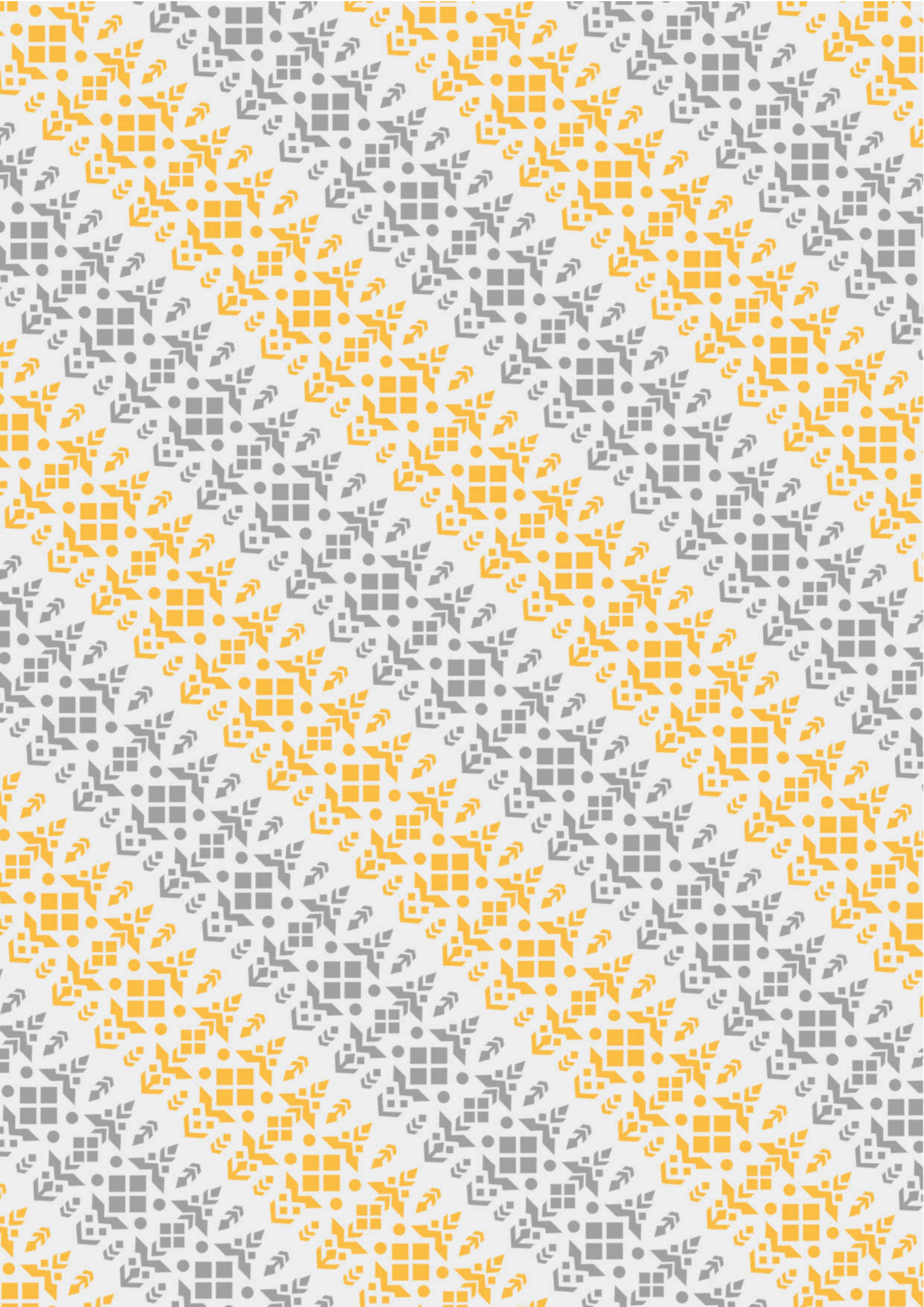


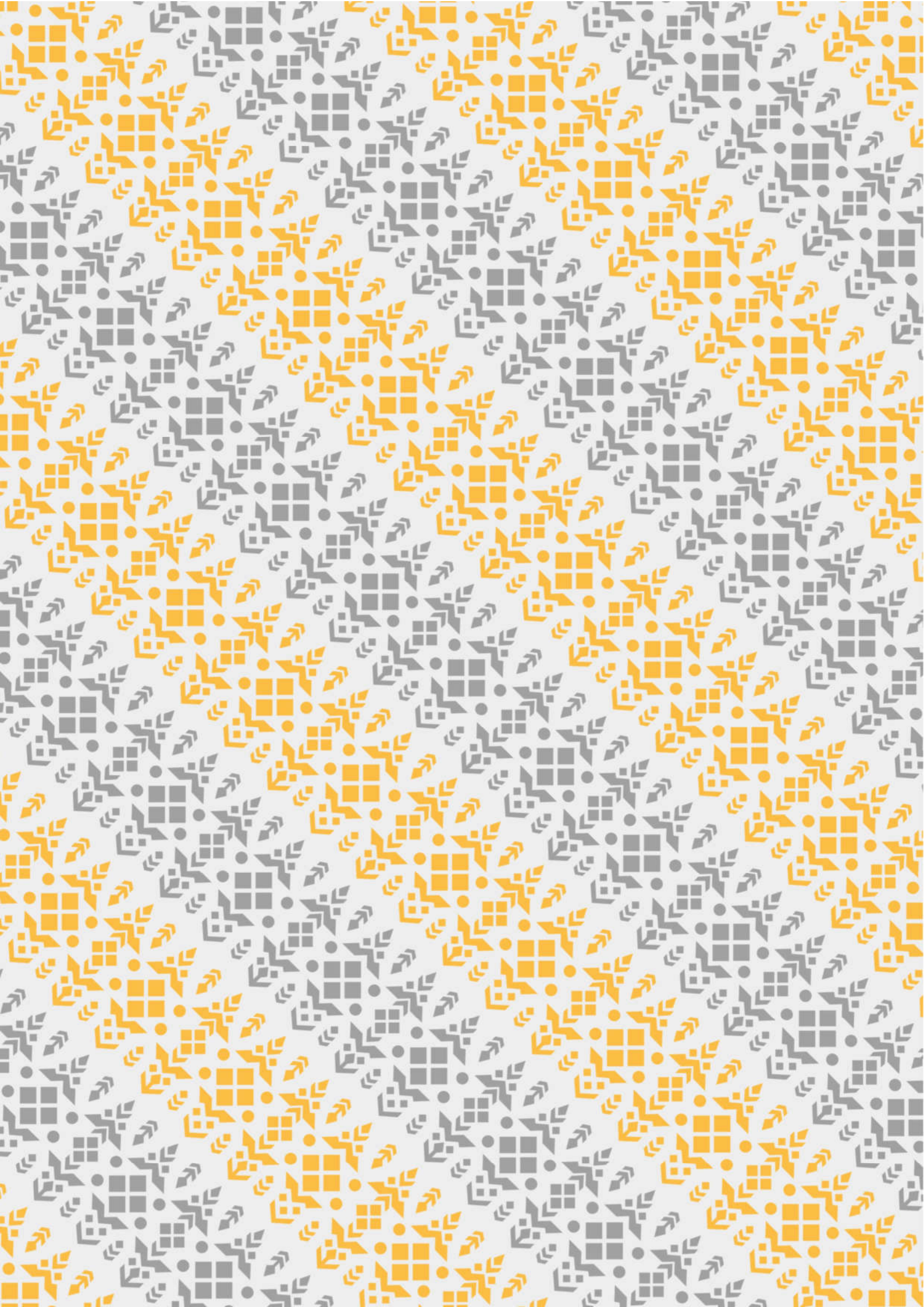




BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA







**BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA****3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja merupakan proses pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun berjalan. Capaian kinerja Tahun 2023 ini diukur dengan membandingkan realisasi 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja pada 11 (sebelas) sasaran strategis dengan target Tahun 2023 pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

Pada Tahun 2023, seluruh sasaran strategis dievaluasi dan diukur pencapaiannya. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) 11 Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 11 Sasaran Strategis BBPOM di Mataram

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)/ NILAI PERSPEKTIF (NP)/ NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)	KATEGORI NSS/NP/NPSS
Nilai Kinerja Organisasi		104,77	Istimewa
Stakeholder Perspective		100,47	Sangat Baik
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	99,28	Cukup
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	97,33	Cukup
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM	104,78	Sangat Baik
Internal Process Perspective		109,27	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	113,29	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	102,79	Sangat Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	120,00	Sangat Baik





NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)/ NILAI PERSPEKTIF (NP)/ NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)	KATEGORI NSS/NP/NPSS
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	101,01	Sangat Baik
Learning and Growth Perspective		104,57	Sangat Baik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Mataram yang optimal	100,54	Sangat Baik
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Mataram yang berkinerja optimal	107,27	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	116,00	Sangat Baik
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Mataram secara Akuntabel	94,48	Cukup

Data Nilai Sasaran Strategis (NSS) dan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan data yang diperoleh dari Aplikasi Simetris menu E-Performance yang terintegrasi antara perencanaan dan monitoring evaluasi. Capaian kinerja pada Aplikasi Simetris terintegrasi dengan Aplikasi SIMAKIN yang menghasilkan output berupa realisasi capaian SKP Kepala Balai serta predikat kinerja organisasi. Terdapat 3 (tiga) perspektif utama sesuai peta strategi BBPOM di Mataram berdasarkan Balanced Scorecard (BSC). Dari tabel diatas, diperoleh hasil capaian NSS perspektif stakeholder dengan nilai 100,47%, perspektif internal proses sebesar 109,02% dan untuk perspektif learning & growth sebesar 104,57%. Hasil rata-rata ketiga perspektif menghasilkan nilai NPSS atau kinerja organisasi sebesar 104,77% dengan predikat kinerja **ISTIMEWA**. Screenshot nilai NPSS dari aplikasi Simetris terdapat pada lampiran 6.

Berdasarkan hasil evaluasi laporan interim TW 4 tahun 2022 beberapa Indikator Kinerja yang capaiannya kurang efektif diusulkan untuk dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2023. Target indikator kinerja persentase Obat yang memenuhi syarat yang semula 91 %, disetujui diturunkan menjadi 90,3%. Di tahun 2023.

Dari 11 sasaran strategis BBPOM di Mataram yang diukur capaiannya pada Tahun 2023 diperoleh 8 sasaran strategis dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS) dengan kategori “sangat baik”, dan 3 sasaran strategis dengan kategori “cukup”.





Gambar 3.1. Perbandingan NPSS/Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau nilai kinerja organisasi Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2022 dan 2021, namun lebih rendah dari Tahun 2020. Nilai NPSS Tahun 2020-2023 lebih dari 100% dengan predikat kinerja organisasi “**ISTIMEWA**”.

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis BBPOM di Mataram dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

No	Sasaran Strategis	NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)/ NILAI PERSPEKTIF (NP)/ NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)		
		BBPOM di Mataram	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang
Nilai Kinerja Organisasi		104,77	104,50	101,82
Stakeholder Perspective		100,47	102,43	100,06
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT	99,28%	102,48%	97,75%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	97,33%	101,26%	98,31%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	104,78%	103,54%	104,11%
Internal Process Perspective		109,27	106,46	101,84
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	113,29%	109,48%	105,82%
5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja	102,79%	100,17%	100,32%





No	Sasaran Strategis	NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)/ NILAI PERSPEKTIF (NP)/ NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)		
		BBPOM di Mataram	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang
Nilai Kinerja Organisasi		104,77	104,50	101,82
Stakeholder Perspective		100,47	102,43	100,06
	UPT			
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	120,0%	120,0%	99,15%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	101,01%	96,21%	102,09%
Learning and Growth Perspective		104,57	104,60	103,55
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	100,54%	94,70%	97,12%
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	107,27%	108,31%	106,38%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	116,0%	120,0%	120,0%
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	94,48%	95,38%	90,70%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BBPOM di Mataram, BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palembang Tahun 2023 memperoleh predikat kinerja “**ISTIMEWA**” dengan NPSS tertinggi dicapai oleh BBPOM di Mataram.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Secara ringkas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Mataram Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Target, Realisasi dan %Capaian IKU BBPOM di Mataram Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Mataram	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90,48	100,53	sangat baik
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	78,35	93,54	cukup
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	84,65	98,43	cukup



**PENDAHULUAN****PERENCANAAN
KINERJA****AKUNTABILITAS
KINERJA****PENUTUP**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	78,90	103,81	sangat baik
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85	85,09	100,10	sangat baik
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Mataram	82	79,81	97,33	cukup
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,8	97,80	108,91	sangat baik
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,75	79,61	101,09	sangat baik
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	94	98,09	104,35	sangat baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Mataram	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	99,11	108,91	sangat baik
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76	88,43	116,36	sangat baik
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	120,00	120,00	sangat baik
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	69,77	107,33	sangat baik
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	76,06	111,85	sangat baik
		6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Mataram	4,4	4,86	110,45	sangat baik



**PENDAHULUAN****PERENCANAAN
KINERJA****AKUNTABILITAS
KINERJA****PENUTUP**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA
		7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	93,33	118,14	sangat baik
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	96,3	96,72	100,44	sangat baik
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	84	93,00	110,71	sangat baik
		3. Jumlah desa pangan aman	25	25,00	100,00	baik
		4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8	8,00	100,00	baik
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120,00	120,00	sangat baik
		2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120,00	120,00	sangat baik
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	1. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99	100,00	101,01	sangat baik
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Mataram yang optimal	1. Indeks RB BBPOM di Mataram	89	87,99	98,87	cukup
		2. Nilai AKIP BBPOM di Mataram	82	83,81	102,21	sangat baik
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Mataram yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Mataram	84	90,11	107,27	sangat baik
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	92	93,43	101,55	sangat baik
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Mataram yang optimal	2,5	2,90	116,00	sangat baik
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Mataram secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Mataram	97	91,65	94,48	cukup





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

Dari 11 sasaran strategis dan 29 indikator kinerja utama (IKU) yang diukur pencapaiannya pada Tahun 2023. Terdapat 22 indikator yang capaiannya dengan kategori “sangat baik”, 2 indikator dengan kategori “baik”, dan 5 indikator dengan kategori “cukup”.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja 2023 dengan Balai lain yang setara (dalam satu kluster), membandingkan realisasi Tahun 2023 terhadap target akhir RENSTRA serta melakukan ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA serta rekomendasi perbaikan kinerja, analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA serta tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Target akhir RENSTRA yang dimaksud adalah target pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024 dan target yang telah direviu pada Tahun 2023 dan dituangkan dalam Perjanjian kinerja Tahun 2024.





SASARAN STRATEGIS - 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram

Sasaran Strategis pertama mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yang merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis pertama.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategi 1 BBPOM di Mataram Tahun 2023

NO SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Mataram	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90,48	100,53	cukup
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	78,35	93,54	cukup
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	84,65	98,43	cukup
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	78,90	103,81	sangat baik
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85	85,09	100,10	sangat baik

Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja serta analisis capaian masing – masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1 di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Obat acak MS}}{\text{Total sampel Obat acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- “Obat” mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
- “Diperiksa” meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.





- “**Diuji**” adalah dilakukan pengujian secara laboratorium sesuai pedoman sampling dan pengujian.


Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar)
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Sedangkan Obat yang Memenuhi Syarat adalah Obat yang evaluasi penandaannya memenuhi ketentuan dan pengujian (uji laboratorium) memenuhi syarat. Obat dengan hasil evaluasi penandaan tidak memenuhi ketentuan (TMK), tetap dilakukan pengujian laboratorium sesuai pedoman sampling dan pengujian, tetapi hasil pengujian tidak mempengaruhi keputusan, kesimpulan akhir Obat tidak memenuhi syarat (TMS).

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,0	90,48	100,53 	Sangat Baik

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2023 telah melebihi target yaitu sebesar 90,48% dari target 90,0% sehingga nilai pencapaian indikator menjadi sebesar 100,53% dengan kriteria ‘Sangat Baik’.

Pada Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap 1124 sampel obat, narkotika/psikotropika, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan obat kuasi yang disampling secara random dari 1123 target sampel di Tahun 2023 atau sebesar 100,09%. Diperoleh hasil uji 1017 sampel (90,48%) memenuhi syarat (MS) dan 107 sampel (9,52%) tidak memenuhi syarat (TMS).

Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional (OT), suplemen kesehatan (SK) dan kosmetik dengan metode sampling random/acak sampai Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 3.6 Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional (OT), suplemen kesehatan (SK), kosmetik dan obat kuasi dengan metode sampling random/acak Tahun 2023

Jenis Produk	Sampling			TMK	Jumlah Sampel diuji	Hasil uji					Total TMS	
						MS		TMS				
	Target	Realisasi	(%)	TIE/ED/Palsu		Jumlah	%	MK Label +TMS uji	TMK Label +MS Uji	TMK Label +TMS uji	Jumlah	%
Obat	354	355	100,28	0	355	346	97,46	0	9	0	9	2,54
Obat Tradisional	231	231	100,00	0	231	176	76,19	40	14	1	55	23,81
Obat Kuasi	16	16	100,00	0	16	16	0	0	0	0	0	0,00
Suplemen Kesehatan	61	61	100,00	0	61	56	91,80	2	2	1	5	8,20
Kosmetik	461	461	100,00	0	461	423	91,76	9	25	4	38	8,24
TOTAL	1123	1124	100,09	0	1124	1017	90,48	51	50	6	107	9,52

Pada Tahun 2023 laboratorium OT dan SK menguji 231 sampel Obat Tradisional dengan hasil 176 sampel (76.19%) Memenuhi Syarat dan 55 sampel (23,81%) Tidak Memenuhi Syarat. 55 sampel yang TMS tsb terdiri atas 14 sampel (25.25%) TMK Label dan 41 sampel (74.54%) TMS Uji Laboratorium. Adapun jenis parameter uji yang TMS sebagai berikut 1 sampel TMS Kadar Air, 35 sampel TMS Angka Kapang Khamir, 6 sampel TMS Angka Lempeng Total, 1 TMS Clostridia dan 10 TMS Bakteri Enterobacteriaceae.

Sedangkan untuk sampel Suplemen Kesehatan terdapat 5 sampel (8,20%) Tidak Memenuhi Syarat dengan rincian 2 sampel TMS Label dan 3 sampel TMS Uji Laboratorium yaitu pada parameter Vitamin A dan TMS Vitamin C.

Untuk produk Kosmetik, dari 461 sampel yang diuji terdapat 38 sampel (8.24%) TMS terdiri dari 25 sampel TMK Label dan 13 sampel TMS Uji Laboratorium. Jenis parameter uji TMS sebagai berikut: 6 TMS methanol, 3 TMS ALT, 2 TMS AKK, 1 TMS Bahan Berbahaya Merkuri, 1 TMS Parafenilendiamin, 1 TMS Asam Tiogliokolat, dan 1 TMS kadar cemaran logam Pb).

Pada Tahun 2023 mulai dilakukan pemisahan kategori sampel Obat Kuasi, dimana sebelumnya dimasukkan ke komoditi Obat Tradisional. Adapun hasil pengujian Obat Kuasi seluruhnya memenuhi syarat.

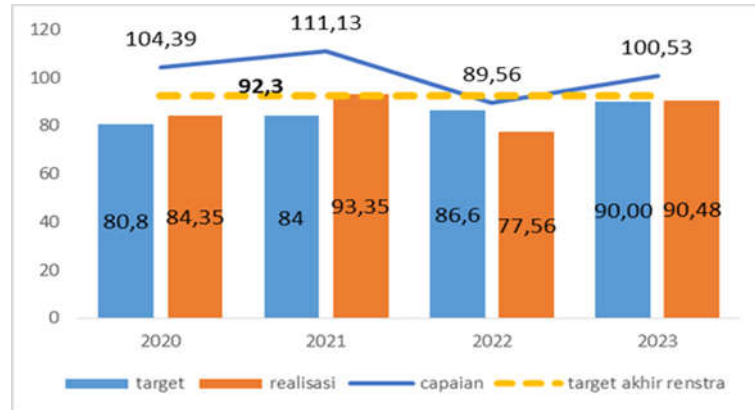
Selain hasil uji laboratorium, pemeriksaan penandaan/label dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang tinggi pada sampel kosmetik memberi kontribusi terbesar terhadap capaian indikator ini. Dari 461 Sampel Kosmetik, 29 sampel TMK Penandaan/ label dengan komposisi TMK Klaim 20,68% TMK Mayor 24% TMK Kelengkapan Label 27,59% dan TMK nama produk tidak sesuai dengan nama





yang terdaftar sebanyak 27,59%. Komoditas dengan persentase TMS terbesar adalah Obat Tradisional sebanyak 23,81% dan Kosmetik sebesar 8,24%.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.2. Perbandingan, Realisasi, dan %Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Capaian Obat memenuhi syarat di Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 12,92% dibandingkan dengan Tahun 2022. Peningkatan capaian di Tahun 2023 disebabkan karena terjadi penurunan TMK Label/penandaan pada produk kosmetik, yaitu 29 dari 461 (6,29%). Terjadinya penurunan TMK penandaan pada produk kosmetik di Tahun 2023 antara lain disebabkan karena populasi sampel kosmetik yang dilakukan sampling secara acak telah memenuhi ketentuan dan produsen telah menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB).

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Target akhir periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reviu Renstra Tahun 2020-2024 dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sama yaitu 92,30%.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra (pada dokumen reviu renstra dan PK Tahun 2024) sebagai berikut:

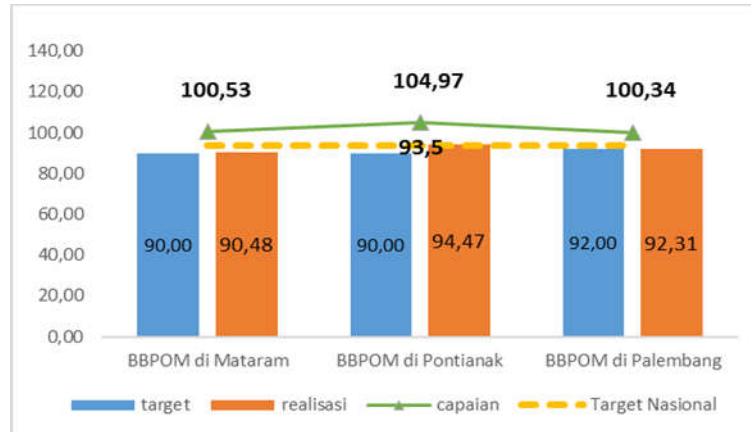
Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,30	90,48	98,03	Akan Tercapai

Realisasi Obat yang memenuhi syarat pada Tahun 2023 (90,48 %) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra (92,30%), telah tercapai sebesar 98,03 %. Oleh sebab itu, target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.





PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER



Gambar 3.3. Perbandingan, Realisasi dan %Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster

Realisasi dan persen capaian BBPOM di Mataram lebih tinggi bila dibandingkan dengan BBPOM di Palembang, namun lebih rendah dari BBPOM di Pontianak. Ketiga BBPOM dalam satu klaster telah mencapai target masing-masing, namun hanya BBPOM di Pontianak yang mencapai target nasional.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Persen capaian persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,53%. Relatif tingginya persentase Obat yang memenuhi syarat disebabkan meningkatnya sampel kosmetik MK label dan sampel obat tradisional MS uji dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kepatuhan produsen obat, kosmetik, obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan terhadap ketentuan pelabelan dan mutu produknya terutama aspek hygiene dan sanitasi sudah relative tinggi.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat meningkatkan capaian persentase Obat yang memenuhi syarat, selanjutnya agar dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Intensifikasi pengawasan *PreMarket* dan *Post Market* guna menjamin produsen dan distributor patuh terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku
- Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan sampling, pengujian, inspeksi, dan pengawasan penandaan.
- Koordinasi lintas sektor terus dilaksanakan sehingga pengawasan obat dan makanan dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif





- Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium untuk meningkatkan cakupan pengawasan sehingga sejalan dengan perkembangan teknologi terkini

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90,48	100,53	790.546.500	790.486.140	99,99	1,01	0,01

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi (IE) sebesar 1,01 lebih besar daripada standar efisiensi (1) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi (TE) sebesar 0,01. Hal ini mencerminkan bahwa Anggaran yang tersedia telah digunakan secara optimal dalam melaksanakan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

- Bimbingan Teknis Kontrak Produksi dan Pelabelan Kosmetik yang Benar kepada Badan Usaha Pemilik Nomor Notifikasi Kosmetik (BUPN), Industri Kosmetik dan Distributor Kosmetik di Pulau Lombok
- Bimbingan Teknis (Bimtek) Cara Distribusi Yang Baik (CDOB) di Sarana milik Pemerintah dan Pedagang Besar Farmasi (PBF)
- Koordinasi antara Bidang Pemeriksaan dan Bidang Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal Tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan
- Pengawasan penerapan CDOB pada rantai distribusi obat untuk menjamin keamanan, mutu dan khasiat agar tetap terjaga di tangan konsumen dan mencegah penyaluran obat dengan menjaga agar pengadaan obat hanya dari distributor resmi untuk menghindari obat ilegal/palsu ke PBF. Selain itu, penyimpanan obat dapat dikendalikan sehingga stabilitas obat terjaga, dan tidak terjadi penyaluran obat ke jalur ilegal yang memicu penyalahgunaan obat, serta meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana pelayanan dan distribusi obat tentang Cara Distribusi Obat yang Baik.
- Pengawasan prinsip cara distribusi kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang baik agar tetap terjaga keamanan, mutu, khasiat, termasuk kesesuaian penandaannya. Pengawasan dilakukan baik di tingkat distributor maupun sarana ritel modern dan tradisional.
- Pelaksanaan monitoring Corrective Action Preventive Action (CAPA) dari sarana pelayanan dan distribusi obat sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.





- Pengawasan yang disertai dengan law enforcement, dengan melakukan penindakan secara Pro Justitia terhadap peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat.
- Pelaksanaan sampling dan pengujian Obat yang berpedoman pada Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023.
- Pengawasan penandaan makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram secara rutin di evaluasi oleh pusat dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Mataram.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja interim Triwulan III Tahun 2023, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Memberikan pinjaman reagensia ke Balai Region untuk mempercepat pengujian sampel	BBPOM di Mataram telah memberikan pinjaman reagensia ke BBPOM Surabaya dan Denpasar	-	-	Realisasi indikator kinerja sebesar 89,66%	Terjadi peningkatan realisasi menjadi 90,48% sehingga target TW4 dapat tercapai

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Penyelenggaraan Bimtek Penandaan Kosmetik dan Obat Tradisional bagi pelaku usaha/ UMK kosmetik yang dilaksanakan secara terpadu bersama Direktorat terkait	Telah diselenggarakan Bimtek Penandaan Kosmetik bagi pelaku usaha/ UMK kosmetik pada bulan Juli 2023	-	-	Pengetahuan peserta pelaku usaha/ UMK kosmetik terkait label masih rendah	Pengetahuan peserta pelaku usaha/ UMK kosmetik di NTB terkait label meningkat

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat telah melampaui target tahun 2023 namun target tahun 2024 (akhir periode renstra) belum tercapai, sehingga target renstra di tahun 2024 tidak dilakukan penyesuaian yaitu sebesar 92,3%.





2. PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Pangan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Pangan acak MS}}{\text{Total sampel Pangan acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian laboratorium.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar),
- Produk kedaluwarsa,
- Produk rusak,
- Tidak memenuhi ketentuan label, dan
- Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Sedangkan Makanan yang Memenuhi Syarat adalah Makanan yang evaluasi penandaannya memenuhi ketentuan dan pengujian (uji laboratorium) yang memenuhi syarat. Makanan dengan hasil evaluasi penandaan tidak memenuhi ketentuan (TMK), tetap dilakukan pengujian laboratorium sesuai pedoman sampling dan pengujian, tetapi hasil pengujian tidak mempengaruhi keputusan, kesimpulan akhirnya adalah Makanan tersebut tidak memenuhi syarat (TMS).

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Persentase makanan yang memenuhi syarat	84,00	78,57	93,54	cukup

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada Tahun 2023 belum mencapai target yaitu sebesar 78,57% dari target 84,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 93,54% dengan Kategori "Cukup".

Pada Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap 462 sampel makanan yang disampling secara random dari 462 target sampel atau sebesar 100,00% dengan hasil 363 sampel (78,57%) memenuhi syarat (MS) dan 99 sampel (21,43%) tidak memenuhi syarat (TMS).

Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel makanan dengan metode sampling random/acak pada Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

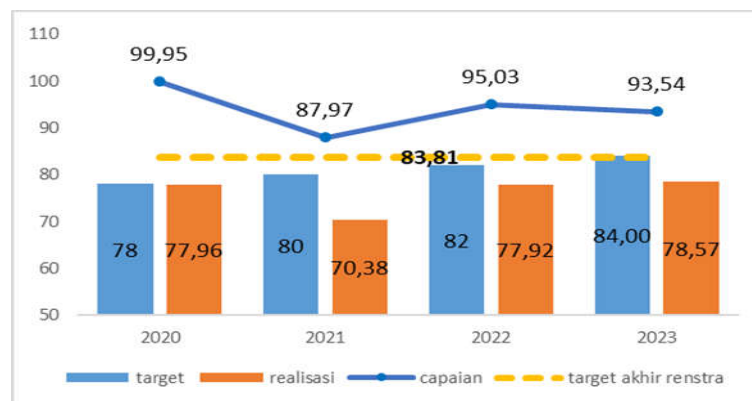


**Tabel 3.9** Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Makanan dengan Metode Sampling Random/Acac Sampai Tahun 2023

Sampling			TMK		Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS	
Target	Realisasi	(%)	TIE/Palsu	ED		MS		TMS			Jumlah	%
						Jumlah	%	MK Label +TMS uji	TMK Label +MS Uji	TMK Label +TMS uji		
462	462	100,00	0	0	462	363	78,57	40	50	9	99	21,43

Dari 462 sampel makanan yang diperiksa diperoleh hasil Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) penandaan/label sebanyak 59 sampel yang meliputi 48 sampel produk MD/ML menggunakan kemasan tidak sesuai label yang disetujui dan 11 sampel produk industri pangan rumah tangga yang tidak mencantumkan kode produksi/nomor *batch* dan tanggal kedaluwarsa. Dari hasil uji diperoleh sejumlah 27 sampel TMS untuk uji kimia. Adapun parameter uji kimia yang TMS yaitu TMS Kadar Pengawet Benzoat: 15 sampel, TMS Pemanis Siklamat: 9 sampel, TMS Pewarna (Tartrazin, P4 R dll): 4 sampel, TMS Antioksidan BHA: 1 sampel, TMS Cemarkan logam Pb: 1 sampel, TMS 3MCPD: 6 sampel, TMS Enzim Diastase: 6 sampel dan TMS HMF: 7 sampel. Sedangkan sampel TMS untuk uji mikrobiologi adalah sebanyak 13 sampel. Adapun parameter uji mikrobiologi yang TMS yaitu TMS Angka Lempeng Total & Angka Kapang Khamir: 9 sampel, TMS *Pseudomonas aeruginosa*: 2 sampel, dan TMS *Bacillus cereus*: 2 sampel.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020

**Gambar 3.4.** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Secara umum, tren realisasi mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Meski demikian peningkatan tersebut masih belum melampaui target, sama seperti dua Tahun sebelumnya. Sehingga diperlukan






upaya perbaikan yang berkesinambungan agar dapat meningkatkan capaian indikator di Tahun-Tahun berikutnya.

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi dan capaian indikator ini yang sejak Tahun 2021 – 2023 tidak pernah tercapai, dilakukan reviu dan penyesuaian target akhir periode renstra (Tahun 2024) pada dokumen reviu renstra 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target akhir periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reviu Renstra sebesar 86,0% disesuaikan menjadi 83,81% pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase makanan yang memenuhi syarat	86,0	78,57	91,36 	Akan Tercapai

Realisasi makanan yang memenuhi syarat pada Tahun 2023 (78,57%) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra (86%), telah tercapai sebesar 91,36%.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut:

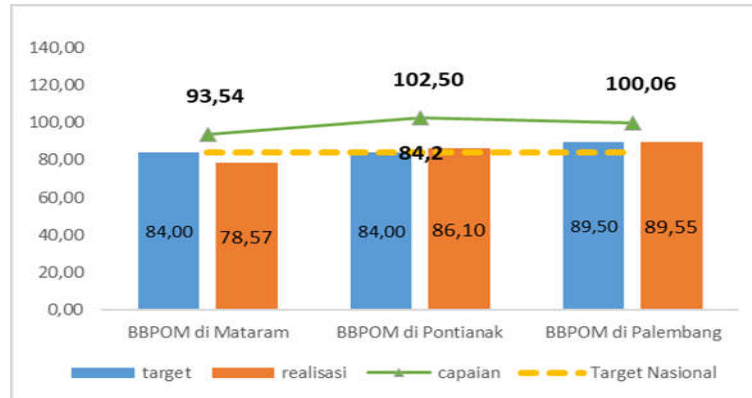
Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase makanan yang memenuhi syarat	83,81	78,57	93,75 	Akan Tercapai

Realisasi makanan yang memenuhi syarat pada Tahun 2023 (78,57%) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (83,81%), telah tercapai sebesar 93,75%. Oleh sebab itu, target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.





PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER



Gambar 3.5. Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster

Realisasi BBPOM di Mataram lebih rendah daripada BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palembang. BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palembang telah mencapai target masing-masing dan target nasional di Tahun 2023. Hal ini dapat digunakan sebagai pemicu bagi BBPOM di Mataram untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan pengujian di Tahun berikutnya agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAU PENURUNAN KINERJA

Persen capaian persentase makanan memenuhi syarat pada Tahun 2023 di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 93,54%. Penyebabnya antara lain relatif tingginya TMK Penandaan dan TMS uji mikrobiologi dan kandungan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melebihi persyaratan. Sampel makanan TMK label sebagian besar berasal dari produk dengan pendaftaran MD/ML, sedangkan sampel makanan TMS pengujian didominasi oleh produk pangan PIRT. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha masih rendah dalam pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya terkait Penandaan/label dan penerapan *Hygiene* Sanitasi khususnya pelaku usaha PIRT.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat meningkatkan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat, selanjutnya perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengintensifkan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan menggalang komitmen untuk mengawal pelaksanaan DAK Non Fisik POM serta untuk mengoptimalkan peran petugas penyuluh/pengawas keamanan pangan yang telah mendapatkan pelatihan sebagai Penyuluh Keamanan Pangan/PKP dan *District Food Inspector/* DFI dalam melakukan





pembinaan/pengawasan pangan produk IRTP di daerah. sehingga pengawasan obat dan makanan bisa berjalan lebih efektif.

- Meningkatkan kolaborasi dan bersinergi dengan lintas sektor/OPD terkait di daerah dalam membina UMK/pelaku usaha pangan IRT, baik secara mandiri maupun terpadu dalam wadah Tim Koordinasi.

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.10 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Persentase makanan yang memenuhi syarat	84	78,57	93,54	263.515.500	263.495.380	99,99	0,94	-0,06

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi (IE) sebesar 0,94 lebih kecil daripada standar efisiensi (1) dengan tingkat efisiensi (TE) sebesar -0,06, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan program/kegiatan dengan dukungan anggaran yang optimal masih terkonsentrasi pada pencapaian rincian output (RO), namun belum sepenuhnya efektif untuk menunjang pencapaian indikator kinerja.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

- Melaksanakan kegiatan Bimtek CPPOB bagi 30 UMK Pangan Olahan tanggal 29-30 Agustus 2023
- Pengawasan prinsip CPPOB untuk produsen pangan sehingga mampu menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu.
- Pelaksanaan monitoring *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) kepada distributor dan industri pangan MD sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari besar keagamaan dan intensifikasi pengawasan bahan berbahaya dalam pangan; dan
- Penguatan pengawasan dan pembinaan kepada produsen, khususnya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Kedua hal tersebut dilakukan karena IRTP dan Produk Jajanan Anak Sekolah (PJAS) turut menyumbangkan jumlah sampel TMS. Sehingga diharapkan dengan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus kepada produsen jumlah makanan yang TMS akan semakin menurun di masa yang akan datang.
- Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan DAK non fisik POM untuk pengawasan dan pembinaan industri rumah tangga pangan.





- Pelaksanaan sampling dan pengujian makanan yang berpedoman pada Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023.
- Pengawasan penandaan makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram secara rutin di evaluasi oleh pusat dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Mataram.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Pembinaan intensif khususnya kepada produsen IRTP di NTB terkait pelabelan dan CPPOB khususnya penggunaan BTP serta higiene dan sanitasi baik secara informal maupun saat pengawasan sarana serta melakukan koordinasi ke instansi terkait untuk pembinaan lebih lanjut (produk luar NTB) dan Pemkab/Kota setempat penerima DAK agar mengoptimalkan anggaran DAK NF POM dalam melakukan pembinaan IRTP (produk lokal NTB)	Pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan IRTP, dalam proses registrasi produk mulai dari penerbitan ijin penerapan CPPOB hingga mendapatkan ijin edar	-	-	Pendampingan UMKM dan IRTP belum secara optimal dilakukan	Pendampingan UMKM dan IRTP dilakukan dengan melakukan pengawalan mulai dari tahap awal, persiapan dokumen sampai terbit ijin edar
2	Mengintensifkan advokasi dan monitoring-evaluasi kepada Pemerintah Daerah dan menggalang komitmen untuk mengawal pelaksanaan DAK Non Fisik POM sehingga pengawasan obat dan makanan bisa berjalan lebih efektif	Pelaksanaan advokasi komitmen pemda dan lintas sektor secara menyeluruh dalam pengawalan DAK Non Fisik POM	-	-	Belum kuatnya komitmen pelaksanaan advokasi dan monev lintas sektor pengawalan DAK Non Fisik	Telah dilaksanakan advokasi komitmen pemda dan lintas sektor dalam pengawalan DAK Non Fisik POM yang efektif dan efisien
3	Meningkatkan kolaborasi dan bersinergi dengan lintas sektor/OPD terkait di daerah dalam membina UMK/pelaku usaha pangan IRT, baik secara mandiri maupun terpadu dalam wadah Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Melaksanakan program pendampingan yang merangkul lintas sektor sebagai wadah bimbingan dan konsultasi teknis bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga, termasuk	-	-	Kolaborasi pembinaan pelaku usaha IRT dengan pendampingan lintas sektor masih belum optimal	Kolaborasi pembinaan pelaku usaha IRT dengan pendampingan lintas sektor menjadi lebih terkoordinir dan berjalan selaras





No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
		berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat				
4	Koordinasi dengan Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan peran petugas penyuluh/pengawas keamanan pangan yang telah mendapatkan pelatihan sebagai Penyuluh Keamanan Pangan/PKP dan <i>District Food Inspector/DFI</i> dalam melakukan pembinaan/pengawasan pangan produk IRTP di daerah.	Meningkatkan peran PKP dan DFI dalam berbagai kegiatan penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh BBPOM di Mataram	-	-	Keikutsertaan anggota PKP dan DFI dalam aktivitas penyuluhan keamanan pangan dalam lingkup kerja BBPOM di Mataram belum optimal	Keikutsertaan anggota PKP dan DFI dalam aktivitas penyuluhan keamanan pangan dalam lingkup kerja BBPOM di Mataram lebih optimal

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Laporan Kinerja Interim TW3 Tahun 2023 dan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat kurang efektif dan jauh dari target, sehingga diusulkan untuk dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2024. Target indikator kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat yang semula 86 %, disetujui diturunkan menjadi 83,81%.

3. PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat Aman dan Bermutu} = \frac{\text{Jumlah sampel Obat targeted MS}}{\text{Total sampel Obat targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- “**Obat**” mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
- “**Diperiksa**” meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian laboratorium.





Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa, produk rusak, tidak memenuhi ketentuan penandaan, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Sedangkan Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah Obat yang evaluasi penandaan memenuhi ketentuan dan pengujian (uji laboratorium) memenuhi syarat. Obat yang hasil evaluasi penandaan tidak memenuhi ketentuan (TMK), tetap dilakukan pengujian laboratorium sesuai pedoman sampling dan pengujian, tetapi hasil pengujian tidak mempengaruhi keputusan, kesimpulan akhir Obat tidak memenuhi syarat (TMS).

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023

Tabel 3.11 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	84,65	98,43 	Cukup

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023 adalah sebesar 84,65% dari target 86,00% sehingga nilai pencapaian indikator menjadi sebesar 98,43% dengan kriteria "Cukup".

Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap 430 sampel obat, narkotika/psikotropika, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik hasil sampling secara targeted dari 419 target sampel atau sebesar 102,63%. Diperoleh hasil uji 364 sampel (84,65%) memenuhi syarat (MS) dan 66 sampel (15,35%) tidak memenuhi syarat (TMS).

Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional (OT), suplemen kesehatan (SK) dan kosmetik dengan metode sampling targeted Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Obat, Obat Tradisional (OT), Suplemen Kesehatan (SK) dan Kosmetik dengan Metode Sampling Targeted Sampai Tahun 2023

Jenis Produk	Sampling			Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji						
	Target	Realisasi	Capaian (%)		MS		TMS			TMS	
					Jumlah	%	MK Label+ TMS uji	TMK Label +MS Uji	TMK Label +TMS uji	Jumlah	%
Obat	85	90	105,88	90	87	96,67	0	3	0	3	3,33
Obat Tradisional	99	101	102,02	101	70	69,31	28	1	2	31	30,69

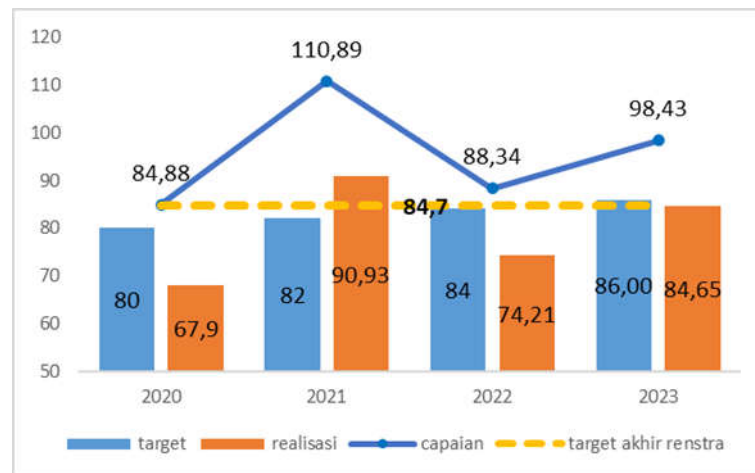




Jenis Produk	Sampling			Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji						
	Target	Realisasi	Capaian (%)		MS		TMS			TMS	
					Jumlah	%	MK Label+TMS uji	TMK Label+MS Uji	TMK Label+TMS uji	Jumlah	%
Obat Kuasi	7	7	100,00	7	7	0,00	0	0	0	0	0,00
Suplemen Kesehatan	26	26	100,00	26	26	100,00	0	0	0	0	0,00
Kosmetik	198	202	102,02	202	170	84,16	9	21	2	32	15,84
Rokok	4	4	100,00	4	4	0,00	0	0	0	0	0,00
TOTAL	419	430	102,63	430	364	84,65	37	25	4	66	15,35

Dari hasil pengawasan penandaan didapatkan hasil sebanyak 29 sampel tidak memenuhi ketentuan (TMK) terdiri dari 23 sampel Kosmetik, 3 sampel obat, dan 3 sampel Obat Tradisional. Sedangkan untuk hasil pengujian laboratorium didapatkan hasil 31 sampel Obat Tradisional TMS, 27 diantaranya TMS uji Mikrobiologi, 2 TMS Kadar Air. Pada pemeriksaan dan pengujian Kosmetik didapatkan hasil 32 sampel TMS (21 TMK Penandaan, 7 TMS Uji Mikrobiologi, TMS kadar Metanol, TMS Logam Pb, Hg, dan Merkuri masing-masing 1 sampel).

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.6. Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020


Realisasi dan persentase capaian Tahun 2023 lebih rendah daripada Tahun 2021 dan lebih tinggi daripada Tahun 2022 dan 2020. Peningkatan realisasi jika dibandingkan Tahun 2022 disebabkan terjadinya penurunan jumlah sampel TMK Penandaan sampel kosmetika dan obat tradisional. Jumlah sampel kosmetik TMK label Tahun 2022 sebanyak 59 sampel turun menjadi 21 sampel di Tahun 2023, sedangkan jumlah sampel obat tradisional TMK label Tahun 2022 sebanyak 23 sampel turun menjadi 1 sampel di Tahun 2023.



**PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA**

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi dan capaian indikator ini yang sejak Tahun 2022 – 2023 tidak pernah tercapai, dilakukan reviu dan penyesuaian target akhir periode renstra (Tahun 2024) pada dokumen reviu renstra 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target akhir periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reviu Renstra sebesar 88,0% disesuaikan menjadi 84,70% pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,0	84,65	96,11 	Akan Tercapai

Realisasi makanan yang memenuhi syarat pada Tahun 2023 (84,65%) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra (88%), telah tercapai sebesar 96,11%.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut:

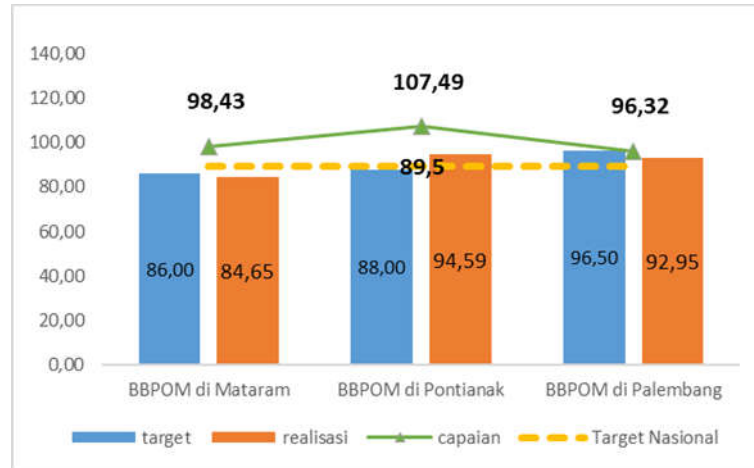
Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,70	84,65	99,94 	Akan Tercapai

Realisasi makanan yang memenuhi syarat pada Tahun 2023 (84,65%) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (84,70%), telah tercapai sebesar 99,94%. Oleh sebab itu, target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.





PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER



Gambar 3.7. Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster

Persentase capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Mataram lebih tinggi dibandingkan dengan BBPOM di Palembang, namun lebih rendah dari BBPOM di Pontianak. Hanya BBPOM di Pontianak yang telah mencapai target balai dan target nasional.

ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAU PENURUNAN KINERJA

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 84,65% sehingga tercapai sebesar 98,43% dari target 86,0%. Masih rendahnya persentase Obat yang yang aman dan bermutu disebabkan cukup tingginya TMK label sampel kosmetik dan TMS uji sampel obat tradisional. Hal ini menunjukkan kepatuhan produsen kosmetik dan obat tradisional terhadap ketentuan yang berlaku masih relative rendah.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat meningkatkan capaian persentase Obat yang aman dan bermutu, perlu ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Intensifikasi pengawasan *PreMarket* dan *Post Market* guna menjamin produsen dan distributor patuh terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku
- Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan Sampling, Pengujian, Inspeksi, dan pengawasan Penandaan.
- Koordinasi lintas sektor terus dilaksanakan sehingga pengawasan Obat dan makanan dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif





- Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium untuk meningkatkan cakupan ruang lingkup pengujian sejalan dengan perkembangan teknologi terkini.

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.13 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	84,65	98,43	524.949.000	524.737.538	99,96	0,98	-0,02

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi (IE) sebesar 0,98 lebih kecil daripada standar efisiensi (1) dengan tingkat efisiensi (TE) sebesar -0,02, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan program/kegiatan dengan dukungan anggaran yang optimal masih terkonsentrasi pada pencapaian rincian output (RO), namun belum sepenuhnya efektif untuk menunjang pencapaian indikator kinerja.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

- Melaksanakan Bimbingan Teknis Kontrak Produksi dan Pelabelan Kosmetik yang Benar kepada Badan Usaha Pemilik Nomor Notifikasi Kosmetik (BUPN), Industri Kosmetik dan Distributor Kosmetik di Pulau Lombok
- Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Cara Distribusi Yang Baik (CDOB) di Sarana milik Pemerintah dan Pedagang Besar Farmasi (PBF)
- Melakukan koordinasi antara Bidang Pemeriksaan dan Bidang Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal Tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan
- Pengawasan penerapan CDOB pada rantai distribusi obat untuk menjamin keamanan, mutu dan khasiat agar tetap terjaga di tangan konsumen dan mencegah penyaluran obat dengan menjaga agar pengadaan obat hanya dari distributor resmi untuk menghindari obat ilegal/palsu ke PBF. Selain itu, penyimpanan obat dapat dikendalikan sehingga stabilitas obat terjaga, dan tidak terjadi penyaluran obat ke jalur ilegal yang memicu penyalahgunaan obat, serta meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana pelayanan dan distribusi obat tentang Cara Distribusi Obat yang Baik.
- Pengawasan prinsip cara distribusi kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang baik agar tetap terjaga keamanan, mutu, khasiat, termasuk kesesuaian penandaannya. Pengawasan dilakukan baik di tingkat distributor maupun sarana ritel modern dan tradisional.





- Meningkatkan pelaksanaan monitoring Corrective Action Preventive Action (CAPA) dari sarana pelayanan dan distribusi obat sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Melakukan pengawasan yang disertai dengan law enforcement, dengan melakukan penindakan secara Pro Justitia terhadap peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat.
- Pelaksanaan sampling dan pengujian yang berpedoman pada Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023.
- Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram secara rutin di evaluasi oleh pusat dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Mataram.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Triwulan III Tahun 2023, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Mengadakan Bimtek CPKB khususnya sanitasi dan hygiene kepada UMKM produsen kosmetik	Sudah melakukan Bimtek CPKB kepada pelaku usaha kosmetik, namun belum berdampak secara signifikan. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah meningkat namun belum mencapai target dengan realisasi 84,65% (target 86%) sehingga capaian 98,43%, meningkat dari triwulan III (95,20%)	-	-	Realisasi indikator kinerja sebesar 81,87%	Terjadi peningkatan realisasi menjadi 84,65% meskipun target 2023 belum tercapai

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Penyelenggaraan Bimtek Penandaan Kosmetik dan Obat Tradisional bagi pelaku usaha/ UMK kosmetik yang dilaksanakan secara terpadu Bersama Direktorat terkait.	Telah diselenggarakan Bimtek Penandaan Kosmetik bagi pelaku usaha/ UMK kosmetik pada bulan Juli 2023	-	-	Pengetahuan peserta pelaku usaha/ UMK kosmetik terkait label masih rendah	Pengetahuan peserta pelaku usaha/ UMK kosmetik di NTB terkait label meningkat





No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
2	Pendampingan pelaksanaan perbaikan temuan hasil pemeriksaan untuk menjamin produsen dan distributor patuh terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku.	Telah dilaksanakan pendampingan perbaikan temuan hasil pemeriksaan /CAPA kepada produsen dan distributor obat, obat tradisional, dan kosmetik	-	-	Perbaikan temuan/penyampaian CAPA dari pelaku usaha waktunya relatif lama	Perbaikan temuan/penyampaian CAPA dari pelaku usaha semakin cepat

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Laporan Kinerja Interim TW3 Tahun 2023 dan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat kurang efektif dan jauh dari target, sehingga diusulkan untuk dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2024. Target indikator kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat yang semula 86 %, disetujui diturunkan menjadi 83,81%.

4. PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan Aman dan Bermutu} = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan targeted MS}}{\text{Total sampel Makanan targeted yang diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

Diuji meliputi pengujian laboratorium

Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan adalah Pangan atau Kemasan Pangan yang disampling secara *targeted* dan dilakukan pengujian (uji laboratorium) sesuai parameter uji wajib dalam pedoman sampling dengan hasil memenuhi syarat.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Sedangkan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan adalah Pangan atau Kemasan Pangan yang dilakukan pengujian (uji laboratorium) sesuai parameter uji wajib dalam pedoman sampling dan pengujian dengan hasil memenuhi syarat.





PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023

Tabel 3.14 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00	78,90	103,81	Sangat baik

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023 sebesar 78,90% dari target 76,00% sehingga nilai pencapaian indikator menjadi sebesar 103,81% dengan kriteria “sangat baik”.

Target indikator ini Tahun 2023 mengalami perubahan yaitu target pada dokumen reuiu Renstra Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 sebesar 74,0% berubah menjadi 76,0% pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Perubahan target ini sebagai tindak lanjut dari hasil monev terhadap realisasi dan persentase capaian Tahun 2022 yang sangat tinggi dan telah melampaui 120%.

Pada Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap 109 sampel makanan yang disampling secara “targeted” dengan hasil 86 sampel (78,90%) memenuhi syarat (MS) dan 23 sampel (21,10%) tidak memenuhi syarat (TMS). Sejumlah sampel yang tidak memenuhi syarat mutu uji kimia adalah sebanyak 5 sampel meliputi 2 parameter uji Kadar Pemanis Siklambat TMS, 2 parameter uji Rasio Pemanis TMS, dan 1 parameter uji pewarna Tartrazin TMS. Sedangkan sampel yang Tidak Memenuhi Syarat mutu uji mikrobiologi adalah sebanyak 18 parameter uji meliputi 5 parameter uji Angka Lempeng Total & Angka Kapang Khamir TMS, 10 parameter uji *Echerichia coli* & MPN *Coliform* TMSI, dan 1 parameter uji *Bacillus cereus* TMS, serta 2 parameter uji DNA Porcine Positif.

Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel makanan dengan metode sampling targeted sampai Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

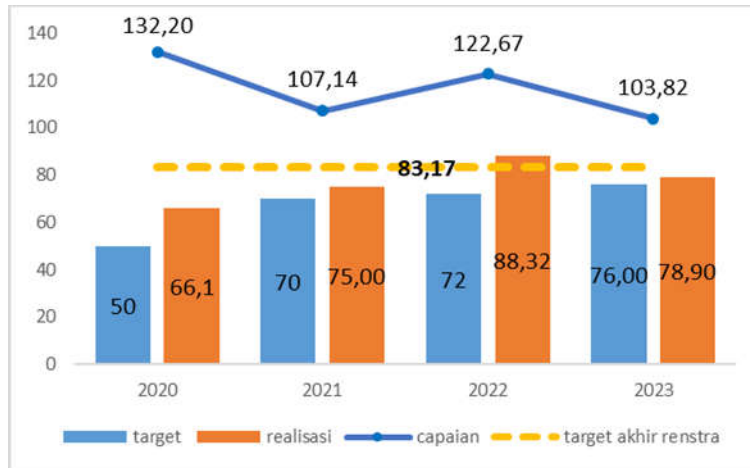
Tabel 3.15 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Makanan dengan Metode Sampling Targeted Sampai Tahun 2023

Sampling		Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji			Total TMS	
Target	Realisasi		MS		TMS	Jumlah	%
			Jumlah	%			
109	109	109	86	78,90	23	23	21,10





PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.8. Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Realisasi pada Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan Tahun 2022, namun lebih tinggi dari Tahun 2021 dan 2020, sedangkan persentase capaian indikator kinerja ini Tahun 2023 terendah dalam rentang Tahun 2020-2023.

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi indikator ini Tahun 2023 yang telah melampaui target akhir periode renstra pada dokumen reuiu renstra 2020-2024 dilakukan reuiu dan penyesuaian target akhir periode renstra (Tahun 2024) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target akhir periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reuiu Renstra sebesar 76,0% disesuaikan menjadi 83,17% pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reuiu Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,0	78,90	103,82 ▲	Melampaui

Realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Tahun 2023 (78,90%) jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reuiu Renstra (76,0%), telah tercapai sebesar 103,82%.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



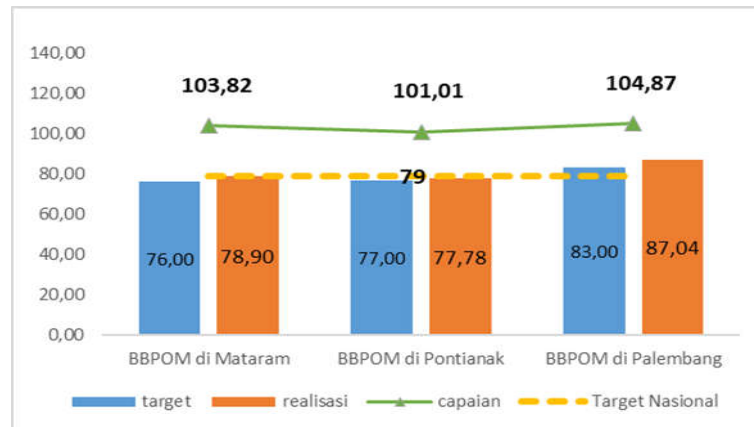
PENUTUP

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,17	78,90	94,87 ▲	Akan Tercapai

Realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Tahun 2023 (78,90%) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (83,17%), telah tercapai sebesar 94,87%. Oleh sebab itu, target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER



Gambar 3.9. Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Realisasi dan persentase BBPOM di Mataram lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Pontianak dan lebih rendah dari BBPOM di Palembang. Ketiga BBPOM telah mencapai target masing-masing, namun hanya BBPOM di Palembang yang telah mencapai target nasional Tahun 2023.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu pada Tahun 2023 yang cukup tinggi (103,81%) disebabkan antara lain relatif tingginya kepatuhan produsen dan distributor makanan terhadap ketentuan yang berlaku, hal itu didukung oleh adanya intervensi pengawasan distributor makanan yang dilakukan secara optimal yaitu dengan pendekatan kepada pelaku usaha dalam berbagai kesempatan antara lain pada saat pengawasan sarana dan pertemuan dengan pelaku usaha.





REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat terus meningkatkan capaian persentase makanan aman dan bermutu, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Mengintensifkan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan menggalang komitmen untuk mengawal pelaksanaan DAK Non Fisik POM sehingga pengawasan obat dan makanan bisa berjalan lebih efektif
- Meningkatkan kolaborasi dan bersinergi dengan lintas sektor/OPD terkait di daerah dalam membina UMK/pelaku usaha pangan IRT, baik secara mandiri maupun terpadu dalam wadah Tim Koordinasi
- Mengoptimalkan peran petugas penyuluh/pengawas keamanan pangan yang telah mendapatkan pelatihan sebagai Penyuluh Keamanan Pangan/PKP dan *District Food Inspector/ DFI* dalam melakukan pembinaan/pengawasan pangan produk IRT di daerah.

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.16 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	78,90	103,81	174.983.000	174.912.513	99,96	1,04	0,04

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi (IE) sebesar 1,04 lebih besar daripada standar efisiensi (1) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi (TE) sebesar 0,04. Hal ini mencerminkan anggaran tersebut telah digunakan secara optimal dalam melaksanakan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

- Kegiatan Bimtek CPPOB bagi 30 UMK Pangan Olahan tanggal 29-30 Agustus 2023
- Pengawasan prinsip CPPOB untuk produsen pangan khususnya IRTTP sehingga mampu menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu.
- Meningkatkan pelaksanaan monitoring *Corrective Action Preventive Action (CAPA)* kepada industri pangan MD dan juga distributor pangan
- Pelaksanaan *sampling* dan pengujian yang berpedoman pada Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023





- Intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari besar keagamaan dan intensifikasi pengawasan bahan berbahaya dalam pangan.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Mengintensifkan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan menggalang komitmen untuk mengawal pelaksanaan DAK Non Fisik POM sehingga pengawasan obat dan makanan bisa berjalan lebih efektif	Pelaksanaan advokasi komitmen pemda dan lintas sektor secara menyeluruh dalam pengawalan DAK Non Fisik POM	-	-	Belum kuatnya komitmen pelaksanaan advokasi dan money lintas sektor pengawalan DAK Non Fisik	Telah dilaksanakan advokasi komitmen pemda dan lintas sektor dalam pengawalan DAK Non Fisik POM yang efektif dan efisien
2	Meningkatkan kolaborasi dan bersinergi dengan lintas sektor/OPD terkait di daerah dalam membina UMK/pelaku usaha pangan IRT, baik secara mandiri maupun terpadu dalam wadah Tim Koordinasi.	Melaksanakan program pendampingan yang merangkul lintas sektor sebagai wadah bimbingan dan konsultasi teknis bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga, termasuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat	-	-	Kolaborasi pembinaan pelaku usaha IRT dengan pendampingan lintas sektor masih belum optimal	Kolaborasi pembinaan pelaku usaha IRT dengan pendampingan lintas sektor menjadi lebih terkoordinir dan berjalan selaras
3	Mengoptimalkan peran petugas penyuluh/pengawas keamanan pangan yang telah mendapatkan pelatihan sebagai Penyuluh Keamanan Pangan/PKP dan District Food Inspector/ DFI dalam melakukan pembinaan/pengawasan pangan produk IRT di daerah	Meningkatkan peran PKP dan DFI dalam berbagai kegiatan penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh BBPOM di Mataram	-	-	Keikutsertaan anggota PKP dan DFI dalam aktivitas penyuluhan keamanan pangan dalam lingkup kerja BBPOM di Mataram belum optimal	Keikutsertaan anggota PKP dan DFI dalam aktivitas penyuluhan keamanan pangan dalam lingkup kerja BBPOM di Mataram lebih optimal

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja interim TW 4 tahun 2022, realisasi Indikator Kinerja Persentase makanan yang aman dan bermutu jauh melebihi target (capaiannya >120%), sehingga





diusulkan untuk dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2023. Target indikator kinerja yang semula 74 %, disetujui dinaikkan menjadi 76%.

Di tahun 2023, berdasarkan Laporan Kinerja Interim TW3 Tahun 2023 dan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat telah dapat melampaui target tahun 2024, sehingga diusulkan untuk dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2024. Target indikator kinerja yang semula pada renstra sebesar 76 %, disetujui dinaikkan menjadi 83,17%.

5. PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Pangan Fortifikasi MS}}{\text{Total sampel Pangan Fortifikasi yang diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

Diuji meliputi pengujian laboratorium.

Kriteria Pangan Fortifikasi Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat terhadap uji parameter Fortifikan. Sedangkan Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat adalah Pangan Fortifikasi yang dilakukan pengujian (uji laboratorium) sesuai parameter uji wajib dalam pedoman sampling dengan hasil pengujian memenuhi syarat terhadap uji parameter Fortifikan.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023

Tabel 3.17 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	85,00	85,09	100,10	Sangat baik

Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 sebesar 85,09% telah melebihi target sebesar 85,0% sehingga nilai pencapaian indikator menjadi sebesar 100,10% dengan kriteria “sangat baik”.

Target indikator ini Tahun 2023 mengalami perubahan yaitu target pada dokumen reuiu Renstra Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 sebesar 82,0% berubah menjadi 85,0% pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Perubahan target ini sebagai tindak lanjut dari hasil money terhadap realisasi dan persentase capaian Tahun 2022 yang sangat tinggi dan telah melampaui 120%.





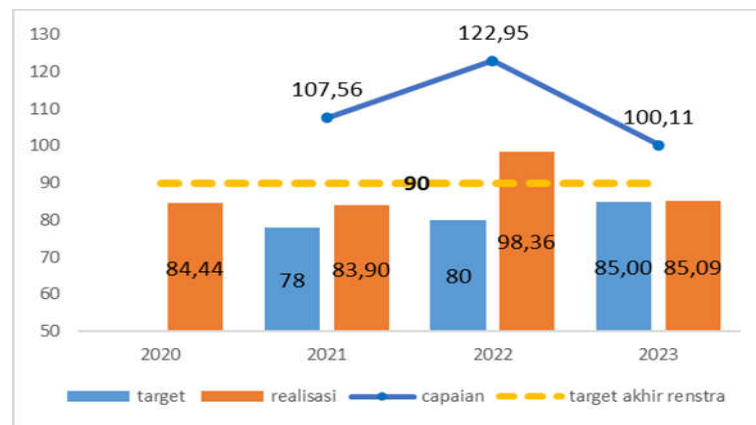
Pada Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap 114 sampel Pangan Fortifikasi disampling secara "targeted" dengan hasil 97 sampel (85,09%) memenuhi syarat (MS) dan 17 sampel (14,91%) tidak memenuhi syarat (TMS). Sampel fortifikasi dengan hasil TMS didominasi oleh sampel garam sebanyak 16 sampel dengan parameter uji KIO₃ dan 1 sampel minyak goreng dengan parameter uji kadar vitamin A.

Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel pangan fortifikasi Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.18 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Pangan Fortifikasi Tahun 2023

Sampling		Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji			Total TMS	
Target	Realisasi		MS		TMS	Jumlah	%
		Jumlah	%				
107	114	114	97	85,09	17	17	14,91

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.10. Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Realisasi kinerja pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2021, namun lebih rendah dibandingkan Tahun 2022.

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi indikator ini Tahun 2023 yang telah melampaui target akhir periode renstra pada dokumen rewiu renstra 2020-2024 dilakukan rewiu dan penyesuaian target akhir periode renstra (Tahun 2024) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target akhir





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA




AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP


periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reviu Renstra sebesar 84,0% disesuaikan menjadi 90,0% pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	84,0	85,09	101,30 	Tercapai

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada Tahun 2023 (85,09%) jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra (84,0%), telah tercapai sebesar 101,30%.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut:

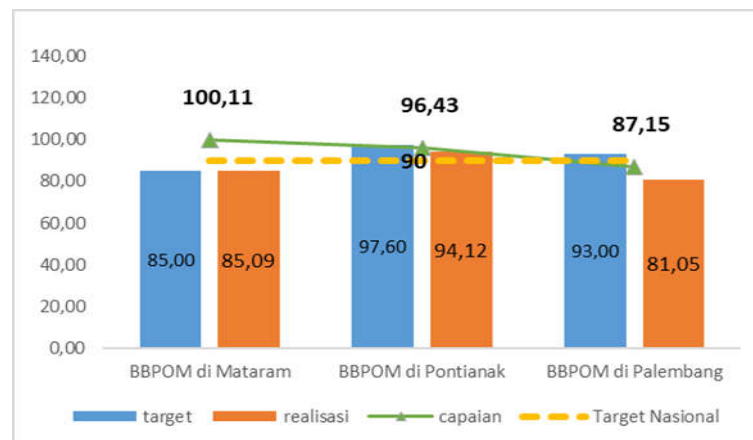
Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90,0	85,09	94,54 	Akan Tercapai

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada Tahun 2023 (85,09%) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (90,0%), telah tercapai sebesar 94,54%. Oleh sebab itu, target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.





PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER



Gambar 3.11. Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster

Persentase capaian BBPOM di Mataram adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palembang. Hanya BBPOM di Pontianak yang telah mencapai target nasional.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Capaian persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 telah mencapai target. Hal ini menunjukkan kepatuhan produsen dan distributor pangan yang relative tinggi terhadap ketentuan yang berlaku. Hal itu didukung oleh adanya intervensi pengawasan penerapan CPPOB pada produsen pangan fortifikasi dan pengawasan distributor makanan yang dilakukan secara optimal, melalui pendekatan kepada pelaku usaha baik pada saat pengawasan sarana maupun pertemuan dengan pelaku usaha.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat terus meningkatkan capaian persentase makanan aman dan bermutu, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan menggalang komitmen stakeholder agar pengawasan obat dan makanan bisa berjalan lebih efektif
- Melakukan kolaborasi dan bersinergi dengan lintas sektor/OPD terkait di daerah dalam membina pelaku usaha yang memproduksi pangan fortifikasi.





ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.19 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	85	85,09	100,10	51.182.000	51.163.236	99,96	1,001	0,001

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi (IE) sebesar 1,00 lebih besar dari standar efisiensi (1) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi (TE) sebesar 0,001. Hal ini mencerminkan anggaran tersebut telah digunakan secara optimal dalam melaksanakan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

- Melaksanakan kegiatan Bimtek CPPOB bagi 30 UMK Pangan Olahan tanggal 29-30 Agustus 2023
- Meningkatkan pelaksanaan *monitoring Corrective Action Preventive Action (CAPA)* kepada distributor dan industri pangan fortifikasi sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Pelaksanaan sampling dan pengujian yang berpedoman pada Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023.
- Intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari besar keagamaan
- Pendampingan sertifikasi melalui inovasi Gemilang Pro UMKM yaitu Pendampingan langsung oleh petugas BBPOM di Mataram secara Intensif dan Proaktif kepada pelaku usaha olahan pangan yang berkomitmen yang dilakukan secara daring dan luring dalam proses pendaftaran produk.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Meningkatkan pelaksanaan monitoring <i>Corrective Action Preventive Action (CAPA)</i> kepada distributor dan industri pangan	Pendampingan CAPA secara konsisten	-	-	Penyelesaian CAPA oleh pelaku usaha belum optimal	Penyelesaian CAPA oleh pelaku usaha menjadi lebih terarah karena didampingi oleh petugas dalam penyelesaiannya.





No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
	fortifikasi sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.					
2	Pelaksanaan sampling dan pengujian yang berpedoman pada Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023	Sampling dan pengujian dilaksanakan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023	-	-	Adanya sampel yang di sampling dan di uji belum sesuai dengan pedoman sampling, serta jumlah nya belum sesuai dengan target yang di rencanakan	Tercapainya jumlah sampel yang di sampling sesuai dengan pedoman sampling 2023 dan target yang telah direncanakan
3	Pelibatan lintas sektor melalui program inovasi Gemilang Pro-UMKM (Gerakan Lintas Lembaga Mengawal Daya Saing Produk UMKM) yaitu Pendampingan langsung oleh petugas BBPOM di Mataram dan stakeholder terkait secara Intensif dan Proaktif kepada pelaku usaha garam beryodium yang berkomitmen dalam proses pendaftaran produk	Pendampingan kepada pelaku usaha telah melibatkan lintas sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota	-	-	Pelaksanaan pendampingan belum mengikutsertakan stakeholder dan belum dilakukan secara intensif	Pelaksanaan program Gemilang Pro-UMKM secara terjadwal kepada pelaku usaha garam beryodium, terutama tindak lanjut terhadap usaha garam krosok

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja interim TW 4 tahun 2022, realisasi Indikator Kinerja Persentase pangan fortifikasi jauh melebihi target (capaiannya >120%), sehingga diusulkan untuk dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2023. Target indikator kinerja yang semula 82 %, disetujui dinaikkan menjadi 85%.

Di tahun 2023, berdasarkan Laporan Kinerja Interim TW3 Tahun 2023 dan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat telah dapat melampaui target renstra tahun 2024, sehingga diusulkan untuk dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2024. Target indikator kinerja yang semula pada renstra sebesar 84 %, dinaikkan menjadi 90%.





SASARAN STRATEGIS - 2

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis kedua hanya berasal dari satu indikator, yaitu **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Mataram.**

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Konsep pengukuran indeks kesadaran masyarakat yaitu:

- Kesadaran (*Awareness*), bertujuan untuk menggali sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “pengetahuan” dari masyarakat.
- Ketertarikan (*Interest*), bertujuan untuk menggali ketertarikan masyarakat untuk tahu dan mempelajari tentang keamanan produk. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “sikap” dari masyarakat.
- Keinginan (*Desire*), bertujuan untuk menggali keinginan masyarakat untuk mendapatkan produk yang aman. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “sikap” dari masyarakat.
- Tindakan (*Action*), bertujuan untuk menggali tindakan masyarakat saat memilih dan mengonsumsi produk Obat dan Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “perilaku” dari masyarakat.
- Indikator ini untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui KIE dan pengawasan Obat dan Makanan untuk mencapai kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan aman dan bermutu.



**PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, %CAPAIAN TAHUN 2023**

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20 Target, realisasi dan capaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Mataram

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Mataram.	82,00	79,81	97,33	Cukup

Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Mataram Tahun 2023 sebesar 79,81 belum mencapai target 82,00 sehingga nilai pencapaian indikator menjadi 97,33% dengan kriteria "Cukup".

Nilai indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan metodologi teknologi *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis online dan offline. Monitoring data secara real-time dilakukan melalui dashboard survei: surveiskkm.pom.go.id dan pengumpulan data dengan teknik wawancara tatap muka terhadap target responden berusia 17-65 Tahun berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga (DSRT) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Aspek atau komponen yang dinilai pada indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu adalah pengetahuan, sikap, dan perilaku.

Penilaian aspek pengetahuan yaitu untuk melihat sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan); penilaian aspek sikap untuk melihat bagaimana sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat dan Makanan palsu; dan penilaian aspek perilaku untuk melihat bagaimana perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Variabel pembentuk pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa.

Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu telah dilaksanakan sejak Tahun 2020. Hasil dari survei ini dan rekomendasinya digunakan untuk peningkatan kinerja dalam melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan pengawasan produk Obat dan Makanan.





PENDAHULUAN



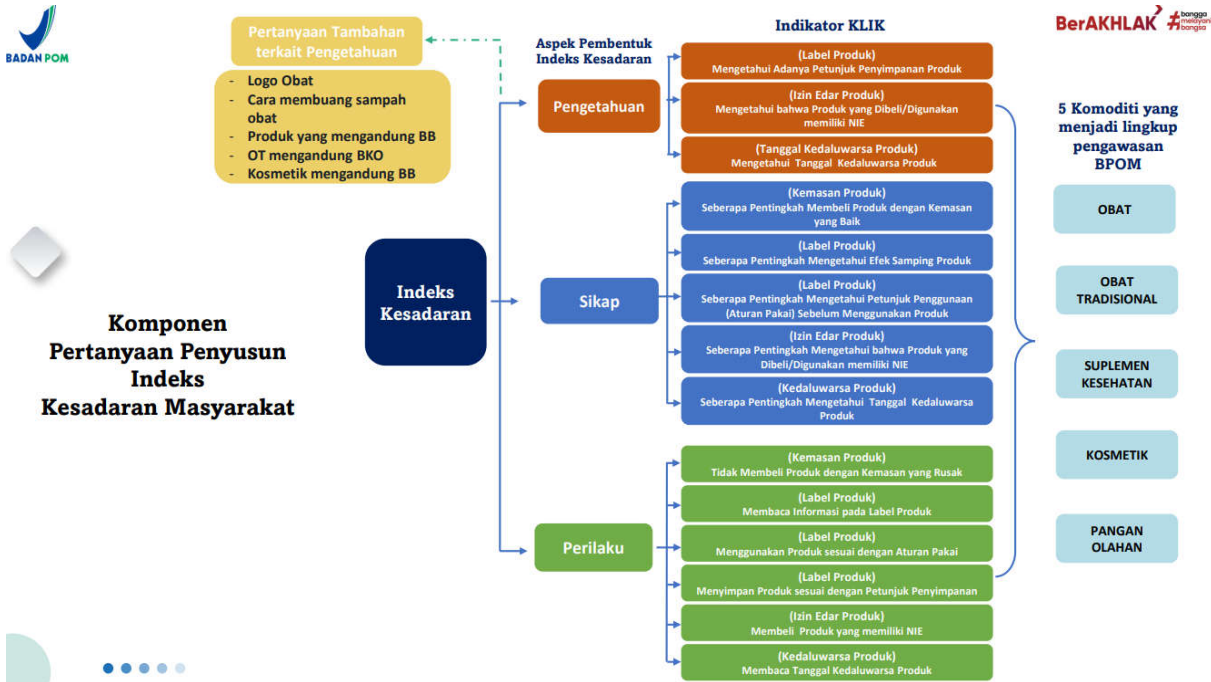
PERENCANAAN KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA



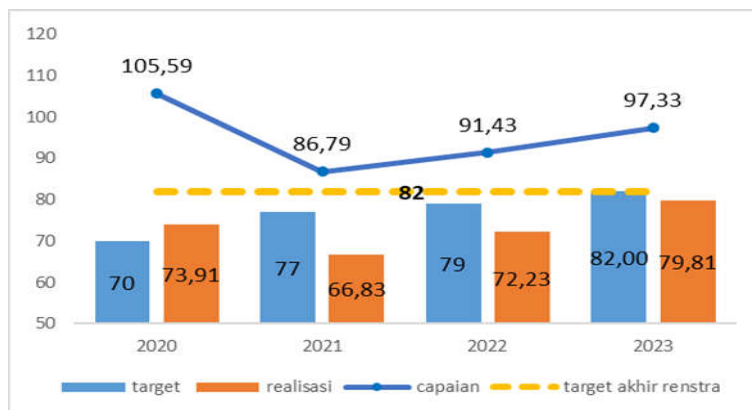
PENUTUP



Gambar 3.12. Indikator Pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat

Nilai untuk komponen pengetahuan sebesar 81,32, komponen perilaku sebesar 71,28, dan komponen sikap sebesar 86,84. Hasil pengukuran indeks per komoditi adalah 1) Obat 82,25; 2) Obat Tradisional 76,55; 3) Suplemen Kesehatan 78,32; 4). Kosmetik 80,13; dan 5) Pangan Olahan 80,55. Indeks kesadaran masyarakat per komoditi seluruhnya berada pada kategori Baik.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.13. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020





Realisasi dan persentase capaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu pada Tahun 2023 terus meningkat bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian Tahun 2022, 2021 dan Tahun 2020.

PERBANDINGAN REALISASI 2023 TAHUN 2022 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi dan capaian indikator ini yang sejak Tahun 2021 – 2023 tidak pernah tercapai, dilakukan reviu dan penyesuaian target akhir periode renstra (Tahun 2024) pada dokumen reviu renstra 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target akhir periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reviu Renstra sebesar 85,0% disesuaikan menjadi 82,0% pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%CAPAIAN	Kategori
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Mataram.	85,0	79,81	93,89 	Akan Tercapai

Realisasi Persentase Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Mataram pada Tahun 2023 (79,81) jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra (85,0), telah tercapai sebesar 93,89%.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut:

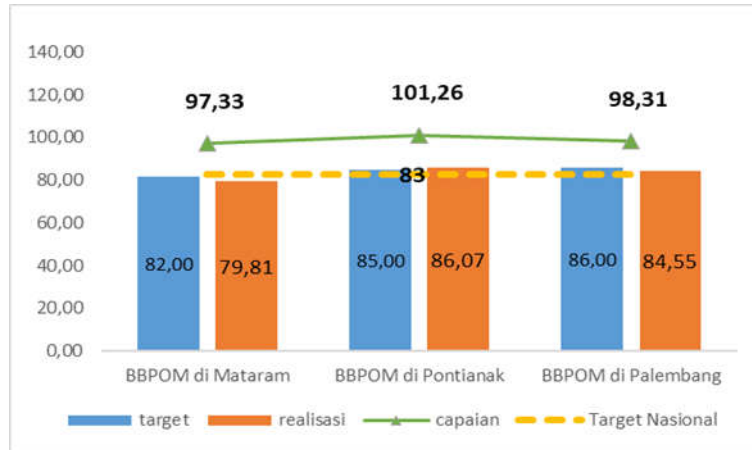
Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%CAPAIAN	Kategori
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Mataram.	82,0	79,81	97,33 	Akan Tercapai

Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Mataram t pada Tahun 2023 (79,81) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (82,0), telah tercapai sebesar 97,33%. Oleh sebab itu, target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.





PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER



Gambar 3.14. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster

Realisasi dan persentase capaian BBPOM di Mataram lebih rendah dibandingkan BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palembang. Realisasi BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palembang telah melampaui target nasional.

ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAU PENURUNAN KINERJA

BBPOM di Mataram belum mencapai target indeks kesadaran masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram antara lain disebabkan oleh:

- Akses dan intensitas pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap peredaran produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu melalui berbagai media (media sosial, media online, media elektronik, media cetak, maupun secara langsung) belum dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda terutama yang tinggal di pedesaan secara efektif, dimana mayoritas penduduk Provinsi NTB bertempat tinggal di pelosok desa yang memiliki keterbatasan terhadap infrastruktur dan akses informasi.
- Belum optimalnya penerapan strategi pelaksanaan KIE sesuai pedoman strategi KIE Obat dan Makanan dengan mempertimbangkan hasil survei kesadaran masyarakat, baik dari sisi komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat maupun demografi. Selain itu, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi NTB Tahun 2022 yang masih cukup rendah yaitu sebesar 68,65 dan berada pada urutan 29 dari 34 provinsi di Indonesia sangat berkorelasi dengan rendahnya capaian indikator ini.





REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat meningkatkan capaian indeks kesadaran masyarakat (*Awareness Index*) terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram, selanjutnya perlu dilakukan:

- Meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor dan organisasi kemasyarakatan untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarkan informasi keamanan Obat dan Makanan dengan melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, Kader desa), media, dan influencer yang memiliki pengaruh dan jangkauan luas di kalangan masyarakat.
- Menguatkan kemitraan dengan Saka POM Gerakan Pramuka dan Perguruan Tinggi di NTB dalam kegiatan pengabdian masyarakat melalui KKN mahasiswa untuk mengedukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja agar dapat menjadi peer educator untuk menyebarkan informasi keamanan Obat dan Makanan melalui pesan cekKLIK.
- Memfokuskan tujuan dan tema/materi/pesan KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audience seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah.
- Penyampaian KIE dengan memperhatikan prioritas kebutuhan informasi masyarakat, media yang tepat dan banyak diakses oleh masyarakat disesuaikan dengan target/kelompok sasaran penerima KIE (media televisi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, kemasan produk dengan cara pemberian informasi adanya Nomor Izin Edar (NIE) atau 2D Barcode pada kemasan produk Obat dan Makanan, media sosial yang disesuaikan dengan usia dan platform, serta media luar ruang).
- Mengembangkan program inovatif dalam pemberian KIE Obat dan Makanan.

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.21 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82	79,81	97,33	237.904.200	236.823.279	99,55	0,98	-0,02

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi (IE) sebesar 0,98 lebih standar efisiensi (1) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah tidak efisien dengan tingkat efisiensi (TE) sebesar -0,02. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan program/kegiatan dengan dukungan anggaran yang tersedia masih terkonsentrasi pada pencapaian rincian output (RO), namun belum sepenuhnya efektif untuk menunjang pencapaian indikator kinerja.



**ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA**

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Mataram adalah:

- Publikasi tentang Obat dan Makanan melalui Media (Talkshow, Dialog, Iklan Layanan Masyarakat, dan Berita di Media cetak, media elektronik, media online maupun media sosial).
- KIE melalui Penyebaran Informasi, Sosialisasi Obat dan Makanan, KIE Bersama TP PKK Provinsi NTB, menjadi narasumber pada kegiatan yang dilakukan oleh lintas sektor, program perkuliahan, dan praktek kerja lapangan (PKL) mahasiswa dari Universitas di NTB,
- Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dengan penambahan komunitas yang baru dari setiap desa yang telah dilakukan intervensi di Tahun sebelumnya. Dengan adanya penambahan jumlah kader pangan aman ini diharapkan dapat semakin meningkatkan sosialisasi kesadaran masyarakat dalam memilih dan mengolah makanan yang aman untuk dikonsumsi.
- Penyebaran informasi melalui kegiatan Mobil Laboratorium Keliling dan kegiatan Intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
- Melaksanakan perintisan pembentukan Saka POM Gerakan Pramuka NTB dan pemberian KIE Obat dan Makanan kepada Saka POM untuk menjadi kader Obat dan Makanan,
- Melaksanakan pemberian KIE Obat dan Makanan kepada Mahasiswa Perguruan Tinggi di NTB sebagai pembekalan untuk kegiatan pengabdian masyarakat melalui KKN mahasiswa untuk mengedukasi kelompok/komunitas di pedesaan melalui pesan cekKLIK.
- Inovasi KIE melalui optimalisasi Kader Keluarga Sadar Pangan Aman (GASPAMAN) yang telah terbentuk untuk memberikan informasi terkait keamanan pangan kepada komunitas terkecil yaitu keluarga.
- Inovasi Manis (Minggu Asik Ngobrol Informatif dan Solutif) memberikan layanan informasi Obat dan Makanan serta pengujian rapid test kit bahan berbahaya pada pangan secara gratis.
- Penyebaran informasi melalui pameran produk ilegal hasil pengawasan Obat dan Makanan bersinergi dengan kegiatan pengawasan GKPD.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Menambahkan variasi KIE media sosial antara lain menggunakan platform TikTok	-	Melakukan kerjasama dengan <i>content creator</i> lokal dalam rangka	TW 3 2024	-	-





No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
	bekerjasama dengan <i>content creator</i> .		meningkatkan minat peserta KIE melalui media sosial.			
2	Sinergi Inovasi GASPAMAN (Keluarga Sadar Pangan Aman) dengan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat.	Telah dilakukan Sinergi Inovasi GASPAMAN (Keluarga Sadar Pangan Aman) dengan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat dengan penambahan kader Gaspaman	-	-	Nilai indeks kesadaran masyarakat untuk komponen pangan olahan = 70,86	Nilai indeks kesadaran masyarakat untuk komponen pangan olahan = 80,56
3	Membentuk kader keamanan Obat dan Makanan dari unsur penyuluh agama yang disinergikan dengan Program Desa Pangan Aman.	Membentuk kader keamanan Obat dan Makanan dari unsur penyuluh agama yang disinergikan dengan Program Desa Pangan Aman.	-	-	Akses pemberian informasi dan pemberdayaan masyarakat relatif terbatas	Akses pemberian informasi dan pemberdayaan masyarakat lebih luas
4	Membentuk SAKA POM sebagai kader keamanan Obat dan Makanan.	Telah dibentuk SAKA POM Kawrda/Kwarcab Parmuka NTB sebagai kader keamanan Obat dan Makanan.	-	-	Akses pemberian informasi dan pemberdayaan masyarakat relatif terbatas	Akses pemberian informasi dan pemberdayaan masyarakat lebih luas

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dan jauh dari target, serta telah dua tahun berturut-turut tidak mencapai target, sehingga diusulkan untuk dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2024. Target indikator kinerja yang semula pada renstra sebesar 85, disetujui diturunkan menjadi 82.



**SASARAN STRATEGIS - 3****Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram**

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 3 indikator kinerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pencapaian sasaran strategis ketiga ini.

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Sasaran Strategi 3 BBPOM di Mataram Tahun 2023

NO SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,8	97,80	108,91	sangat baik
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,75	79,61	101,09	sangat baik
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	94	98,09	104,35	sangat baik

Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja serta analisis capaian masing – masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis 3 di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan mencakup desk, bimbingan teknis, sosialisasi, dan pendampingan. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor. Aspek pengukuran dalam survei ini adalah: a. Aspek *Tangible* (T) b. Aspek *Reliability* (R) c. Aspek *Assurance* (A) d. Aspek *Responsiveness* (Re) e. Aspek *Empathy* (E).



**PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023****Tabel 3.23** Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,80	97,80	108,91	Sangat Baik

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sampai dengan Tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 97,80 dari target 89,80 sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 108,91% dengan kriteria "sangat baik".

Nilai indeks ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan Tahun 2023 secara online menggunakan aplikasi yang terhubung dengan BPOM Operation Center (BOC) saat dilakukan kegiatan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha. Data yang disurvei untuk BBPOM di Mataram berasal dari 17 Kegiatan bimbingan dan pembinaan (KBP) yaitu 17 kegiatan/layanan yang diberikan kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan, dengan total responden sebanyak 186 orang.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020

Realisasi nilai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada Tahun 2020 sebesar 86,48 dengan persentase capaian terhadap target sebesar 104,19%. Kemudian pada Tahun 2021 mengalami penurunan realisasi nilai indeks menjadi 85,10 dengan capaian 97,15%. Selanjutnya mengalami tren peningkatan pada Tahun 2022 dengan realisasi indeks sebesar 90,30 dengan capaian 101,80% dan berlanjut pada 2023 dengan realisasi indeks sebesar 97,8 dengan capaian sebesar 108,91. Terdapat peningkatan signifikan pada capaian nilai indeks Tahun 2023 yang disebabkan oleh peningkatan nilai dari keseluruhan aspek penilaian terutama pada aspek kemudahan akses terhadap layanan, kemudahan memperoleh informasi, dan mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perijinan.





PENDAHULUAN



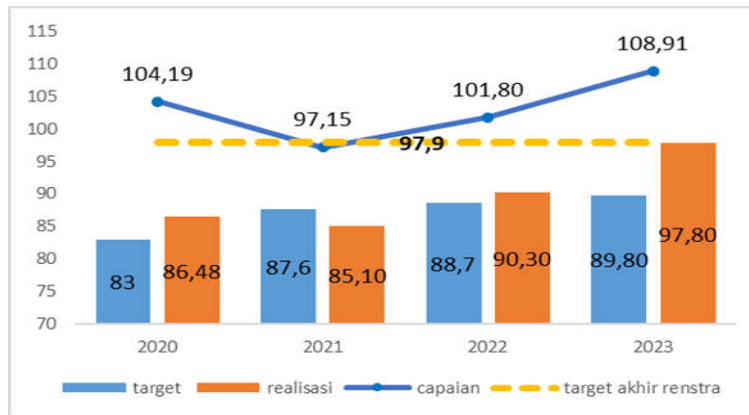
PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP



Gambar 3.15. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Tabel 3.24 Perbandingan Nilai IKEPU Per Unsur Tahun 2023 dan 2022

Unsur Pelayanan		2022	2023
P1	Kemudahan memperoleh informasi atau undangan	3,80	3,94
P2	Kemudahan menjangkau lokasi untuk layanan tatap muka langsung ATAU kemudahan akses terhadap layanan yang menggunakan telepon/internet	3,91	3,95
P3	Kemanfaatan materi	3,66	3,95
P4	Materi mudah dipahami	3,65	3,88
P5	Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perijinan/sertifikasi/registrasi	3,74	3,92
P6	Kecukupan waktu	3,39	3,83
P7	Narasumber/petugas menguasai materi	3,76	3,94
P8	Tanggapan (respons) narasumber/petugas/panitia terhadap pertanyaan/permasalahan/kritik/saran	3,78	3,96
P9	Keramahan petugas/panitia/penyelenggara	3,73	3,95
P10	Fasilitas pendukung (toilet, tempat ibadah, alat peraga, platform/aplikasi, fitur bantuan untuk layanan online)	3,70	3,92

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi indikator ini Tahun 2023 yang telah melampaui target akhir periode renstra pada dokumen reuiu renstra 2020-2024 dilakukan reuiu dan penyesuaian target akhir periode renstra (Tahun 2024) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target akhir periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reuiu Renstra sebesar 90,9 disesuaikan menjadi 97,90 pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reuiu Renstra sebagai berikut:





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,9	97,80	107,59 ▲	Melampaui

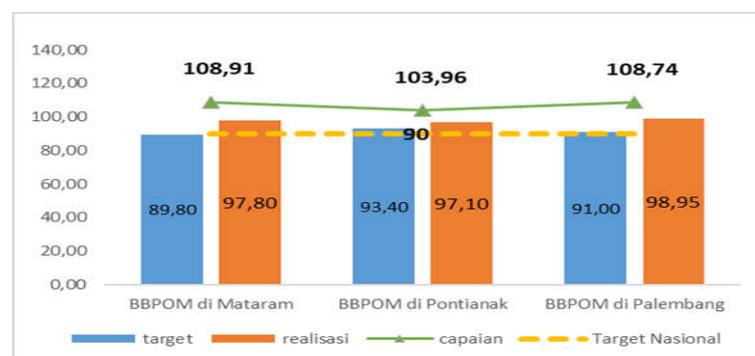
Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada Tahun 2023 (97,80) jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra (90,9), telah tercapai sebesar 107,59%.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97,90	97,80	99,90 ▲	Akan Tercapai

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada Tahun 2023 (97,80) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (97,90%), telah tercapai sebesar 99,9%. Oleh sebab itu, target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLAS TER



Gambar 3.16. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster

Persentase capaian BBPOM di Mataram pada Tahun 2023 dibandingkan dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster merupakan yang tertinggi. Realisasi ketiga BBPOM telah melampaui target nasional.





ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Realisasi nilai indeks Tahun 2023 sebesar 97,80 dapat melewati target sebesar 89,80 dilakukan dengan menambah jumlah Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP) menjadi 17 KBP dari sebelumnya hanya 7 KBP pada Tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 13 KBP dilakukan mandiri dan 4 KBP dilakukan bersama unit lain. Pelaksanaan KBP dilakukan di masing-masing triwulan dengan topik sesuai perencanaan yang telah dibuat untuk setiap komoditi meliputi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan Olahan. KBP tidak hanya dilakukan kepada pelaku usaha yang dalam proses pendampingan penerbitan izin namun juga dilakukan kepada pelaku usaha yang telah memiliki izin.

KBP yang dilakukan pada Tahun 2023 dapat dikelompokkan menjadi kegiatan Desk (5 KBP), Pendampingan (4 KBP), Bimbingan Teknis (6 KBP) dan Sosialisasi (2 KBP). Nilai indeks untuk masing-masing kelompok yaitu sosialisasi sebesar 99,25, bimbingan teknis sebesar 98,36, desk sebesar 97,92 dan terkecil pendampingan sebesar 96,24. Berdasarkan nilai indeks kelompok KBP tersebut dapat disimpulkan jika kegiatan yang manfaatnya dirasakan langsung setelah pelaksanaan akan mendapatkan nilai tinggi. Pelaku usaha mendapatkan pengetahuan baru pada sosialisasi yang dilakukan yaitu kegiatan terkait Eksportasi Pangan Olahan dan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga pelaku usaha dapat mengetahui persyaratan yang diperlukan sebelum melakukan pengajuan agar mengurangi kemungkinan pengajuan permohonan dikembalikan atau ditolak. Oleh sebab itu, pelaku usaha meminta agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat dilakukan lebih sering lagi.

Pada kegiatan desk yang dilakukan meliputi kegiatan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan yang dilakukan dua kali, Desk Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) hasil audit untuk sarana produksi obat tradisional dan sarana produksi kosmetik serta sarana distribusi ONPP memungkinkan pelaku usaha untuk memperoleh hasil secara langsung seperti terbitnya Nomor Izin Edar Pangan Olahan dan status temuan yang dapat diselesaikan (*closed*). Untuk TPTP yang status temuannya telah selesai maka pelaku usaha akan mendapatkan rekomendasi untuk memperoleh sertifikat sesuai permohonan yang diajukan.

Untuk kegiatan bimbingan teknis, berbagai kegiatan telah dilakukan seperti Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi UMK yang dilakukan dua kali, Teknologi Proses Panas bagi UMK, Pelaku Usaha Kontrak Produksi Kosmetik, Cara Distribusi Obat yang Baik di Sarana Distribusi ONPP dan Pengendalian Resistensi Antimikroba. Bimbingan teknis ini diberikan untuk meningkatkan pengetahuan bagi pelaku usaha maupun sebagai penyegaran terhadap peraturan baru. Selain itu, juga dilakukan workshop untuk menyusun dokumen persyaratan pada kegiatan CPPOB sehingga pelaku usaha dapat langsung mengajukan permohonan.

Sedangkan untuk kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memenuhi standar bagi UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik memiliki nilai terkecil. Hal ini disebabkan pengukuran





indeks dilakukan setelah pelaku usaha menyusun dokumen lengkap untuk pengajuan permohonan pemenuhan standar yang berlangsung antara 3 – 5 bulan sesuai tahapan pendampingan UMKM. Pengukuran pada akhir masa pendampingan memberikan nilai rendah pada aspek Kecukupan Waktu, dalam hal ini pelaku usaha menghitung durasi waktu dari awal didampingi hingga selesai menyusun dokumen secara lengkap sebelum mengajukan permohonan yang dianggap terlalu lama.

Selain itu, untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis perlu dilakukan pengaturan ulang terhadap jadwal kegiatan sehingga materi pembelajaran tidak padat dengan tugas workshop yang harus dikumpulkan. Demikian pula dengan alat peraga bantu seperti brosur atau banner yang dapat disertakan sebagai kelengkapan materi untuk memudahkan pelaku usaha dalam melihat alur proses dan persyaratan secara ringkas.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat meningkatkan capaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, selanjutnya perlu dilakukan:

1. Meningkatkan frekuensi pelaksanaan kegiatan sosialisasi melalui pertemuan tatap muka agar informasi persyaratan pengajuan izin lebih banyak tersebar di pelaku usaha.
2. Melakukan pengaturan kembali terhadap jadwal yang disusun untuk kegiatan bimbingan teknis sehingga pelaku usaha memiliki waktu yang memadai untuk menyusun tugas.
3. Melengkapi alat peraga dengan brosur atau banner yang memudahkan pelaku usaha dalam menyediakan informasi alur dan persyaratan secara ringkas.
4. Melakukan pengukuran nilai indeks untuk pendampingan UMKM agar memenuhi Standar pada masing-masing tahapan proses dimana manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut dirasakan langsung oleh pelaku usaha.

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.25 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,8	97,80	108,91	55.945.000	55.793.100	99,73	1,09	0,09

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi (IE) sebesar 1,09 lebih tinggi dari standar efisiensi (1) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi (TE) sebesar 0,09. Hal ini mencerminkan anggaran tersebut telah digunakan secara optimal dalam melaksanakan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator.



**ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA**

Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan didukung oleh adanya program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.26 Hasil Survei Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP) Tahun 2023

No	Kegiatan	Jenis	Pelaksanaan	Metode	Nilai
1	Desk CAPA terhadap Hasil Audit Sertifikasi BBPOM di Mataram untuk Obat Tradisional	D	Mandiri	Tatap Muka	98,89
2	Pendampingan UMKM Pangan Olahan	P	Mandiri	Tatap Muka	99,27
3	Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan kolaborasi dengan BBPOM di Mataram 1	D	Kerja Sama Unit Lain	Tatap Muka	95,53
4	Desk CAPA terhadap Hasil Audit Sertifikasi BBPOM di Mataram untuk Kosmetik	D	Mandiri	Tatap Muka	96,92
5	Bimbingan Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik di Sarana Distribusi Obat Milik Pemerintah dan Pedagang Besar Farmasi	B	Mandiri	Tatap Muka	97,16
6	Desk CAPA terhadap Hasil Audit Sertifikasi BBPOM di Mataram untuk Distribusi ONPP (PBF)	D	Mandiri	Tatap Muka	100
7	Jemput Bola Ekspor Pangan Olahan	S	Kerja Sama Unit Lain	Tatap Muka	98,5
8	Bimbingan Teknis Kontrak Produksi dan Pelabelan Kosmetik yang Benar	B	Mandiri	Tatap Muka	100
9	Bimbingan Teknis Teknologi Proses Panas bagi UMK Pangan Olahan	B	Mandiri	Tatap Muka	98,42
10	Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi UMK Pangan Olahan	B	Mandiri	Tatap Muka	96,34
11	Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi UMK Pangan Olahan	B	Mandiri	Tatap Muka	98,25
12	Sosialisasi dan Desk Registrasi Pangan Olahan Kolaborasi dengan Balai Besar POM di Mataram	D	Kerja Sama Unit Lain	Tatap Muka	98,25
13	Bimbingan Teknis Notifikasi Kosmetik dan Pendampingan UMKM OT Berbasis Kearifan Lokal	P	Kerja Sama Unit Lain	Tatap Muka	90,45
14	Pendampingan UMKM Kosmetik	P	Mandiri	Tatap Muka	95,25
15	Pendampingan UMKM Obat Tradisional	P	Mandiri	Tatap Muka	100
16	Pelayanan Prima Pre-Audit Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi UMK Pangan Olahan	S	Mandiri	Tatap Muka	100
17	FGD Langkah Strategis Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba Di Provinsi NTB	B	Mandiri	Tatap Muka	100
TOTAL				97,84	186

Hasil survei pada masing-masing KBP memiliki sebaran hasil yang variative dengan rentang nilai 90,45-100. KBP dengan metode hybrid membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan





karena petugas dapat memberikan contoh langsung baik terkait denah bangunan maupun dokumen cara produksi yang baik sehingga pelaku usaha dapat memperoleh rekomendasi dari Balai Besar POM di Mataram. Selanjutnya, petugas juga melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha tersebut selama proses registrasi produk hingga terbit izin edarnya.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Memperbaiki kurikulum materi bimbingan teknis agar lebih mudah dipahami dan dimanfaatkan dalam proses pendaftaran produk.	Telah dilakukan penyusunan kurikulum untuk kegiatan sosialisasi / bimbingan teknis / desk sesuai dengan topik dan kebutuhan pelaku usaha yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kegiatan	-	-	Penilaian terhadap aspek kemanfaatan materi sebesar 3,66 dan aspek materi mudah dipahami sebesar 3,65	Penilaian terhadap aspek kemanfaatan materi menjadi 3,96 dan aspek materi mudah dipahami sebesar 3,88

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan telah dapat melampaui target renstra tahun 2024, sehingga diusulkan untuk dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2024. Target indikator kinerja yang semula pada renstra sebesar 90,9, dinaikkan menjadi 97,90.

2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan adalah ukuran kepuasan masyarakat atas kebijakan dan program dari BPOM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk: Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan. Indeks Kepuasan masyarakat diukur melalui 4 indikator pembentuk kepuasan mengacu pada konsep Service Quality dari Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990) yang terdiri dari *Service Quality* (ServQual) meliputi *Reliability*, *Assurance*, *Empathy*, dan yang mengacu *Responsiveness* pada proses pengawasan Obat dan Makanan.

Adapun variable pengukuran yang digunakan, yaitu:

- Kepuasan masyarakat atas upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan (misalnya dengan melakukan operasi pasar, operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa).





- Kepuasan masyarakat atas tindakan yang dilakukan BPOM terhadap produk berbahaya bagi kesehatan yang beredar di masyarakat (misalnya dengan menarik produk yang berbahaya atau kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat).
- Kepuasan masyarakat atas kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan (misalnya dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu produk).
- Kepuasan masyarakat atas perhatian BPOM terhadap jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat (misalnya dengan pemberian nomor izin edar dan pengujian produk).

Keempat variabel di atas menggunakan skala pengukuran 1 sampai 5 dengan kategori: Sangat Tidak Puas (1), Tidak Puas (2), Puas (3), Sangat Puas (4), dan Biasa Saja (5), kemudian dikonversi menjadi skala indek kesadaran dan kepuasan skala 0 – 100 dengan kategori: Tidak Baik/Tidak Puas ($\leq 45,00$); Kurang Baik/Kurang Puas (45,01 – 60,00); Cukup Baik/Cukup Puas (60,01 – 75,00); Baik/Puas (75,01 – 90,00); Sangat Baik/Sangat Puas ($\geq 90,01$). Analisis data dilakukan melalui perhitungan Indeks, Analisis Deskriptif, Analisis Lanjutan (Anova dan Korelasi), Analisis SEM dan Analisis Kualitatif.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023

Capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.27 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,75	79,61	101,09	Sangat Baik

Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan sampai Tahun 2023 sudah mencapai target yaitu sebesar 79,61 dari target 78,75 sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 101,09% dengan kriteria “sangat baik”.

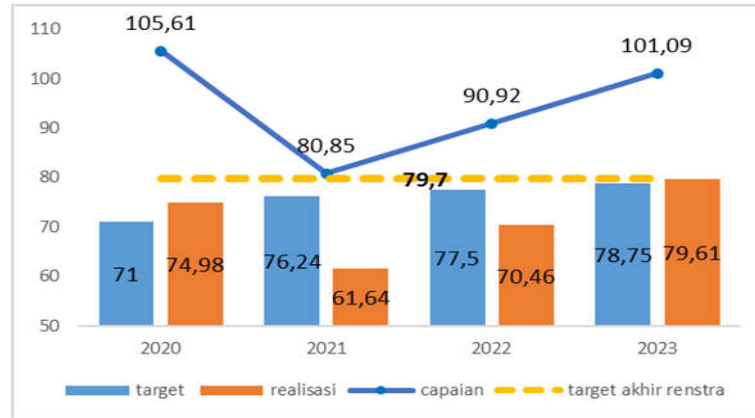
Sumber Data untuk menghasilkan nilai pencapaian indikator ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari responden melalui wawancara tatap muka (*face to face interview*) dengan menggunakan kuesioner dalam format *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI). Sementara itu data sekunder adalah data olahan atau data telah dipublikasikan secara resmi yang diperoleh dari media, unit kerja di lingkungan BPOM, UPT, dokumentasi dan arsip lembaga terkait lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian





(contohnya: data realisasi pelaksanaan KIE Tahun 2020, 2021 dan 2022, hasil survei efektivitas KIE, dsb).

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.17. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan pada Tahun 2023 terus meningkat sejak Tahun 2021, setelah sempat turun dari Tahun 2020.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan telah dilaksanakan sejak Tahun 2020. Hasil dari survei ini dan rekomendasinya digunakan unit kerja BBPOM di Mataram untuk peningkatan kinerja dalam melakukan Pengawasan Obat dan Makanan.

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi dan capaian indikator ini yang sejak Tahun 2021 – 2022 tidak pernah tercapai, dilakukan reviu dan penyesuaian target akhir periode renstra (Tahun 2024) pada dokumen reviu renstra 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target akhir periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reviu Renstra sebesar 80,01% disesuaikan menjadi 79,70% pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,01	79,61	99,50 ▲	Akan Tercapai





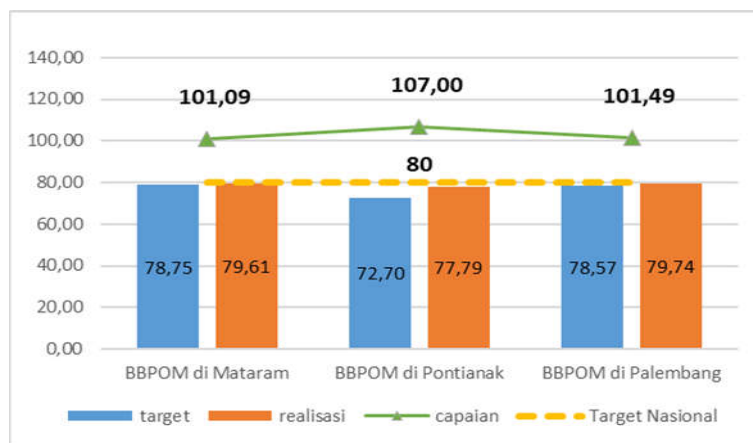
Realisasi makanan yang memenuhi syarat pada Tahun 2023 (79,61) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra (80,01), telah tercapai sebesar 99,50%.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	79,70	79,61	99,89 	Akan Tercapai

Realisasi makanan yang memenuhi syarat pada Tahun 2023 (79,61) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (79,70), telah tercapai sebesar 99,89%. Oleh sebab itu, target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER



Gambar 3.18. Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster

Realisasi BBPOM di Mataram lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Palembang dan lebih rendah dari BBPOM di Pontianak. Ketiga BBPOM telah mencapai target masing-masing, namun tidak satupun yang mencapai target nasional.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Pencapaian Balai Besar POM di Mataram yang telah melampaui target indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada Tahun 2023 tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu:

- Publikasi berbagai kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM dan UPT BBPOM di Mataram yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti razia Obat





dan Makanan yang kadaluarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal melalui berbagai media, termasuk media luar ruang seperti poster dan pamflet telah terlaksana cukup intensif,

- Pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan melalui berbagai media promosi yang mempunyai cakupan luas dan dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat telah meningkat aksesnya,
- Sosialisasi dan Publikasi Inovasi – inovasi yang dibuat oleh BBPOM di Mataram (GAS PAMAN, Si JELAPP, SILAPOL, dan Gemilang Pro UMKM) untuk meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan,
- Sosialisasi dan Publikasi Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman, Pasar Aman berbasis komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PJAS semakin intensif melalui Media sosial, media elektronik, media cetak, maupun secara langsung.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat meningkatkan capaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, selanjutnya perlu dilakukan:

- Meningkatkan kegiatan *public relation* dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti razia Obat dan Makanan yang kadaluarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal melalui berbagai media, termasuk media luar ruang seperti poster dan pamflet.
- Meningkatkan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan melalui berbagai media promosi yang mempunyai cakupan luas dan dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat.
- Meningkatkan engagement dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial termasuk menjawab pertanyaan, memberikan klarifikasi, dan mengatasi kekhawatiran yang mungkin muncul dalam komentar atau pesan langsung.
- Memanfaatkan fitur-fitur media sosial live streaming untuk sesi tanya jawab tentang keamanan produk secara langsung, atau menyusun konten yang fokus pada cerita yang menarik dan relevan yang dapat beredar lebih luas.

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.28 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,75	79,61	101,09	237.904.200	236.823.279	99,55	1,02	0,02





Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi (IE) sebesar 1,02 lebih tinggi dari standar efisiensi (1) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi (TE) sebesar 0,02. Hal ini mencerminkan anggaran tersebut telah digunakan secara optimal dalam melaksanakan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Program/ kegiatan yang mendukung capaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada Tahun 2023 yaitu:

- KIE melalui Media (Talkshow, Dialog, Iklan Layanan Masyarakat, dan Berita di Media cetak, Media elektronik, Media Online dan Media Sosial), melalui Penyebaran Informasi, Sosialisasi Obat dan Makanan, KIE Bersama TP PKK Provinsi NTB, dan KIE di pasar tradisional dan ritel modern.
- Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan (Program Desa Pangan Aman, Pasar Aman berbasis komunitas dan Program Sekolah PJAS Aman) dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di bidang keamanan pangan, serta Pembinaan UMKM untuk meningkatkan daya saing produk.
- Melakukan pengawasan yang disertai dengan law enforcement, dengan melakukan penindakan secara Pro Justitia terhadap peredaran obat dan penyalahgunaan Obat dan Makanan ilegal.
- Forum Komunikasi Publik dengan melibatkan unsur penyelenggara layanan, pengguna layanan, tokoh masyarakat (DPRD dan tokoh agama), OPD terkait, ahli/praktisi (akademisi/ahli/praktisi dari universitas, inkubator bisnis, organisasi masyarakat sipil dan media cetak/eletronik untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas pelayanan publik.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Meningkatkan kegiatan <i>public relation</i> dan publikasi (liputan media massa) berbagai aktivitas BBPOM di Mataram yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BBPOM di Mataram melindungi masyarakat.	Peningkatan intensitas keikutsertaan rekan media dalam berbagai aktivitas publik dan release dari BBPOM di Mataram	-	-	Keikutsertaan rekan media dalam berbagai aktivitas publik BBPOM di Mataram belum optimal	Keikutsertaan rekan media dalam berbagai aktivitas publik BBPOM di Mataram lebih optimal
2	Penyebaran informasi	Menggunakan	-	-	Belum	Telah dilakukan



**PENDAHULUAN****PERENCANAAN
KINERJA****AKUNTABILITAS
KINERJA****PENUTUP**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
	dengan strategi pemilihan media yang digunakan perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah urban-rural, tingkat Pendidikan dan pekerjaan masyarakat.	spanduk, gimmick promosi di area pelayanan publik tertentu sebagai sarana penyampaian informasi non elektronik. Adanya pelaksanaan improvisasi dengan bahasa daerah juga dilakukan guna mempermudah penyampaian KIE ke masyarakat			melakukan improvisasi penggunaan bahasa daerah dalam penyampaian KIE	improvisasi penggunaan bahasa daerah dalam penyampaian KIE ke masyarakat.
3	Mengintensifkan program dengan mengencarkan penggunaan tagline Cek KLIK, cek BPOM dan BPOM Mobile melalui berbagai media.	Pelaksanaan KIE melalui media luar ruang dan media sosial telah dilaksanakan terkait produk obat, kosmetik, suplemen Kesehatan dan pangan melalui berbagai media promosi termasuk intensifikasi CEK KLIK di hari raya keagamaan	-	-	Media promosi terbatas secara tatap muka / langsung	Keberagaman media yang digunakan sebagai media promosi dengan telah ditetapkan agenda setting selama 1 Tahun berjalan
4	Sosialisasi dengan melibatkan influencer, perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi kemasyarakatan (Pramuka, PKK, IPEMI, Salimah, Aisyiah).	Pelaksanaan sosialisasi dan intensifikasi pengawasan pangan takjil Ramadhan 2023 dengan melibatkan anggota Gerakan Pramuka di kabupaten/kota dan SAKA POM	-	-	Pelaksanaan n program melibatkan anggota Gerakan pramuka terbatas	Anggota Gerakan pramuka diberdayakan dalam pelaksanaan program mendukung terbentuknya SAKA POM
5	Meningkatkan penggunaan media sosial dengan penyampaian pesan yang disesuaikan dengan usia dan platform media sosial, contohnya penggunaan media sosial Tik Tok untuk usia remaja, penggunaan media sosial Instagram untuk usia produktif, penggunaan media sosial Facebook untuk ibu rumah tangga dan lainnya.	Menambahkan publikasi informasi terkini di semua media sosial telah dilakukan secara rutin dan dikoordinir oleh tim publikasi media sosial BBPOM di Mataram	-	-	Publikasi informasi terkini belum ditambahkan di media sosial	Publikasi informasi terkini telah ditambahkan di media sosial IG, Youtube, Facebook dan Subsite dalam bentuk infografis dan video





INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan jauh dari target akhir periode renstra dan sejak tahun 2021-2022 target tidak pernah tercapai, sehingga diusulkan untuk dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2024. Target indikator kinerja yang semula pada renstra sebesar 80,01 ,disetujui diturunkan menjadi 79,70.

3. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BBPOM DI MATARAM

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada PermenPAN No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat pada BBPOM di Mataram dilakukan terhadap 3 jenis layanan yaitu layanan pengujian dan layanan informasi dan pengaduan serta layanan sertifikasi.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2023

Capaian Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Mataram pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.29 Target, realisasi dan capaian Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Mataram

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Mataram	94,0	98,09	104,35	Sangat Baik

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Mataram sampai Tahun 2023 adalah sebesar 98,09 dari target 94,0 sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 104,35% dengan kriteria "sangat baik".

Nilai indeks ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan Tahun 2023 secara online menggunakan aplikasi yang terhubung dengan aplikasi SAPA APIP di Inspektorat Utama BPOM.



**Tabel 3.30** Nilai SKM Per Unsur Pelayanan Tahun 2023

Unsur Pelayanan		2023
U1	Persyaratan	97,54
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	97,92
U3	Waktu Penyelesaian	97,60
U4	Biaya/Tarif	97,92
U5	Produk, Spesifikasi, Jenis Pelayanan	97,92
U6	Kompetensi Pelaksana	98,30
U7	Perilaku Pelaksana	99,43
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	98,30
U9	Sarana dan Prasarana	97,92
TOTAL/RATA-RATA		98,09

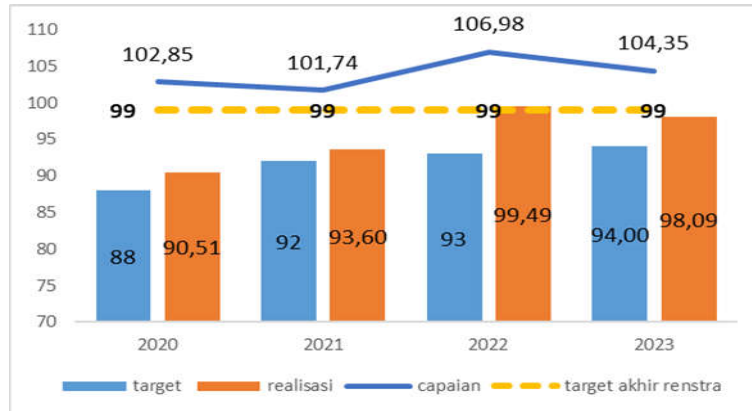
Tabel 3.31 Nilai SKM Per Unsur Pelayanan berdasarkan Jenis Layanan 2023

Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Layanan
Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	87,04	90,74	89,51	92,59	96,30	96,30	98,15	98,15	92,59	93,48
Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,67	100,00	99,07
Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan kosmetika yang Baik Golongan A dan B	83,33	83,33	94,44	100,00	83,33	100,00	100,00	83,33	83,33	90,12
Pengujian Obat dan Makanan	98,61	98,61	97,69	97,22	97,22	97,92	99,31	97,92	97,92	98,05
Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan	99,02	99,02	99,02	99,02	99,02	98,69	99,67	99,02	99,02	99,06
Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap	100,00	100,00	94,44	100,00	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	97,53





PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.19 Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BBPOM di Mataram Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Realisasi dan persentase capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Mataram Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 dan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 dan 2020.

Perbandingan nilai SKM per masing-masing unsur antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.32 Nilai SKM Per Unsur Pelayanan Tahun 2021, 2022 dan 2023

Unsur Pelayanan		2021	2022	2023
U1	Persyaratan	93,41	99,24	97,54
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	93,41	99,24	97,92
U3	Waktu Penyelesaian	91,60	98,48	97,60
U4	Biaya/Tarif	93,80	100,0	97,92
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	91,86	100,0	97,92
U6	Kompetensi Pelaksana	94,19	99,24	99,30
U7	Perilaku Pelaksana	95,74	100,0	99,43
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	95,35	99,24	98,30
U9	Sarana dan Prasarana	93,02	100,00	97,92
		93,60	99,49	98,09

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi indikator ini Tahun 2023 yang telah melampaui target akhir periode renstra pada dokumen reviu renstra 2020-2024 dilakukan reviu dan penyesuaian target akhir periode renstra (Tahun 2024) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target akhir





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reviu Renstra sebesar 95,0% disesuaikan menjadi 99,0% pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Mataram	95,0	98,09	103,25 ▲	Melampaui

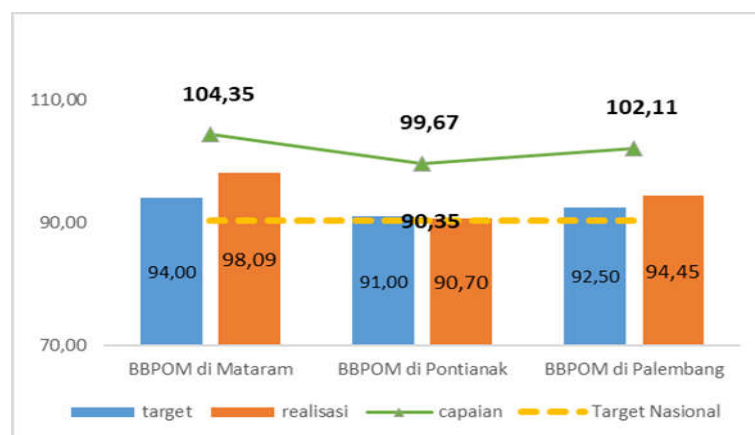
Realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Tahun 2023 (98,09%) jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra (95,0), telah terlampaui sebesar 103,25%.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Mataram	99	98,09	99,08 ▲	Akan Tercapai

Realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Tahun 2023 (98,09%) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (99,0%), telah tercapai sebesar 99,08%. Oleh sebab itu, target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER



Gambar 3.20. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik pada Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster





Realisasi dan persentase capaian BBPOM di Mataram paling tinggi dibandingkan dengan kedua BBPOM lain dalam satu kluster. Ketiga BBPOM telah melampaui target nasional Tahun 2023.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Pencapaian Balai Besar POM di Mataram yang telah melampaui target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Mataram Tahun 2023 tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung yaitu:

- Inovasi – inovasi terkait pelayanan publik yang digagas dan dijalankan oleh seluruh pegawai BBPOM di Mataram (SIJELAPP, SILAPOL, GEMILANG Pro UMKM, Gaspaman) guna mewujudkan pelayanan publik yang prima.
- Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik
- peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik
- Selalu berusaha menindaklanjuti setiap masukan pelanggan baik secara langsung maupun dari hasil survei sebelumnya

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat terus meningkatkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Mataram, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil konsultasi pelanggan melalui media cetak maupun media elektronik (subsite).
- Menyediakan standar pelayanan publik sesuai dengan regulasi dan kondisi terkini seperti menggunakan huruf braille dan bahasa isyarat untuk pelanggan disabilitas dengan memperhatikan semua masukan dan saran masyarakat pengguna layanan melalui Forum Konsultasi Publik

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.33 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Mataram

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Mataram	94	98,09	104,35	237.904.200	236.823.279	99,55	1,05	0,05

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi (IE) sebesar 1,05 lebih tinggi dari standar efisiensi (1) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi (TE) sebesar 0,05. Hal ini mencerminkan anggaran tersebut telah digunakan secara optimal dalam melaksanakan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator.



**ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA**

- Peningkatan sarana pelayanan publik antara lain melalui penyediaan PC Informasi dan alat bantu berupa kaca mata baca.
- Pengembangan inovasi melalui peningkatan aplikasi pelayanan publik SI JELAPP ver.2 dengan fitur (Pesan otomatis kepada pelanggan melalui whatsapp, download Laporan hasil uji, dan lain-lain).
- Penambahan akses layanan informasi dan pengaduan melalui fitur whatsapp di dalam subsite mataram.pom.go.id
- Peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui pelatihan pelayanan publik.
- Implementasi inovasi GEMILANG Pro UMKM dan GASPAMAN
- Implementasi inovasi ODS (*One Day Service*) dan OHS (*One Hour Service*) untuk pengujian sampel barang bukti kasus narkoba.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil konsultasi pelanggan melalui media fisik maupun media elektronik (subsite).	Hasil konsultasi pelanggan telah didokumentasikan dan dipublikasikan	-	-	Hasil konsultasi pelanggan tidak dapat diakses oleh masyarakat luas	Hasil konsultasi pelanggan dapat diakses oleh masyarakat luas melalui subsite
2	Menyediakan standar pelayanan publik menggunakan huruf braille untuk pelanggan disabilitas	Telah tersedia standar pelayanan publik menggunakan huruf braille	-	-	Pelanggan tuna netra tidak mendapatkan informasi standar pelayanan publik	Pelanggan tuna netra bisa mendapatkan informasi standar pelayanan publik

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Mataram telah dapat melampaui target renstra tahun 2024, sehingga diusulkan untuk dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2024. Target indikator kinerja yang semula pada renstra sebesar 95, dinaikkan menjadi 99.



**SASARAN STRATEGIS - 4****Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram**

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 7 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis keempat ini. Capaian ketujuh indikator kinerja pada Sasaran Strategis 4 di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.34 Capaian Kinerja Sasaran Strategi 4 BBPOM di Mataram Tahun 2023

NO SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Mataram	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,2	99,91	108,91	sangat baik
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88,5	99,92	116,36	sangat baik
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	120,00	sangat baik
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	99,67	107,33	sangat baik
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,1	99,95	111,85	sangat baik
		6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Mataram	4,95	98,18	110,45	sangat baik
		7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	97	96,22	118,14	sangat baik





Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja serta analisis capaian masing – masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis 4 di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023

Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.35 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	99,11	108,91	Sangat Baik

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 99,11% dari target 91,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 108,91% dengan Kategori “sangat baik”.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Mataram diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

- A Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%
- B Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%
- C Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%
- D Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%.

Rincian tindak lanjut hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan berdasarkan jenis keputusan/rekomendasi yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



**Tabel 3.36** Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Jenis Keputusan/Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindaklanjut
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT	396	396
			100,00%
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT	85	85
			100,00%
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	140	135
			96,43%
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	1	1
			100,00%
TOTAL		622	617
			99,11%

Berdasarkan tabel di atas, rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh BBPOM di Mataram yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat atau UPT lain paling rendah realisasinya dikarenakan tidak semua rekomendasi yang disampaikan oleh BBPOM di Mataram kepada UPT lain/BBPOM ditindaklanjuti khususnya untuk tindak lanjut hasil pengawasan label dan iklan produk pangan olahan. Secara umum untuk rekomendasi lainnya seluruhnya telah ditindaklanjuti, hal ini menunjukkan semakin baiknya respon BBPOM di Mataram dalam melakukan tindak lanjut pengawasan obat dan makanan di daerah.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2020 hingga 2023 dan diharapkan pada Tahun 2024 dapat mencapai target akhir periode Renstra yaitu 99.2%. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini:





PENDAHULUAN



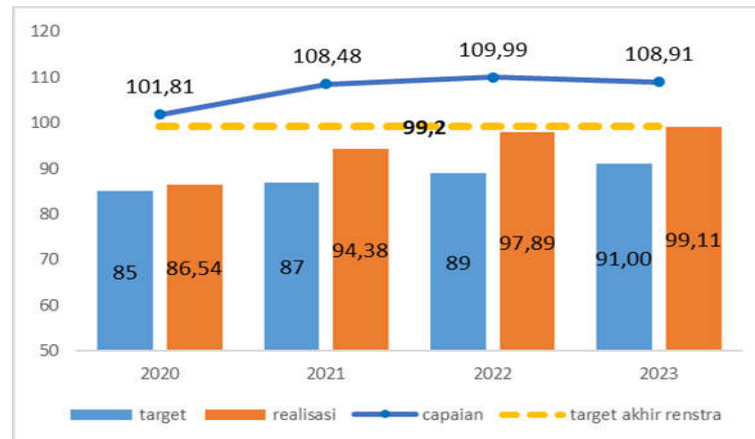
PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP



Gambar 3.21. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan selama 4 Tahun berturut-turut mengalami kenaikan. Realisasi Tahun 2023 bila dibandingkan dengan Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 1,22%. dengan target yang meningkat sebesar 2% di Tahun 2023. Kenaikan tersebut merupakan kontribusi dari komitmen BBPOM di Mataram dalam menindaklanjuti setiap keputusan hasil inspeksi baik yang dilaksanakan oleh Balai, rekomendasi dari Pusat maupun UPT lainnya dan Pemerintah Daerah.

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi indikator ini Tahun 2023 yang telah melampaui target akhir periode renstra pada dokumen reuiu renstra 2020-2024 dilakukan reuiu dan penyesuaian target akhir periode renstra (Tahun 2024) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target akhir periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reuiu Renstra sebesar 93,0% disesuaikan menjadi 99,2% pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reuiu Renstra sebagai berikut:


Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,0	99,11	106,57	Melampaui

Realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Tahun 2023 (99,11%) jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reuiu Renstra (93,0), telah terlampaui sebesar 106,57%.





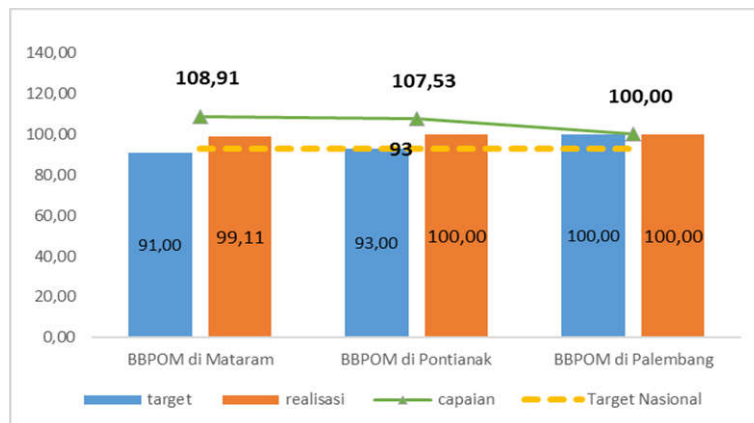
Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,20	99,11	99,91 	Akan Tercapai

Realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Tahun 2023 (99,11%) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (99,20%), telah tercapai sebesar 99,91%. Oleh sebab itu, target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER

Perbandingan Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2023 dengan BBPOM lain dalam satu klaster adalah sebagai berikut:



Gambar 3.22 Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster

Capaian Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2023 pada BBPOM di Mataram, BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palembang seluruhnya telah melebihi target nasional (93%). Persentase capaian target BBPOM di Mataram tertinggi dibandingkan kedua BBPOM lainnya, namun realisasinya terendah dibandingkan kedua BBPOM lainnya.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Capaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan pihak-pihak terkait merupakan kunci keberhasilan tercapainya indikator ini. Semakin intensifnya *feedback* evaluasi hasil pengawasan (Pemeriksaan sarana, label, periklanan, *recall*, hasil sampling dan Uji Tidak Memenuhi Syarat) merupakan salah satu indikasi makin baiknya tata hubungan kerja antara Balai dengan Pusat dan Balai dengan Balai/pemangku kepentingan lainnya.

Disisi lain capaian indikator ini mencerminkan BBPOM di Mataram semakin responsif dalam menindaklanjuti permasalahan-permasalahan obat dan makanan khususnya permasalahan lokal spesifik NTB.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat terus mempertahankan dan meningkatkan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi, selanjutnya perlu dilakukan koordinasi intensif melalui saluran komunikasi yang ada, khususnya terhadap tindak lanjut keputusan/rekomendasi yang capaiannya relatif rendah terkait rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain.

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.37 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	99,11	108,91	119.557.800	119.499.144	99,95	1,09	0,09

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi (IE) sebesar 1,09 lebih tinggi dari standar efisiensi (1) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi (TE) sebesar 0,09. Hal ini mencerminkan anggaran tersebut telah digunakan secara optimal dalam melaksanakan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

1. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Pusat atau UPT lainnya baik formal maupun non formal.
2. Pemeriksaan Sarana Produksi/ Distribusi/ Pelayanan Obat dan makanan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi yang diterima.





3. Pemantauan produk Obat dan Makanan melalui sampling, pengawasan penandaan, pengawasan periklanan dan pemantauan produk recall.
4. Peningkatan kompetensi teknis maupun non teknis bagi petugas.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Bersurat ke Direktorat Pengawasan Kosmetik dan juga Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan agar dapat mengirimkan hasil evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan iklan dan label tepat waktu sehingga IKU BBPOM di Mataram tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Telah bersurat ke Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan, No.T-PW.04.03.18A.18A2.10.23.23 68 tanggal 30 Oktober 2023 hal Permohonan Feedback Hasil Evaluasi Penilaian Label dan Iklan Pangan Tahun 2023 dan telah ditanggapi dengan surat No. T-PW.04.05.54.544.12.23.2063 tanggal 12 Desember 2023 hal Respon Surat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Label dan Iklan Produk Pangan. • Laporan verifikasi laporan iklan kosmetik telah diterima secara rutin. 	-	-	Realisasi indikator kinerja sebesar 85,42%	Terjadi peningkatan realisasi menjadi 99,11% sehingga target TW4 dapat tercapai

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	koordinasi intensif melalui saluran komunikasi yang ada, khususnya terhadap tindak lanjut keputusan/rekomendasi yang capaiannya relatif rendah terkait rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain.	Telah dilaksanakan koordinasi intensif baik melalui surat ataupun saluran <i>whatsApp</i> , dengan PIC BPOM terkait rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat.	-	-	Persentase Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain sebesar 91, 57%.	Persentase Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain sebesar 96,43%.





INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan telah melampaui target renstra tahun 2024, sehingga diusulkan untuk dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2024. Target indikator kinerja yang semula pada renstra sebesar 93%, dinaikkan menjadi 99,2%.

2. PERSENTASE KEPUTUSAN/ REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023

Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.38 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76	88,43	116,36	Sangat Baik

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 88,43% dari target 76% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 116,36% dengan Kategori "sangat baik".

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dari perhitungan:

$$\% \text{ Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan} = (A + B) / 2$$

$A = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}) \times 100\%$

Tindak lanjut merupakan *feedback*/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait, terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh BBPOM di Mataram atas keputusan Kepala Balai atau perintah dari Kepala Badan POM, terkait hasil pengawasan yang dapat berupa pembinaan,





peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan tindak lanjut kasus.

Jumlah *feedback* tindak lanjut yang diterima Balai Besar POM di Mataram pada Tahun 2023 sebanyak 155 dari 177 rekomendasi yang dikeluarkan. Sebagian besar tindak lanjut yang diperoleh, berasal dari pelaku usaha yaitu sebanyak 88 tindaklanjut/*feedback*, dan 67 *feedback* yang berasal dari lintas sektor terkait.

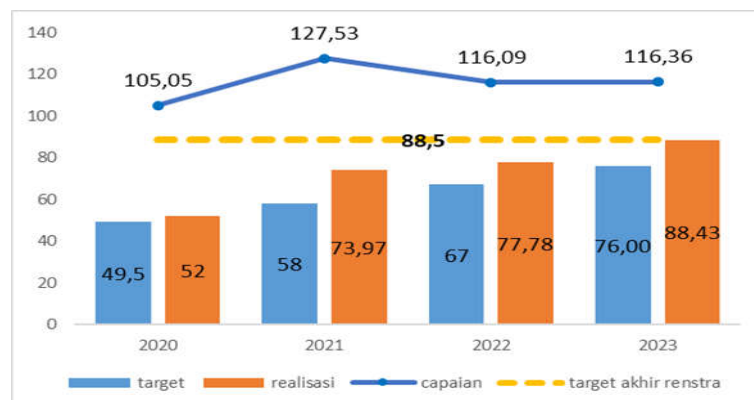
Rincian tindaklanjut hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan berdasarkan jenis keputusan/rekomendasi pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.39 Rincian Tindak Lanjut Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Berdasarkan Jenis Keputusan/Rekomendasi

No	Jenis Keputusan/Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindaklanjuti
1	keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	105	88 83,81%
2	keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	72	67 93,06%
TOTAL		177	155 88,43%

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Tahun 2023 terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2020 hingga 2023 dan diharapkan pada Tahun 2024 dapat mencapai target akhir periode Renstra yaitu 88.5%. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini:




Gambar 3.23. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Realisasi Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020



**PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA**

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi indikator ini Tahun 2023 yang telah melampaui target akhir periode renstra pada dokumen reuiu renstra 2020-2024 dilakukan reuiu dan penyesuaian target akhir periode renstra (Tahun 2024) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target akhir periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reuiu Renstra sebesar 85,0% disesuaikan menjadi 88,5% pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reuiu Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85,0	88,43	104,04 	Melampaui

Realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Tahun 2023 (88,43%) jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reuiu Renstra (85,0), telah terlampaui sebesar 104,04%.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut:

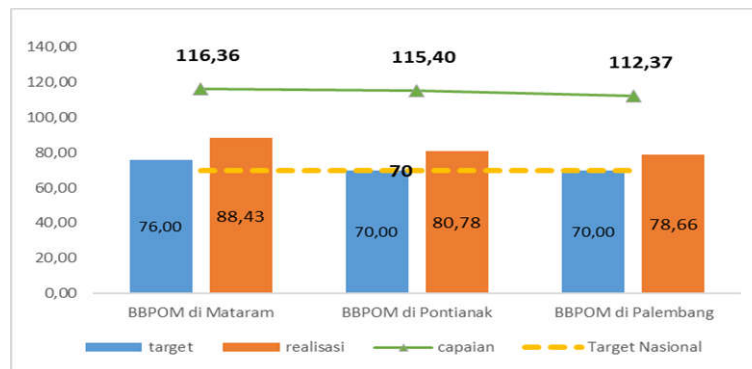
Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88,5	88,43	99,92 	Akan Tercapai

Realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Tahun 2023 (88,43%) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (88,50%), telah tercapai sebesar 99,92%. Oleh sebab itu, target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER

Perbandingan Persentase realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2023 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster seperti terlihat pada tabel berikut:





Gambar 3.24. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Kluster

Realisasi dan persentase capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang dilaksanakan BBPOM di Mataram paling tinggi dibandingkan BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palembang. Realisasi ketiga BBPOM seluruhnya telah melebihi target nasional (70%).

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Pada Tahun 2023 indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah mencapai target yang ditetapkan dengan %capaian 116,36% atau dengan kategori “sangat baik”. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya komitmen dan kesadaran pemangku kepentingan khususnya pelaku usaha dalam memberikan respon tindak lanjut/CAPA hasil pemeriksaan sarana oleh BBPOM di Mataram sampai status temuan dinyatakan selesai (close). Selain itu adanya inovasi e-CAPA yang memudahkan pelaku usaha dalam mengirimkan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan hasil pemeriksaan secara online serta memudahkan evaluasi dan monitoring oleh petugas.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat terus meningkatkan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi CAPA secara berkala.
- Peningkatan koordinasi dan pengawalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor.



**ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA****Tabel 3.40** Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM Di Mataram

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76	88,43	116,36	119.557.800	119.499.144	99,95	1,16	0,16

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi (IE) sebesar 1,16 lebih tinggi dari standar efisiensi (1) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi (TE) sebesar 0,16. Hal ini mencerminkan anggaran tersebut telah digunakan secara optimal dalam melaksanakan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

- Implementasi Instruksi Gubernur Nomor 440/321/KUM Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB sebagai implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017;
- Implementasi Keputusan Gubernur NTB Nomor 442-29 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB, diikuti dengan pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota antara lain:
- Surat Keputusan Walikota Mataram No. 85/I/2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Mataram Tahun 2022
- Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/454/KES/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Lombok Timur
- Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No. 643-A/238-1/Dikes/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Lombok Barat
- Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 452 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Lombok Tengah
- Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No.368/1155.1/Dikes/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Lombok Utara
- Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 188.4.45.1041 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Sumbawa Barat
- Surat Keputusan Bupati Sumbawa No. 299 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Sumbawa





- Pemanfaatan DAK NF POM TA 2022 oleh 6 Kabupaten/Kota di wilayah kerja BBPOM di Mataram;
- Pendampingan desk CAPA terhadap penanggungjawab sarana pelayanan kefarmasian dan pelaku usaha Obat dan makanan

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi CAPA secara berkala	Peningkatan jumlah pelaksanaan Pembinaan teknis CAPA	-	-	Melaksanakan Pembinaan teknis CAPA sebanyak 2 kali	Melaksanakan Pembinaan teknis CAPA sebanyak 4 kali
2	Peningkatan koordinasi dan pengawalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor.	Melakukan peningkatan koordinasi dan pengawalan DAK NF POM baik secara langsung maupun daring melalui monev berkala tiap triwulan	-	-	Realisasi DAK Non Fisik 2022 untuk Kab/Kota di wilayah kerja BBPOM di Mataram sebesar 85,33%	Realisasi DAK Non Fisik 2023 untuk Kab/Kota di wilayah kerja BBPOM di Mataram sebesar 86,79%
3	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SMARTPOM dalam upaya peningkatan tindak lanjut oleh pemangku kepentingan terhadap rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram.	Fitur aplikasi SMARTPOM dalam upaya peningkatan tindak lanjut oleh pemangku kepentingan terhadap rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan tidak dapat dimanfaatkan	-	-	Fitur aplikasi SMARTPOM dalam upaya peningkatan tindak lanjut oleh pemangku kepentingan terhadap rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan dapat dimanfaatkan	Fitur aplikasi SMARTPOM dalam upaya peningkatan tindak lanjut oleh pemangku kepentingan terhadap rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan tidak dapat dimanfaatkan

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah melampaui target renstra tahun 2024, sehingga diusulkan untuk dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2024. Target indikator kinerja yang semula pada renstra sebesar 85%, dinaikkan menjadi 88,5%.





3. PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

(Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100%

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Tabel 3.41 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Mataram	100,0	120,0	120,0	Sangat Baik

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Mataram pada Tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 120,0% dari target 100,0% sehingga nilai pencapaian indikator sebesar 120,0% dengan kriteria "sangat baik".

Nilai realisasi Tahun 2023 sebesar 120% merupakan nilai konversi yaitu apabila realisasi indikator sebesar 100%. Hal ini berdasarkan Pedoman SAKIP Tahun 2023 dan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM Nomor PR.04.02,21.01.24.12 tanggal 8 Januari 2024 hal Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023, Indikator Kinerja ini termasuk indikator yang dapat dikonversi realisasi/capaiannya menjadi 120% bila realisasinya 100%.

Tabel 3.42 Jumlah Keputusan Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023

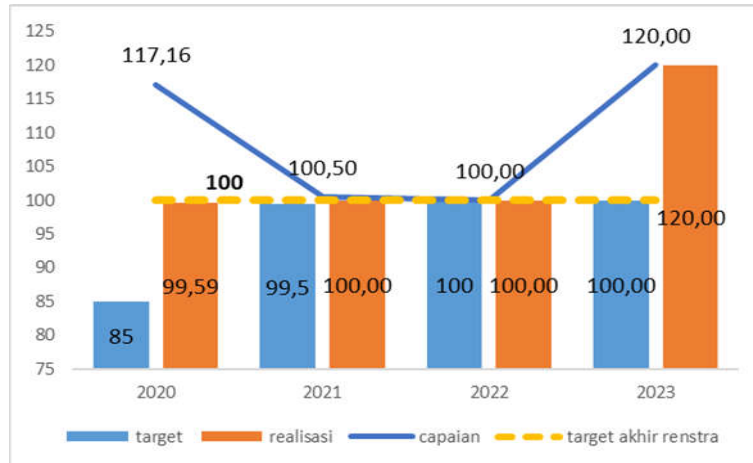
No	Jenis Keputusan Sertifikasi	Jumlah Permohonan	Jumlah Keputusan Sertifikasi Tepat Waktu	% sertifikasi tepat waktu
1	Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB	13	13	100,00
2	Rekomendasi/ Keputusan Pemenuhan CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	45	45	100,00
3	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	1385	1385	100,00
TOTAL		1430	1430	1430





Dari tabel diatas, keputusan sertifikasi didominasi oleh layanan pengujian sampel sebanyak 1385 sertifikat hasil pengujian (96,85%) dan sisanya 45 rekomendasi (3,15%) adalah layanan sertifikasi.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.25. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram Tahun 2022 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Realisasi dan persentase capaian Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020. Hal ini disebabkan karena nilai realisasi Tahun 2023 sebesar 120% merupakan nilai konversi yang mulai berlaku sejak Tahun 2023. Bila tanpa konversi realisasi Tahun 2023 sama dengan Tahun 2022 dan 2021.

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Target akhir periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reviu Renstra Tahun 2020-2024 dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sama yaitu 100,0%. Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra (pada dokumen reviu renstra dan PK Tahun 2024) sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	120%	120%	Tercapai

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (nilai konversi) pada Tahun 2023 (120,0%) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra (100,0%), telah tercapai sebesar 120,0%.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA

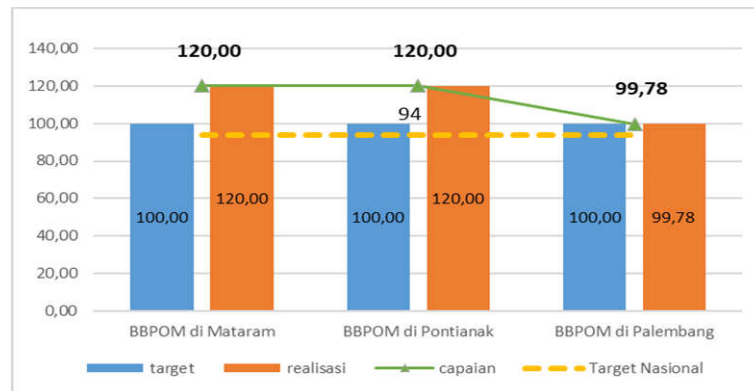


AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2022 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER



Gambar 3.26. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster

Realisasi dan capaian BBPOM di Mataram sama dengan BBPOM di Pontianak, realisasi keduanya telah mencapai target masing-masing dan target nasional sedangkan BBPOM di Palembang belum mencapai target balai, namun telah mencapai target nasional.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah mencapai target yaitu sebesar 100,0%. Hal ini disebabkan karena seluruh permohonan yang diterima baik dari pengujian sampel pihak ketiga maupun sertifikasi seluruhnya telah diselesaikan tepat waktu.

Penyelesaian 1385 sampel pengujian dapat dilakukan tepat waktu antara lain didukung dengan inovasi yang dimiliki oleh laboratorium pengujian BBPOM di Mataram yaitu SILAPOL (ODS dan OHS) dimana sampel barang bukti tindak pidana narkoba diselesaikan dengan *timeline* satu hari dan di hari tertentu dengan *timeline* satu jam saja. Sedangkan untuk pengujian sampel pihak ketiga selain barang bukti tindak pidana narkoba dapat terpenuhi didukung inovasi SI OPA LAGI JJ yang memungkinkan pelaksanaan pengujian dilakukan jarak jauh (*remote*) dan inovasi Ikan Tuanku Gesit dan Gemes untuk pengujian BKO yang lebih cepat. Selain itu, pemenuhan *timeline* pengujian dapat dipantau oleh konsumen melalui inovasi SIJELAPP sehingga mendorong transparansi pemenuhan *timeline* pengujian di BBPOM di Mataram sesuai janji layanan.

Sebanyak 45 keputusan Sertifikasi dan 13 hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB dapat diselesaikan sesuai *service level agreement* (SLA) / janji layanan. Hal ini tercapai dengan didukung pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis dengan materi sesuai kebutuhan dan adanya desk CAPA (*corrective action preventive action*) atas temuan audit yang dilakukan intensif.





Penerbitan keputusan Sertifikasi mengalami perubahan proses bisnis dengan berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Perubahan proses tersebut antara lain untuk penerbitan Izin Penerapan CPPOB sesuai Peraturan Badan POM nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) dimana pelaku usaha yang termasuk dalam skala Usaha Mikro Kecil dan memiliki produk pangan dengan risiko kategori rendah dan sedang maka tidak perlu dilakukan audit sarana. Penerbitan Izin Penerapan CPPOB dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap dokumen persyaratan saja, sedangkan pemeriksaan sarana akan dilakukan paling lama 1 (satu) Tahun sejak IP CPPOB terbit.

Walaupun penerbitan Izin Penerapan CPPOB tersebut tanpa dilakukan pemeriksaan sarana, namun kendala masih ada karena pemahaman pelaku usaha terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan masih kurang yang mengakibatkan perlunya pendampingan dalam penyusunannya. Salah satu upaya yang ditempuh petugas adalah dengan menyediakan dokumen contoh yang dapat dijadikan sebagai pedoman penyusunan bagi pelaku usaha dan melaksanakan bimbingan teknis untuk penyusunan dokumen. Selain itu, dilakukan desk kepada pelaku usaha untuk perbaikan terhadap dokumen yang belum sesuai.

Perubahan juga terjadi pada sistem elektronik / aplikasi yang digunakan untuk penerbitan Izin Penerapan CPPOB dan Sertifikat CPOTB Bertahap melalui e-sertifikasi yang telah terintegrasi dalam sistem One Single Submission Risk Based Analysis (OSS RBA). Sedangkan Surat Pemenuhan Aspek CPKB langsung diajukan melalui OSS RBA. Penggunaan sistem elektronik menjadi tantangan bagi pelaku usaha yang tidak paham baik keterkaitan integrasi sistem OSS dengan sistem Badan POM maupun cara penggunaan sistem elektronik itu sendiri. Oleh sebab itu, petugas memberikan tahapan detail proses dalam sistem elektronik dan melakukan bimbingan atau desk secara langsung kepada pelaku usaha yang masih mengalami kendala.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat mempertahankan capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perawatan dan kalibrasi instrument GC-MS secara berkala sebagai instrument utama untuk pengujian sampel barang bukti narkotika dari pihak ketiga
2. Pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis semakin intensif dengan materi yang sesuai kebutuhan;
3. Desk CAPA (*corrective action preventive action*) terhadap pelaku usaha/penanggung jawab sarana atas temuan audit dilakukan semakin intensif.



**ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA****Tabel 3.43** Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	120,00	120,00	125.163.000	121.957.330	97,44	1,23	0,23

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi (IE) sebesar 1,23 lebih tinggi dari standar efisiensi (1) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi (TE) sebesar 0,23. Hal ini mencerminkan anggaran tersebut telah digunakan secara optimal dalam melaksanakan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat memenuhi target karena telah dilakukan program – program kegiatan, antara lain:

- Penambahan dan peremajaan alat laboratorium, peningkatan kompetensi personil, dan penambahan ruang lingkup pengujian untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian;
- Transparansi, pemantauan proses pengujian, dan sertifikat hasil uji pihak ketiga dapat diakses melalui inovasi SIJELAPP;
- Peningkatan kompetensi petugas layanan Sertifikasi secara *offline* maupun *online* untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sehingga petugas dapat mengikuti perkembangan pengetahuan;
- Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dan Pembinaan yang dilakukan per topik (jenis produk) sehingga dapat berdampak langsung terhadap percepatan pemenuhan kebutuhan pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan UMKM baik yang memproduksi pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional sebagai dampak dari kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan industrialisasi dalam menyambut pergelaran even internasional yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 – 2024;
- Percepatan pelayanan sertifikasi melalui inovasi GEMILANG Pro-UMKM (Gerakan Lintas Lembaga Mengawal Daya Saing Produk UMKM) baik dengan tatap muka ataupun secara daring agar pelaku usaha dapat segera melengkapi dokumen persyaratan
- Percepatan pelayanan pengujian melalui inovasi *One Day Services* (ODS) dan *One Hour Services* (OHS) setiap hari Jumat;



**TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA**

Tidak terdapat rekomendasi pada laporan kinerja interim TW3 dan laporan kinerja Tahun 2022.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
NIHIL						

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan analisis diatas diperoleh informasi bahwa Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM di Mataram telah mencapai target, namun tetap dibutuhkan upaya-upaya untuk peningkatan kinerja agar senantiasa dapat memberikan pelayanan publik khususnya sertifikasi sarana maupun produk secara prima.

4. PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Sarana produksi Obat dan Makanan Memenuhi Ketentuan = $(\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan} / \text{Target Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}) \times 100\%$

Keterangan:

Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.

Rincian Target, Realisasi dan %Capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.44** Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	69,77	107,34	Sangat Baik

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai Tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 69,71% dari target 65,00% sehingga nilai pencapaian indikator menjadi sebesar 107,34% dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha yang relatif baik terhadap peraturan yang berlaku.

Sarana produksi Obat dan Makanan yang ada di wilayah NTB meliputi sarana produksi obat tradisional (Usaha Kecil Obat Tradisional /UKOT dan Usaha Mikro Obat Tradisional/UMOT), kosmetik (industri kosmetik golongan A dan B), industri pangan olahan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Pemeriksaan sarana produksi bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan Cara Produksi yang Baik guna menjamin mutu, keamanan dan khasiat/manfaat produk yang dihasilkan.

Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis risiko, dimana sarana yang menjadi target pemeriksaan diprioritaskan pada sarana produksi dengan riwayat / *track record* tidak memenuhi ketentuan, sarana yang belum diperiksa selama lebih dari 2 Tahun serta sarana baru. Sampai Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi sebanyak 129 sarana dengan hasil 90 sarana (69,77%) MK dan 39 sarana (30,23%) TMK. Rincian hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.45 Rincian Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan Tahun 2023

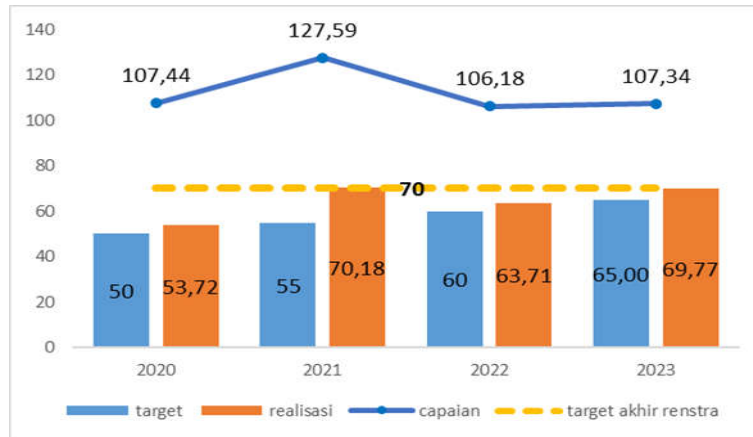
No.	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan			
			MK		TMK	
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	UKOT	2	1	50,00	1	50,00
2	UMOT	6	2	33,33	4	66,67
3	Industri Kosmetik	8	7	87,50	1	12,50
4	Industri Pangan	29	12	41,38	17	58,62
5	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	84	68	80,95	16	19,05
TOTAL		129	90	69,77	39	30,23





PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020

Perbandingan Target, Realisasi, %Capaian dan Target Renstra 2024 sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 dengan Tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Gambar 3.27. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Realisasi dan persentase capaian Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2020 dan 2022, namun lebih rendah daripada Tahun 2021.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Target akhir periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reviu Renstra Tahun 2020-2024 dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sama yaitu 100,0%. Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra (pada dokumen reviu renstra dan PK Tahun 2024) sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	69,77	99,67%	Akan Tercapai

Realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 sebesar 69,77%, Jika dibandingkan dengan target di Tahun akhir periode renstra 2024 sebesar 70%, maka telah tercapai sebesar 99,67%. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, BBPOM di Mataram optimis dapat mencapai target yang ditetapkan.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



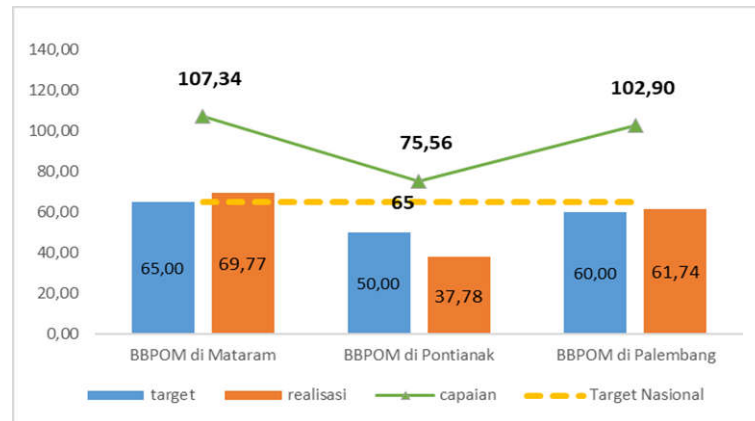
AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER

Perbandingan realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 dengan BBPOM lain dalam satu klaster adalah sebagai berikut:



Gambar 3.28. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Realisasi dan persentase capaian BBPOM di Mataram paling tinggi dari kedua UPT yang berada dalam satu klaster yang telah ditetapkan oleh Badan POM. Hanya BBPOM di Mataram yang telah melampaui target nasional Tahun 2023.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Capaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target. Hal ini disebabkan antara lain:

- Penetapan target pemeriksaan sarana produksi Tahun 2023 berdasarkan kajian resiko dan hasil pengawasan sarana Tahun 2022.
- Konsistensi pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi sesuai renlak yang telah disusun
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan sarana produksi setiap bulan
- Adanya inovasi *e-CAPA* yang memudahkan pelaku usaha dalam mengirimkan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan hasil pemeriksaan secara online serta memudahkan evaluasi dan monitoring oleh petugas.
- BBPOM di Mataram melibatkan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dinas Perdagangan) dalam melakukan pengawasan sarana sebagai upaya pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.
- Adanya peran aktif Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pengawasan pre dan Post Market P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) di peredaran melalui pemanfaatan Dana Alokasi





Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan, juga ikut berkontribusi dalam keberhasilan pencapaian indikator.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat terus meningkatkan capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Pembinaan yang lebih intensif kepada pelaku usaha agar melaksanakan proses produksi sesuai dengan ketentuan Cara Produksi yang Baik melalui pendampingan dan atau pemberian pelatihan / bimtek bagi pelaku usaha.
- Pemberian sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran untuk memberi efek jera dalam perbaikan terus menerus
- Peningkatan koordinasi dan pengawalan DAK NF POM dengan lintas sektor baik secara daring maupun pertemuan secara langsung.
- Menyelenggarakan Desk CAPA secara kontinu dan berkala untuk memonitor pelaku usaha dalam menindak lanjuti hasil pemeriksaan.
- Mengembangkan inovasi e-CAPA
- Meningkatkan kompetensi petugas dengan mengikuti pelatihan/bimtek baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring.

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPI KINERJA

Tabel 3.46 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	69,77	107,33	156.907.000	156.860.080	99,97	1,07	0,07

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi (IE) sebesar 1,07 lebih besar daripada standar efisiensi (1) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan capaian tingkat efisiensi (TE) sebesar 0,07. Anggaran tersebut telah digunakan secara optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sarana produksi selama periode Tahun 2023 hingga efektif menunjang pencapaian target.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:





- Pemeriksaan 129 sarana produksi obat tradisional (Usaha Kecil Obat Tradisional /UKOT dan Usaha Mikro Obat Tradisional/UMOT), kosmetik (industri kosmetik golongan A dan B), industri pangan olahan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) berdasarkan prioritas pengawasan dan analisis risiko.
- Intensifikasi pendampingan dan peningkatan kompetensi bagi UMK Produsen Pangan Olahan dengan penyelenggaraan Bimtek CPPOB pada 22 Agustus 2023
- Memberikan layanan konsultasi offline dan tersedianya ruang khusus layanan konsultasi dengan petugas yang kompeten dalam memberikan pendampingan bagi pelaku usaha dalam menindak lanjuti hasil pemeriksaan.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Pembinaan yang lebih intensif kepada pelaku usaha agar melaksanakan proses produksi memenuhi ketentuan yang berlaku, produk yang dihasilkan aman dan bermutu.	Intensifikasi pendampingan dan peningkatan kompetensi bagi UMK Produsen Pangan Olahan dengan penyelenggaraan Bimtek CPPOB pada 22 Agustus 2023	-	-	Pelaku usaha belum mengetahui dan belum menerapkan CPPOB pada alur proses produksi	Peningkatan pengetahuan dan wawasan pelaku usaha dalam menerapkan CPPOB pada proses produksi
2	Pemberian sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran	Memberikan surat tindak lanjut berupa Peringatan bagi pelaku usaha / sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan dan mereviu sarana yang telah mendapatkan sanksi Peringatan berulang	-	-	Beberapa sarana produksi mendapatkan sanksi Peringatan berulang	Telah diterbitkan surat peringatan bagi pelaku usaha, namun masih ada sarana produksi yang mendapatkan peringatan berulang
3	Peningkatan koordinasi dan pengawalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Obat dan Makanan dengan lintas sektor baik secara daring maupun pertemuan secara langsung	Melakukan koordinasi dan pengawalan DAK NF POM baik secara langsung maupun daring melalui monev berkala tiap triwulan	-	-	Capaian output pengawasan sarana UMOT/PIRT Dana DAK NF belum sesuai target	Capaian output maupun komponen pada indikator pengawasan sarana UMOT/PIRT Dana DAK NF dapat tercapai tepat waktu
4	Membuat inovasi untuk mengakomodir monitoring dan evaluasi CAPA bagi pelaku usaha	Membuat dan mengimplementasikan inovasi e-CAPA untuk mengakomodir monitoring dan evaluasi CAPA bagi pelaku usaha	-	-	Proses evaluasi CAPA lebih lama karena data dukung dan perbaikan temuan	Tindak lanjut perbaikan hasil pemeriksaan dapat dimonitor dan dievaluasi lebih cepat





No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
					dilakukan secara offline/dikirim langsung	
5	Menyelenggarakan Desk CAPA bagi pelaku usaha dalam menindak lanjuti hasil pemeriksaan	Pelaksanaan Desk CAPA pada penyelenggaraan Bimtek CPPOB pada 22 Agustus 2023	-	-	Masih terdapat sarana yang belum mengirimkan CAPA atau temuan yang belum diselesaikan (closed)	Seluruh sarana yang diperiksa telah mengirimkan CAPA atau menyelesaikan temuan hingga status <i>closed</i>

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Laporan Kinerja Interim TW3 Tahun 2023 dan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah melampaui target tahun 2023 namun target tahun 2024 (akhir periode renstra) belum tercapai, sehingga target renstra di tahun 2024 tidak dilakukan penyesuaian yaitu tetap sebesar 70%.

5. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

% Sarana distribusi Obat dan Makanan MS = (Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / Target Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Keterangan:

Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa sama dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.

Tabel 3.47 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,0	76,06	111,85	Sangat Baik





Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 telah melebihi target yaitu sebesar 76,06% dari target 68,0% sehingga nilai pencapaian indikator menjadi sebesar 111,85% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

Pemeriksaan sarana distribusi bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan Cara Distribusi yang Baik guna menjamin mutu, keamanan dan khasiat/manfaat produk Obat dan Makanan yang didistribusikan/dijual.

Pemeriksaan sarana distribusi mencakup sarana distribusi Obat (Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Instalasi Farmasi Milik Pemerintah (IFP)), sarana pelayanan kefarmasian (Rumah Sakit, Klinik, Apotek, Puskesmas, dan Toko Obat), sarana distribusi Obat Tradisional, sarana distribusi Suplemen Kesehatan, sarana distribusi Kosmetik serta sarana peredaran pangan olahan.

Pemilihan target pemeriksaan sarana didasarkan pada kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana distribusi dengan riwayat / *track record* tidak memenuhi ketentuan, sarana yang memiliki risiko penyaluran produk tidak sesuai ketentuan, sarana yang sudah lama tidak dilakukan pemeriksaan serta sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya.

Pada Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi sebanyak 685 sarana dengan hasil 521 sarana MK (76,06%) dan 164 sarana TMK (23,94%). Rincian hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.48 Rincian Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2023

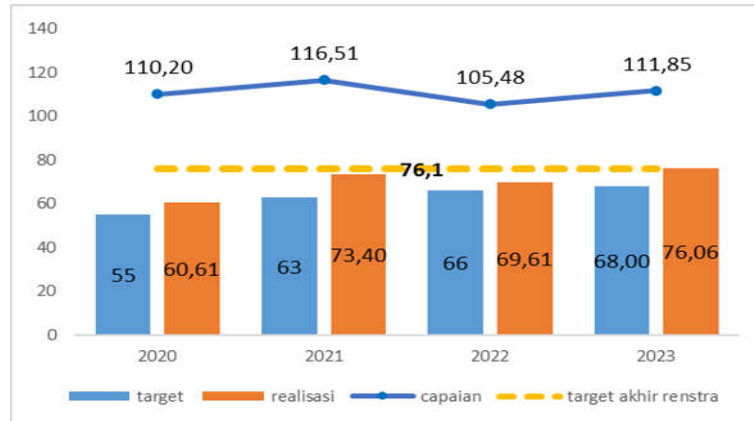
No.	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan			
			MK		TMK	
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	PBF	15	12	80,00	3	20,00
2	Apotek	61	31	50,82	30	49,18
3	Toko Obat	29	19	65,52	10	34,48
4	IFK/IFRS	9	8	88,89	1	11,11
5	Rumah Sakit	25	19	76,00	6	24,00
6	Puskesmas	42	39	92,86	3	7,14
7	Klinik	58	42	72,41	16	27,59
8	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	20	12	60,00	8	40,00
9	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	7	6	85,71	1	14,29
10	Fasilitas Distribusi Kosmetik	146	94	64,38	52	35,62
11	Sarana Peredaran Pangan Olahan	273	239	87,55	34	12,45
TOTAL		685	521	76,06	164	23,94





Jenis sarana yang menyumbang angka MK terbanyak adalah Puskesmas, IFK/IFRS dan sarana peredaran pangan olahan.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.29. Perbandingan Target, Realisasi, %Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan Tahun 2020

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2022, 2021 dan 2020. Dari Tahun 2022, realisasi indikator ini meningkat 7,55 point dan peningkatan persen capaian sebesar 6,37%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha sarana Distribusi di wilayah kerja BBPOM di Mataram semakin patuh dalam penerapan Cara Distribusi Obat dan Makanan yang Baik.

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi indikator ini Tahun 2023 yang telah melampaui target akhir periode renstra pada dokumen reviu renstra 2020-2024 dilakukan reviu dan penyesuaian target akhir periode renstra (Tahun 2024) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target akhir periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reviu Renstra sebesar 71,0% disesuaikan menjadi 76,10% pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,0	76,06	107,13 ▲	Tercapai





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Tahun 2023 (76,06%) jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra (71,0%), telah tercapai sebesar 107,13%.

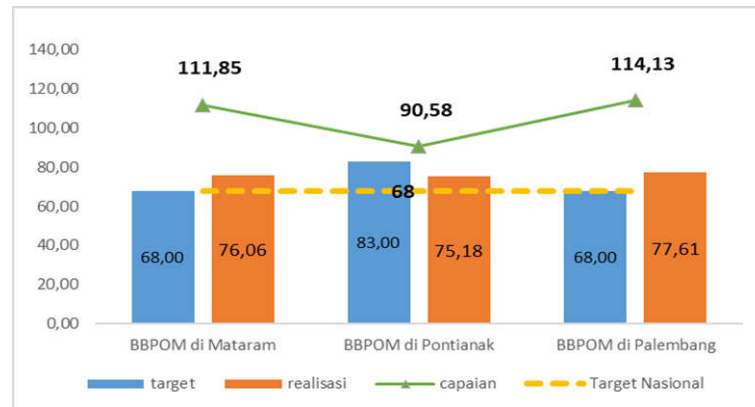
Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,10	76,06	99,95 ▲	Akan Tercapai

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Tahun 2023 (76,06%) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (76,10%), telah tercapai sebesar 99,95%. Oleh sebab itu, target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER

Perbandingan realisasi sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 dengan BBPOM lain dalam satu klaster adalah sebagai berikut:



Gambar 3.30. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Realisasi tertinggi dicapai oleh BBPOM di Palembang sebesar 77,61%, disusul dengan BBPOM di Mataram 76,06% dan paling rendah adalah BBPOM di Pontianak sebesar 75,18%. Capaian BBPOM di Palembang dan BBPOM di Mataram melebihi target yang ditetapkan di Tahun 2023 yaitu sebesar 114,13% dan 111,85%. Sedangkan capaian BBPOM di Pontianak belum dapat mencapai target yaitu sebesar 90,58%. Namun, realisasi seluruh BBPOM telah melebihi target nasional Tahun 2023 sebesar 68,00%





ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Capaian indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang cukup tinggi antara lain disebabkan cukup tingginya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya di sarana puskesmas, IFK/IFRS dan sarana peredaran pangan olahan.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat meningkatkan Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha antara lain melalui bimbingan teknis tentang cara distribusi yang baik guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran sarana/pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Peningkatan kompetensi Inspektur melalui pendidikan dan pelatihan yang berjenjang;
- Penerapan sanksi baik administrasi maupun projustisia sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan;
- Pengawasan pemanfaatan DAK NF POM untuk meningkatkan pengawasan sarana distribusi/ pelayanan kefarmasian;
- Pengembangan inovasi e-CAPA untuk mengakomodir monitoring dan evaluasi CAPA bagi pelaku usaha dan penanggungjawab sarana

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.49 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	76,06	111,85	838.872.000	838.304.480	99,93	1,12	0,12

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi sebesar 1,12 lebih besar daripada standar efisiensi (1) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi (TE) sebesar 0,12. Anggaran tersebut telah digunakan secara optimal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan sarana distribusi selama periode Tahun 2023 hingga efektif menunjang pencapaian indikator.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:





PENDAHULUAN



PERENCANAAN KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA



PENUTUP

- Pemeriksaan 239 sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dengan hasil 170 sarana Memenuhi Ketentuan (71,1%) dan 69 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (28,9%). Serta pemeriksaan ke sejumlah 446 sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan dengan hasil 351 sarana Memenuhi Ketentuan (78,7%) dan 95 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (21,3%);
- Bimbingan Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik bagi para penanggungjawab di sarana distribusi obat milik Pemerintah dan Pedagang Besar Farmasi dengan peserta 55 orang. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2023 ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan POM RI. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas pengelola obat sehingga mampu mengimplementasikan prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik di sarana distribusi obat baik milik pemerintah ataupun swasta;
- Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama dan District Food Inspector (DFI) Junior bekerja sama dengan PPSDM BPOM tanggal 30 Oktober 2023 dengan 21 peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- Forum Group Discussion (FGD) untuk menetapkan langkah strategis dalam pengendalian Resistensi Antimikroba di Provinsi NTB pada tanggal 9 November 2023. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dengan mengundang 50 orang peserta luring dan 100 orang peserta daring dari perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi dan seluruh Kab/Kota di NTB; organisasi profesi IDI, IBI, PPNI dan IAI; akademisi dari Universitas Mataram; serta pelaku usaha atau penanggungjawab di sarana pelayanan kefarmasian.

Selain itu, untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk Obat dan Makanan ilegal, mengandung bahan berbahaya, ataupun peredaran obat-obat tertentu yang rawan disalahgunakan, maka pada Tahun 2023 ini dilakukan kegiatan Intensifikasi Pengawasan, antara lain:

- Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023/1444 H yang dilaksanakan pada 13 Maret 2023 sampai dengan 18 April 2023. Hasil pengawasan selama intensifikasi dari 109 sarana yang diperiksa, 97 sarana Memenuhi Ketentuan (89,0%) dan 12 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (11,0%).
- Operasi Pengawasan Peredaran Tramadol dan Trihexyphenidyl (THP) secara serentak dalam rangka pengetatan peredaran Tramadol dan THP untuk mencegah terjadinya penyimpangan peredaran dari jalur legal ke jalur ilegal dan sebaliknya. Selama periode pengawasan khusus 6 Juni 2023 sampai dengan 22 Juni 2023, BBPOM di Mataram telah melakukan pengawasan ke 19 sarana distribusi obat (PBF) dan sarana pelayanan kefarmasian (Apotek dan Klinik) yang berpotensi melakukan peredaran obat jenis Tramadol dan THP. Dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya penyimpangan peredaran dari sarana legal ke sarana ilegal maupun sebaliknya.





- Intensifikasi Pengawasan Klinik Kecantikan yang dilakukan pada periode 12 Juni 2023 sampai dengan 21 Juni 2023. Adanya tren pelanggaran produksi kosmetik mengandung bahan dilarang dan/atau berbahaya secara massal, dimana rantai distribusi utamanya juga melibatkan sarana klinik kecantikan, maka dilakukan intensifikasi pengawasan terhadap klinik kecantikan secara serentak di seluruh UPT Badan POM. Hasil intensifikasi pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram, dari 15 sarana klinik kecantikan yang dilakukan pengawasan ditemukan 7 sarana Memenuhi Ketentuan dan 8 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Dimana temuan terbanyak adalah peredaran kosmetik Tanpa Izin Edar.
- Intensifikasi Pengawasan Tematik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan ilegal dan/atau mengandung bahan kimia obat. Kegiatan intensifikasi difokuskan pengawasan pada depot jamu atau kios jamu. Hal ini karena berdasarkan data pengawasan, tren temuan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan ilegal dan/atau bahan kimia obat berada di rantai distribusi terkecil. Selama periode pengawasan 29 Agustus s.d 20 September 2023 BBPOM di Mataram telah melakukan pengawasan terhadap 19 sarana Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan hasil 13 sarana Memenuhi Ketentuan (68,42%) dan 6 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (31,58%).
- Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan menjelang Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Kegiatan Intensifikasi secara nasional dilaksanakan sebanyak 5 (lima) tahap, Balai Besar POM di Mataram mengawali kegiatan pada 1 Desember 2023 dan berakhir pada 3 Januari 2024, dengan total jumlah sarana yang dilakukan pengawasan adalah 66 sarana peredaran pangan olahan dengan hasil 59 sarana Memenuhi Ketentuan (89,4%) dan 7 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (10,6%).

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Penerapan sanksi baik administrasi maupun projustisia sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan.	Memberikan surat Tindak Lanjut berupa Peringatan, Peringatan Keras sampai dengan Penghentian Sementara Kegiatan untuk sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan.	-	-	Beberapa sarana masih ditemukan melakukan pelanggaran berulang	Masih ditemukan sarana yang melakukan pelanggaran berulang walaupun telah diberikan surat peringatan
2	Peningkatan kompetensi Inspektur melalui pendidikan dan pelatihan yang	Penunjukan petugas untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi inspektur, yaitu: Pelatihan	-	-	Belum seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan	Jumlah inspektur CDOB, inspektur





No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
	berjenjang	Inspektur CDOB Junior, Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior, Pelatihan Inspektur Kosmetik Senior, Pelatihan Inspektur OT/SK Junior, serta Pelatihan Food Inspector Tingkat Dasar			inspektur sesuai dengan jenjangnya	pangan, inspektur kosmetik dan inspektur OT/SK bertambah
3	Pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha antara lain melalui bimbingan teknis tentang cara distribusi yang baik guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran sarana/pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik bagi para penanggungjawab di sarana distribusi obat milik Pemerintah dan Pedagang Besar Farmasi Forum Group Discussion (FGD) langkah strategis dalam pengendalian Resistensi Antimikroba di Provinsi NTB	-	-	Realisasi persentase sarana distribusi yang Memenuhi ketentuan sebesar 69,61%	Realisasi persentase sarana distribusi yang Memenuhi ketentuan sebesar 76,06%
4	Pengawasan pemanfaatan DAK NF POM untuk meningkatkan pengawasan sarana distribusi/ pelayanan kefarmasian	Melakukan koordinasi dan pengawasan DAK NF POM baik secara langsung maupun daring melalui monev berkala tiap triwulan	-	-	Realisasi DAK Non Fisik 2022 untuk Kab/Kota di wilayah kerja BBPOM di Mataram sebesar 85,33%	Realisasi DAK Non Fisik 2023 untuk Kab/Kota di wilayah kerja BBPOM di Mataram sebesar 86,79%
5	Pengembangan inovasi e-CAPA untuk mengakomodir monitoring dan evaluasi CAPA bagi pelaku usaha dan penanggungjawab sarana	Membuat dan mengimplementasikan inovasi e-CAPA untuk mengakomodir monitoring dan evaluasi CAPA bagi pelaku usaha dan penanggungjawab sarana	-	-	Proses evaluasi CAPA lebih lama dan sulit dilakukan monitoring karena dokumen dikirimkan secara manual	Dokumen e-CAPA dikirim secara online (<i>paperless</i>) dan petugas menjadi lebih mudah dalam melakukan evaluasi dan monitoring

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Laporan Kinerja Interim TW3 Tahun 2023 dan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah melampaui target renstra tahun 2024, sehingga diusulkan untuk dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2024. Target indikator kinerja yang semula pada renstra sebesar 71%, dinaikkan menjadi 76,1%.





6. INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI MATARAM

Indeks Pelayanan Publik (IPP) digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja berdasarkan 6 (enam) komponen meliputi Kebijakan pelayanan (30%), Profesionalitas SDM (18%), Sarana prasarana (15%), Sistem informasi pelayanan publik (15%), Konsultasi dan pengaduan (15%), dan Inovasi (7%). Penilaian kinerja UPP mengacu Permen PANRB nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun hasil penilaian indeks pelayanan publik untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut

Tabel 3.50 Hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik untuk Masing-Masing Komponen

No.	Komponen	Bobot	Nilai (Skala 5,00)
1	Kebijakan Pelayanan	24%	4,65
2	Profesionalisme SDM	25%	4,9
3	Sarana dan Prasarana	18%	4,8
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	4,7
5	Konsultasi dan Pengaduan	10%	5
6	Inovasi	12%	5
Rerata			4,86

Dapat dilihat bahwa dari seluruh komponen penilaian, 2 komponen yang memiliki nilai terendah adalah kebijakan pelayanan serta sistem informasi pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan terobosan untuk dapat meningkatkan realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik khususnya nilai 2 komponen tersebut.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023

Tabel 3.51 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Indeks pelayanan publik (IPP)	4,40	4,86	110,45	Sangat Baik

Realisasi Indeks pelayanan publik (IPP) Tahun 2022 sebesar 4,86 telah mencapai target sebesar 4,40 sehingga nilai pencapaian indikator menjadi 110,45% dengan kriteria “sangat baik”.

Target indikator ini Tahun 2023 mengalami perubahan yaitu target pada dokumen reuiu Renstra Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 sebesar 4,55 berubah menjadi 4,40 pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Perubahan target ini mengacu kepada surat Sekretaris Utama BPOM nomor B-PR.04.01.2.21.01.23.05 tanggal 2 Januari 2023 perihal Penyampaian Revisi Target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023- 2024 di Lingkungan BPOM, dengan pertimbangan adanya



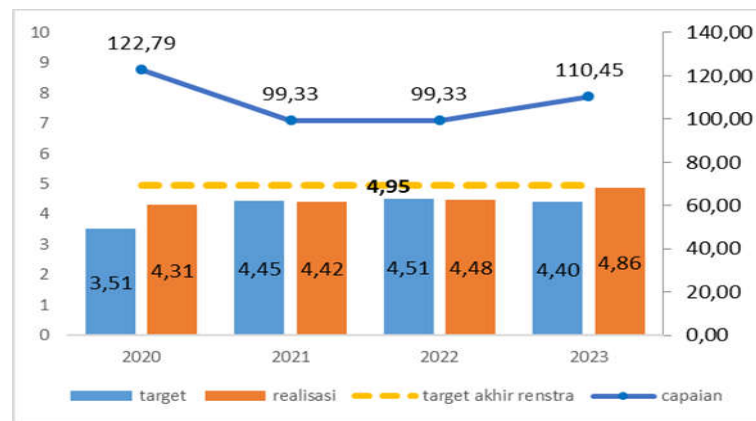


perubahan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) meliputi:

- a) Perubahan jumlah indikator dan persentase bobot pada 6 (enam) aspek penilaian.
- b) Perubahan formulasi perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan persentase nilai F02 sebesar 75% dan F03 sebesar 25%, sementara formulir F01 hanya menjadi tambahan informasi bagi evaluator.
- c) Penambahan jenis formulir daring pada F01, F02, dan F03 pada UPP yang memiliki pelayanan online.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik mulai dilaksanakan sejak awal Tahun 2023 melalui survei. Hasil dari survei ini dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi unit kerja BBPOM di Mataram untuk peningkatan kinerja dalam melakukan Pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 3.31. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Realisasi Tahun 2023 lebih tinggi bila dibandingkan dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020. Persentase capaian Tahun 2023 paling tinggi bila dibandingkan dengan Tahun 2022, 2021 dan lebih rendah dari Tahun 2020.

PERBANDINGAN REALISASI 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi indikator ini Tahun 2023 yang telah melampaui target akhir periode renstra pada dokumen reuiu renstra 2020-2024 dilakukan reuiu dan penyesuaian target akhir periode renstra (Tahun 2024) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target akhir periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reuiu Renstra sebesar 4,60 disesuaikan menjadi 4,95 pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.





Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Indeks pelayanan publik	4,60	4,86	105,65	Tercapai

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada Tahun 2023 (4,86) jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra (4,60), telah tercapai sebesar 105,65%.

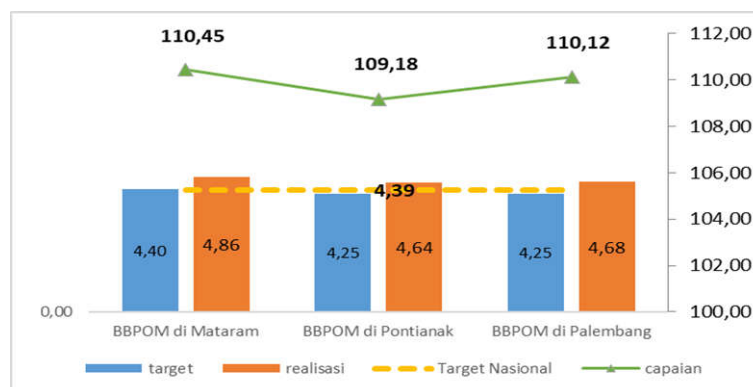
Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Indeks pelayanan publik	4,95	4,86	98,18	Akan Tercapai

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada Tahun 2023 (4,86) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (4,95), telah tercapai sebesar 98,18%. Oleh sebab itu, target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASER

Perbandingan realisasi indeks pelayanan publik Tahun 2023 dengan BBPOM lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 3.32. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

Realisasi dan persen capaian BBPOM di Mataram tertinggi dibandingkan BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palembang. Ketiga BBPOM telah mencapai target masing-masing dan target nasional.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Tercapainya target indikator kinerja ini pada Tahun 2023 antara lain disebabkan karena:

- Kebijakan pelayanan dan standar pelayanan publik telah disosialisasikan dan dipublikasikan melalui media elektronik, media sosial, media cetak dan media luar ruang dengan 6 service delivery.
- Dilaksanakan peningkatan profesionalisme SDM pelayanan publik melalui kegiatan *Capacity Building* dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Mekanisme reward dan punishment bagi petugas pelayanan publik juga telah dilakukan setiap bulan. Sarana dan prasarana pengaduan serta pendukung pelayanan publik telah dilengkapi termasuk untuk konsumen dengan kebutuhan khusus.
- Sistem informasi pelayanan publik telah di-*update* secara berkala dengan memanfaatkan berbagai sarana media (media cetak, media elektronik, media online, media sosial, dan website).

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat meningkatkan Capaian Indeks pelayanan publik (IPP), perlu dilakukan:

- Publikasi melalui media dilengkapi dengan infografis untuk setiap jenis layanan yang memuat 6 komponen *service delivery*.
- Menyediakan *guiding block* dan media informasi standar pelayanan huruf braille bagi pengguna layanan disabilitas netra

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.52 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks pelayanan publik (IPP)

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Indeks pelayanan publik (IPP)	4,4	4,86	110,45	1.800.476.100	1.800.273.235	99,99	1,10	0,10

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi (IE) sebesar 1,10 lebih besar dari standar efisiensi (1), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien, dengan tingkat efisiensi sebesar 0,10. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sepenuhnya efektif dan berdampak pada pencapaian indikator maupun sasaran.



**ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA**

Kegiatan atau hal-hal yang menunjang peningkatan realisasi Indeks Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

- Peningkatan dan Pemenuhan sarana pelayanan publik sesuai standar melalui renovasi ruang layanan publik, pemanfaatan mesin antrian elektronik, mesin pembayaran elektronik (EDC), area tunggu pengantar dan ruang tunggu yang nyaman dilengkapi dengan makanan ringan dan kopi/ teh gratis, serta sarana dan prasarana bagi konsumen berkebutuhan khusus.
- Profesionalisme SDM melalui penerapan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa dengan Semangat memberikan Solusi), petugas pelayanan dengan berseragam khusus dan peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan pelayanan publik
- Adanya inovasi pelayanan publik antara lain SI JELAPP-SILAPOL, GAS PAMAN, dan Gemilang Pro UMKM
- Update berkala sistem informasi pelayanan publik memanfaatkan berbagai media (media sosial, media elektronik, dan website).
- Perbaikan dan publikasi standar pelayanan publik ke berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai media
- Pelaksanaan forum konsultasi publik untuk menjaring masukan dan informasi sebagai langkah perbaikan terhadap pelayanan yang sudah ada.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Merevisi standar dan maklumat pelayanan publik sesuai hasil forum konsultasi publik dan regulasi terkini untuk setiap jenis layanan selanjutnya didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang pelayanan (leaflet/ pamflet/ brosur, poster/ banner, bukusaku/ katalog), media informasi (baliho/ billboard), media cetak dan website/media sosial	Melakukan revisi standar dan maklumat pelayanan publik sesuai hasil forum konsultasi publik dan regulasi terkini. Standar dan maklumat pelayanan publik tersebut telah didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang pelayanan dengan media leaflet, brosur, banner, di area publik dengan billboard, di media massa baik cetak dan online, serta di	-	-	standar dan maklumat pelayanan public belum direvisi sesuai kondisi terkini	standar dan maklumat pelayanan public telah direvisi sesuai kondisi terkini dan telah dipublikasikan di area ruang pelayanan (leaflet/ pamflet/ brosur, poster/ banner, bukusaku/ katalog), media informasi (baliho/ billboard), media cetak dan website/media sosial





No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
		website dan media sosial				
2	Menyediakan rubrik, dokumentasi, dan publikasi konsultasi yang mudah diakses	Menyediakan dokumentasi dan publikasi konsultasi yang mudah diakses melalui subsite mataram.pom.go.id	-	-	Dokumentasi dan publikasi konsultasi tidak dapat diakses oleh masyarakat luas	dokumentasi dan publikasi konsultasi dapat diakses oleh masyarakat luas melalui subsite mataram.pom.go.id

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Laporan Kinerja Interim TW3 Tahun 2023 dan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi Indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Mataram telah melampaui target renstra tahun 2024, sehingga diusulkan untuk dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2024. Target indikator kinerja yang semula pada renstra sebesar 4,60, dinaikkan menjadi 4,95.

7. PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK

Persentase UMKM yang memenuhi standar merupakan indikator baru yang mulai diukur Tahun 2022, indikator ini sebelumnya hanya diukur di unit kerja pusat. terdapat perbedaan Definisi UMKM yang memenuhi standar untuk masing-masing jenis komoditi produk. UMKM Pangan yang memenuhi standar yaitu UMK yang menerima surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai sesuai Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan. Namun perhitungan untuk UMK pangan olahan disesuaikan berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) yang memberikan batas waktu maksimal pemeriksaan sarana hingga 12 bulan setelah izin terbit sehingga perhitungan capaian dilakukan terhadap UMK Pangan yang telah memiliki IP CPPOB dan telah dilakukan pemeriksaan sarana.

UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar yaitu UMKM yang menerima surat rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap baik untuk Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Tahap I atau Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Tahap I. Sedangkan UMKM Kosmetik yang memenuhi standar yaitu UMKM yang menerima Persetujuan denah atau Surat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) atau SK penerbitan nomor notifikasi kosmetik atau Surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik



**PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023****Tabel 3.53** Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik Yang Baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat Dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja BBPOM Di Mataram	Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik	79,0	93,33	118,14	Sangat Baik

Realisasi Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik Tahun 2023 sebesar 93,33 telah melewati target 79,00 dengan nilai pencapaian indikator sebesar 118,14% dengan kriteria "sangat baik".

Tabel 3.54 Realisasi UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Berdasarkan Jenis Komoditi Tahun 2023

No	Jenis Komoditi	Jumlah UMKM yang didampingi	Jumlah UMKM yang Memenuhi Standar	% UMKM yang MS
1	Obat tradisional	2	2	100.00
2	Kosmetik	5	5	100.00
3	Pangan Olahan	45	36	80.00
TOTAL		52.00	43.00	93.33

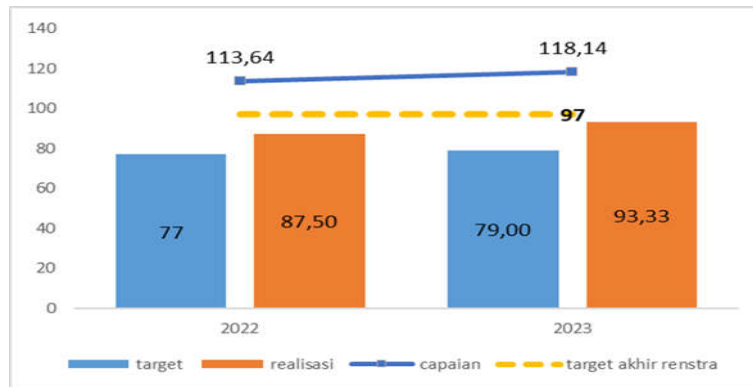
UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar sebanyak 36 sarana yang terdiri dari 17 UMKM yang didampingi sesuai pedoman pendampingan dari kegiatan Balai Tahun 2023, 3 UMKM yang didampingi sesuai pedoman pendampingan dari kegiatan Magang Bersertifikat MBKM Tahun 2023, 4 UMKM yang didampingi sesuai pedoman pendampingan dari kegiatan Tahun 2022 dan 12 UMKM yang didampingi namun tidak sesuai pedoman pendampingan Tahun 2023.

UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar sebanyak 2 sarana yang terdiri dari 2 sarana UMOT yang menerima rekomendasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (SPA CPOTB) secara Bertahap tahap I. Sedangkan UMKM Kosmetik yang memenuhi standar sebanyak 5 sarana yang terdiri dari 1 sarana Industri Golongan B menerima Persetujuan Denah, 2 sarana Industri Golongan A menerima Surat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan A, 1 badan usaha pemohon notifikasi menerima Rekomendasi Pemohon Notifikasi dan 1 industri kosmetik golongan B menerima serta Notifikasi Produk.





PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022



Gambar 3.33. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Realisasi dan persen capaian Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2022.

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi indikator ini Tahun 2023 yang telah melampaui target akhir periode renstra pada dokumen reuiu renstra 2020-2024 dilakukan reuiu dan penyesuaian target akhir periode renstra (Tahun 2024) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target akhir periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reuiu Renstra sebesar 81% disesuaikan menjadi 97% pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reuiu Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik	81	93,33	115,22%	Tercapai

Realisasi Persentase Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik pada Tahun 2023 (93,33%) jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reuiu Renstra (81%), telah tercapai sebesar 115,22%.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut:

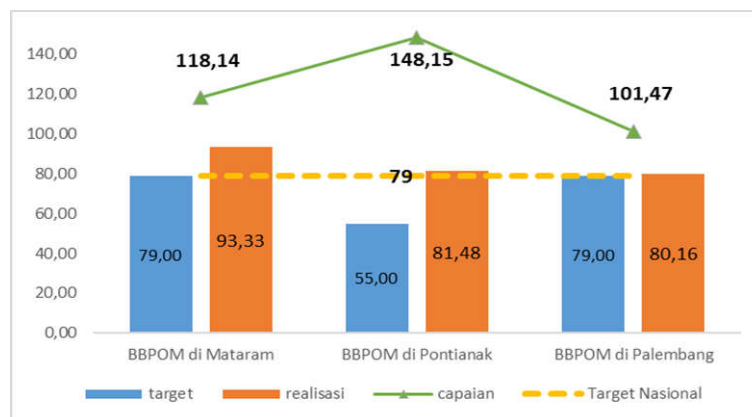




Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik	97	93,33	96,22 	Akan Tercapai

Realisasi Persentase Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik pada Tahun 2023 (93,33%) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (97%), telah tercapai sebesar 96,22%. Oleh sebab itu, target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLAS TER



Gambar 3.34. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik Yang Baik Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster

Realisasi BBPOM di Mataram tertinggi jika dibandingkan dengan BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palembang. Ketiga BBPOM dalam satu klaster telah melampaui target masing-masing dan target nasional.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Faktor yang mendorong terlampaiunya target pendampingan yaitu program Inovasi Gerakan Lintas Lembaga Mengawal Produk UMKM (Gemilang Pro-UMKM) telah dapat disinergikan dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Gemilang Pro-UMKM telah disusun sesuai dengan tahapan pendampingan dengan memperkaya peran lintas lembaga dalam melakukan pendampingan UMKM di provinsi NTB. Lintas lembaga yang telah tergabung yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta dari Universitas. Namun jejaring yang terbentuk belum merata baik di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota sehingga belum maksimal dalam melakukan pendampingan.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA



PENUTUP

Sinergi lintas lembaga dimulai dengan penetapan target pendampingan yang berasal dari masukan OPD Dinas sehingga memungkinkan Dinas untuk memberikan dukungan anggaran dalam pelaksanaan pendampingan karena menjadi capaian Dinas. Pelaksanaan tahapan proses pendampingan yang dilaksanakan mulai Februari - November perlu disinergikan dengan program yang ada di masing-masing OPD Dinas agar tahapan proses dari penetapan target hingga pendampingan penerbitan izin lebih terarah. Namun perlu menjadi perhatian dalam penyusunan target mengingat data sarana yang ada di masing-masing OPD Dinas belum seragam sehingga memerlukan verifikasi ke calon target untuk memastikan kesesuaian sarana, jenis produk dan komitmen dari pelaku usaha dimana dari 647 UMKM yang terdata hanya diperoleh 30 UMKM yang menjadi target potensial.

Selain itu, pelaksanaan pendampingan dapat dilakukan lebih intensif dengan membentuk fasilitator yang berasal dari mahasiswa yang sedang melaksanakan PKL di Balai dan petugas penyuluh yang ada di OPD Dinas. Fasilitator dapat membantu dalam penyusunan dokumen persyaratan terutama untuk pangan olahan sehingga dapat mempercepat penyelesaian dimana kelengkapan dokumen CPPOB menjadi hambatan bagi UMKM. Oleh sebab itu, petugas BBPOM dapat mengurangi peran sebagai fasilitator dan lebih fokus dalam melakukan evaluasi permohonan yang diajukan sehingga dapat mempercepat proses serta mendampingi pelaku usaha yang diluar target pendampingan dimana 12 UMKM dari 18 UMKM yang konsultasi mandiri dapat difasilitasi untuk memenuhi standar. Pembekalan kepada petugas fasilitator sangat penting untuk memberikan pemahaman yang sama terkait tahapan proses dan persyaratan yang harus dipenuhi, namun terdapat aspek penyusunan denah bangunan dan pengendalian proses produksi belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh fasilitator sehingga memerlukan pendampingan lebih lanjut oleh petugas Balai.

Pelaksanaan desk setelah pendampingan sebelum pengajuan juga berperan dalam peningkatan capaian, dimana pelaku usaha akan bertemu dengan evaluator untuk melihat kelengkapan dokumen permohonan sehingga meminimalkan kemungkinan dokumen permohonan dikembalikan atau ditolak. Kegiatan desk juga sekaligus untuk mencari solusi jika pelaku usaha mengalami kendala / hambatan dalam menyusun dokumen permohonan. Namun upaya yang dilakukan oleh petugas untuk mendorong percepatan proses pendampingan sangat dipengaruhi komitmen dari pelaku usaha untuk melengkapi dokumen permohonan akibat proses pendampingan yang dirasa terlalu panjang.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Untuk meningkatkan capaian ini, perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Memperkuat inovasi Gemilang Pro-UMKM dengan melibatkan lebih banyak lintas lembaga terkait baik di tingkat provinsi dan kabupaten / kota.
- Melakukan verifikasi ke pelaku usaha untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria dan menilai komitmen pelaku usaha dalam menyelesaikan program pendampingan.





- Meningkatkan kapasitas pengetahuan fasilitator dalam penyusunan denah bangunan dan pengendalian proses produksi
- Menyusun rencana kerja dengan lini masa yang lebih singkat untuk percepatan pendampingan UMKM.

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.55 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik	79	93,33	118,14	81.795.000	81.413.100	99,53	1,19	0,19

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi (IE) sebesar 1,19 lebih besar dari standar efisiensi (1), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien, dengan capaian tingkat efisiensi sebesar 0,19. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian indikator maupun sasaran.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi Penetapan Target Target UMKM Bersama lintas sektor terkait yang mengikuti program pendampingan.
- Bimbingan Teknis bagi Fasilitator Pendamping UMKM yang dilaksanakan bagi mahasiswa magang.
- Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi BBPOM di Mataram yang melaksanakan pendampingan kepada UMKM.
- Layanan konsultasi bagi pelaku usaha yang sedang proses pendampingan secara daring maupun luring baik dilaksanakan selama jam kerja maupun diluar jam kerja.
- Desk Pre-Audit Izin Penerapan CPPOB bagi UMKM untuk evaluasi kecukupan dan kesesuaian dokumen



**TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA**

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Melaksanakan pendampingan UMKM secara intensif sesuai perencanaan yang telah dibuat.	Penyusunan kerangka acuan kegiatan Gemilang Pro UMKM yang dimonitor pelaksanaannya setiap bulan	-	-	Capaian UMKM yang memenuhi standar sebanyak 28 UMKM terdiri dari 19 UMKM pangan, 7 UMKM kosmetik dan 2 UMKM OT	Capaian UMKM yang memenuhi standar sebanyak 43 UMKM terdiri dari 36 UMKM pangan, 5 UMKM kosmetik dan 2 UMKM OT
2	Memperkuat inovasi Gemilang Pro-UMKM dengan melibatkan lebih banyak <i>stakeholder</i> terkait	Pelaksanaan Koordinasi yang diikuti oleh OPD Dinas dan Universitas untuk menyusun rencana kerja dan pembagian peran dalam pendampingan	-	-	Tidak memiliki Fasilitator Pendamping UMKM	Terbentuk Fasilitator Perndamping terdiri dari 30 fasilitator dari OPD Dinas dan 12 fasilitator mahasiswa

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Laporan Kinerja Interim TW3 Tahun 2023 dan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan didapatkan bahwa realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik telah melampaui target renstra tahun 2024, sehingga diusulkan untuk dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2024. Target indikator kinerja yang semula pada renstra sebesar 81%, dinaikkan menjadi 97%.



**SASARAN STRATEGIS - 5****Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)
Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram**

Terdapat 4 Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis kelima yaitu tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, jumlah Desa Pangan Aman serta jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Capaian keempat indikator kinerja pada Sasaran Strategis kelima sebagai berikut:

Tabel 3.56 Capaian Kinerja Sasaran Strategi 5 BBPOM di Mataram Tahun 2023

NO SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,3	96,72	100,44	sangat baik
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	84	93,00	110,71	sangat baik
		3. Jumlah desa pangan aman	25	25,00	100,00	baik
		4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8	8,00	100,00	baik

Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja serta analisis capaian masing – masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis 5 di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan BBPOM di Mataram melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang meliputi KIE melalui media cetak, KIE langsung ke masyarakat dan KIE melalui media elektronik.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: (i) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (ii) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; (iii) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; (iv) Tingkat minat terhadap informasi Obat dan Makanan.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
< 65,00	Kurang efektif
65,01 – 75,00	Cukup efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM pada Tahun 2023 (minimal 30 responden per triwulan). Teknik survei dapat dilakukan *face to face* interview, penyebaran kuisisioner dan survei daring.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, %CAPAIAN TAHUN 2023

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Tingkat Efektivitas KIE pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.57 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,30	96,72	100,44	Sangat Baik

Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada Tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 96,30 dari target 96,72 sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 100,44% dengan Kategori “sangat baik”.

Realisasi ini diperoleh dari hasil survei terhadap 299 orang responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BBPOM di Mataram selama Tahun 2023. Skor interpretasi efektivitas yang dicapai berada pada range 95,01 – 100,00 dengan kategori “Sangat Efektif Sekali”

Hasil survei diperoleh dari Biro Hukum dan Organisasi BPOM selaku pihak yang mengolah data hasil survei.



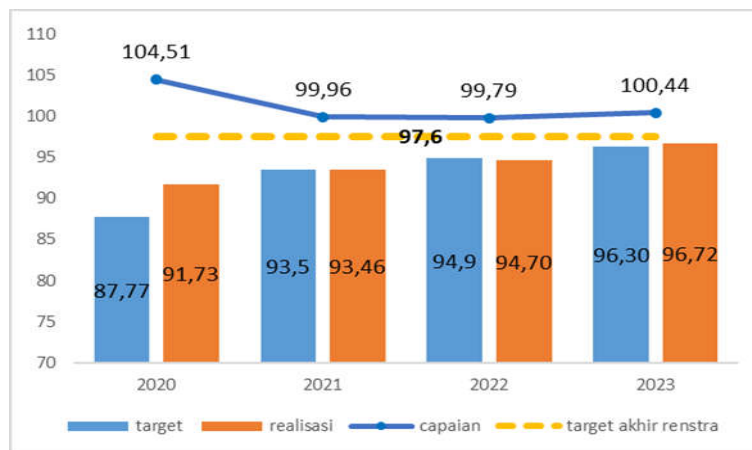


Tabel 3.58 Nilai Indeks Per Kriteria Tahun 2023

No	Parameter Penilaian	Nilai Indeks			
		Tahun 2023		Tahun 2022	
		Skala 100	Skala 4	Skala 100	Skala 4
1	Ragam Kegiatan	96,44	3,86	93,87	3,75
2	Pemahaman	97,62	3,9	94,9	3,79
3	Manfaat	97,74	3,91	95,98	3,84
4	Minat	92,73	3,71	91,48	3,66
Total Indeks		96,72	3,87	94,7	3,79

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa komponen penilaian indeks efektifitas KIE yang paling rendah adalah pada parameter minat, sedangkan yang tertinggi adalah parameter manfaat.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.35. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan makanan Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Realisasi dan persen capaian Tingkat Efektivitas KIE Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2022 dan 2021. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 realisasi 2023 lebih tinggi, namun persen capaiannya lebih rendah disebabkan target 2020 yang lebih rendah.

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE

Berdasarkan reviu dari Biro Hukum dan Organisasi BPOM sebagai pengampu indikator kinerja, target akhir periode Renstra (target Tahun 2024) dilakukan penyesuaian. Target pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024 sebesar 97,80 disesuaikan menjadi 97,60 yang dituangkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra sebagai berikut:





Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97,8	96,72	98,90%	Tercapai

Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Tahun 2023 (96,7) jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra (97,80), telah tercapai sebesar 98,90%.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%CAPAIAN	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97,6	96,72	99,10	Akan tercapai

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target di Tahun akhir renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (97,60) telah tercapai sebesar 99,10%, sehingga target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER



Gambar 3.36. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Tingkat Efektivitas KIE Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster

Realisasi BBPOM di Mataram lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Pontianak dan lebih rendah dari BBPOM di Palembang. Realisasi BBPOM di Mataram dan BBPOM di Palembang telah melampaui target masing-masing, namun hanya BBPOM di pontianak yang belum mencapai target nasional.





ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Capaian indikator Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan telah melebihi target yang ditetapkan disebabkan karena seluruh nilai parameter penilaian mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Parameter penilaian yang mengalami nilai dan peningkatan terbesar yaitu pemahaman dan manfaat. Hal tersebut sebagai hasil dari terobosan dan inovasi KIE berkelanjutan sehingga meningkatkan pemahaman dan dinilai bermanfaat bagi audiens/masyarakat.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat meningkatkan capaian Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, perlu dilakukan:

- Terobosan dan inovasi KIE berkelanjutan yang dapat menarik minat masyarakat melalui ragam kegiatan dan media sesuai karakteristik dan kebutuhan informasi target audiens.
- Evaluasi lebih lanjut terhadap konten materi dan konsep kegiatan KIE yang diselenggarakan. Konten materi KIE sebaiknya relevan dengan isu Obat dan Makanan terkini serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat dengan mempertimbangkan budaya dan bahasa setempat yang mudah dipahami.
- Pilihan media KIE dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan paparan media yang banyak diakses target audiens.

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.59 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,3	96,72	100,44	135.660.000	134.990.370	99,51	1,01	0,01

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi (IE) sebesar 1,01 lebih besar dari standar efisiensi (1), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien, dengan capaian tingkat efisiensi sebesar 100%. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian indikator maupun sasaran.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh BBPOM di Mataram untuk menunjang peningkatan realisasi indikator ini adalah:

- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui penyebaran informasi/Sosialisasi 17 kali, ULPK sebanyak 246 kali, Pameran 13 kali, medsos 639 kali, media cetak/elektronik





23 kali, sebagai narasumber 25 kali, Sekolah dengan PJAS aman sebanyak 67 sekolah, Desa Pangan Aman sebanyak 18 Desa, dan Pasar Aman Berbasis Komunitas sebanyak 6 Pasar.

- Penyampaian informasi melalui program inovasi KIE Keluarga Sadar Pangan Aman (GASPAMAN) dan MANIS (Minggu Asik Ngobrol Informatif) untuk memberikan informasi terkait keamanan pangan kepada komunitas terkecil yaitu keluarga.
- Kegiatan KIE menggunakan strategi pentahelix yaitu dengan melibatkan akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah dan media.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Melakukan kerjasama dengan <i>content creator</i> lokal dalam rangka meningkatkan minat peserta KIE	-	Melakukan kerjasama dengan <i>content creator</i> lokal dalam rangka meningkatkan minat peserta KIE melalui media sosial.	TW 3 2024	-	-

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Laporan Kinerja Interim TW3 Tahun 2023 dan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan didapatkan bahwa realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan telah melampaui target renstra tahun 2023 namun masih cukup jauh terhadap target renstra tahun 2024, sehingga diusulkan untuk dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2024. Target indikator kinerja yang semula pada renstra sebesar 97,8, diturunkan menjadi 97,6.

2. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

Anak usia sekolah merupakan salah satu kelompok yang sangat penting untuk diperhatikan. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan kualitas suatu negara. Kebiasaan konsumsi anak usia sekolah yang umum diketahui adalah jajan pangan yang biasanya diperoleh dari kantin sekolah maupun pedagang di sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce.

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Pangan jajanan berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah, terdiri atas pangan siap saji, pangan olahan dari industri besar (MD/ML), pangan olahan IRTP, serta buah





potong. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari pangan jajanan karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan jajanan dan juga pembinaan produsen, penjual, serta konsumen harus dilakukan secara holistik agar terjamin keamanannya sejak diproduksi hingga dikonsumsi.

Keamanan dan mutu produk pangan yang beredar di lingkungan sekolah ditentukan oleh kebijakan sekolah, tingkat pengetahuan dan kepedulian penyedia PJAS yang ada di sekitar lingkungan sekolah serta pengawasan dan pembinaan aktif OPD terkait. Sedangkan keamanan dan mutu produk pangan yang beredar di luar lingkungan sekolah, sangat penting adanya kemandirian dari anak usia sekolah dalam mengawasi diri sendiri dari peredaran pangan yang tidak aman. Oleh karena itu penting adanya kemandirian sekolah dalam penerapan prinsip keamanan pangan yang berdampak tidak hanya untuk lingkungan sekolah tetapi juga di luar sekolah.

Salah satu elemen penting dalam kemandirian sekolah adalah komunitas sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, pedagang PJAS) yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program keamanan pangan di sekolah termasuk mensosialisasikan secara aktif pesan keamanan pangan. Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu, maka perlu dilakukan Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan yang dapat digunakan oleh komunitas sekolah sebagai referensi dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah.

Namun demikian, penjaminan terhadap konsumsi pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi komunitas sekolah, terutama siswa, harus tetap menjadi prioritas. Sasaran utama penyesuaian strategi tersebut dilakukan dengan meningkatkan kesadaran komunitas sekolah serta menggalang komitmen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah untuk memastikan agar pangan jajanan anak usia sekolah terjamin keamanannya.

Lembaga Pendidikan yang target sasaran intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan PJAS dilaksanakan meliputi tahapan: advokasi lintas sektor keamanan PJAS, Sosialisasi Keamanan PJAS, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah, dan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman.

Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman merupakan proses pemberian sertifikat penghargaan kepada sekolah yang memiliki komitmen baik untuk mengimplementasikan program keamanan pangan melalui rencana aksi program keamanan PJAS dan memberdayakan Kader Keamanan Pangan Sekolah. Tujuan pelaksanaan kegiatan Sertifikasi ini adalah untuk mendorong pihak sekolah





memenuhi persyaratan keamanan pangan setelah sebelumnya sekolah melakukan evaluasi mandiri (self assessment) pemenuhan kriteria Sekolah dengan PJAS Aman. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah: (i) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif; (ii) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah; (iii) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023

Realisasi dan capaian indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.60 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	84	93	110,71	Sangat Baik

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada Tahun 2023 sebanyak 93 sekolah telah melebihi target 84 sekolah, sehingga nilai pencapaian indikator menjadi sebesar 110,71 % dengan kriteria "sangat baik".

Realisasi Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS sebanyak 93 sekolah berdasarkan sebaran kabupaten/kota, terdiri dari tingkat SD/MI, hingga tingkat SMA/SMK/MA yaitu: sebanyak 8 sekolah di Kab. Lombok Utara, 12 sekolah di Kota Mataram, 16 sekolah di Kab. Lombok Barat, 20 sekolah di Kab. Lombok Tengah, 17 sekolah di Kab. Lombok Timur, 12 sekolah di Kab. Sumbawa, dan 8 sekolah di Kab. Bima. Terdapat 9 sekolah yang diintervensi merupakan tambahan realisasi atas permintaan dari sekolah.

Realisasi ini diperoleh dari seluruh tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.61 Realisasi Tahapan Kegiatan Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

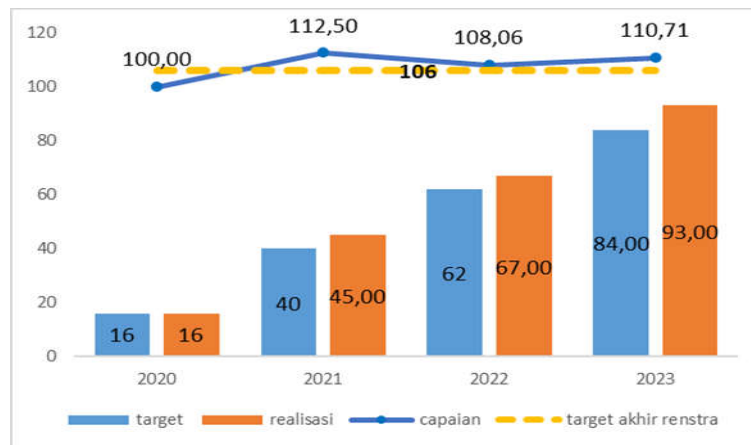
No	Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Realisasi (%)
1	Advokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20	20
2	Sosialisasi keamanan pangan	10	10
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15	15
4	Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan	10	10





5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah		
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	5	5
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	10	10
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20	20
7	Pengawasan	10	10
TOTAL (%)		100	100

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.37. Perbandingan Target, Realisasi, dan %CAPAIAN Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan Tahun 2020

Realisasi Tahun 2023 merupakan akumulasi dari jumlah sekolah yang diintervensi Tahun 2023 ditambah dengan pengawasan sekolah yang telah diintervensi Tahun 2020-2022, sehingga realisasi dan targetnya selalu meningkat tiap Tahun.

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Target akhir periode Renstra (target Tahun 2024) indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024 dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sama yaitu 106.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%CAPAIAN	Kategori
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	106	93	87,74	Akan tercapai

Realisasi jumlah Sekolah dengan PJAS Aman jika dibandingkan dengan target di akhir renstra telah tercapai sebesar 87,74%, sehingga target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA

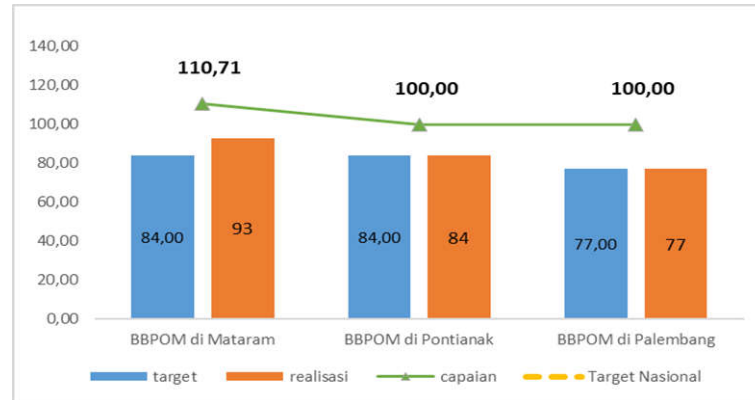


AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER



Gambar 3.38. Perbandingan Target, Realisasi, %Capaian Indikator Sekolah dengan PJAS Aman BBPOM di Mataram Tahun 2023 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Seluruh BBPOM telah mampu mencapai target yang ditetapkan masing-masing. Realisasi dan persen capaian BBPOM di Mataram tertinggi bila dibandingkan dengan BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palembang.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Tingginya capaian indikator ini yang jauh melampaui target disebabkan karena adanya capaian yang melebihi target di Tahun 2021 dan Tahun 2023 (realisasi bersifat akumulasi capaian Tahun sebelumnya dalam periode Renstra). Hal ini terjadi karena adanya permintaan dari sekolah-sekolah tersebut untuk diikutsertakan dalam program sekolah dengan PJAS aman atau melakukan refleksi program Sekolah dengan PJAS Aman secara mandiri.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar capaian jumlah sekolah dengan PJAS aman dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode berikutnya, rekomendasi yang perlu dilakukan adalah:

- Bersinergi dengan lintas sektor terkait yang memiliki program sejenis yaitu: Dinas Kesehatan Kota/Kab dengan Program Kantin Sekolah Sehat dan Dinas Pendidikan dengan Program Sekolah Sehat dan Sekolah Ramah Anak. Sehingga memiliki luaran yang sama untuk semua Dinas yang terkait.
- Pendampingan dari lintas sektor terkait, antara lain Dinas Pendidikan Provinsi NTB, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, Kemenag Kota Mataram, Kemenag Kabupaten Lombok Tengah, Kemenag Kabupaten Lombok Barat, Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat



**ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA****Tabel 3.62** Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	84	93,00	110,71	490.779.100	487.834.213	99,40	1,11	0,11

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi sebesar 1,11 lebih besar dari standar efisiensi (1), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien, dengan tingkat efisiensi sebesar 0,11. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian indikator maupun sasaran.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa program atau kegiatan yang dilakukan untuk menunjang tercapainya indikator kinerja ini adalah:

- Advokasi Lintas Sektor: Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu dengan Program Desa Pangan Aman dan Program Pasar Aman Berbasis Komunitas Dilaksanakan di Kab. Lombok Tengah tanggal 14 Maret 2023, dengan jumlah peserta sebanyak 86 orang dan Kab. Lombok Barat tanggal 20 Maret 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 73 orang.
- Sosialisasi Keamanan Pangan: Sosialisasi Keamanan Pangan dilaksanakan sebanyak 6 kali. Sosialisasi Keamanan Pangan di Provinsi NTB Tahun 2023 diberikan kepada 306 peserta yang terdiri dari 190 peserta siswa, 95 peserta guru dan 21 peserta dari unsur pengawas baik pengawas kemenag maupun dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota.
- Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah: Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah dilaksanakan secara luring di Kota Mataram tanggal 8 Juni 2023 yang dihadiri oleh peserta sekolah intervensi: 12 (duabelas belas) sekolah Kabupaten Lombok Tengah dan 12 (duabelas belas) sekolah di Kabupaten Lombok Barat dan 2 sekolah dari Kota Mataram.
- Pemberian Paket Edukasi: Pada kegiatan Bimtek masing-masing sekolah diberikan paket edukasi berupa produk informasi yang memuat pesan keamanan pangan dalam bentuk Permainan/Games Edukasi berupa Ular tangga Keamanan Pangan, Materi Keamanan Pangan dalam bentuk audio visual, Media cetak keamanan pangan serta Perlengkapan hygiene sanitasi penjaja PJAS, yang terdiri dari celemek, topi dan penjepit makanan kepada seluruh sekolah peserta.
- Monitoring Kader Keamanan Pangan Sekolah: Tahapan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke sekolah maupun koordinasi dan komunikasi melalui Whatsapp group kader dengan BBPOM di Mataram dalam rangka pemantauan kegiatan intervensi pangan di sekolah.





Adapun kegiatan yang dimonitoring adalah pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah yang tertuang dalam SK yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, adanya komitmen Kepala Sekolah secara tertulis dan adanya rencana aksi sekolah yang berisi program Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah secara mandiri. Telah dibuat google sites untuk pengumpulan dokumentasi dan bukti kegiatan Intervensi Keamanan Pangan sehingga pemantauan lebih mudah dilaksanakan.

- Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman: Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman dilakukan dengan melakukan kunjungan ke sekolah yang diintervensi dengan melakukan Pengisian Formulir Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2023, pengisian dilakukan dengan menggunakan data dari Monitoring Kader Keamanan Pangan Sekolah dan data dari Kuisisioner pengetahuan, sikap dan perilaku komunitas sekolah, selain itu juga dilaksanakan sampling dan pengujian oleh petugas bidang infokom/bidang pengujian Balai Besar/Balai POM. Sertifikat Sekolah PJAS Aman diberikan kepada sekolah yang telah melengkapi semua bukti dukung yang telah ditetapkan dengan skor minimal 70.
- Pengawalan Sekolah Intervensi Tahun sebelumnya: Dilaksanakan pengawalan kepada 67 sekolah yang telah diintervensi Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022. Kegiatan pengawalan dilaksanakan dengan kunjungan petugas BBPOM di Mataram ke sekolah untuk melakukan sampling dan pengujian dengan parameter uji kimia menggunakan rapid test kit dan memastikan sekolah telah memperbarui SK Tim Keamanan Pangan sekolah, komitmen kepala sekolah dan rencana aksi sekolah mandiri. Komunikasi dan penyebaran informasi juga tetap dilakukan melalui whatsapp grup yang telah dibentuk.
- Pendampingan BBPOM Mataram yang berkelanjutan kepada beberapa sekolah sehingga dapat diajukan dalam Lomba Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2023 yaitu: SDN 19 Cakranegara yang diintervensi Tahun 2020 di Kota Mataram, SMPN 1 Lembar yang diintervensi Tahun 2023 di Kabupaten Lombok Barat dan SMA Negeri 5 Lembar yang diintervensi Tahun 2020 di Kabupaten Lombok Barat.
- Pengimbasan KIE keamanan pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah kepada sekolah lain dalam satu gugus.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tidak terdapat rekomendasi pada laporan kinerja interim TW3 Tahun 2023 dan laporan kinerja Tahun 2022.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
NIHIL						





INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023 dan laporan kinerja tahun 2022, maka dilakukan pemanfaatan informasi dengan melakukan himbauan agar para kader keamanan pangan sekolah dapat mengembangkan berbagai inovasi yang mendukung pelaksanaan program PJAS di sekolah. Diharapkan program Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah dapat terlaksana dengan baik dan semakin banyak sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan sehingga target renstra tahun 2024 bisa lebih cepat tercapai.

3. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Program Desa Pangan Aman adalah program yang melibatkan desa dan kelurahan agar memiliki kemandirian dalam menyiapkan sumber daya, kemampuan, dan kemauan dalam mewujudkan keamanan pangan yang meliputi produksi, peredaran, serta konsumsi pangan aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa dan kelurahan di wilayahnya secara berkelanjutan.

Peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta seluruh lapisan masyarakat juga turut menentukan keberhasilan dari program ini hingga dapat dirasakan dampak dan manfaatnya. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan Desa dan Kelurahan Pangan Aman karena dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif. Oleh karena itu, peran aktif dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mereplikasi program menjadi kunci utama suksesnya Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman ini.

Adapun sasaran dari program ini adalah desa/kelurahan yang berada di Nusa Tenggara Barat dengan kriteria sebagai berikut:

- Kepala desa/lurah mempunyai komitmen untuk melaksanakan program keamanan pangan secara berkelanjutan,
- Mempunyai potensi untuk perkembangan ekonomi desa melalui program keamanan pangan seperti Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), warung/toko/ritel pangan desa,
- Memiliki program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), khususnya di bidang pangan,
- Mempunyai potensi untuk pengembangan wisata,
- Mempunyai potensi untuk pengembangan industri berbasis pangan lokal,
- Membutuhkan bantuan perbaikan keamanan pangan terkait adanya kasus stunting, penyakit akibat pangan (foodborne diseases), termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan,





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

- Memiliki program yang dapat disinergikan dan dikolaborasikan dengan program “Keamanan Pangan Desa” yang akan dilaksanakan, misalnya: Rumah Desa Sehat (Program Kemendesa PDTT), Pekarangan Pangan Lestari (Program Kementan), Kampanye Destinasi Wisata (Program Kemenparekraf), Kampung Keluarga Berkualitas, Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal.
- Belum pernah diintervensi oleh UPT BPOM.

Tahapan kegiatan pembentukan Desa Pangan Aman yaitu: (1) Advokasi Kelembagaan Desa, (2) Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) untuk perkuatan kapasitas desa, (3) Bimbingan Teknis Komunitas untuk pemberdayaan komunitas desa, (4) Fasilitasi Keamanan Pangan berupa pendampingan praktik keamanan pangan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa dan pelaku usaha pangan Desa dalam menerapkan keamanan pangan, dan (5) Pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan, (6) Monitoring dan Evaluasi.

Desa Pangan Aman hasil intervensi adalah desa yang memiliki: (i) Kader keamanan pangan desa yang aktif; (ii) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa; (iii) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023

Realisasi dan capaian indikator Jumlah desa pangan aman pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.63 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%CAPAIAN	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25	25	100,00	Baik

Realisasi jumlah desa pangan aman pada Tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebanyak 25 desa dari target 25 desa, sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 100% dengan Kriteria “baik”.

Desa/kelurahan yang diintervensi Tahun 2023 adalah Desa Setiling, Desa Sintung, Desa Teruwai dan Desa Lendang Are di Kabupaten Lombok Tengah, serta Desa Penimbung, Desa Cendi Manik dan Desa Batu Kumbang di Kabupaten Lombok Barat, ditambah pengawalan desa/kelurahan yang diintervensi Tahun 2020, yaitu: Kelurahan Sapta Marga dan Kelurahan Kekalik Jaya di Kota Mataram, serta Desa Saba dan Desa Darek di Kabupaten Lombok Tengah; Tahun 2021, yaitu: Desa Penyaring,





Desa Mama, Desa Pernek, Desa Poto, dan Desa Dalam di Kabupaten Sumbawa, serta Desa Bolo dan Desa Wawo di Kabupaten Bima; Tahun 2022 yaitu: Desa Kembang Kuning, Desa Dasan Borok, Desa Sajang dan Desa Sembalun Bumbung di Kabupaten Lombok Timur, serta Desa Bayan dan Desa Santong di Kabupaten Lombok Utara.

Realisasi ini diperoleh dari seluruh tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.64 Realisasi Tahapan Kegiatan Jumlah Desa Pangan Aman

No	Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Realisasi (%)
1	Adokasi Kelembagaan Desa	20	20
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	5	5
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15	15
4	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15	15
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10	10
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10	10
7	Monitoring dan Evaluasi	10	10
8	Lomba Desa Pangan Aman	5	5
9	Pengawalan Tahun sebelumnya	10	10
TOTAL (%)		100	100,0

Jumlah Desa Pangan Aman dihitung dari akumulasi jumlah desa mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi desa pangan aman.

Tabel 3.65 Rincian Jumlah Desa Pangan Aman yang Diintervensi

Tahun	Kabupaten/Kota Lokus Intervensi	Desa	
		Target	Realisasi
2020	Kota Mataram	2	2
	Kab. Lombok Tengah	3	3
	Total	5	5
2021	Kab. Bima	2	2
	Kab. Sumbawa	5	5
	Tambahan sekolah*)		
Total	7	7	
2022	Kab. Lombok Utara	2	2
	Kab. Lombok Timur	4	4
	Total	6	6
2023	Kab. Lombok Tengah	4	4
	Kab. Lombok Barat	3	3
	Total	7	7
Grand Total		25	25





PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.39. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Realisasi Tahun 2023 merupakan akumulasi dari jumlah desa yang diintervensi Tahun 2023 ditambah dengan pengawalan desa yang telah diintervensi Tahun 2020-2022, sehingga realisasi dan targetnya selalu meningkat tiap Tahun.

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Target akhir periode Renstra (target Tahun 2024) indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024 dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sama yaitu 31.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%CAPAIAN	Kategori
Jumlah desa pangan aman	31	25	80,65	Akan tercapai

Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra telah tercapai sebesar 80,65%, sehingga target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER



Gambar 3.40. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Realisasi seluruh BBPOM sudah mencapai target yang ditetapkan masing-masing. Persentase capaian masing-masing BBPOM pun berada di angka yang sama, yakni 100%.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian indikator kinerja jumlah Desa Pangan Aman adalah dilaksanakannya audiensi dan koordinasi dengan Bupati/Walikota bersama OPD terkait sehingga mendapatkan dukungan dan komitmen dari pimpinan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Terobosan baru berupa inovasi dalam pelaksanaan program KIE secara langsung kepada masyarakat desa melalui pameran produk yang tidak memenuhi ketentuan atau produk ilegal dan layanan uji cepat parameter uji kimia menggunakan rapid test terus ditingkatkan pelaksanaannya.

Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) sebanyak 21 orang per desa memiliki peranan penting dalam menggerakkan aktifitas penerapan keamanan pangan di desa. Pemanfaatan aplikasi *Zoom Meeting* dan *Whatsapp chat* juga sangat membantu para kader dalam berkoordinasi dengan petugas sehingga diskusi dan komunikasi terkait pelaksanaan tahapan program Desa Pangan Aman tetap dapat dilaksanakan dan mencapai sasaran yang diharapkan.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat terus meningkatkan keberhasilan program Desa Pangan Aman, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:





- Pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan perencanaan sehingga target progress yang telah ditetapkan dapat dicapai,
- Mendorong pemerintah daerah untuk mereplikasi dan mengimplementasikan program Desa Pangan Aman secara mandiri,
- Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman untuk mengatasi kendala jarak dan SDM,
- Menyesuaikan bentuk penyampaian materi keamanan pangan agar lebih mudah dipahami dan dipraktekkan oleh kader dan komunitas,
- Pengawasan terhadap desa yang sudah diintervensi agar terus menjalankan program Desa Pangan Aman secara mandiri,
- Koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan sinkronisasi kegiatan di Desa, seperti program Kampung KB (BKKBN), Kampung Sehat (POLRI), dan Desa Bersinar (BNN).

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.66 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Jumlah desa pangan aman	25	25,00	100,00	667.856.700	664.760.289	99,54	1,005	0,005

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi sebesar 1,005 lebih besar dari standar efisiensi (1), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien, dengan capaian tingkat efisiensi sebesar 0,005. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian indikator maupun sasaran.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Adapun program atau kegiatan yang telah dilakukan adalah:

1. Penguatan Kapasitas Desa, melalui:
 - Advokasi Kelembagaan Desa, untuk melakukan penguatan kapasitas di Desa diperlukan integrasi program yaitu mengintegrasikan pelaksanaan keamanan pangan disepanjang rantai pangan melalui 3 (tiga) pilar keamanan pangan yaitu Pemerintah/pemangku kepentingan di daerah dengan melibatkan peran aktif pelaku usaha dan masyarakat. Dilaksanakan di Kab. Lombok Tengah tanggal 14 Maret 2023, dengan jumlah peserta sebanyak 86 orang dan Kab. Lombok Barat tanggal 20 Maret 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 73 orang.
2. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan:
 - Memberikan Pelatihan Kader Keamanan Desa, dilaksanakan di Kab.Lombok Tengah tanggal 8-9 Mei 2023, dan di Kab. Lombok Barat tanggal 11-12 Mei 2023.





- Bimtek untuk Komunitas Desa yang diadakan di Kab. Lombok Tengah 14-15 Juni 2023 (Desa Setiling), tanggal 19-20 Juni 2023 (Desa Sintung) dan tanggal 12-13 Juni 2022 (Desa Teruwai); di Kab. Lombok Barat tanggal 27-28 Juli 2023 (Desa Penimbung dan Desa Cendi Manik), tanggal 25-26 Juli 2023 (Desa Batu Kumbang).
- Fasilitasi keamanan pangan kepada komunitas desa, dan pengawasan keamanan pangan desa, dengan memberikan pendampingan praktik keamanan pangan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dan pelaku usaha pangan desa dalam menerapkan keamanan pangan, serta pengawasan terhadap penerapan keamanan pangan di desa dilakukan dengan sampling dan pengujian pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya, dilaksanakan di Kab. Lombok Tengah 14-15 Juni 2023 (Desa Setiling), tanggal 19-20 Juni 2023 (Desa Sintung) dan tanggal 12-13 Juni 2022 (Desa Teruwai); di Kab. Lombok Barat tanggal 27-28 Juli 2023 (Desa Penimbung dan Desa Cendi Manik), tanggal 25-26 Juli 2023 (Desa Batu Kumbang).
- Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan SDM yang kompeten

3. Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini kemajuan maupun proses dari pelaksanaan program dievaluasi dan dilakukan identifikasi terhadap hal-hal yang mendukung atau menghambat pelaksanaan program. Pelaksanaan monev dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat tanggal 28 Nopember 2023 dan di Kabupaten Lombok Tengah tanggal 5 Desember 2023.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan atau regulasi sebagai dasar hukum penganggaran dan pelaksanaan Program Prioritas Nasional oleh Pemerintah Desa dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota	Telah mengusulkan pembuatan kebijakan atau regulasi sebagai dasar hukum penganggaran dan pelaksanaan Program Prioritas Nasiona kepada pemerintah daerah	-	-	Belum ada kebijakan atau regulasi yang terbit	Belum ada kebijakan atau regulasi yang terbit
2	Bekerjasama dengan OPD terkait di Provinsi/Kabupaten/Kota tetap memberikan pendampingan kepada Desa yang telah diintervensi untuk melanjutkan Program Prioritas Nasional.	Melakukan pengawalan terhadap Desa yang telah diintervensi untuk melanjutkan	-	-	Dilakukan pengawalan namun belum ada pemerintah daerah yang melakukan	Dilakukan pengawalan namun belum ada pemerintah daerah yang melakukan





No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
		Program Prioritas Nasional			replikasi	replikasi
	Mengefektifkan pelaksanaan Program Prioritas Nasional di Desa intervensi OPD terkait agar dapat melibatkan sebanyak mungkin potensi organisasi masyarakat seperti TP PKK, Gerakan Pramuka maupun organisasi masyarakat lainnya di tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota / Kecamatan / Desa / Kelurahan	Melibatkan Penyuluh Agama yang ditugaskan ke dalam Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	-	-	KKPD belum termasuk unsur penyuluh agama	Penyuluh agama masuk dalam susunan KKPD

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Laporan kinerja pada triwulan sebelumnya digunakan untuk mengevaluasi tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Penundaan tahapan kegiatan akan berimbas pada keterlambatan tahapan berikutnya karena tiap tahap saling terkait dan harus dilaksanakan secara berurutan. Monitoring pencapaian tahapan tiap triwulan dengan melihat laporan kinerja interim ini dilakukan agar perencanaan dilaksanakan secara konsisten, sehingga tidak terjadi keterlambatan baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan.

4. JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

Pasar merupakan ujung tombak keamanan pangan dimana masyarakat sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar rakyat. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methanil Yellow) dan Rhodamin B di pasar rakyat. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah bentuk upaya pemerintah untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar.

Upaya persuasi melalui advokasi dilakukan untuk menggalang komitmen pemerintah daerah, swasta, dan perguruan tinggi di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota tentang pentingnya berbagi tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan pada setiap titik rantai pangan sesuai dengan perannya. Diperlukan kerja sama terpadu terhadap program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

baik dalam bentuk kebijakan dan penganggaran untuk keberlanjutan program, replikasi program PPABK di pasar lain yang belum diintervensi, dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan serta rencana program pengawalan pada Tahun berikutnya, sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Pemangku kepentingan yang diharapkan terlibat secara aktif, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bappeda, asosiasi/organisasi yang menaungi pedagang pasar, dan Lembaga Swadaya Masyarakat/Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam rangka memberdayakan komunitas pasar dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan pasar secara mandiri, dilakukan bimbingan teknis kepada pengelola pasar atau dinas yang membawahi pasar agar peredaran bahan berbahaya di pasar dapat dikendalikan. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar.

Pemberdayaan komunitas pasar dilakukan baik dari sisi *supply*, dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar, maupun pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand*, berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Kepada pedagang pasar perlu dilakukan penyuluhan tentang keamanan pangan, untuk meningkatkan kepedulian dan pengetahuan mereka agar dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya, dan diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023

Realisasi dan capaian indikator jumlah Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.67 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8	8	100% 	Baik

Realisasi jumlah Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada Tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebanyak 8 pasar dari target yaitu 8 pasar, sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 100,00% dengan Kategori “baik”.





Pasar yang diintervensi Tahun 2023 adalah pasar Karang Bulayak di Kabupaten Lombok Tengah, pasar Gerung di Kabupaten Lombok Barat, pengawalan pasar intervensi Tahun 2020 yaitu Pasar Renteng Kabupaten Lombok Tengah dan Pasar Cakranegara Kota Mataram; pengawalan pasar intervensi Tahun 2021 yaitu: Pasar Sila Kabupaten Bima dan Pasar Seketeng Kabupaten Sumbawa, dan pengawalan pasar intervensi Tahun 2022, yaitu: Pasar Tanjung Kabupaten Lombok Timur, Pasar Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Realisasi ini diperoleh dari sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2023 seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.68 Realisasi Tahapan Kegiatan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

No	Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Realisasi (%)
1	Advokasi	20	20
2	Survei Pasar	5	5
3	Bimtek Pengelola Pasar	15	15
4	Sampling dan Pengujian Tahap 1 (Monev Tahap 1)	15	15
5	Penyuluhan	10	10
6	Kampanye	10	10
7	Sampling dan Pengujian Tahap 2 (Monev Tahap 2)	15	15
8	Pengawalan	10	10
TOTAL (%)		100	100

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari akumulasi jumlah pasar mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas, dan terhadap pasar yang diberikan intervensi, terjadi penurunan % TMS cemaran kimia dan mikrobiologi pada kegiatan Monev Tahap 2 dibandingkan Monev Tahap 1.

Tabel 3.69 Rincian Jumlah Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang Diintervensi

Tahun	Kabupaten/Kota Lokus Intervensi	Pasar	
		Target	Realisasi
2020	Kota Mataram	1	1
	Kab. Lombok Tengah	1	1
	Total	2	2
2021	Kab. Bima	1	1
	Kab. Sumbawa	1	1
	Total	2	2
2022	Kab. Lombok Utara	1	1
	Kab. Lombok Timur	1	1
	Total	2	2





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



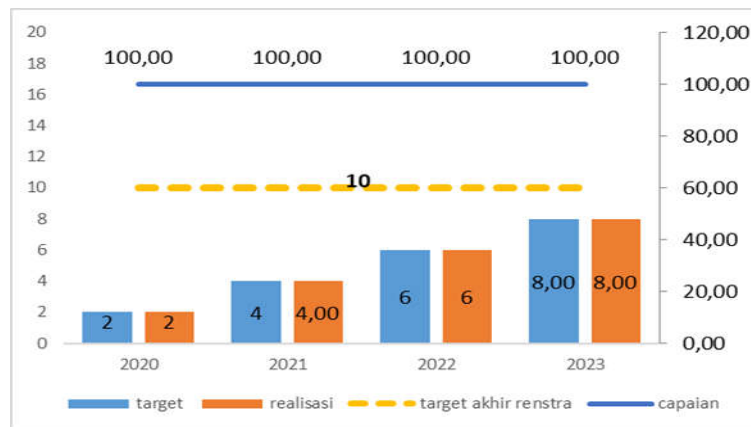
AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

Tahun	Kabupaten/Kota Lokus Intervensi	Pasar	
		Target	Realisasi
2023	Kab. Lombok Tengah	1	1
	Kab. Lombok Barat	1	1
	Total	2	2
Grand Total		8	8

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.341. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Pada Tahun 2023 BBPOM di Mataram melakukan intervensi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas terhadap 2 pasar serta melakukan pengawalan kepada 6 pasar yang menjadi intervensi Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022, sehingga realisasi dan targetnya selalu meningkat tiap Tahun.

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Target akhir periode Renstra (target Tahun 2024) indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024 dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sama yaitu 10.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%CAPAIAN	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	8	80,00 ▲	Akan tercapai





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



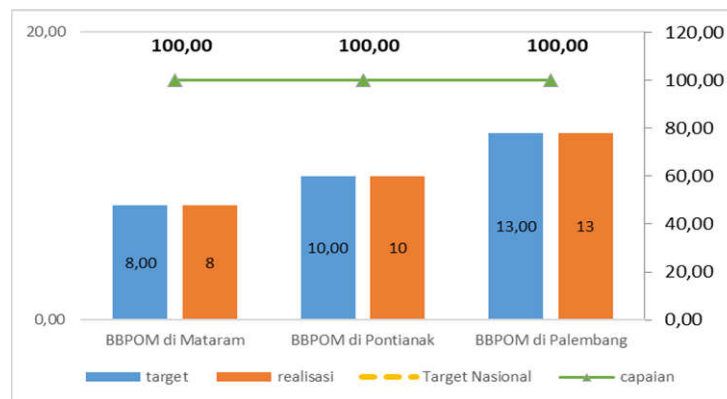
AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra sebanyak 10 pasar telah tercapai 80,00%, sehingga target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER



Gambar 3.42. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam satu klaster

Realisasi BBPOM di Mataram, BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palembang sudah mencapai target yang ditetapkan masing-masing. Persentase capaian masing-masing BBPOM berada di angka yang sama, yakni 100%.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2023 telah mencapai target disebabkan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan, bahkan beberapa tahapan dapat dilaksanakan lebih cepat dibandingkan perencanaan.

Peran aktif dan komitmen Pemerintah Daerah terutama Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota dalam Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya sangat mempengaruhi terlaksananya program intervensi ini. Bimtek Pengelola pasar oleh petugas BBPOM di Mataram dan pengujian sampel yang dilakukan secara mandiri oleh Petugas Pasar terus dilakukan untuk memastikan validitas terhadap

hasil uji yang dilakukan, terutama untuk sampel-sampel yang menunjukkan hasil uji positif mengandung bahan berbahaya.

Adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan komunitas pasar (pengelola pasar, pedagang, pengunjung, dan masyarakat sekitar) tentang keamanan pangan yang dijual di pasar menjadi faktor yang menunjang keberhasilan program pasar pangan aman ini.





Koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pemanfaatan *whatsapp grup* secara berkelanjutan juga sangat membantu para pengelola pasar melaksanakan tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat terus meningkatkan keberhasilan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan perencanaan,
2. Mendorong pemerintah daerah untuk mereplikasi dan mengimplementasikan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya secara mandiri,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya untuk mengatasi kendala jarak dan SDM,
4. BBPOM di Mataram meningkatkan materi Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan yang benar-benar berdampak secara langsung terhadap keamanan pasar dari bahan berbahaya.
5. Koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan sinkronisasi kegiatan di Desa, seperti program Pasar Sehat (Dinas Kesehatan).

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa program atau kegiatan yang dilakukan untuk menunjang tercapainya indikator kinerja ini adalah:

- Advokasi Lintas Sektor: Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu dengan Program Desa Pangan Aman dan Program Pasar Aman Berbasis Komunitas Dilaksanakan di Kab. Lombok Tengah tanggal 14 Maret 2023, dengan jumlah peserta sebanyak 86 orang dan Kab. Lombok Barat tanggal 20 Maret 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 73 orang.
- Survei Pasar: Kegiatan ini dilaksanakan di Pasar intervensi yaitu Pasar Karang Bulayak Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 30 Maret 2023 dan pasar Gerung Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 31 Maret 2023 bertujuan untuk mengidentifikasi pasar tradisional yang memenuhi persyaratan pasar sehat atau pasar wisata dan sejenisnya yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagai prioritas sasaran pengendalian bahan berbahaya, selain itu juga untuk mengidentifikasi pedagang pasar dan intervensi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya sehingga memudahkan penentuan lokus sampling dan pengujian, ketertelusuran, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut.
- Bimtek dan fasilitator Pasar di kabupaten Lombok Barat pada tanggal 16-17 Mei 2023 dan di kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan pada tanggal 22 -23 Mei 2023 bertujuan untuk melatih petugas pengelola pasar agar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan





berbahaya di pasar yang dikelolanya, selain itu juga untuk meningkatkan partisipasi pengelola pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di Pasar Rakyat.

- Sampling dan Pengujian: Sampling dan pengujian dilakukan 2 tahap. Sampling tahap 1 dilaksanakan pada bulan Mei 2023 dan tahap 2 pada bulan September 2023. Sampling dan pengujian bertujuan untuk memperoleh data hasil pengawasan di pasar sebagai bahan untuk evaluasi dan tindaklanjut implementasi program. Pasar gerung termasuk dalam pasar tipe A, penetapan pasar tipe A ini didasarkan pada jumlah pedagang dan luas dari pasar tersebut, sedangkan pasar karang bulayak termasuk dalam pasar tipe D. Untuk pasar tipe A jumlah sampel yang di sampling dan diuji sebanyak 95 sampel untuk diuji kimia dan 5 sampel untuk diuji mikro, sedangkan untuk pasar tipe D jumlah sampel yang di sampling dan uji sebanyak 35 sampel uji kimia dan 5 sampel uji mikrobiologi.
- Kampanye dan Penyuluhan Pedagang Pasar: Kegiatan kampanye pedagang pasar bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada komunitas pasar khususnya Masyarakat sebagai konsumen, kegiatan kampanye diintegrasikan dengan penyuluhan pedagang pasar sehingga pelaksanaannya dalam satu hari. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023 untuk pasar Gerung Kabupaten Lombok Barat dan 26 Juli 2023 untuk Pasar Karang Bulayak.
- Pengawasan Pasar: Pengawasan pasar pada Tahun 2023 dilaksanakan di 6 pasar intervensi Tahun 2020,2021 dan 2022, adapun pasar yang dilakukan pengawasan di Tahun 2023 yaitu pasar Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Pasar Tanjung Kabupaten Lombok Timur, Pasar Seketeng Kabupaten Sumbawa, Pasar Sila di Kabupaten Bima, Pasar Cakra di Kota Mataram dan Pasar Renteng di Kabupaten Lombok Tengah.
- Pendampingan BBPOM Mataram yang berkelanjutan kepada pasar dilakukan sehingga dapat diajukan dalam Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023 yaitu: Pasar Dasan Agung di Kota Mataram, pasar ini merupakan pasar intervensi Tahun 2014 namun memiliki komitmen yang besar terkait keamanan pangan di pasar, selain itu prestasi dari pasar Dasan Agung sebagai 50 besar SNI juga menjadi nilai tambah dalam pengusulan lomba pasar Tingkat nasional.

Selain tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, hal lain yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan pencapaian indikator kinerja jumlah Pasar Aman adalah audiensi dan koordinasi dengan Bupati bersama OPD terkait sehingga mendapatkan dukungan dan komitmen yang lebih besar dari pimpinan daerah untuk mendapatkan data yang valid dalam penentuan pasar target intervensi.



**ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA****Tabel 3.70** Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8	8,00	100,00	154.033.600	153.804.154	99,85	1,002	0,002

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi sebesar 1,002 lebih besar dari standar efisiensi (1), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien, dengan capaian tingkat efisiensi sebesar 0,002. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian indikator maupun sasaran.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan atau regulasi sebagai dasar hukum penganggaran dan pelaksanaan Program Prioritas Nasional oleh Pemerintah Desa dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota	Telah mengusulkan pembuatan membuat kebijakan atau regulasi sebagai dasar hukum penganggaran dan pelaksanaan Program Prioritas Nasiona kepada pemerintah daerah	-	-	Belum ada kebijakan atau regulasi yang terbit	Belum ada kebijakan atau regulasi yang terbit
2	Bekerjasama dengan OPD terkait di Provinsi / Kab / Kota tetap memberikan pendampingan kepada Desa yang telah diintervensi untuk melanjutkan Program Prioritas Nasional.	Melakukan pengawalan terhadap Desa yang telah diintervensi untuk melanjutkan Program Prioritas Nasional	-	-	Dilakukan pengawalan namun belum ada pemerintah daerah yang melakukan replikasi	Dilakukan pengawalan namun belum ada pemerintah daerah yang melakukan replikasi

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Laporan kinerja interim pada triwulan sebelumnya digunakan untuk mengevaluasi tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Penundaan tahapan kegiatan akan berimbas pada keterlambatan tahapan berikutnya karena tiap tahap saling terkait dan harus dilaksanakan secara berurutan. Monitoring pencapaian tahapan tiap triwulan dengan melihat laporan kinerja interim ini dilakukan agar perencanaan dilaksanakan secara konsisten, sehingga tidak terjadi keterlambatan baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan.



**SASARAN STRATEGIS - 6****Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram**

Terdapat 2 Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis keenam. Capaian kedua indikator kinerja pada Sasaran Strategis keenam sebagai berikut:

Tabel 3.71 Capaian Kinerja Sasaran Strategi 6 BBPOM di Mataram Tahun 2023

NO SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120,00	120,00	sangat baik
		2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120,00	120,00	sangat baik

Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja serta analisis capaian masing – masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis 6 di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebagai berikut:

Tabel 3.72 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120	120,0	Sangat Baik

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 120,0% dari target 100,0% sehingga nilai pencapaian indikator sebesar 120,0% dengan kriteria “sangat baik”.

Nilai realisasi Tahun 2023 sebesar 120% merupakan nilai konversi yaitu apabila realisasi indikator sebesar 100%. Hal ini berdasarkan Pedoman SAKIP Tahun 2023 dan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM Nomor PR.04.02,21.01.24.12 tanggal 8 Januari 2024 hal Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam Perhitungan Nilai Pencapaian





Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023, Indikator Kinerja ini termasuk indikator yang dapat dikonversi realisasi/capaiannya menjadi 120% bila realisasinya 100%.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dari perhitungan:

$$\% \text{ Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

Keterangan:

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat yang diperiksa) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat yang masuk ke laboratorium/diuji) x 100%

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik;

- Sampel Obat yang diperiksa meliputi pemeriksaan sampel Obat sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel berasal dari internal yang disampling oleh fungsi inspeksi maupun dari UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium
- Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman sampling dan SOP Mikro.

Dalam rangka melindungi masyarakat NTB dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BBPOM Mataram melaksanakan kegiatan sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang beredar. Pelaksanaan sampling mengacu kepada SK Kepala Badan POM RI tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023. Sampling dilakukan di sarana produksi dan distribusi Obat, pelayanan kesehatan dan secara *online*.

Tabel 3.73 Rincian Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023

No	Jenis Sampel	Target sampel yang diperiksa 1 Tahun	Sampel yang diperiksa sesuai standar	Sampel yang masuk Laboratorium	Sampel yang diuji sesuai standar	% diperiksa dan diuji sesuai standar
1	obat	449	449	531	531	100,00
2	obat kuasi	23	23	28	28	100,00

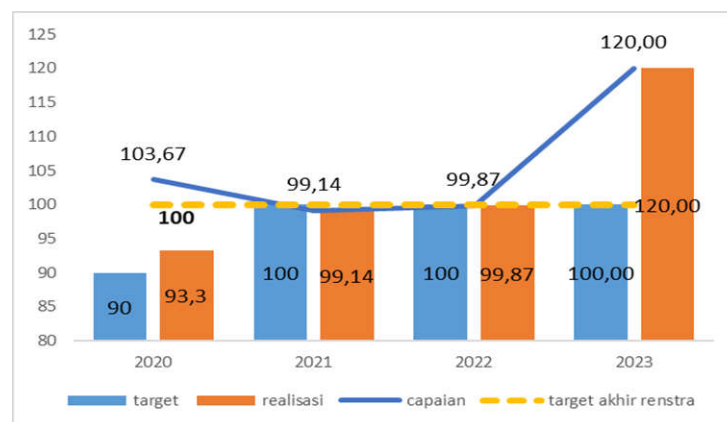




No	Jenis Sampel	Target sampel yang diperiksa 1 Tahun	Sampel yang diperiksa sesuai standar	Sampel yang masuk Laboratorium	Sampel yang diuji sesuai standar	% diperiksa dan diuji sesuai standar
3	rokok	4	4	0	0	0,00
4	obat tradisional	332	332	405	405	100,00
5	Suplemen Kesehatan	87	87	109	109	100,00
6	Kosmetik	663	663	803	803	100,00
TOTAL		1558	1558	1876	1876	100,00

Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan sesuai standar sejumlah 1558 sampel dari 1558 target sampel (100,0%). Telah diuji sesuai standar sejumlah 1876 sampel (100,0%) dari total 1876 sampel yang ditargetkan masuk ke laboratorium di Tahun 2023. Jumlah target total sampel yang masuk ke laboratorium *diadjust* sesuai dengan jumlah total sampel yang diuji. Seluruh sampel pada Tahun 2023 telah diperiksa dan diuji sesuai standar.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.43. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 Dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 lebih tinggi daripada Tahun 2022, 2021 dan 2020. Hal ini disebabkan karena Tahun 2023 seluruh sampel telah diperiksa dan diuji sesuai standar, selain itu disebabkan juga karena nilai realisasi Tahun 2023 sebesar 120% merupakan nilai konversi yang mulai berlaku sejak Tahun 2023.





PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

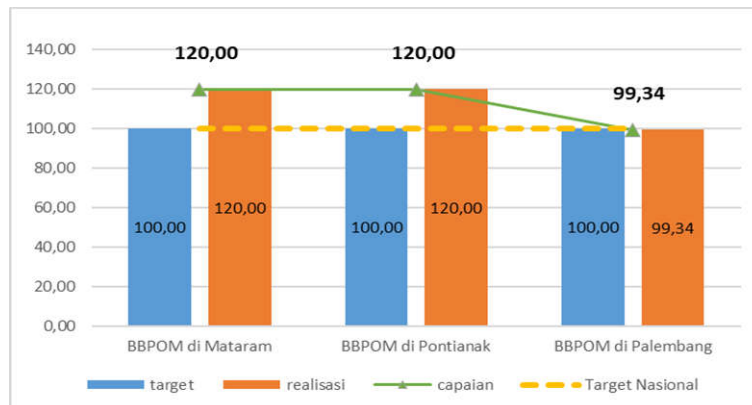
Target akhir periode Renstra (target Tahun 2024) indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024 dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sama yaitu 100%

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%CAPAIAN	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120	120,00	Tercapai

Realisasi (konversi) persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Tahun 2023 sebesar 120%, jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra sebesar 100%, maka telah tercapai sebesar 120%.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER



Gambar 3.44. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Mataram sama dengan BBPOM di Pontianak. Realisasi keduanya sudah melampaui target masing-masing dan target nasional, sedangkan realisasi BBPOM di Palembang belum mencapai target Balai maupun target nasional.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Capaian indikator kinerja ini telah mencapai target Tahun 2023. Hal ini disebabkan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sampel dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

disusun sebelumnya. Semua sampel Obat yang diperiksa dan yang telah diuji seluruhnya sesuai dengan standar.

Hal-hal yang menunjang tercapainya target persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Tahun 2023 sebagai berikut:

- Peningkatan Sinergitas antar fungsi terkait yang terlibat dari awal penyusunan prioritas sampling Obat antara penguji dan petugas sampling serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara rutin setiap bulan;
- Peningkatan kompetensi personel sampling dan penguji sampel Obat di laboratorium sehingga dapat mengimplementasikan Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023 dengan baik;
- Sistem manajemen mutu terintegrasi ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 diupayakan selalu diterapkan secara konsisten.

.REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat mempertahankan capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya perlu dipertahankan hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sampel Obat sesuai dengan perencanaan serta penetapan target yang akurat;
- Peningkatan kompetensi penguji dan petugas sampling Obat melalui pelatihan secara daring maupun luring;
- Pengadaan baku pembanding, reagensia dan suku cadang sesuai perencanaan sehingga menjamin pengujian sampel makanan khususnya parameter uji wajib dapat senantiasa dilakukan.
- Penggunaan *software remote* untuk instrumen laboratorium, sehingga penguji dapat mengoperasikan alat laboratorium meskipun sedang tidak berada di laboratorium.

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.74 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120,00	120,00	1.115.341.800	1.114.431.249	99,92	1,20	0,20

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi sebesar 1,20 lebih besar daripada standar efisiensi (1), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien, dengan tingkat efisiensi sebesar 0,20. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian indikator maupun sasaran.



**ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA**

Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh BBPOM di Mataram untuk menunjang peningkatan realisasi indikator ini adalah:

- Rapat sinergitas antar fungsi pengujian dan inspeksi (petugas *sampling*) di awal Tahun terkait perencanaan *sampling* Obat dan makanan di Tahun 2023;
- Pelaksanaan audit internal dan surveillance ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan ISO 9001:2015 Tahun 2023 sebagai media evaluasi pencapaian kinerja pengujian;
- Kalibrasi dan perawatan alat secara teratur untuk menjaga kondisi alat dapat beroperasi dengan baik sesuai spesifikasinya;
- Peningkatan kompetensi penguji, petugas *sampling* dan inspektur/pengawas melalui pelatihan secara *offline* maupun *online* antara lain:
 - a) On The Job Training (OJT) Pemastian Keabsahan Hasil Pengujian Kimia tanggal 13-14 Maret 2023 di Aula BBPOM Mataram dengan narasumber Bapak Dwi R Kurniawan dari Rumah Mutu Indonesia, diikuti 25 peserta dari Tim pengujian.
 - b) On Job Training Pemeliharaan Alat Laboratorium dengan narasumber engineer dari PT Wiralab Analitika Solusindo Farhan Afiadi dan Mochammad Zaky Zahrani tanggal 12-15 September 2023 diikuti 15 orang peserta
 - c) On Job Training Pemeliharaan Alat Laboratorium dengan narasumber engineer dari PT Wiralab Analitika Solusindo Farhan Afiadi dan Mochammad Zaky Zahrani tanggal 12-15 September 2023 diikuti 15 orang peserta
 - d) On Job Training Pemeliharaan Alat Laboratorium dengan narasumber engineer dari PT Wiralab Analitika Solusindo Farhan Afiadi dan Mochammad Zaky Zahrani tanggal 12-15 September 2023 diikuti 15 orang peserta
 - e) Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 dan diseminasi hasil pelatihan teknis pengujian tanggal 12 Oktober 2023 dan 16 Juni 2023 yang diikuti oleh seluruh personel pengujian
 - f) Pelatihan Internal Teknis Pengujian dan Verifikasi Metode Pengujian Endotoksin. Kegiatan diikuti oleh seluruh staf pengujian mikrobiologi BBPOM di Mataram tanggal 4-8 September 2023 dengan narasumber Christy Ambarsari, S.Si., Apt, M.Farm. dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) BPOM.
- Implementasi inovasi SI OPA LAGI JJ (Sistem Pengoperasian Alat Laboratorium Jarak Jauh) melalui pemanfaatan teknologi dengan penggunaan *software remote* untuk beberapa instrumen laboratorium, sehingga penguji dapat mengoperasikan alat dari lokasi manapun saat sedang tidak berada di laboratorium;
- Penerapan metode analisis berupa inovasi pengujian kosmetik (KASINO NAIK SEPEDA) dan obat tradisional (SI INA BIKIN TEH MANIS, IKAN TUANKU GESIT DAN GEMES) untuk pengujian yang lebih cepat, hemat reagen, hemat suku cadang, dan hemat baku pembanding;





- Pengadaan baku pembanding, reagensia dan suku cadang sesuai perencanaan sehingga menjamin pengujian sampel makanan dapat senantiasa dilakukan.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang lebih ketat untuk sampel TMS yang memerlukan uji ulang sehingga tidak melewati <i>timeline</i>	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi untuk sampel TMS yang memerlukan uji ulang secara berkala	-	-	Masih terdapat sampel Obat khususnya sampel TMS yang memerlukan uji ulang melewati <i>timeline</i> pengujian	Tidak terdapat sampel Obat yang diuji melewati <i>timeline</i> pengujian (seluruh sampel diuji sesuai standar)
2	Melakukan pelatihan homogenisasi sampel untuk mencegah terjadinya keberulangan hasil yang tidak memenuhi syarat keberterimaan	Dilakukan peningkatan kompetensi personil melalui on the job training pemahaman Jaminan mutu hasil pengujian terkait uji homogenitas dan keberterimaan hasil uji	-	-	Personil belum memahami pentingnya jaminan mutu hasil pengujian	Personil memahami pentingnya jaminan mutu hasil pengujian

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan analisis diatas diperoleh informasi bahwa Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target, namun tetap dibutuhkan upaya-upaya untuk peningkatan kinerja agar pemeriksaan dan pengujian sampel senantiasa dapat diselesaikan dengan baik sesuai timeline dan parameter uji kritis.

2. PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.75 Target, Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120	120,0	sangat baik





Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 120,0% dari target 100,0% sehingga nilai pencapaian indikator sebesar 120,0% dengan kriteria “sangat baik”.

Nilai realisasi Tahun 2023 sebesar 120% merupakan nilai konversi yaitu apabila realisasi indikator sebesar 100%. Hal ini berdasarkan Pedoman SAKIP Tahun 2023 dan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM Nomor PR.04.02,21.01.24.12 tanggal 8 Januari 2024 hal Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023, Indikator Kinerja ini termasuk indikator yang dapat dikonversi realisasi/capaiannya menjadi 120% bila realisasinya 100%.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan BBPOM di Mataram melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap makanan olahan yang beredar. Pelaksanaan sampling mengacu Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023, sampling dilakukan di sarana produksi dan distribusi.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dari perhitungan:

$$\% \text{ Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa) x 100%

B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan yang masuk ke laboratorium/diuji) x 100%

- Sampel makanan yang diperiksa meliputi pemeriksaan sampel makanan sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Sampel makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel berasal dari internal yang disampling oleh fungsi inspeksi maupun dari UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium
- Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman sampling dan SOP Mikro.

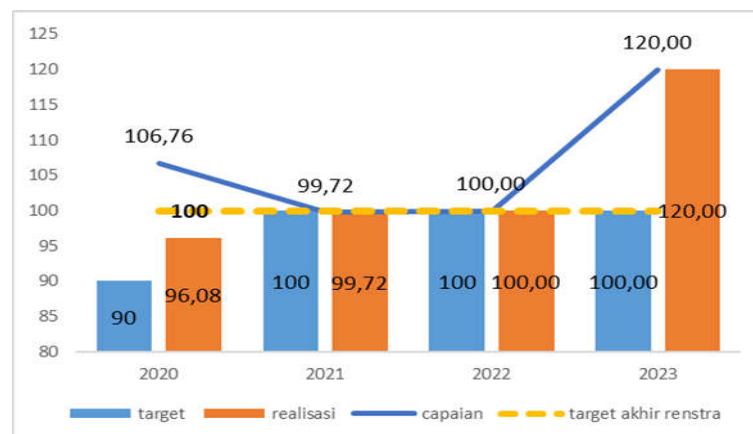


**Tabel 3.76** Rincian Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023

No	Jenis Saampel	Target sampel diperiksa 1 Tahun	Sampel diperiksa sesuai standar	Target Sampel masuk Laboratorium	Sampel yang diuji sesuai standar	% diperiksa dan diuji sesuai standar
1	Sampel Pangan nonfortifikasi	571	571	885	885	100,00
2	Sampel Pangan fortifikasi	114	114	124	124	100,00
TOTAL		685	685	1009	1009	100,00

Pada Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan sesuai standar sejumlah 685 sampel makanan dari 685 target produk yang diperiksa selama Tahun 2023 (100,0%). Telah dilakukan pengujian sampel sesuai standar sejumlah 1009 sampel dari total 1009 sampel yang diuji (100,0%). Sampel pangan yang diperiksa dan diuji tersebut termasuk dari kategori fortifikasi dan nonfortifikasi. Jumlah target total sampel yang masuk ke laboratorium *diadjust* sesuai dengan jumlah total sampel yang diuji.

PERBANDINGAN REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020

**Gambar 3.45.** Perbandingan target, capaian, dan realisasi Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Realisasi dan capaian Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020. Hal ini disebabkan karena nilai realisasi Tahun 2023 sebesar 120% merupakan nilai konversi yang mulai berlaku sejak Tahun 2023. Bila tanpa konversi realisasi Tahun 2023 sama dengan Tahun 2022.





PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

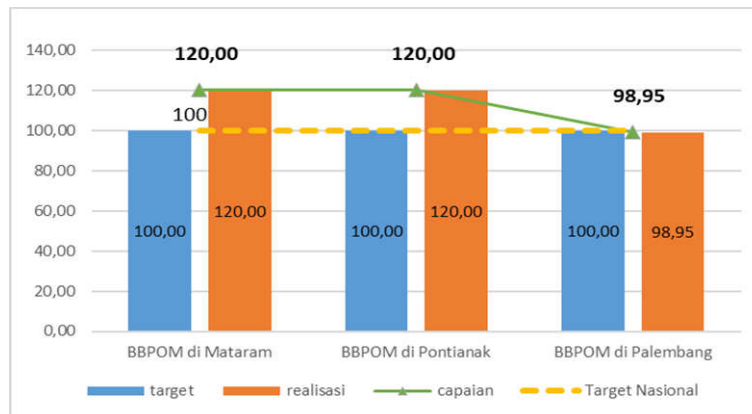
Target akhir periode Renstra (target Tahun 2024) indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024 dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sama yaitu 100%.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%CAPAIAN	Kategori
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120	120,00	Tercapai

Realisasi (konversi) persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Tahun 2023 sebesar 120%, jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra sebesar 100%, maka telah tercapai sebesar 120%.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER



Gambar 3.46. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023 dengan BBPOM lain dalam satu klaster

Realisasi dan capaian BBPOM di Mataram sama dengan BBPOM di Pontianak, realisasi keduanya telah mencapai target masing-masing dan target nasional sedangkan BBPOM di Palembang belum mencapai target, baik target balai maupun target nasional.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Capaian indikator kinerja ini telah mencapai target Tahun 2023. Hal ini disebabkan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sampel dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah





disusun sebelumnya. Semua sampel makanan yang diperiksa dan yang telah diuji seluruhnya sesuai dengan standar.

Hal-hal yang menunjang tercapainya target persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Tahun 2023 sebagai berikut:

- Peningkatan Sinergitas antar fungsi terkait yang terlibat dari awal penyusunan prioritas sampling Makanan antara penguji dan petugas sampling serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara rutin setiap bulan;
- Peningkatan kompetensi personel sampling dan penguji sampel makanan di laboratorium sehingga dapat mengimplementasikan Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023 dengan baik;
- Sistem manajemen mutu terintegrasi ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 diupayakan selalu diterapkan secara konsisten.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat mempertahankan capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya perlu dipertahankan hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sampel makanan sesuai dengan perencanaan serta penetapan target yang akurat;
- Peningkatan kompetensi penguji dan petugas sampling makanan melalui pelatihan secara daring maupun luring;
- Pengadaan baku pembanding, reagensia dan suku cadang sesuai perencanaan sehingga menjamin pengujian sampel makanan khususnya parameter uji wajib dapat senantiasa dilakukan.
- Penggunaan *software remote* untuk instrumen laboratorium, sehingga penguji dapat mengoperasikan alat laboratorium meskipun sedang tidak berada di laboratorium.

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.77 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120,00	120,00	501.706.200	501.253.936	99,91	1,20	0,20

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi sebesar 1,20 lebih besar daripada standar efisiensi (1), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien, dengan capaian tingkat efisiensi sebesar 0,20. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan





yang dilaksanakan telah sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian indikator maupun sasaran.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh BBPOM di Mataram untuk menunjang peningkatan realisasi indikator ini adalah:

- Rapat sinergitas antar fungsi pengujian dan inspeksi (petugas *sampling*) di awal Tahun terkait perencanaan *sampling* Obat dan makanan di Tahun 2023;
- Pelaksanaan audit internal dan surveillance ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan ISO 9001:2015 Tahun 2023 sebagai media evaluasi pencapaian kinerja pengujian;
- Kalibrasi dan perawatan alat secara teratur untuk menjaga kondisi alat dapat beroperasi dengan baik sesuai spesifikasinya;
- Peningkatan kompetensi penguji, petugas *sampling* dan inspektur/pengawas melalui pelatihan secara *offline* maupun *online* antara lain:
 - a) On The Job Training (OJT) Pemastian Keabsahan Hasil Pengujian Kimia tanggal 13-14 Maret 2023 di Aula BBPOM Mataram dengan narasumber Bapak Dwi R Kurniawan dari Rumah Mutu Indonesia, diikuti 25 peserta dari Tim pengujian.
 - b) On Job Training Pemeliharaan Alat Laboratorium dengan narasumber engineer dari PT Wiralab Analitika Solusindo Farhan Afiadi dan Mochammad Zaky Zahrani tanggal 12-15 September 2023 diikuti 15 orang peserta
 - c) On Job Training Pemeliharaan Alat Laboratorium dengan narasumber engineer dari PT Wiralab Analitika Solusindo Farhan Afiadi dan Mochammad Zaky Zahrani tanggal 12-15 September 2023 diikuti 15 orang peserta
 - d) On Job Training Pemeliharaan Alat Laboratorium dengan narasumber engineer dari PT Wiralab Analitika Solusindo Farhan Afiadi dan Mochammad Zaky Zahrani tanggal 12-15 September 2023 diikuti 15 orang peserta
 - e) Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 dan diseminasi hasil pelatihan teknis pengujian tanggal 12 Oktober 2023 dan 16 Juni 2023 yang diikuti oleh seluruh personel pengujian
 - f) Pelatihan Internal Teknis Pengujian dan Verifikasi Metode Pengujian Endotoksin. Kegiatan diikuti oleh seluruh staf pengujian mikrobiologi BBPOM di Mataram tanggal 4-8 September 2023 dengan narasumber Christy Ambarsari, S.Si., Apt., M.Farm. dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) BPOM.
- Implementasi inovasi SI OPA LAGI JJ (Sistem Pengoperasian Alat Laboratorium Jarak Jauh) melalui pemanfaatan teknologi dengan penggunaan *software remote* untuk beberapa instrumen laboratorium, sehingga penguji dapat mengoperasikan alat dari lokasi manapun saat sedang tidak berada di laboratorium;





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

- Pengadaan baku pembanding, reagensia dan suku cadang sesuai perencanaan sehingga menjamin pengujian sampel makanan dapat senantiasa dilakukan.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tidak terdapat rekomendasi pada laporan kinerja interim TW3 Tahun 2023 dan laporan kinerja Tahun 2022.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
NIHIL						

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan analisis diatas diperoleh informasi bahwa Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target, namun tetap dibutuhkan upaya-upaya untuk peningkatan kinerja agar pemeriksaan dan pengujian sampel senantiasa dapat diselesaikan dengan baik sesuai timeline dan parameter uji kritis.



**SASARAN STRATEGIS - 7****Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram**

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis ketujuh hanya satu indikator yaitu **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Mataram**. Penilaian persentase keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023

Pengukuran capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.78 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	99,0	100	101,01	Sangat Baik

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 adalah sebesar 100 % dari target 99,0% atau tercapai sebesar 101,01% dengan kriteria "sangat Baik". Hasil tersebut diperoleh dengan perhitungan:

- SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara Tahun n dan perkara carry over.

Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Rincian pencapaian target dan realisasi setiap tahap penyelesaian berkas perkara baik BBPOM di Mataram dapat dilihat pada tabel berikut ini:





Tabel 3.79 Target dan Realisasi Perkara serta Keberhasilan Penindakan Tahun 2023

UPT	Tahapan	Target Perkara		Realisasi Perkara		Koefisien		Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Thn 2023	Carry Over	Thn 2023	Carry Over	Tahun Berjalan	Carry Over					
BBPOM Mataram	SPDP	11	1			1,00		0,15	15,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Tahap I					1,00	0,08	0,4	40,00%			
	P21					1,00	0,08	0,3	30,00%			
	Tahap II			11	1	1,00	0,08	0,15	15,00%			
	Total	11	1	11	1							

Pada Tahun 2023, jumlah kasus yang ditindaklanjuti secara *projustitia* oleh PPNS BBPOM di Mataram sebanyak 11 perkara atau 137,5% dari target 8 perkara Tahun 2023 serta terdapat 1 perkara *carry over* Tahun 2022. Posisi perkara Tahun 2023 yaitu 12 perkara sudah tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang Bukti). Terdapat 1 perkara P21 Tahun 2019 yang belum bisa tahap 2 dikarenakan tersangka melarikan diri /sudah diterbitkan DPO Penyidik BBPOM di Mataram terus melakukan pemantauan terhadap keberadaan tersangka dan terus berkoordinasi dengan kepolisian serta memohon bantuan kepada Direktorat Intelijen, Direktorat Penyidikan Badan POM dan kepala Loka POM di Surakarta untuk melacak keberadaan tersangka sehingga yang bersangkutan dapat dihadirkan, perkara tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan keberhasilan penindakan karena perkara Tahun 2019 (sudah 3 Tahun).

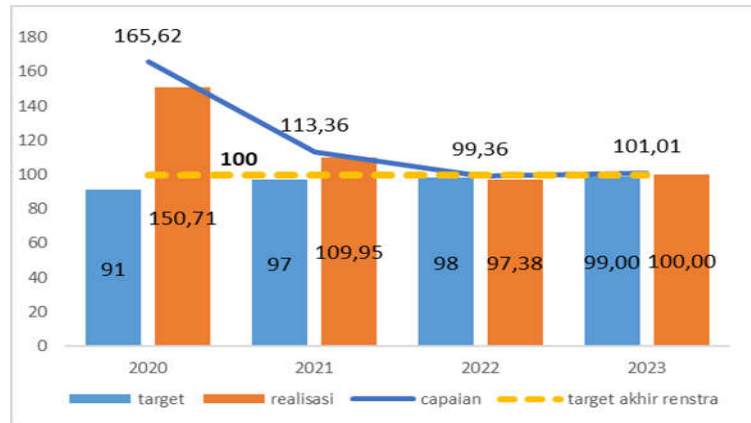
Rincian 11 perkara yang ditindaklanjuti secara *projustitia* di Tahun 2023 adalah semua perkara obat ilegal (Tramadol dan Trihexyphenidil). Terdapat 3 perkara yang tersangkanya dilakukan penahanan oleh penyidik di tingkat penyidikan. Dari 11 perkara yang sudah P21, terdapat 6 perkara yang melalui P-18/P-19 namun sudah bisa dilengkapi oleh penyidik, sementara 5 perkara lainnya langsung P21. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas berkas yang dikerjakan oleh Penyidik BBPOM di Mataram sudah baik dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain (kepolisian dan kejaksaan) juga telah berjalan dengan baik.

Perencanaan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Mataram dilakukan berdasarkan analisis risiko dan mempertimbangkan sumber daya manusia di Kelompok Substansi Penindakan serta berpedoman pada target Renstra 2020-2024.





PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.47. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase Tingkat Keberhasilan Penindakan Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Realisasi Indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 (101,01 %) lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 (99,38 %) dan lebih rendah dibandingkan Tahun 2021 dan 2020. Tingginya realisasi pada Tahun 2020-2021 disebabkan karena adanya perbedaan cara perhitungan indikator kinerja. Sejak Tahun 2022, cara perhitungan indikator kinerja mengalami perubahan yaitu realisasi perkara apabila melebihi target maka jumlah target perkara *diadjust* sesuai realisasi, sehingga realisasi indikator maksimal 100%.

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Target akhir periode Renstra (target Tahun 2024) indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024 dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sama yaitu 100%

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode Renstra sebagai berikut:

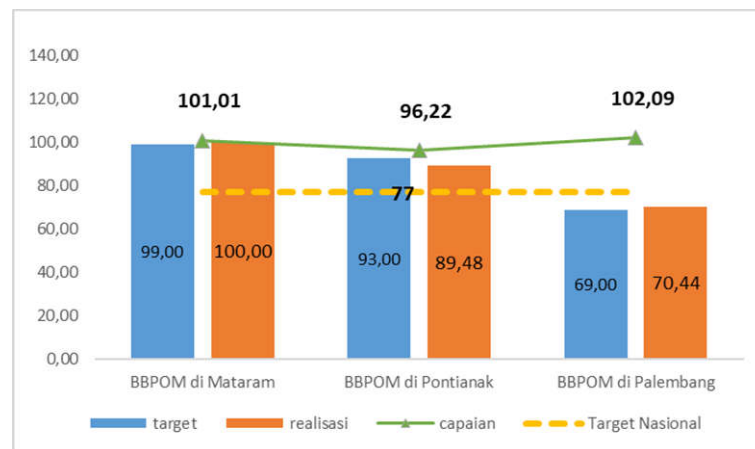
Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%CAPAIAN	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	100	100	100,00	Tercapai

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram (100,00%), jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (100,00%), sudah tercapai sebesar 100,00 %.





PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER



Gambar3.48. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Persentase Tingkat Keberhasilan Penyidikan Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram dan BBPOM Palembang telah melampaui target masing-masing dan target nasional, sedangkan BBPOM di Pontianak belum mencapai target balai dan nasional. Realisasi BBPOM di Mataram paling tinggi (100,00%) dibanding dengan kedua BBPOM lainnya. Sedangkan berdasarkan capaian kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan berturut-turut dari yang tertinggi sampai terendah adalah BBPOM Palembang, disusul BBPOM Mataram dan yang terakhir adalah BBPOM Pontianak, walaupun demikian kinerja BBPOM di Mataram relatif lebih baik dibandingkan dengan kedua BBPOM lainnya karena target BBPOM di Mataram paling tinggi dibanding kedua BBPOM lainnya.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Keberhasilan BBPOM di Mataram mencapai target persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dan peningkatan kinerja disebabkan beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

- Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan;
- Pengelolaan manajemen risiko fungsi penindakan telah dilaksanakan dengan baik
- Dukungan Direktorat intelijen Badan POM RI dengan memberikan informasi yang A1 (pasti) terkait adanya pengiriman obat ilegal ke wilayah kerja BBPOM Mataram;
- Kerja sama dan koordinasi yang baik antar tim internal PPNS BBPOM di Mataram maupun PPNS di Loka POM di Kabupaten Bima;
- Peningkatan kompetensi dan profesionalisme intelijen dan PPNS BBPOM di Mataram meningkat, khususnya dalam kegiatan intelijen dan olah TKP. Faktor tersebut berdampak pada





ditemukannya alat bukti yang cukup sehingga perkara menjadi terang dan jelas, serta mempermudah penelusuran dan penetapan tersangka;

- Dukungan lintas sektor terutama kepolisian dalam memberikan bantuan teknis, taktis dan upaya paksa kepada PPNS BBPOM Mataram dan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara di bidang Obat dan Makanan yang semakin meningkat;
- Komitmen perusahaan ekspedisi/jasa pengiriman dalam mengimplementasikan MoU Badan POM vs Asperindo dalam rangka mendukung pencegahan kejahatan dan penegakan hukum Obat dan Makanan yang distribusinya memanfaatkan jasa pengiriman/paket; dan
- Peran aktif masyarakat untuk memberikan laporan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar POM di Mataram dan ULPK Badan POM tentang adanya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan intelijen dan penyidikan.
- Penggunaan aplikasi sederhana terkait administrasi penyidikan yang memungkinkan berkas diproses dengan cepat, dengan aplikasi ini berkas memiliki timeline selama satu bulan, dari yang sebelumnya berkas selesai dalam 2-3 bulan.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat terus meningkatkan capaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan kompetensi personel di fungsi penindakan di Mataram terutama terkait dengan cybercrime, pembentukan/pembinaan jaringan serta kemampuan komunikasi untuk pengungkapan perkara sampai pada aktor intelektualnya
- Percepatan penyelesaian kelengkapan berkas perkara (tahap I) maupun pemenuhan petunjuk JPU bilamana JPU mengeluarkan P19

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.80 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	99	100,00	101,01	883.652.000	882.899.952	99,91	1,01	0,01

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi sebesar 1,01 lebih besar daripada standar efisiensi (1), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 0,01. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian indikator maupun sasaran.





PENDAHULUAN



**PERENCANAAN
KINERJA**



**AKUNTABILITAS
KINERJA**



PENUTUP

Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan/output perkara dengan realisasi 11 perkara dari target 8 perkara. Sebagian besar perkara yang ditindaklanjuti berada di dalam kota mataram (6 Perkara) dan luar Kota (5 perkara).

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan analisis kejahatan obat dan makanan dilakukan sebanyak 10 kali di wilayah Pulau Lombok dan sumbawa dan menghasilkan 2 laporan analisis Kejahatan Obat dan makanan.
2. Verifikasi data hasil patroli siber dan profiling kejahatan obat dan makanan dilaksanakan sebanyak 12 kali dengan output 12 laporan
3. Pelaksanaan Operasi Intelijen Tahun 2023 Kegiatan intelijen/operasi intelijen dilakukan sebanyak 53 kali di seluruh Kabupaten/Kota di NTB dengan output 94 laporan Informasi.
4. Pelaksanaan Operasi/penindakan pemberantasan obat dan makanan ilegal baik tingkat daerah/nasional (operasi Gabungan Daerah dan Operasi Gabungan Nasional) dan internasional (Operasi Opson, Storm dan Pangea) dilakukan sebanyak 29 kali di wilayah kerja BBPOM di Mataram dengan temuan 29 kasus terdiri dari 22 kasus pelanggaran Obat ilegal, 2 kasus Kosmetik Mengandung BB dan tanpa perizinan berusaha, 4 kasus obat tradisional tanpa izin edar yang mengandung BKO, 1 kasus pangan TMS dan TIE. Sebanyak 11 kasus ditindaklanjuti secara pro justitia dan 22 kasus ditindaklanjuti secara non justitia. Terhadap kasus yang ditindaklanjuti secara non justitia diberikan sanksi administratif berupa pemusnahan produk yang ditemukan dan pemilik/penguasa barang membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Seluruh kegiatan operasi/penindakan, pengumpulan alat bukti dan penyelesaian berkas perkara senantiasa menerapkan protokol kesehatan.
5. Penyidikan bersama antara PPNS BBPOM di Mataram dengan penyidik kepolisian (Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB dan Satres Narkoba Polres) terhadap 3 kasus peredaran Obat dan Makanan ilegal. Dilakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka oleh PPNS BBPOM di Mataram di Rumah Tahanan Polres dan Rumah tahanan Polda NTB Hal ini merupakan wujud pelaksanaan MoU antara Kapolri dengan Kepala Badan POM RI
6. Dukungan teknis penindakan berupa upaya penggalangan, pembentukan dan pembinaan jaringan dengan pelaku usaha (Asperindo) dan stakeholder (BNN, Bakesbangpoldagri, Pemdes (Kepala Lingkungan/kepala dusun), Kepolisian dan Kejaksaan) sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan MoU antara Kepala Badan POM RI dengan stakeholder terkait
7. Peningkatan kompetensi penyidik melalui:





- Pendidikan dan Pelatihan Analis dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan (1 orang, 26 Juli s.d 24 Ags 2023)
- Pelatihan Intelijen Lanjutan (1 orang, 20 Februari - 21 Maret 2023)
- Drone Safety and Ethics Training (2 orang, 13 -16 November 2023)
- Pelatihan Dark Web Investigation Angkatan ke-5 Bagi Personel Badan Pengawas Obat dan Makanan (2 Orang, 20 s.d. 24 November 2023)
- Pelatihan Investigasi Keuangan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Pusdiklat APU PPT PPATK), (1 orang, 3 -7 Juli 2023)
- Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Obat dan Makanan (1 orang, 26-27 Juni 2023)
- Bimtek investigasi siber: penanganan pertama Bukti Elektronik Pada kejahatan Obat dan Makanan (4 orang, 03 sd 05 juli 2023)
- In House training: pencegahan Tindak Pidana Obat dan makanan dalam perspektif Kriminologi (3 orang, 07/08/2023)
- In House Training: Penyidikan Tindak Pidana (5 orang, 27 sd 28 November 2023)
- In House Training: Urgensi Viktimologi dalam Penanganan Kejahatan Obat dan Makanan (2 orang, 8 Agt 2023)
- In House Training: "Pemodelan Prediktif: Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Metode Kualitatif dan Kuantitatif" (2 Orang, 19 Sep 2023,)
- Forum Koordinasi Intelijen: Upaya Percepatan Pemanfaatan Teknologi Intelijen Dan Penguatan Pemahaman Regulasi dalam Pengungkapan Kejahatan Obat dan Makanan (1 orang, 17 sd 19 Okt 2023)
- Forum Komunikasi Cegah Tangkal kejahatan Obat dan makanan (1 orang, 22 sd 24 Agustus 2023)
- Bimbingan Teknis Pendukung Tugas PPNS (1 orang, 27 - 30 November 2023)

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	pemantauan terhadap keberadaan tersangka DPO dan terus berkoordinasi dengan Kepolisian / Direktorat Intelijen Badan POM/Direktorat Penyidikan Badan POM / Loka POM di Surakarta untuk melacak	Telah dilakukan pemantauan terhadap tersangka DPO dengan terus berkoordinasi dengan kepolisian, namun keberadaan tersangka belum	-	-	keberadaan tersangka DPO tidak diketahui	keberadaan tersangka DPO masih tidak diketahui





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
	keberadaan tersangka sehingga yang bersangkutan dapat dihadirkan	ditemukan				

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan III tahun 2023 realisasi indicator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 82,58%. Realisasi tersebut masih cukup jauh terhadap target tahun 2023 maupun target tahun 2024 (100%), sehingga pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 ditetapkan target indicator sebesar 98,5%. Berdasarkan hasil evaluasi internal TW4 2023 diperoleh realisasi indicator sebesar 100% sehingga target pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 tetap sama dengan target renstra yaitu sebesar 100%.





SASARAN STRATEGIS - 8

Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan BBPOM di Mataram yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti dimuat dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra BPOM 2020-2024, BBPOM di Mataram berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM di Mataram terus meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan BBPOM di Mataram dalam rangka mempertahankan predikat WBK yang telah diraih pada Tahun 2021. Predikat WBK ini tidak hanya sebagai wujud apresiasi tapi juga melambangkan komitmen unit kerja untuk senantiasa menjadi *icon* birokrasi yang melayani sekaligus bersih dan bebas dari korupsi. Untuk itu komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif. Roadmap Reformasi Birokrasi predikat WTP, pakta integritas maupun anugerah WBK seluruhnya harus dimanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima.

Sumber daya meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Dengan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BBPOM di Mataram untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mewujudkan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas fungsi BBPOM di Mataram, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sehingga menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan. Penatalaksanaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedelapan. Capaian kedua indikator kinerja pada Sasaran Strategis kedelapan sebagai berikut:



**Tabel 3.81** Capaian Kinerja Sasaran Strategi 8 BBPOM di Mataram Tahun 2023

NO SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Mataram yang optimal	1. Indeks RB BBPOM di Mataram	89	87,99	98,87	cukup
		2. Nilai AKIP BBPOM di Mataram	82	83,81	102,21	sangat baik

Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja serta analisis capaian masing – masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis 8 di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. INDEKS RB BBPOM DI MATARAM

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, %CAPAIAN TAHUN 2023

Realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Mataram Tahun 2023 belum mencapai target yaitu sebesar 87,99 dari target 89,0 sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 98,87% dengan Kriteria “cukup”.

Tabel 3.81 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Indeks RB BBPOM di Mataram

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Terwujudnya Tata kelola pemerintahan BBPOM di Mataram yang optimal	Indeks RB BBPOM di Mataram	89	87,99	98,87	cukup

Nilai indeks ini diperoleh dari penilaian Inspektorat utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) beserta data dukungnya dalam rangka menuju WBK dan WBBM pada BBPOM di Mataram. Hal ini sesuai dengan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.06.06.1.2.03.22.05 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2022. Tujuan evaluasi PMPZI tersebut adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.





Tabel 3.83 Penilaian Evaluasi RB BBPOM di Mataram Tahun 2023 dan 2022

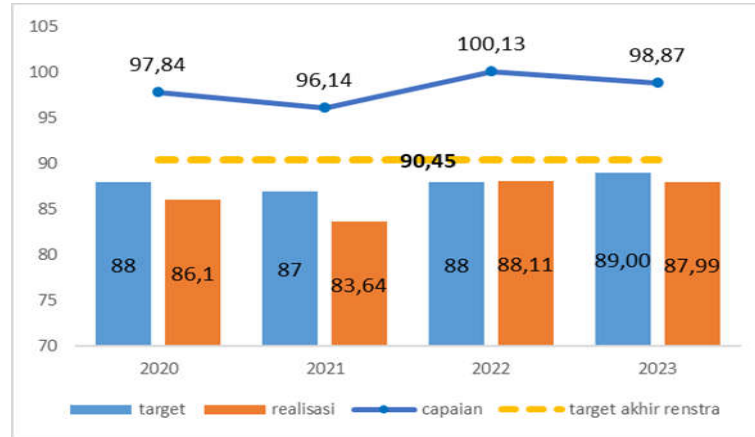
PENILAIAN		Nilai							
		Aspek Pemenuhan		Aspek Reform		Total		%	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
KOMPONEN PENGUNGKIT (60)									
A.	I. MANAJEMEN PERUBAHAN (8)	3.61	3.59	3.56	3.61	7.17	7.2	89.63	90.00
	II. PENATAAN TATALAKSANA (7)	2.63	2.75	2.75	3.08	5.38	5.83	76.86	83.29
	III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)	4.23	4.63	4.25	4.25	8.48	8.88	84.80	88.80
	IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)	4.43	4.84	3.82	3.6	8.25	8.44	82.50	84.40
	V. PENGUATAN PENGAWASAN (15)	6.09	6.5	6.88	6.88	12.97	13.38	86.47	89.20
	VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	4.56	3.75	4.59	3.35	9.15	7.1	91.50	71.00
TOTAL PENGUNGKIT						51.4	50.83	85.67	84.72
KOMPONEN HASIL (40)									
B.	I. BIROKRASI BERSIH DAN AKUNTABEL (22,5)					19.64	19.96	87.29	88.71
	1. Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) (17,5)					17.14	17.46	97.94	99.77
	2. Capaian Kinerja Lebih Baik (5)					2.5	2.5	50.00	50.00
	II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA					16.95	17.33	96.86	99.03
	1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) (17,5)					16.95	17.33	96.86	99.03
TOTAL HASIL						36.59	37.29	91.48	93.23
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI						87.99	88.12	87.99	88.12

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa komponen pengungkit yang masih memiliki nilai rendah adalah penataan tatalaksana dan penguatan akuntabilitas.





PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.49. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indeks RB BBPOM di Mataram Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Realisasi dan capaian Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan Tahun 2022 dan lebih tinggi dari Tahun 2021 dan 2020.

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Berdasarkan reuiu dari Biro Hukum dan Organisasi BPOM sebagai pengampu indikator kinerja, target akhir periode Renstra pada dokumen Reuiu Renstra 2020-2024 sebesar 90,0 disesuaikan menjadi 90,45 yang dituangkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reuiu Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Indeks RB BBPOM di Mataram	90,0	87,99	97,77	Tercapai

Realisasi Indeks RB BBPOM di Mataram pada Tahun 2023 (87,99) jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reuiu Renstra (90,0), telah tercapai sebesar 97,77%.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut:

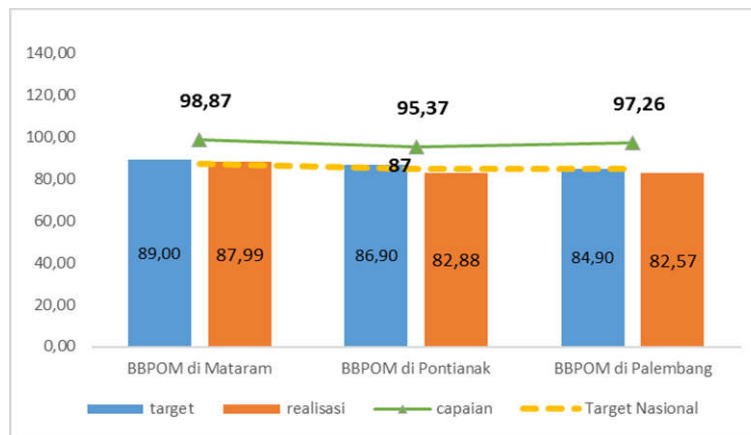
Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%CAPAIAN	Kategori
Indeks RB BBPOM di Mataram	90,45	87,99	97,28	Akan Tercapai





Realisasi Indeks RB BBPOM di Mataram pada Tahun 2023 (87,99) jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra (90,45), sudah tercapai sebesar 97,28%. Oleh sebab itu, target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER



Gambar 3.50. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indeks RB BBPOM di Mataram Tahun 2023 dengan BBPOM Lain Dalam Satu Klaster

Realisasi dan capaian BBPOM di Mataram paling tinggi dibandingkan BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palembang. Ketiga BBPOM belum berhasil mencapai target masing-masing, dan hanya BBPOM di Mataram yang telah melampaui target nasional.

ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAU PENURUNAN KINERJA

Diraiknya predikat WBK Tahun 2021 dan penetapan target meraih WBBM oleh Balai Besar POM di Mataram pada Tahun 2023 menjadikan faktor utama yang berkontribusi terhadap realisasi sebesar 87,99%. Tidak tercapainya target indikator disebabkan belum optimalnya capaian komponen penilaian baik di komponen pengungkit antara lain Penataan tata laksana dengan %capaian 76,86% dan Penguatan Akuntabilitas dengan %capaian 82,50% maupun komponen hasil yaitu capaian kinerja lebih baik dengan %capaian 50%. Selain itu terjadi penurunan realisasi pada komponen hasil yaitu Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022.

Terobosan inovasi dan kegiatan untuk mencapai WBBM telah meningkatkan pemahaman Pegawai Balai Besar POM di Mataram terhadap pentingnya reformasi birokrasi untuk mengimplementasikan Zona Integritas (ZI) dalam mewujudkan WBK/WBBM. Perubahan paradigma, mindset dan prosedur dalam tata Kelola pemerintahan serta pelayanan publik berpengaruh signifikan dengan capaian tersebut. Beberapa inovasi khususnya pada pelayanan publik telah berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi.





REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat terus meningkatkan capaian indeks RB di BBPOM di Mataram, hal-hal yang harus ditingkatkan adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan seluruh rencana kerja pembangunan ZI dan target prioritas secara berkala dan memadai dengan disertai kendala serta RATL dan tindak lanjut atas RATL yang telah disusun tersebut.
- Melakukan tinjauan terhadap seluruh SOP unit kerja dan menuangkan budaya kerja BerAKHLAK dalam setiap SOP kegiatan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut.
- Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi untuk seluruh pegawai dengan mempertimbangkan data kesenjangan kompetensi.
- Melakukan reviu kebijakan WBS dan melakukan analisis dampak kemanfaatannya dalam peningkatan kinerja Unit Kerja sebelum dan setelah implementasi inovasi serta melakukan monitoring dan evaluasi dan melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut.
- Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan serta mendokumentasikan analisis dampak sebelum dan setelah adanya inovasi. Inovasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan *stakeholder*, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain serta melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dari penerapan inovasi tersebut.
- Memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat dalam melakukan reviu dan perbaikan standar pelayanan serta mendokumentasikannya.
- Melakukan reviu kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan melakukan monitoring dan evaluasi penerapan inovasi tersebut.
- Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.84 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks RB BBPOM di Mataram

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Indeks RB BBPOM di Mataram	89	87,99	98,87	7.775.402.500	7.770.243.212	99,93	0,99	-0,01

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi sebesar 0,99 lebih kecil daripada standar efisiensi (1), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien dengan tingkat efisiensi sebesar -0,01. Hal ini disebabkan karena beberapa program/kegiatan





yang dilakukan selama Tahun 2023 belum sepenuhnya efektif untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks RB BBPOM di Mataram.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator, BBPOM di Mataram telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Komitmen pimpinan Balai Besar POM di Mataram terhadap pembangunan ZI sebagai “*Role Model*”;
2. Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju WBBM yang dihadiri oleh seluruh *stakeholders* dan pegawai BBPOM di Mataram;
3. *Capacity Building* dalam rangka implementasi *core values* ASN BerAkhlak yang diikuti oleh seluruh pegawai;
4. Apel Pembinaan secara berkala setiap minggu secara *online* dalam rangka memberikan arahan, informasi terkini, sekaligus monitoring disiplin pegawai.;
5. Inovasi-inovasi berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung pemahaman dan persamaan Pegawai Balai Besar POM di Mataram terhadap Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas dan *core values* ASN BerAkhlak, antara lain:
 - Jumat Segar Berbagi informasi (Jus Bergizi);
 - Sosialisasi Semangat Perubahan dan Kuis Tentang Reformasi Birokrasi (Segera-Kita RB);
 - KIE *Door to door* (Manis & Pompi Blusukan);
 - BPOM Peduli (B-Care);
 - Duta Anti Gratifikasi (RELASI);
 - Kantin Kejujuran;
 - Best Employe (Pare Pedis); dan
 - Spirit RB.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh pegawai terkait penerapan budaya pelayanan prima	Telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait penerapan budaya pelayanan prima pada kegiatan capacity building di Malang dan	-	-	Komitmen, sikap dan perilaku sebagian pegawai terhadap budaya pelayanan	Komitmen, sikap dan perilaku sebagian pegawai terhadap budaya pelayanan



**PENDAHULUAN****PERENCANAAN
KINERJA****AKUNTABILITAS
KINERJA****PENUTUP**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
		Sembalun serta melalui aplikasi IDEAS Tahun 2023			prima relative rendah	prima meningkat dibanding sebelumnya
2	Berinisiatif melakukan revidi dan perbaikan, serta membuat inovasi terkait SOP dan standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.	Telah dibuat inovasi SOP pelayanan pengujian pihak ketiga terkait <i>timeline</i> pengujian	-	-	Timeline pengujian sampel pihak ketiga khusus sampel barang bukti narkotika satu hari (24 jam)	Timeline pengujian sampel pihak ketiga khusus sampel barang bukti narkotika khusus di hari jumat 1 jam dan hari lainnya satu hari
3	Membuat SOP terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi, formulir permintaan informasi, formulir pengajuan keberatan, dan register permintaan informasi. Melakukan monitoring dan evaluasi atas permintaan informasi melalui mekanisme PPID	Telah dibuat SOP tentang seluruh pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui mekanisme PPID	-	-	Belum seluruh pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui mekanisme PPID tersedia SOP nya	Seluruh pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui mekanisme PPID tersedia SOP nya
4	Menyempurnakan sistem pemberian reward and punishment kepada pelaksana layanan dengan memuat kriteria penilaian minimal memenuhi unsur disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, serta menerapkannya secara rutin/berkelanjutan. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penilaian/assessment pegawai dalam mutasi internal dan pengembangan kompetensi	Telah dilakukan penyempurnaan sistem pemberian reward and punishment kepada pelaksana layanan yang dituangkan melalui Surat Keputusan Kepala BBPOM di Mataram dan telah diimplementasikan secara rutin	-	-	Sistem pemberian reward and punishment kepada pelaksana layanan masih bersifat parsial dan belum dilaksanakan secara rutin	Sistem pemberian reward and punishment kepada pelaksana layanan menyeluruh dan telah dilaksanakan secara rutin
5	Menyempurnakan pengembangan berbagai inovasi yang telah dibangun dan melakukan pengukuran dampaknya secara berkala	Telah dilakukan pengembangan dan pengukuran dampaknya secara berkala terhadap inovasi salah satu Inovasi yaitu Gemilang Pro UMKM	-	-	Inovasi Gemilang Pro UMKM belum dikembangkan dan belum dilakukan pengukuran dampaknya secara berkala	Inovasi Gemilang Pro UMKM telah dikembangkan dan telah dilakukan pengukuran dampaknya secara berkala






INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa komponen nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang belum optimal baik pada komponen pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) pada masing-masing area perubahan serta komponen hasil, sehingga perlu upaya yang cukup keras untuk peningkatan nilai seluruh komponen sehingga diharapkan target Indeks RB dapat tercapai.

2. NILAI AKIP BBPOM DI MATARAM

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023

Tabel 3.85 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Nilai AKIP BBPOM di Mataram

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%CAPAIAN	Kriteria
Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Mataram yang optimal	Nilai AKIP BBPOM di Mataram	82,00	83,81	102,21 	Sangat Baik

Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Mataram Tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 83,81 dari target 82,0 sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 102,21% dengan kriteria “sangat baik”.

Tabel 3.86 Hasil Penilaian AKIP Tahun 2020-20223

Komponen Yang Dinilai	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	Bobot (%)	Nilai	%	Bobot (%)	Nilai	%	Bobot (%)	Nilai	%	Bobot (%)	Nilai	%
a. Perencanaan Kinerja	30	23,9	79,67	30	27,27	90,90	24	20,88	87,00	24	20,88	87,00
b. Pengukuran Kinerja	25	18,13	72,52	25	19,69	78,76	24	20,16	84,00	24	20,16	84,00
c. Pelaporan Kinerja	15	12,94	86,27	15	13,56	90,40	12	10,08	84,00	12	10,08	84,00
d. Evaluasi Internal	10	7,85	78,50	10	9,42	94,20	20	16,80	84,00	20	16,80	84,00
e. Capaian Kinerja	20	15,35	76,75	20	12,78	63,90	20	16,88	84,40	20	15,89	79,45
Nilai Hasil Evaluasi	100	78,17	78,17	100	82,72	82,72	100	84,80	84,80	100	83,81	83,81
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB			A			A			A		

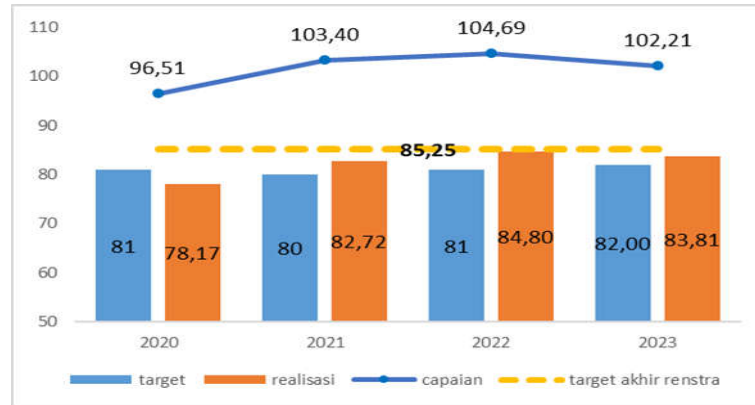
Nilai indeks ini diperoleh dari penilaian Inspektorat utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) terhadap penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penilaian AKIP mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi





Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.51. Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Nilai AKIP BBPOM di Mataram Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Terdapat penurunan realisasi indikator Nilai AKIP BBPOM di Mataram Tahun 2023 sebesar 0,99 point dari Tahun 2022 dan kenaikan 1,09 point dari Tahun 2021 dan kenaikan 5,64 point dari Tahun 2020. Nilai AKIP di Tahun 2023 terjadi penurunan pada komponen capaian kinerja, sedangkan keempat komponen lainnya tetap bila dibandingkan dengan Tahun 2022. Pada Tahun 2023, realisasi nilai AKIP BBPOM di Mataram berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dan berhasil meraih Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan kategori “A” (Memuaskan).

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi indikator ini Tahun 2023 yang telah melampaui target akhir periode renstra pada dokumen reuiu renstra 2020-2024 dilakukan reuiu dan penyesuaian target akhir periode renstra (Tahun 2024) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target akhir periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reuiu Renstra sebesar 83,0 disesuaikan menjadi 85,25 pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reuiu Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Nilai AKIP BBPOM di Mataram	83,0	83,81	100,98	Tercapai





Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Mataram pada Tahun 2023 (83,81) jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra (83,0), telah tercapai sebesar 100,98%.

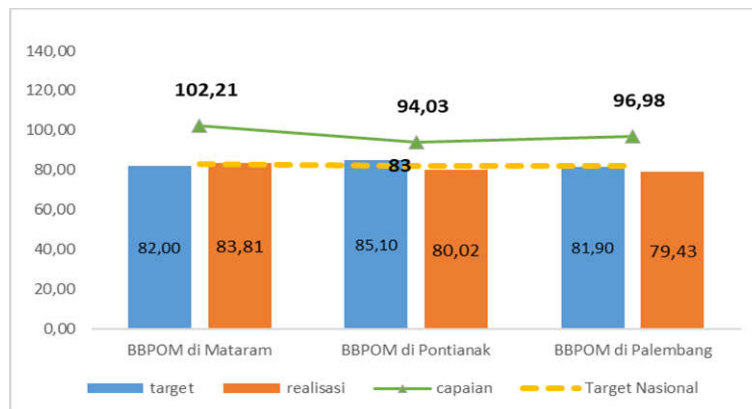
Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%CAPAIAN	Kategori
Nilai AKIP BBPOM di Mataram	85,25	83,81	98,31	Akan Tercapai



Realisasi pada Tahun 2023 (83,81) jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (85,25), sudah tercapai sebesar 98,31%. Oleh sebab itu, target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLAS TER



Gambar 3.52. Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Nilai AKIP BBPOM di Mataram Tahun 2023 dengan Balai Lain dalam Satu Klaster

Realisasi dan capaian BBPOM di Mataram paling tinggi dibandingkan BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palembang. BBPOM di Mataram yang telah melampaui target Balai dan target nasional, sedangkan BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palembang belum mencapai target masing-masing dan target nasional.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Pencapaian nilai AKIP BBPOM di Mataram yang telah mencapai target di Tahun 2023 yaitu sebesar 102,21%, antara lain disebabkan karena cukup optimalnya hasil penilaian pada empat komponen penilaian yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal, khususnya komponen perencanaan kinerja dengan total persentase capaian sebesar 87%. Untuk selanjutnya BBPOM di Mataram harus terus meningkatkan kinerja agar nilai seluruh komponen indikator kinerja dapat meningkat, sehingga nilai AKIP dapat meningkat di masa yang akan datang.





REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat terus meningkatkan nilai AKIP BBPOM di Mataram, hal-hal yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- Menyusun kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja berdasarkan basis data yang memadai termasuk mempertimbangkan realisasi kinerja Tahun sebelumnya serta memanfaatkan data dari sumber yang dapat diyakini validitasnya;
- Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja (perubahan indikator dan target) secara memadai;
- Menyusun MPH dengan memastikan seluruh indikator Kepala Unit Kerja telah diturunkan sampai ke level individu/anggota tim.

2. Pengukuran Kinerja

- Mendokumentasikan peran aktif Pimpinan dalam rapat monitoring dan evaluasi kinerja khususnya dalam penyusunan rencana aksi tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja;

3. Pelaporan Kinerja

Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan:

- Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis, indikator kinerja dan kegiatan serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya;
- Penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan

4. Evaluasi Kinerja Internal

Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan:

- Memanfaatkan hasil pelaksanaan evaluasi internal dalam perencanaan kinerja Tahun berikutnya;
- Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan kertas kerja/data untuk mendukung capaian data kinerja.

5. Capaian Kinerja

- Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target Tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari Tahun sebelumnya.



**ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA****Tabel 3.87** Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Nilai AKIP BBPOM di Mataram

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Nilai AKIP BBPOM di Mataram	82	83,81	102,21	1.153.630.400	1.153.268.852	99,97	1,02	0,02

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi sebesar 1,02 lebih besar daripada standar efisiensi (1), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 0,02. Hal ini disebabkan karena seluruh program/kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai AKIP BBPOM di Mataram telah efektif.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Mataram didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

- Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta laporan kinerja telah dilaksanakan tepat waktu antara lain: Laporan Kinerja Tahun 2022, Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2022, Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022, Laporan Monev Internal dan Laporan Kinerja Interim Triwulan 1 - Triwulan 4 Tahun 2022, Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023, dan RKAKL/DIPA Tahun 2024.
- Pelaksanaan Monev internal setiap bulan yang dilengkapi dengan matriks rencana tindak lanjut (RTL) terhadap indikator kinerja yang capaiannya tidak tercapai.
- Perjanjian kinerja Kepala BBPOM di Mataram telah *dicascading* sampai level individu dan capaian kinerja individu dievaluasi dan dilaporkan secara berkala dan tepat waktu.
- Implementasi SK Kepala BBPOM di Mataram tentang Mekanisme Pelaporan Kinerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran BBPOM di Mataram Tahun 2023 terlaksana dengan baik.
- Implementasi SK Kepala BBPOM di Mataram tentang Penetapan Reward dan Punishment Pencapaian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2023 terlaksana dengan baik.
- Melakukan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi Inspektorat Utama pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penilaian SAKIP Tahun 2022.
- Peningkatan kualitas SDM unit kerja yang mengelola akuntabilitas Kinerja melalui Bimbingan Teknis/Workshop dan pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja.
- Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) dalam penyusunan perencanaan kinerja dan pelaporan realisasi target kinerja secara berkala.



**TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA**

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022 (Rekomendasi LHE AKIP Tahun 2022), telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Menyempurnakan kertas kerja penyusunan target dengan penjelasan analisis dan didukung dengan dokumentasi baseline data yang memadai.	Telah dilakukan penyempurnaan kertas kerja penyusunan target PK Tahun 2023	-	-	Kertas kerja penyusunan target belum didukung dengan penjelasan analisis dan didukung dengan dokumentasi baseline data yang memadai.	Kertas kerja penyusunan target telah didukung dengan penjelasan analisis dan didukung dengan dokumentasi baseline data yang memadai.
2	Melakukan reviu terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah tercapai lebih dari 120%	Telah dilakukan reviu target target IKU yang capaiannya >120% dan telah dilakukan revisi target Renstra 2023-2024 terhadap 2 indikator yaitu Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada PK 2023	-	-	Target persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada dokumen reviu renstra masing-masing sebesar 74% dan 82%.	Target persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada dokumen PK Tahun 2023 masing-masing sebesar 76% dan 85%
3	Mengoptimalkan reviu berjenjang dalam pengukuran kinerja untuk mencegah kesalahan penyajian data kinerja	Telah dibuatkan SK Tim Monev Kinerja Tahun 2023 yang mewajibkan bahwa data yang diinput di link RHPK sudah diverifikasi oleh ketua Tim Kerja. Selain itu penanggung jawab datanya dari masing-masing fungsi hampir seluruhnya sebagai ketua Tim Kerja.	-	-	SK Tim Monev belum mewajibkan data yang diinput di link RHPK sudah diverifikasi oleh ketua Tim Kerja	SK Tim Monev sudah mewajibkan data yang diinput di link RHPK sudah diverifikasi oleh ketua Tim Kerja
4	Mendokumentasikan penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dari hasil pemanfaatan pengukuran kinerja	Telah dibuat nota dinas/memorandum dari Kepala BBPOM di Mataram kepada seluruh Ketua Tim agar mendokumentasikan	-	-	penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dari hasil pemanfaatan	penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dari hasil pemanfaatan





No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
		penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dari hasil pemanfaatan pengukuran kinerja			pengukuran kinerja belum terdokumentasi dengan baik	pengukuran kinerja sudah terdokumentasi relatif baik
5	Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dalam pemantauan dampak atas rencana aksi yang telah diimplementasikan terhadap keberhasilan pencapaian kinerja	Telah dibuat nota dinas/memorandum dari Kepala BBPOM di Mataram kepada seluruh Ketua Tim agar Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dalam pemantauan dampak atas rencana aksi yang telah diimplementasikan terhadap keberhasilan pencapaian kinerja	-	-	Pemanfaatan laporan kinerja dalam pemantauan dampak atas rencana aksi yang telah diimplementasikan terhadap keberhasilan pencapaian kinerja kurang optimal	Pemanfaatan laporan kinerja dalam pemantauan dampak atas rencana aksi yang telah diimplementasikan terhadap keberhasilan pencapaian kinerja sudah optimal
6	Menjelaskan latar belakang perubahan anggaran yang dikaitkan dengan upaya mencapai target kinerja pada laporan kinerja	Latar belakang perubahan anggaran (bila ada) yang dikaitkan dengan upaya mencapai target kinerja telah dijelaskan pada Laporan kinerja Interim TW3 dan Lakin Tahun 2023	-	-	Belum terdapat penjelasan latar belakang perubahan anggaran yang dikaitkan dengan upaya mencapai target kinerja pada laporan kinerja	pada Laporan kinerja Interim TW3 dan Lakin Tahun 2023 telah dijelaskan latar belakang perubahan anggaran yang dikaitkan dengan upaya mencapai target kinerja
7	Memastikan validitas hasil evaluasi internal yang dimanfaatkan dalam penyusunan laporan kinerja interim maupun Tahunan	Hasil evaluasi internal telah dimanfaatkan dalam penyusunan laporan kinerja interim maupun Tahunan antara lain data capaian kinerja, rencana tindak lanjut serta hasil tindak lanjut evaluasi sebelumnya	-	-	Hasil evaluasi internal dimanfaatkan dalam penyusunan laporan kinerja interim maupun Tahunan belum maksimal	Hasil evaluasi internal dimanfaatkan dalam penyusunan laporan kinerja interim maupun Tahunan lebih maksimal
8	Memfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang	Hasil Monev Kinerja Telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja antara lain telah dilakukan revisi target Renstra 2023-2024 terhadap 2 indikator	-	-	Pemanfaatan hasil monev kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan belum maksimal	Pemanfaatan hasil monev kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan lebih maksimal





No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
		yaitu Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat				
9	Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada Tahun berjalan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja serta mempertahankan upaya perbaikan secara terus-menerus (<i>continuous improvement</i>)	Telah dibuat nota dinas/memorandum dari Kepala BBPOM di Mataram kepada seluruh Ketua Tim agar Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada Tahun berjalan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja serta mempertahankan upaya perbaikan secara terus-menerus (<i>continuous improvement</i>)	-	-	Pemanfaatan hasil evaluasi internal triwulanan untuk mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada Tahun berjalan belum maksimal	Pemanfaatan hasil evaluasi internal triwulanan untuk mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada Tahun berjalan lebih maksimal

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa kelima komponen nilai AKIP yang belum maksimal baik yaitu komponen perencanaan, pengukuran pelaporan, evaluasi internal maupun capaian kinerja, sehingga perlu upaya yang cukup keras untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi pada laporan kinerja sehingga diharapkan target nilai AKIP dapat tercapai dan meningkat disbanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi nilai AKIP BBPOM di Mataram telah melampaui target renstra tahun 2024, sehingga dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2024. Target indikator kinerja yang semula pada renstra sebesar 83, dinaikkan menjadi 85,25.





SASARAN STRATEGIS - 9

Terwujudnya SDM BBPOM di Mataram yang Berkinerja Optimal

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis Kesembilan hanya satu indikator yaitu Indikator **Indeks Profesionalitas (IP) ASN BBPOM di Mataram**.

Indeks Profesional ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap Tahun. Berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk 4 Dimensi menjadi sebagai berikut:

1. **Dimensi Kualifikasi**, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot sebesar 25%;
2. **Dimensi Kinerja**, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%;
3. **Dimensi Kompetensi**, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%; dan
4. **Dimensi Disiplin** digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 (satu) Tahun terakhir, dengan bobot sebesar 5%.

Berdasarkan hasil perhitungan IP ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Tahun 2023 diperoleh berdasarkan hasil evaluasi Biro Sumber Daya Manusia Badan POM RI pada akhir Tahun 2023.



**PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023****Tabel 3.88** Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Mataram

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Terwujudnya SDM BBPOM di Mataram yang berkinerja optimal	IP ASN BBPOM di Mataram	84.00	90.11	107.27	Sangat baik

Realisasi IP ASN BBPOM di Mataram Tahun 2023 telah melebihi target yaitu sebesar 90,11 dari target 84,0 sehingga nilai pencapaian indikator menjadi sebesar 107,27% dengan kriteria "sangat baik".

Pengukuran Indeks Profesionalitas (IP) ASN Tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan aplikasi IP ASN BPOM yang masing-masing dimensi mengambil data dari:

- Dimensi Kualifikasi mengambil data dari Riwayat Pendidikan Terakhir pada Aplikasi SIAP, untuk proses pengukuran disesuaikan dengan syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhir Pegawai;
- Dimensi Kompetensi mengambil data dari Riwayat Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIAP dimana data Riwayat Kompetensi di Aplikasi SIAP terintegrasi pada Aplikasi Pengembangan Kompetensi (PPSDM).
- Dimensi Kinerja mengambil data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN.
- Dimensi Disiplin mengambil data disiplin dari SIASN BKN.

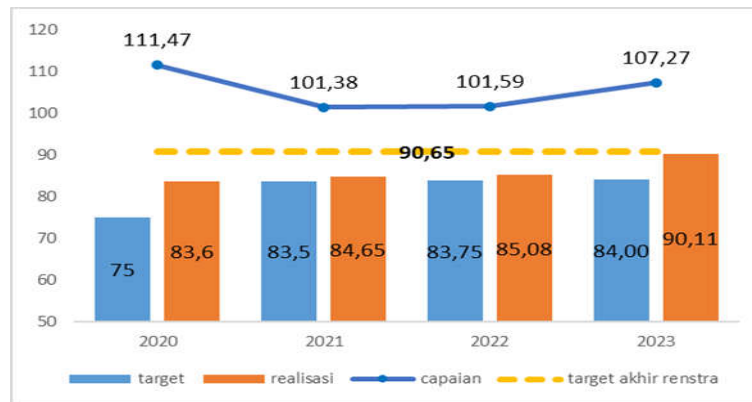
Tabel 3.89 Nilai Masing-Masing Komponen Penyusun Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Mataram

No	Komponen Penyusun Nilai IP ASN	Bobot (%)	Nilai	% Nilai
1	Dimensi Kualifikasi	25	21,22	84,87
2	Dimensi Kompetensi	40	39,03	97,58
3	Dimensi Kinerja	30	24,86	82,85
4	Dimensi Disiplin	5	5,00	100,00
Nilai IP ASN			90,11	





PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.53. Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase IP ASN BBPOM di Mataram Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Realisasi IP ASN BBPOM di Mataram Tahun 2023 terus meningkat sejak Tahun 2020. Capaian Tahun 2023 lebih tinggi daripada Tahun 2022 dan 2021, namun lebih rendah daripada Tahun 2020 dikarenakan target Tahun 2020 lebih rendah.

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi indikator ini Tahun 2023 yang telah melampaui target akhir periode renstra pada dokumen reviu renstra 2020-2024 dilakukan reviu dan penyesuaian target akhir periode renstra (Tahun 2024) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target akhir periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reviu Renstra sebesar 84,0 disesuaikan menjadi 90,65 pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
IP ASN BBPOM di Mataram	84,25	90,11	106,96	Tercapai

Realisasi IP ASN BBPOM di Mataram pada Tahun 2023 (90,11) jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra (84,25), telah tercapai sebesar 106,96%.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut:

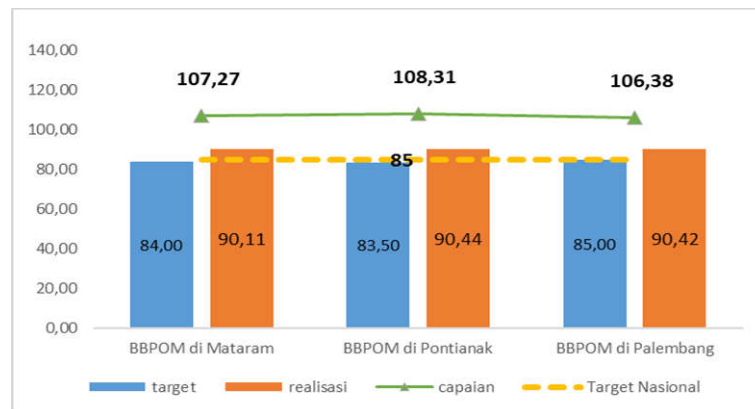




Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%CAPAIAN	Kategori
IP ASN BBPOM di Mataram	90,65	90,11	99,40	Akan Tercapai

Realisasi IP ASN BBPOM di Mataram pada Tahun 2023 (90,11) jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (90,65), sudah tercapai sebesar 99,40%. Oleh sebab itu, target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER



Gambar 3.54. Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian indikator Persentase IP ASN BBPOM di Mataram Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster

Realisasi BBPOM di Mataram lebih rendah dari BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palembang. Realisasi ketiga BBPOM dalam satu klaster telah melampaui target masing-masing serta target nasional.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

IP ASN adalah tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Faktor yang mendukung keberhasilan capaian BBPOM di Mataram tersebut antara lain:

- Monitoring yang berkala terhadap pemenuhan Pengembangan Kompetensi minimum 20 jam pelajaran per Tahun sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Hal tersebut dimasukkan kedalam target SKP setiap ASN di lingkungan BBPOM di Mataram, sehingga setiap ASN diwajibkan mengikuti pengembangan kompetensi untuk memenuhi target tersebut. Sejak adanya pandemi Covid-19 banyak mengubah metode pelatihan ke bentuk daring/online melalui fasilitas Zoom maupun Google Meet. Metode tersebut memberikan banyak kemudahan yang mendorong semakin meningkatnya jumlah pelatihan secara daring yang ditawarkan baik dari internal (PPSDM Badan POM atau BBPOM di Mataram) maupun pihak eksternal.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA



PENUTUP

- Peningkatan kapasitas dan kemampuan seluruh ASN di lingkungan BBPOM di Mataram telah didukung dengan perencanaan sumber daya anggaran T.A 2023 sebagai bukti komitmen pimpinan untuk terus meningkatkan profesionalitas ASN. Peningkatan tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis, workshop, seminar, diklat, dan *on the job training* baik daring maupun luring.
- Peningkatan pemahaman ASN BBPOM di Mataram perihal penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara konsisten dilakukan melalui role model, sosialisasi peraturan dan implementasi disiplin pegawai sesuai peraturan baik pada saat apel pembinaan atau kesempatan pertemuan lainnya serta pemberian punishment dan reward melalui inovasi PARE PEDIS (Punishment and Reward Pegawai Disiplin).
- Penilaian kinerja pegawai berkala setiap triwulan dan Tahunan dilaksanakan tepat waktu

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat meningkatkan capaian IP ASN BBPOM di Mataram, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Meningkatkan kualifikasi pendidikan formal pegawai diantaranya dengan memberikan kesempatan tugas belajar kepada pegawai
- Meningkatkan nilai dimensi kompetensi dengan memberikan penugasan kepada jabatan struktural/fungsional/pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.90 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IP ASN BBPOM di Mataram

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
IP ASN BBPOM di Mataram	84	90,11	107,27	3.420.619.800	3.419.392.051	99,96	1,07	0,07

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi sebesar 1,07 lebih besar daripada standar efisiensi (1), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 0,07. Hal ini disebabkan karena seluruh program/kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja IP ASN BBPOM di Mataram telah efektif.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian IP ASN BBPOM di Mataram tidak lepas dari kontribusi beberapa kegiatan yang telah dilakukan, antara lain:





- Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan dengan target minimal yang harus dicapai oleh Pegawai sebesar 20 Jam Pelajaran baik secara daring maupun luring antara lain diklat manajerial, diklat fungsional, diklat teknis dan seminar.
- Pengembangan kompetensi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui tugas belajar bagi pegawai dengan kualifikasi di bawah S1
- Penetapan dan penilaian kinerja individu didasarkan pada sistem *cascading* indikator kinerja dari pimpinan unit sampai level individu
- Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku melalui sosialisasi peraturan dan implementasi disiplin pegawai sesuai peraturan.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Meningkatkan kualifikasi pendidikan formal pegawai diantaranya dengan memberikan kesempatan tugas belajar kepada pegawai	Mengusulkan Peningkatan kualifikasi pendidikan ASN BBPOM di Mataram melalui program tugas belajar a.n Ramadhan Al Dzahabi Ardy, A.Md dan Kadek Bagus Khrisna Candra, A.Md.	-	-	Kualifikasi Pendidikan atas nama Ramadhan Al Dzahabi Ardy, A.Md dan Kadek Bagus Khrisna	Personel atas nama Ramadhan Al Dzahabi Ardy, A.Md dan Kadek Bagus Khrisna Masih proses tugas belajar Pendidikan S1
2	Memberikan penugasan kepada pegawai untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis min 20 JP, dan seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya	Dilakukan peningkatan kapasitas dan kemampuan pegawai sehingga seluruh pegawai mencapai minimal 20 Jam Pelajaran Pengembangan Kompetensi	-	-	Seluruh pegawai telah mencapai minimal 20 Jam Pelajaran Pengembangan Kompetensi	Seluruh pegawai telah mencapai minimal 20 Jam Pelajaran Pengembangan Kompetensi
3	Meningkatkan hasil penilaian kinerja pegawai dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.	dilakukan penilaian SKP pegawai tiap triwulan Tahun 2023	-	-	Hasil penilaian SKP seluruh pegawai pada tiap triwulan seluruhnya dengan kategori BAIK	Hasil penilaian SKP seluruh pegawai pada TW I-3 seluruhnya dengan kategori BAIK, sedangkan





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
						pada TW4 beberapa pegawai dengan kategori SANGAT BAIK, sisanya kategori baik.
4	Melakukan monitoring data / informasi pegawai yang dikenakan hukuman disiplin	Telah dilakukan monitoring data/informasi pegawai yang dikenakan hukuman disiplin	-	-	Tidak terdapat pegawai yang dikenakan hukuman disiplin	Tidak terdapat pegawai yang dikenakan hukuman disiplin

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Mataram telah melampaui target renstra tahun 2024, sehingga dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2024. Target indikator kinerja yang semula pada renstra sebesar 84,25, dinaikkan menjadi 90,65.



**SASARAN STRATEGIS - 10****Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 2 indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis kesepuluh. Capaian kedua indikator kinerja pada sasaran strategis kesepuluh sebagai berikut:

Tabel 3.91 Capaian Kinerja Sasaran Strategi 10 BBPOM di Mataram Tahun 2023

NO SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	92	93,43	101,55	sangat baik
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Mataram yang optimal	2,5	2,90	116,00	sangat baik

Pengukuran capaian indikator kinerja serta analisis capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 10 pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP

Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2023 sebagai berikut:

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, %CAPAIAN TAHUN 2023

Tabel 3.92 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	92	93,43	101,55	sangat baik





Realisasi Indeks Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada Tahun 2023 telah melebihi target yaitu sebesar 93,43 dari target 92,00 sehingga nilai pencapaian indikator menjadi sebesar 101,55% dengan kriteria 'Sangat Baik'.

Pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP adalah upaya laboratorium pengujian BBPOM di Mataram untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Penilaian dilakukan sesuai Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.02.1.3.02.22.85 Tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan yang meliputi standar ruang lingkup pengujian, standar kompetensi, dan standar peralatan. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh PPPOMN dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.93 Hasil Penilaian Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2020-2023

No	Standar	NILAI			
		2023	2022	2021	2020
1	Persentase Pemenuhan Standar Ruang lingkup	93,19	88,3	83,3	72,1
2	Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi	97,8	94,96	91,42	75,6
3	Persentase Pemenuhan Standar Peralatan	89,3	86,32	76,52	85,4
Total Nilai		93,43	89,90	83,75	77,70

Indikator ini telah mencapai target Tahun 2023 karena telah dilakukan peningkatan kompetensi personil di masing-masing laboratorium melalui pelatihan yang diikuti baik secara daring maupun luring. Disamping itu, laboratorium kimia dan mikrobiologi telah meningkatkan pemenuhan ruang lingkup dengan verifikasi metode, pengujian parameter dalam ruang lingkup, uji profisiensi, dan uji banding antar laboratorium. Pencapaian pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai stardar GLP BBPOM Mataram Tahun 2023 sebesar 93,43 selalu meningkat dalam tiga Tahun terakhir. Peningkatan persentase capaian BBPOM Mataram pada persentase pemenuhan standar ruang lingkup Tahun 2023 sebesar 93,19% meningkat 4,89% dibandingkan Tahun 2022. Pemenuhan standar kompetensi Tahun 2023 sebesar 97,80% meningkat 2,84% dibanding Tahun 2022. Demikian pula pemenuhan standar peralatan Tahun 2023 sebesar 89,30% meningkat 2,98% dari Tahun 2022. Perolehan capaian nilai SKL BBPOM Mataram sejak Tahun 2020 sampai dengan 2023 selalu menempati peringkat 1 Nasional yang menggambarkan kemampuan laboratorium pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Mataram yang kompeten dan kredibel.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA

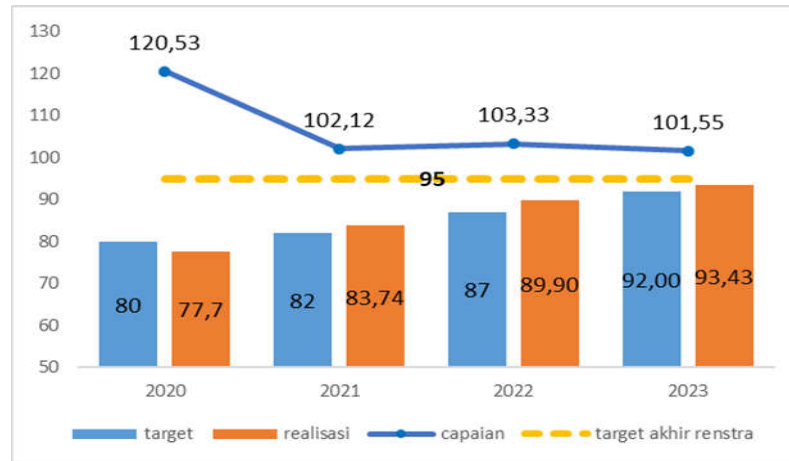


AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.55. Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Realisasi pada Tahun 2023 (93,43) lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2022 (89,90), 2021 (83,74) dan 2020 (77,7). Peningkatan capaian ini merupakan hasil dari penambahan peta kemampuan uji untuk setiap komoditi obat dan makanan diikuti dengan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan baik secara daring maupun luring serta pengadaan dan perbaikan alat laboratorium.

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi dan capaian indikator ini periode Tahun 2020 – 2023, dilakukan reviu dan penyesuaian target akhir periode renstra (Tahun 2024) pada dokumen reviu renstra 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target akhir periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reviu Renstra sebesar 97,0% disesuaikan menjadi 95,0% pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	97,0	93,43	96,32	Akan Tercapai

Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada Tahun 2023 (93,43%) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra (97%), baru tercapai sebesar 96,32%.





Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%CAPAIAN	Kategori
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	95	93,43	98,35	Akan Tercapai

Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada Tahun 2023 (93,43%) jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (95%), sudah tercapai sebesar 98,35%. Oleh sebab itu, target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASER



Gambar 3.56. Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Pemenuhan laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Kluster

Realisasi dan capaian BBPOM di Mataram paling tinggi dibandingkan dengan BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palembang. Hanya realisasi BBPOM di Palembang yang belum mencapai target, serta ketiga BBPOM dalam satu kluster telah melampaui target nasional.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Capaian BBPOM di Mataram yang tinggi ini disebabkan beberapa faktor yang langsung mempengaruhi nilai pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP. Terdapat tiga komponen penilaian yang masing-masing komponen telah dilakukan kegiatan yang dapat meningkatkan skor tersebut, penyebab peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan verifikasi metode dan pengujian terhadap seluruh parameter uji yang terdapat dalam standar ruang lingkup pengujian minimal 1 kali seTahun, sehingga meningkatkan nilai pemenuhan standar ruang lingkup.





- Pengadaan dan perawatan alat-alat laboratorium. Untuk memenuhi nilai peralatan, Tahun 2023 dilakukan pengadaan 3unit Freezer, satu *fume hood* (lemari asam) dan *nitrogen evaporator*. Selain itu, kalibrasi dan perawatan alat-alat laboratorium dilakukan secara berkala baik itu secara mandiri maupun oleh vendor / distributor alat laboratorium, sehingga alat dapat tetap berfungsi dan berkinerja dengan baik.
- Peningkatan kompetensi pegawai dilakukan secara berkala yang melibatkan seluruh personel laboratorium. Peningkatan kompetensi ini dilakukan secara *offline* maupun *online meeting*. Dalam pelatihan secara *online* tidak hanya presentasi yang ditampilkan, namun juga simulasi melalui video, sehingga penguji tetap dapat memahami dan menerapkan apa yang dipelajari.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat meningkatkan capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, selanjutnya perlu dilakukan dan dipertahankan hal-hal sebagai berikut:

- Menyusun perencanaan pemenuhan standar ruang lingkup sesuai target
- Memenuhi kebutuhan dan pemeliharaan peralatan sesuai standar yang telah ditetapkan
- Melaksanakan program pelatihan yang terstruktur berdasarkan identifikasi kebutuhan pelatihan

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 3.94 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	92	93,43	101,55	360.000.000	359.999.055	100,00	1,02	0,02

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi sebesar 1,02 lebih besar daripada standar efisiensi (1), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi (TE) sebesar 0,02. Hal ini disebabkan karena seluruh program/kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini telah efektif.





ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Terdapat beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, sebagai faktor pendukung ketercapaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP, yaitu:

- Penerapan Integrasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 dan ISO/IEC 17025: 2017 di setiap laboratorium pengujian. Melakukan kaji ulang dokumen mutu secara periodik terutama terkait kalibrasi dan pemeriksaan antara.
- Penerapan Inovasi "Si Opa Lagi JJ" (Sistem Pengoperasian Alat Lab Jarak Jauh) pada pengujian obat dan makanan meningkatkan kinerja laboratorium di dalam pemenuhan standar ruang lingkup.
- Kalibrasi dan verifikasi alat secara berkala tiap Tahun selalu dilakukan untuk memastikan hasil pengujian tetap valid akurat. Kalibrasi dan pemeriksaan antara alat laboratorium dilakukan baik oleh internal pegawai BBPOM di Mataram maupun oleh PPPOMN dan vendor / distributor alat laboratorium.
- Pemeliharaan alat laboratorium melalui terobosan Inovasi I-CONIC (*Instrument Conculatation Clinic*) yang melahirkan dokter alat laboratorium di Balai Besar POM Mataram mampu melakukan perbaikan alat laboratorium seperti GCMS, HPLC, dan AAS sehingga kinerja alat laboratorium tetap dalam kondisi prima.
- Pengadaan suku cadang, baku pembanding, dan reagensia dilakukan dengan perencanaan yang baik. Ketiga hal tersebut sangat berpengaruh utamanya dalam proses pengujian dan verifikasi metode, sehingga dapat mendukung tercapainya standar ruang lingkup.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Menyusun perencanaan pemenuhan standar ruang lingkup	Telah terpenuhi ruang lingkup sesuai perencanaan	-	-	Nilai Persentase Pemenuhan Standar Ruang lingkup sebesar 88,3%	Terjadi peningkatan Nilai Persentase Pemenuhan Standar Ruang lingkup menjadi sebesar 93,19%
2	Memenuhi kebutuhan dan pemeliharaan peralatan sesuai standar yang telah ditetapkan	Telah dilakukan pengadaan peralatan sesuai perencanaan	-	-	Nilai Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi Sebesar 84,96%	Terjadi peningkatan Nilai Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi menjadi sebesar 97,8%
3	Melaksanakan program pelatihan	Telah dilakukan pelatihan berupa	-	-	Nilai Persentase Pemenuhan	Terjadi peningkatan Nilai Persentase





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
	yang terstruktur berdasarkan identifikasi kebutuhan pelatihan	<i>on the job training</i> dan magang			Standar Peralatan Sebesar 86,32%	Pemenuhan Standar Peralatan menjadi sebesar 89,3%

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan laporan evaluasi kinerja TW 4 tahun 2023 bahwa terdapat perubahan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) mulai TW 3 tahun 2023 yang mempengaruhi Standar Peralatan, antara lain peralatan yang distandarkan lebih diperinci. Berdasarkan hal tersebut laboratorium mengajukan usulan Rekomendasi Peralatan ke PPPOMN untuk menyesuaikan Standar Kemampuan Laboratorium terbaru sebagai dasar untuk perencanaan pemenuhan peralatan laboratorium di tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP telah melampaui target renstra tahun 2023 namun masih cukup jauh terhadap target renstra tahun 2024, sehingga diusulkan untuk dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2024. Target indikator kinerja yang semula pada renstra sebesar 97% diturunkan menjadi 95%.

2. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BBPOM DI MATARAM YANG OPTIMAL


Indeks pengelolaan data dan Informasi UPT yang optimal bertujuan untuk menjamin data dan Informasi yang tersedia selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran, serta untuk menilai implementasi sistem Informasi dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja.

Setiap komponen penilaian indeks pengelolaan data dan Informasi UPT yang optimal memiliki ketentuan yang berbeda-beda, tergantung pada aspek yang dinilai. Nilai capaian dapat dipantau oleh masing-masing unit kerja pusat dan UPT melalui aplikasi BOC, yaitu dengan login sebagai PIC Unit Teknis pada command-center.pom.go.id, kemudian memilih menu Pengelolaan Data dan Informasi.

Capaian indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Mataram yang optimal Tahun 2023 sebagai berikut:



**PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023****Tabel 3.95** Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Mataram yang Optimal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Mataram yang optimal	2,5	2,90	116,00 	Sangat Baik

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Mataram yang optimal pada Tahun 2023 sudah melebihi target dengan realisasi sebesar 2,90 dari target 2,5 sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 116,00% dengan kriteria “sangat baik”.

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Mataram yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen oleh Pusat Data dan Informasi Nasional (Pusdatin) BPOM tiap triwulan mulai mulai triwulan I s/d triwulan 4 Tahun 2023.

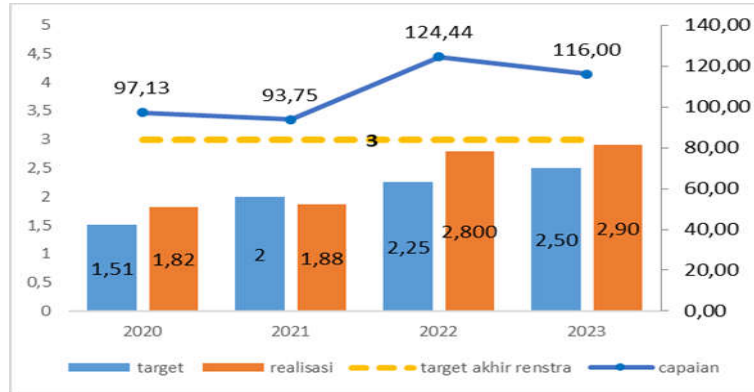
Realisasi pengelolaan data dan informasi UPT diperoleh dari nilai rata-rata penilaian 2 komponen yaitu:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BPOM *Operational Center* (BOC) dengan nilai 2,9 diperoleh dari nilai pemutakhiran data SIPT (2,4) ditambah data keracunan dari aplikasi SPIMKer (0,4);
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM dengan nilai 3,00 diperoleh dari rata-rata nilai: i) pemanfaatan email *corporate* dengan nilai 3 ii) pemanfaatan *sharing folder* dengan nilai 3; iii) pemanfaatan *dashboard* BCC dengan nilai 3; dan iv) *upload* berita aktual pada *website* BPOM/*subsite* BBPOM di Mataram dengan nilai 3.





PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020



Gambar 3.57. Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Mataram yang Optimal Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Realisasi BBPOM di Mataram Tahun 2023 terdapat kenaikan 0,10 poin apabila dibandingkan dengan di Tahun 2022 dan terjadi peningkatan setiap Tahun sejak Tahun 2020.

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Target akhir periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reviu Renstra Tahun 2020-2024 dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sama yaitu 3,0

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra (pada dokumen reviu renstra dan PK Tahun 2024) sebagai berikut:

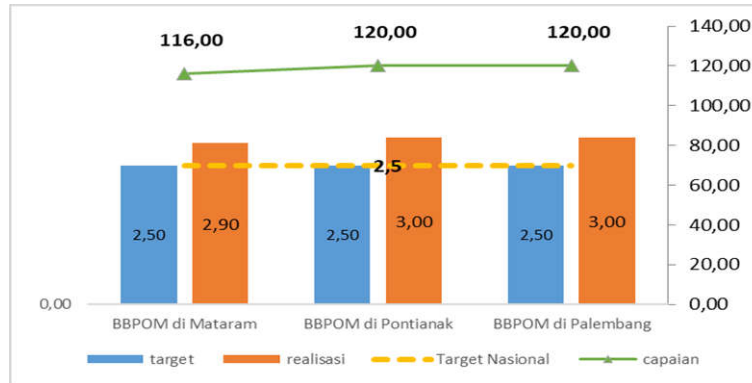
Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%CAPAIAN	Kategori
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Mataram yang optimal	3,0	2,9	96,67	Akan Tercapai

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Mataram yang optimal pada Tahun 2023 (2,90) jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra (3,00), sudah tercapai sebesar 96,67%. Oleh sebab itu, target akhir periode renstra optimis dapat dicapai.





PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLASTER



Gambar 3.58. Perbandingan target, realisasi dan %Capaian Presentase Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Mataram yang Optimal Tahun 2023 dengan BBPOM Lain dalam Satu Klaster

Berdasarkan gambar di atas, realisasi dan capaian BBPOM di Mataram lebih rendah dibandingkan BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palembang. Realisasi ketiga BBPOM telah melampaui target masing-masing dan target nasional (2,5) dengan kriteria capaian “sangat baik”.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Dari hasil evaluasi, Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Mataram yang optimal pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan capaian 116,0%. Hal ini disebabkan karena tingginya realisasi pada Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM dengan nilai maksimal yaitu 3,00 yang diperoleh dari rata-rata nilai: i) pemanfaatan email *corporate* dengan nilai 3 ii) pemanfaatan *sharing folder* dengan nilai 3; iii) pemanfaatan *dashboard* BCC dengan nilai 3; dan iv) *upload* berita aktual pada *website* BPOM/*subsite* BBPOM di Mataram dengan nilai 3.

REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja ini, langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu mempertahankan nilai indikator yang capaiannya sudah tinggi (maksimal) dan meningkatkan nilai indikator yang capaiannya belum maksimal antara lain dengan cara:

- Meningkatkan koordinasi tentang pelaporan kasus keracunan Obat dan Makanan dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di Kab/Kota dan Provinsi NTB



**ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA****Tabel 3.96** Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Mataram yang Optimal

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Mataram yang optimal	2,5	2,90	116,0	326.721.200	326.667.283	99,98	1,16	0,16

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi sebesar 1,16 lebih besar daripada standar efisiensi (1), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 0,16. Hal ini disebabkan karena seluruh program/kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini telah efektif.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Capaian BBPOM di Mataram yang tinggi ini disebabkan beberapa faktor yang langsung mempengaruhi nilai Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi, yaitu:

- *e-mail corporate* telah dimanfaatkan oleh seluruh pegawai secara rutin untuk keperluan korespondensi dan berbagi informasi
- Pemanfaatan *sharing folder* untuk keperluan pengawasan produk Obat dan makanan setiap sampling, pengawasan penandaan, pemeriksaan sarana, dan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai produk Obat dan makanan
- Mengunggah berita aktual di *subsite* mataram.pom.go.id secara rutin sebagai bagian dari dokumentasi dan peliputan kegiatan BBPOM di Mataram yang merupakan bagian dari kegiatan tim publikasi
- Pemanfaatan *dashboard* BOC secara rutin untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan kinerja
- Melaksanakan input data hasil pemeriksaan dan pengujian di SIPT sesuai dengan target yang telah ditetapkan

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Meningkatkan koordinasi tentang pelaporan kasus keracunan dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di Kab/Kota dan Provinsi NTB	Telah dilakukan koordinasi tentang pelaporan kasus keracunan dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di Kab/Kota dan Provinsi NTB bersamaan dengan kegiatan	-	-	Pelaporan data keracunan Obat dan Makanan melalui SPIMKER belum rutin	Pelaporan data keracunan Obat dan Makanan melalui SPIMKER telah rutin tiap bulan kecuali di bulan





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
		farmakovigilans dan toksikovigilans			tiap bulan	Januari
2	Pertemuan dengan petugas rekam medis dari Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan terkait farmakovigilans dan toksikovigilans	Telah dilakukan kegiatan farmakovigilans dan toksikovigilans dengan mendatangi Dinas kesehatan dan Rumah Sakit di Kab/Kota dan Provinsi NTB	-	-	Data keracunan Obat dan Makanan belum tersedia secara berkala tiap bulan	Data keracunan Obat dan Makanan tersedia secara berkala tiap bulan kecuali di bulan Januari

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Laporan Kinerja Interim TW 3 Tahun 2023 dan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Mataram yang optimal sudah baik namun masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan Langkah-langkah peningkatan terutama pada komponen pemanfaatan data yaitu pelaporan keracunan (Spimker) dan pelaporan SIPT khususnya pengawasan sarana maupun pengujian sehingga diharapkan data dan informasi dapat dimanfaatkan secara optimal.



**SASARAN STRATEGIS - 11****Terkelolanya Keuangan BBPOM di Mataram Secara Akuntabel**

Terdapat 1 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan penacapaian Sasaran Strategis 11 yaitu **Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM di Mataram** dengan target realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.97 Indikator dan Target Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Kesebelas

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Mataram	97,0

Pengukuran capaian indikator kinerja serta analisis capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 11 adalah sebagai berikut:

NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI MATARAM**PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023**

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM di Mataram Tahun 2023 belum mencapai target yaitu sebesar 91,65 dari target 97,0. Sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 94,48% dengan kriteria “cukup”

Tabel 3.98 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan NKA BBPOM di Mataram

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Mataram secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Mataram	97,00	91,65	94,48	cukup

Realisasi NKA BBPOM di Mataram diperoleh dari perhitungan:

$$\text{NKA BBPOM di Mataram: (Nilai EKA x 60\%) + (Nilai IKPA x 40\%)}$$

Realisasi indikator nilai kinerja anggaran sebesar 91,65 diperoleh dari penjumlahan 40% nilai IKPA sebesar 97,97 (39,184) dan 60% nilai EKA sebesar 87,44 (52,464).

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).



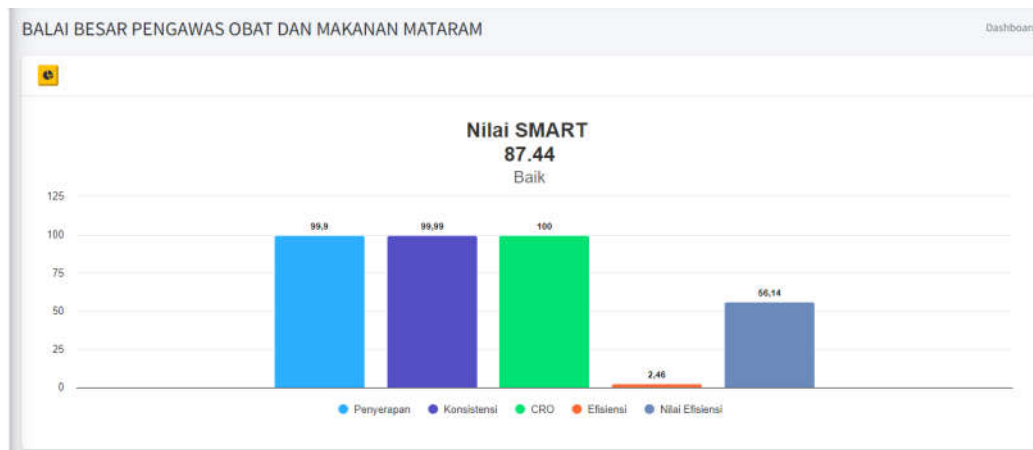


Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang berdasarkan reformulasi IKPA Tahun 2023 memuat 8 indikator yang mencerminkan aspek kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: (i) Revisi DIPA, (ii) Deviasi Halaman III DIPA, (iii) Penyerapan anggaran, (iv) Belanja kontraktual, (v) Penyelesaian Tagihan, (vi) UP dan TUP, (vii) Dispensasi, (viii) Capaian Output.

Tabel 3.99 Rincian Nilai IKPA Tahun 2023

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
Nilai	100	85,9	97,41	100	100	98,96	100	100	97,97
Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25	
Nilai Akhir	10	8,59	19,48	10	10	9,9	5	25	
Nilai Aspek	92,95		99,27					100	

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

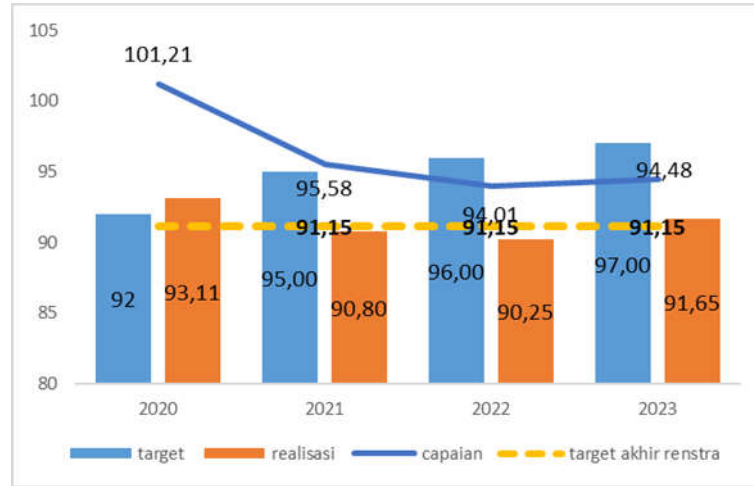


Gambar 3.59. Rincian nilai EKA Tahun 2023





PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021 DAN 2020 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DALAM PERIODE RENSTRA



Gambar 3.60. Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian NKA BBPOM di Mataram Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Realisasi indikator NKA BBPOM di Mataram Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2022 dan 2021, namun lebih rendah dari Tahun 2020.

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi dan capaian indikator ini yang sejak Tahun 2021 – 2023 tidak pernah tercapai, dilakukan reviu dan penyesuaian target akhir periode renstra (Tahun 2024) pada dokumen reviu renstra 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target akhir periode renstra (target Tahun 2024) pada dokumen Reviu Renstra sebesar 98,0% disesuaikan menjadi 91,15% pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Mataram	98,0	91,65	93,52	Akan Tercapai

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Mataram pada Tahun 2023 (91,65) jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra pada dokumen Reviu Renstra (98), baru tercapai sebesar 93,52%.



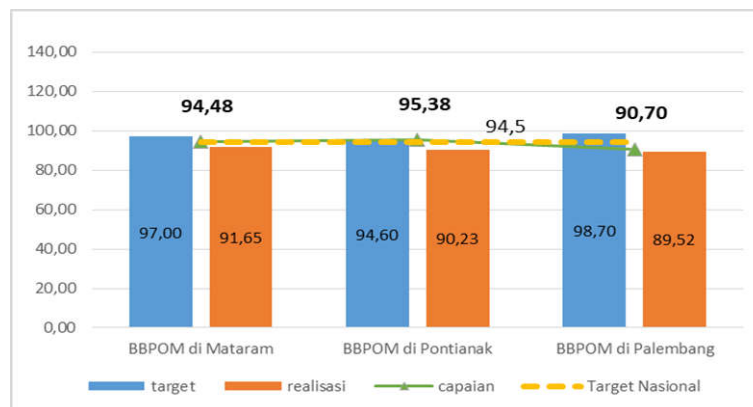


Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	%CAPAIAN	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Mataram	91,15	91,65	100,55 ▲	Tercapai

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Mataram pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, sudah tercapai sebesar 100,55%.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN %CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN BBPOM LAIN DALAM SATU KLAS TER



Gambar 3.61. Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Presentase Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Mataram yang Optimal Tahun 2023 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Realisasi BBPOM di Mataram paling tinggi dibandingkan BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Palembang. Capaian BBPOM di Mataram lebih tinggi dari BBPOM di Palembang, namun lebih rendah dari BBPOM di Pontianak karena target BBPOM di Mataram yang lebih tinggi. Realisasi BBPOM di Mataram dan BBPOM lainnya dalam satu klaster belum mencapai target nasional.

ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAU PENURUNAN KINERJA

Capaian NKA BBPOM di Mataram Tahun 2023 tidak mencapai target disebabkan karena realisasi nilai EKA maupun IKPA yang kurang optimal. Kurang optimalnya nilai IKPA antara lain disumbang oleh nilai deviasi halaman 3 DIPA sebesar 8,59 (bobot nilai 10) dan nilai penyerapan anggaran sebesar 19,48 (bobot nilai 20). Selain itu kecilnya nilai efisiensi pada pembentuk nilai EKA menyebabkan nilai EKA tidak optimal. Hal ini terjadi karena tingginya realisasi anggaran tidak disertai dengan capaian rincian output (RO) yang tinggi/melebihi target, karena hampir sebagian RO yang ada merupakan RO “generik/statis” yang capaiannya tidak dapat melebihi target.





REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Agar dapat meningkatkan Capaian NKA BBPOM di Mataram, selanjutnya perlu dilakukan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Mengusulkan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM RI untuk menurunkan target indikator kinerja agar lebih realistis dan dapat dicapai (SMART).
- Memastikan konsistensi antara perencanaan (*Plan of Action*), pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA
- Menjaga penyerapan anggaran tiap jenis belanja tiap triwulan sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Target Realisasi Minimal			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Belanja Pegawai	20%	50%	75%	95%
2	Belanja Barang	15%	50%	70%	90%
3	Belanja Modal	10%	40%	70%	90%

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPI KINERJA

Tabel 3.100 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Mataram

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
	T	R	%	T	R	%		
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Mataram	97	91.65	94.48	1,047,059,400	1,046,700,407	99.97	0.95	- 0.05

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi sebesar 0,95 lebih kecil daripada standar efisiensi (1) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien karena capaian output indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran. Hal ini terjadi disebabkan karena anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program/kegiatan selama Tahun 2023 belum efektif untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa upaya yang sudah dilakukan dalam rangka pencapaian nilai kerja anggaran diantaranya:

- Melakukan monitoring dan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan;
- Pengawasan pelaporan data kinerja dan anggaran secara tepat waktu;
- Menyusun dan merealisasikan anggaran berdasarkan POA dan RPD sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan;
- Percepatan pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan yang telah terlaksana dan pembayaran kontrak yang telah selesai pekerjaannya;
- Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap bulan.





TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi laporan kinerja triwulan III Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga capaian RO bisa dicapai tanpa menunggu akhir Tahun khusus untuk 3 RO pro PN (PJAS, desa dan pasar) serta seluruh target RO dipastikan dapat dicapai. Optimalisasi anggaran dan kegiatan sehingga capaian RO dapat optimal melebihi yang ditargetkan (untuk beberapa RO kecuali RO "generik") 	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk 3 RO pro PN (PJAS, desa dan pasar) sehingga di bulan Nopember progress ketiganya sudah 100% Telah dilakukan optimalisasi anggaran dan kegiatan sehingga capaian sebagian RO dapat melebihi target 	-	Desember 2023	%CAPAIAN indikator kinerja sebesar 96,75%	Terjadi penurunan %capaian menjadi 94,48% (merupakan target kumulatif)

Terhadap rekomendasi laporan kinerja Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
1	Memastikan konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan <i>Plan of Actions</i> (PoA) serta Rencana Penarikan Dana (RPD).	Telah dilakukan Monev kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dan rencana penarikan dana (RPD) serta dilakukan revisi halaman III DIPA pada aplikasi SAKTI secara berkala	-	-	Nilai deviasi halaman 3 DIPA pada IKPA sebesar 7,22	Terjadi peningkatan Nilai deviasi halaman 3 DIPA walaupun belum maksimal menjadi 8,59
2	Pengelolaan UP dan TUP dengan melaksanakan pertanggungjawaban UP (GUP) ke KPPN tepat waktu minimal 2 kali tiap bulan	Telah dilakukan pertanggungjawaban UP (GUP) ke KPPN tepat waktu minimal 2 kali tiap bulan	-	-	Nilai Pengelolaan UP dan TUP pada IKPA sebesar 9,82	Terjadi peningkatan Nilai Pengelolaan UP dan TUP walaupun belum maksimal menjadi 9,9
3	Mendorong pelaksanaan kegiatan kontraktual Pra DIPA dan pelaksanaan pengadaan di bawah	Telah dilaksanakan pengadaan di bawah Rp 200 dan diatas 50 juta dengan Surat Perintah Kerja (SPK) di triwulan	-	-	Nilai belanja kontraktual pada IKPA sebesar 9,39	Terjadi peningkatan Nilai belanja kontraktual menjadi 10





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time Line		
	Rp 200 juta di triwulan pertama.	pertama 2023 serta Pelaksanaan kegiatan kontraktual Pra DIPA Tahun 2024 untuk pengadaan alat laboratorium dan suku cadang alat laboratorium				(nilai maksimal)

INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Laporan Kinerja Interim TW3 Tahun 2023 dan hasil evaluasi internal TW 4 tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Mataram masih jauh dari target tahun 2023, serta telah dua tahun berturut-turut tidak mencapai target, sehingga diusulkan untuk dilakukan penyesuaian target perjanjian kinerja tahun 2024. Target indikator kinerja yang semula pada renstra sebesar 97, disetujui diturunkan menjadi 91,15.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2023 BBPOM di Mataram memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 30 Nopember 2022 sebesar Rp. 23,995,139,000,-. Dilakukan 2 kali revisi DIPA yang menyebabkan perubahan pagu anggaran, yaitu: revisi pengurangan anggaran (pengembalian anggaran *automated adjustment* ke Bendahara Umum negara (BUN)) sehingga total anggaran menjadi sebesar Rp. 22,807,156,000 serta revisi pemenuhan belanja pegawai sehingga total anggaran DIPA akhir menjadi sebesar Rp. 23,849,625,000.

Pada bulan September 2023, untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dilakukan revisi DIPA dengan penambahan anggaran belanja modal (pengalihan dari belanja barang) yang sebelumnya Rp 265,000,000 menjadi Rp 733,100,000. Penambahan anggaran ini antara lain digunakan untuk pengadaan alat laboratorium berupa Nitrogen Evaporator dan *fume hood* (Lemari asam).

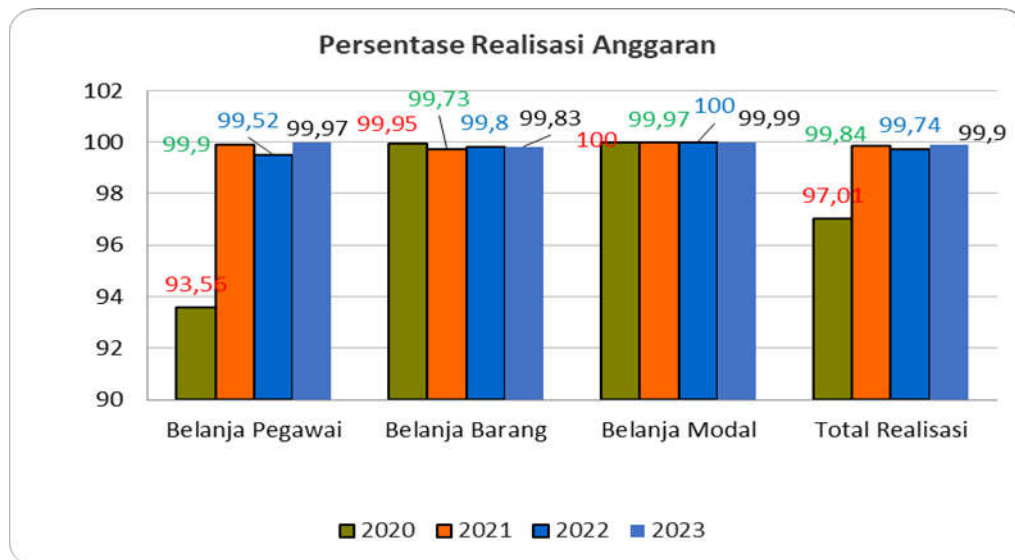
Realisasi anggaran Tahun 2023 adalah Rp. 23,825,109,279 atau 99,90%. Sumbangan terbesar terhadap realisasi anggaran ini yaitu realisasi belanja pegawai (99,97%) dan belanja modal (99,99%).





Tabel 3.101 Realisasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% REALISASI
1.	BELANJA PEGAWAI	10,470,594,000	10,467,004,074	3,589,926	99,97
2.	BELANJA BARANG	12,645,931,000	2,625,063,080	20,867,920	99,83
3.	BELANJA MODAL	733,100,000	733,042,125	57,875	99,99
TOTAL		23,849,625,000	23,825,109,279	24,515,721	99,90



Gambar 3.62. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

Total realisasi anggaran Tahun 2023 paling tinggi bila dibandingkan dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020. Realisasi anggaran di Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,60% dari Tahun 2022.

Pengelolaan anggaran BBPOM di Mataram senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Penyerapan anggaran tidak terlepas dari komitmen pimpinan, pengelola anggaran, penanggungjawab kegiatan dan seluruh pegawai BBPOM di Mataram untuk melaksanakan kegiatan tepat waktu, identifikasi dini kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana untuk dialihkan (revisi) ke kegiatan lainnya, dan pemanfaatan evaluasi bulanan capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran termasuk evaluasi oleh pihak eksternal (Dirjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi NTB) sebagai bahan perbaikan kinerja untuk periode berikutnya. Sehingga realisasi anggaran di Tahun 2023 dapat terealisasi dengan optimal.





Realisasi anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis BBPOM di Mataram Tahun 2023 seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.102 Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis BBPOM di Mataram Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Indikator/Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f= (e/d*100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram		1.805.176.000	1.804.794.806	99,98
		1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	790.546.500	790.486.140	99,99
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	263.515.500	263.495.380	99,99
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	524.949.000	524.737.538	99,96
		4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	174.983.000	174.912.513	99,96
	5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	51.182.000	51.163.236	99,96	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram		237.904.200	236.823.279	99,55
		1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	237.904.200	236.823.279	99,55
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram		531.753.400	529.439.657	99,56
		1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	55.945.000	55.793.100	99,73
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	237.904.200	236.823.279	99,55
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	237.904.200	236.823.279	99,55	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram		3.242.328.700	3.237.806.512	99,86
		1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	119.557.800	119.499.144	99,95





No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Indikator/Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f= (e/d*100)
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	119.557.800	119.499.144	99,95
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	125.163.000	121.957.330	97,44
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	156.907.000	156.860.080	99,97
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	838.872.000	838.304.480	99,93
		6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Mataram	1.800.476.100	1.800.273.235	99,99
		7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81.795.000	81.413.100	99,53
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan		1.448.329.400	1.441.389.027	99,52
		1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	135.660.000	134.990.370	99,51
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	490.779.100	487.834.213	99,40
		3. Jumlah desa pangan aman	667.856.700	664.760.289	99,54
		4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	154.033.600	153.804.154	99,85
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram		1.617.048.000	1.615.685.185	99,92
		1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.115.341.800	1.114.431.249	99,92
		2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	501.706.200	501.253.936	99,91
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram		883.652.000	882.899.952	99,91
		1. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	883.652.000	882.899.952	99,91
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Mataram yang optimal		8.929.032.900	8.923.512.064	99,94
		1. Indeks RB Balai Besar POM di Mataram	7.775.402.500	7.770.243.212	99,93
		2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Mataram	1.153.630.400	1.153.268.852	99,97
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Mataram yang berkinerja optimal		3.420.619.800	3.419.392.051	99,96





No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Indikator/Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f= (e/d*100)
		1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Mataram	3.420.619.800	3.419.392.051	99,96
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Terintegrasi dan Adaptif		686.721.200	686.666.338	99,99
		1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	360.000.000	359.999.055	100,00
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Mataram yang optimal	326.721.200	326.667.283	99,98
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Mataram secara Akuntabel		1.047.059.400	1.046.700.407	99,97
		1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Mataram	1.047.059.400	1.046.700.407	99,97

Dari tabel 3.55, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran masing-masing sasaran strategis seluruhnya diatas 99%. Realisasi tertinggi adalah pada sasaran strategis 10 “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” dengan capaian 99,99%. Sedangkan capaian terendah adalah pada sasaran strategis 2 yaitu “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram” dengan realisasi 99,55%.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$





Standar efisiensi (SE) merupakan angka perbandingan yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Perhitungan efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan pada rasio antara capaian output dan input (anggaran yang dikeluarkan). Perhitungan efisiensi anggaran masing-masing kegiatan (Rincian Output) dan sasaran strategis selengkapnya terdapat pada lampiran 7 dan 9.

Tabel 3.103 Nilai Efisiensi Masing-masing Sasaran Strategis BBPOM di Mataram Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	%Output	%Input (anggaran)	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	99,28	99,97	0,993	-0,007
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	97,33	99,55	0,978	-0,022
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	104,78	99,61	1,052	0,052
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	113,29	99,54	1,138	0,138
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan	102,79	99,58	1,032	0,032





No.	Sasaran Strategis	%Output	%Input (anggaran)	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)
	Makanan				
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	120,00	99,92	1,201	0,201
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	101,01	99,91	1,011	0,011
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Mataram yang optimal	100,54	99,95	1,006	0,006
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Mataram yang berkinerja optimal	107,27	99,96	1,073	0,073
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Terintegrasi dan Adaptif	108,78	99,99	1,088	0,088
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Mataram secara Akuntabel	94,48	99,97	0,945	-0,055
UPT BBPOM DI MATARAM		104,77	99,90	1,049	0,049

Dari 11 sasaran strategis yang diukur, diperoleh bahwa 8 sasaran strategis efisien dan 3 sasaran tidak efisien, dengan Tingkat Efisiensi (TE) sasaran tertinggi 0,138 dan terendah -0,055. Sasaran Strategis yang tidak efisien yaitu Sasaran Strategis 1, 2 dan 11. Sedangkan dari 29 indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, diperoleh 24 indikator dengan hasil efisien dan 5 indikator tidak efisien dengan Tingkat Efisiensi (TE) indikator tertinggi 0,232 dan terendah sebesar -0,055. Adanya sasaran strategis dan indikator kinerja yang tidak efisien disebabkan karena tingginya realisasi/capaian anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja masing-masing sasaran/indikator. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan masih berpusat pada pencapaian Rincian Output (RO), namun belum efektif untuk menunjang pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis.

Pada Tahun 2023 BBPOM di Mataram melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 29 indikator kinerja dan 11 sasaran strategis. Dari 21 kegiatan utama (Rincian Output) yang dilaksanakan, seluruhnya efisien (Indeks efisiensi > 1) dengan Tingkat Efisiensi (TE) tertinggi 1,479 dan terendah sebesar 0,000005. Hal ini disebabkan bahwa dengan anggaran yang digunakan, seluruh target kegiatan/Rincian Output dapat tercapai bahkan ada yang melampaui target.

Secara keseluruhan penggunaan anggaran BBPOM di Mataram Tahun 2023 menunjukkan hasil efisien dengan nilai indeks efisiensi (IE) 1,049 dan tingkat efisiensi (TE) 0,049. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis secara umum telah efektif dan berdampak untuk pencapaian indikator maupun sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

dengan sumber daya (dana) yang ada, pada Tahun 2023 BBPOM di Mataram mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Realisasi anggaran **99,90%** dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar **104,77%** menunjukkan adanya **EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI** penggunaan dana dengan **Indeks efisiensi sebesar 1,049 dan Tingkat Efisiensi 0,049**

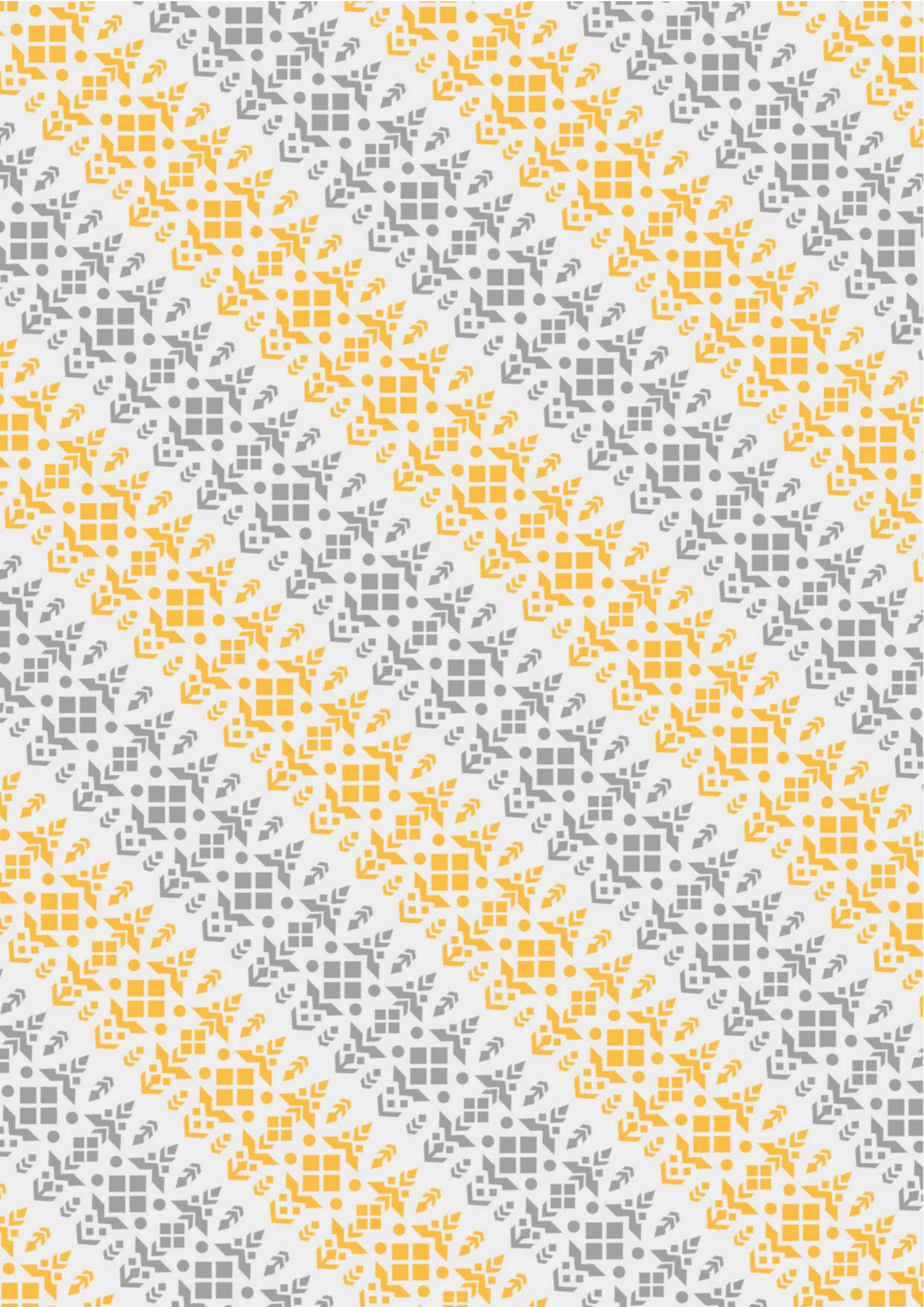
Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya sebagai berikut:

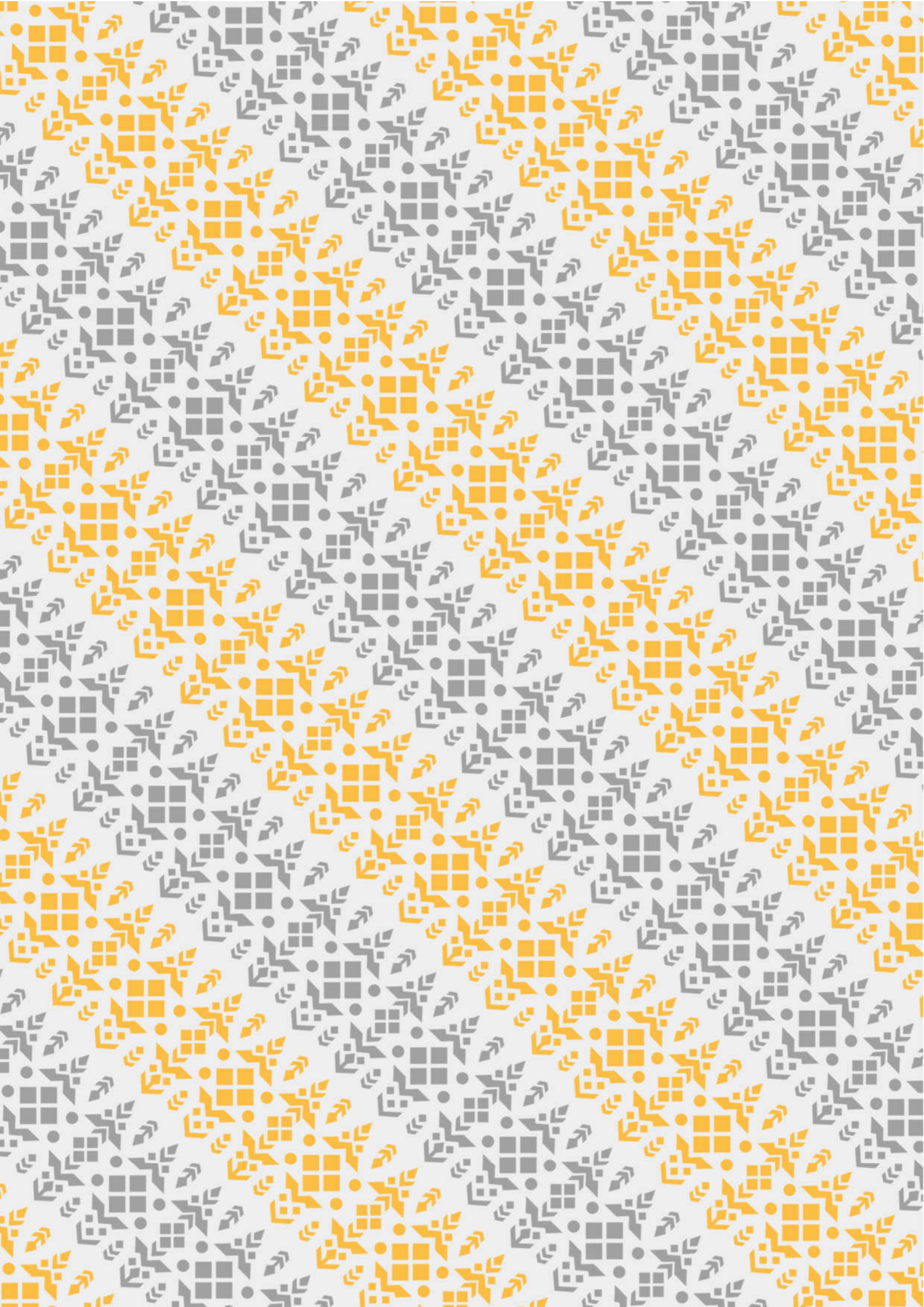
- Pelaksanaan kegiatan seperti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop, Pendampingan, dll menggunakan metode hybrid maupun *online*, sehingga anggaran dapat dioptimalisasi untuk kegiatan strategis lainnya;
- Penggunaan *e-office* dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kantor, sehingga menghemat biaya dokumentasi dan pencetakan;
- Membatasi kegiatan di luar kantor sesuai dengan urgensinya;
- Melakukan optimalisasi sisa anggaran pada kegiatan yang telah tercapai outputnya untuk membiayai kegiatan lain yang memiliki daya ungkit tinggi sehingga capaian kinerja meningkat.

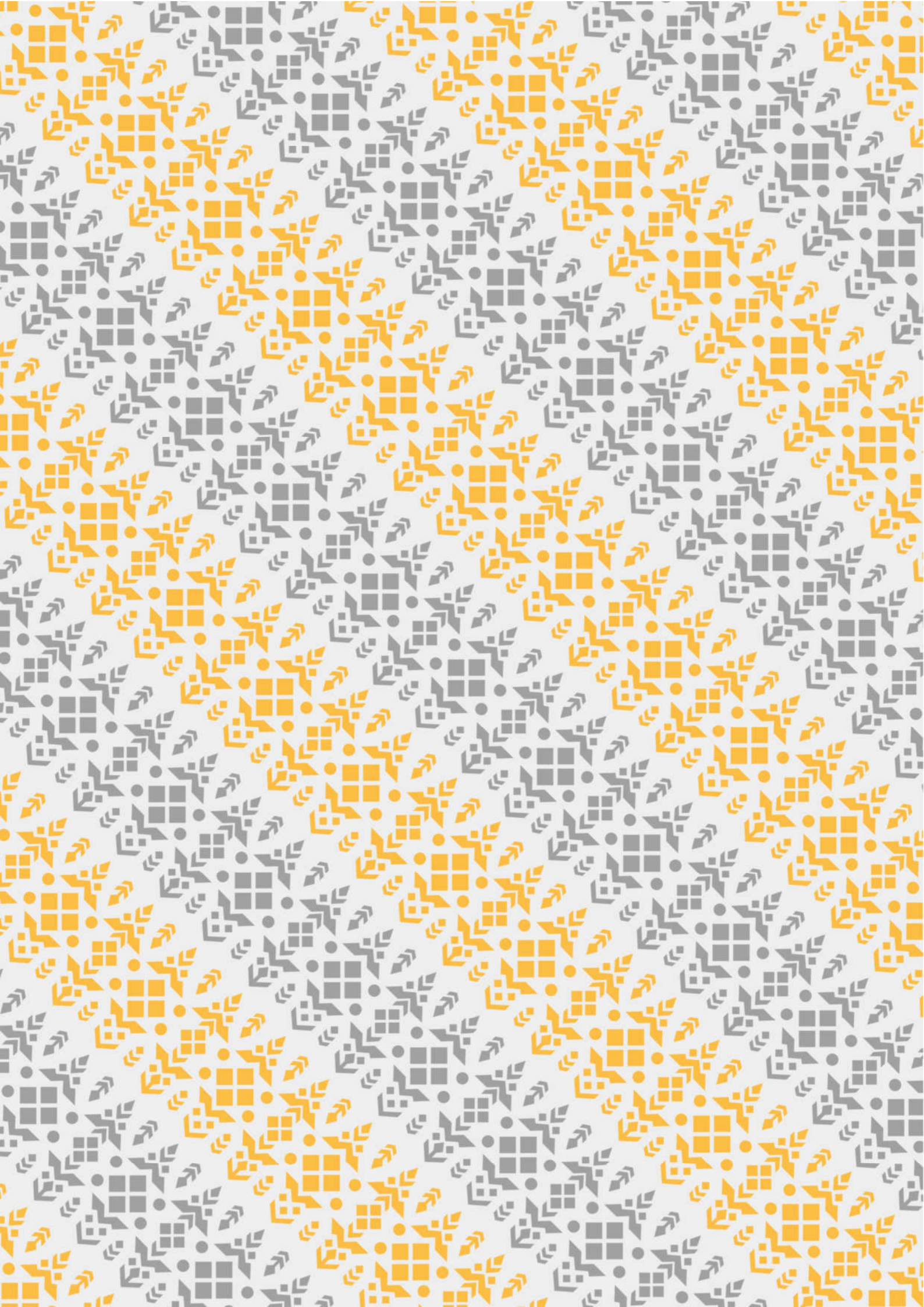




BAB IV **PENUTUP**









BAB IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari periode Rencana Strategis 2020-2024. Evaluasi capaian kinerja tahun 2023 didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 yang mengacu pada Reviu Renstra BBPOM di Mataram Tahun 2020-2024. Terdapat 21 kegiatan utama (Rincian Output) untuk menunjang pencapaian 11 sasaran strategis dan 29 indikator kinerja Utama.

Dari 11 sasaran strategis BBPOM di Mataram yang diukur capaiannya pada tahun 2023, 8 sasaran strategis dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS) dengan Kategori "SANGAT BAIK" dan 3 sasaran strategis dengan Kategori NSS "CUKUP". Nilai Kinerja Organisasi atau Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh sebesar 104,77% dengan predikat "ISTIMEWA".

Hasil capaian tiap sasaran strategis tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- o Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama "Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram" sebesar 99,28% dengan Kategori CUKUP, menunjukkan BBPOM di Mataram cukup efektif dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- o Capaian Indikator pada sasaran strategis kedua "Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram" sebesar 97,33% dengan kriteria CUKUP, menunjukkan BBPOM di Mataram cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- o Capaian Indikator pada sasaran strategis ketiga "Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram" sebesar 104,78% dengan kriteria SANGAT BAIK, menunjukkan BBPOM di Mataram efektif dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- o Capaian indikator sasaran strategis keempat "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram" sebesar 103,39% dengan Kategori SANGAT BAIK, menunjukkan BBPOM di Mataram sangat efektif meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- o Capaian indikator sasaran strategis kelima "Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan" sebesar 102,79% dengan Kategori SANGAT BAIK menunjukkan BBPOM di Mataram sangat efektif dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;





- o Capaian indikator sasaran strategis keenam “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram” sebesar 120,0% dengan Kategori SANGAT BAIK menunjukkan BBPOM di Mataram sangat efektif dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- o Capaian indikator sasaran strategis ketujuh “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram” sebesar 101,01% dengan Kategori SANGAT BAIK, menunjukkan BBPOM di Mataram sangat efektif dalam meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- o Capaian indikator sasaran strategis kedelapan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Mataram yang optimal” sebesar 100,54% dengan kriteria SANGAT BAIK, hal ini menunjukkan BBPOM di Mataram sangat efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan UPT yang optimal.
- o Capaian indikator sasaran strategis kesembilan “Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Mataram yang berkinerja optimal” sebesar 107,27% dengan kriteria SANGAT BAIK, hal ini menunjukkan BBPOM di Mataram sangat efektif dalam mewujudkan sumber daya manusia UPT yang optimal.
- o Capaian indikator sasaran strategis kesepuluh “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” sebesar 116,0% dengan Kategori SANGAT BAIK, menunjukkan BBPOM di Mataram sangat efektif dalam meningkatkan penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
- o Capaian indikator sasaran strategis kesebelas “Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Mataram secara Akuntabel” sebesar 94,48% dengan Kategori CUKUP, menunjukkan BBPOM di Mataram cukup efektif dalam pengelolaan keuangan UPT secara akuntabel.

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Tahun 2023, dari 11 sasaran strategis dan 29 indikator kinerja utama (IKU) yang diukur pencapaiannya. Terdapat 22 indikator yang capaiannya dengan kategori “sangat baik”, 2 indikator dengan kategori “baik”, dan 5 indikator dengan kategori “cukup”.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2023 antara 93,54% sampai dengan 120,0%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 93,54%, sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar serta Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian masing-masing sebesar 120,0%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi NTB untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, BBPOM di Mataram didukung anggaran APBN Tahun





Anggaran 2023 DIPA awal sebesar Rp. 23,995,139,000 dan DIPA akhir Rp. 23,849,625,000. Realisasi anggaran tahun 2023 adalah Rp. 23,825,109,279 atau 99,90%. Sumbangan terbesar terhadap realisasi anggaran ini yaitu realisasi belanja pegawai (99,97%) dan belanja modal (99,99%).

Secara keseluruhan penggunaan anggaran BBPOM di Mataram Tahun 2023 menunjukkan hasil efisien dengan nilai indeks efisiensi (IE) 1,04 dan tingkat efisiensi (TE) 0,04 serta capaian tingkat efisiensi sebesar 100%. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis secara umum telah efektif dan berdampak untuk pencapaian indikator maupun sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sumber daya (dana) yang ada, pada tahun 2023 BBPOM di Mataram mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

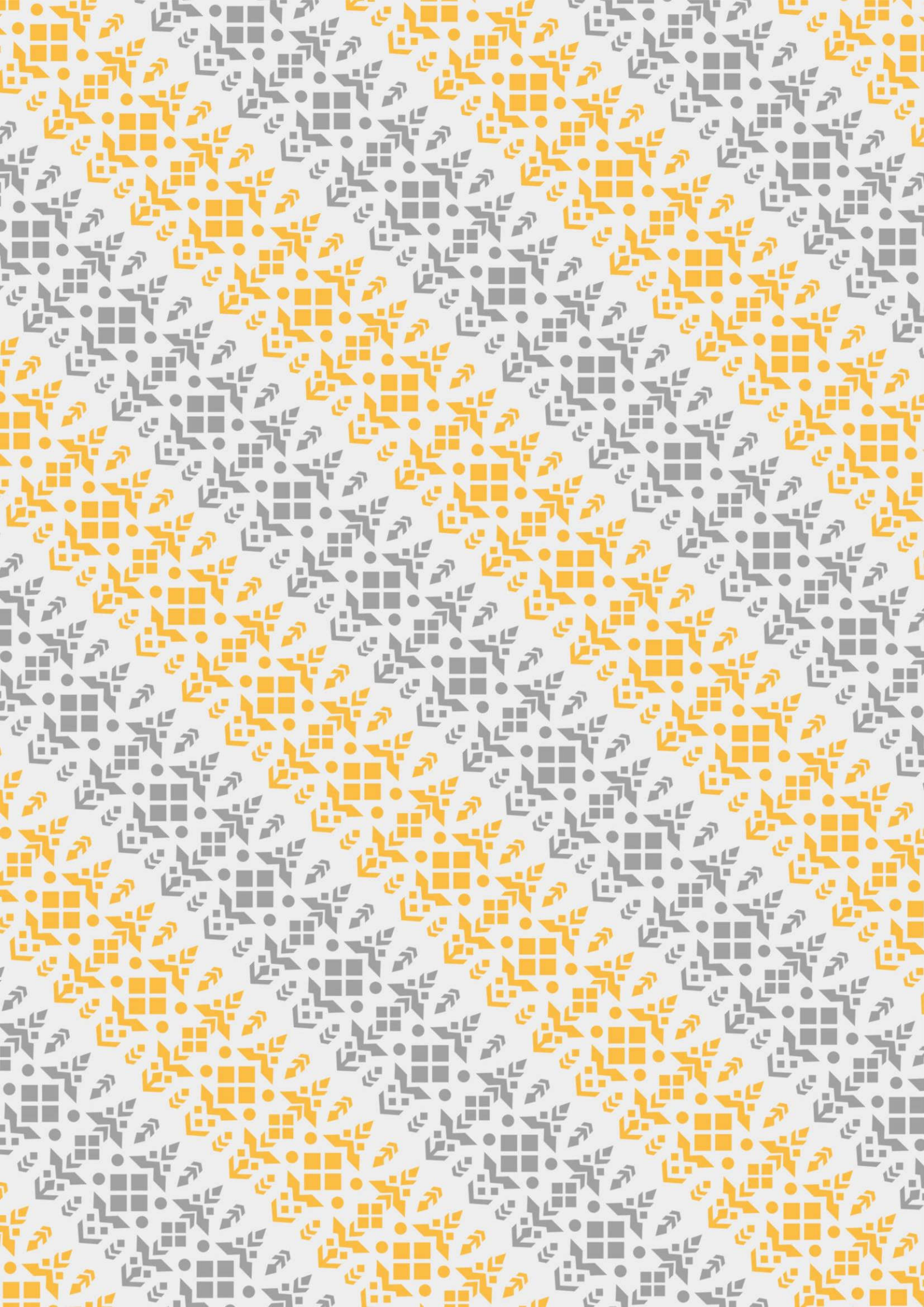
4.2 SARAN

Laporan Kinerja Tahun 2023 yang memuat informasi dan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dan capaian kinerja tahun 2023 agar digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Hasil evaluasi di tahun 2023 ditindaklanjuti dan dimonitor pencapaiannya secara berkala terhadap seluruh indikator kinerja dan sasaran strategis khususnya pada 5 (lima) indikator yang belum mencapai target di tahun 2023, agar seluruh target indikator kinerja di tahun berikutnya dapat tercapai dengan kriteria “BAIK ATAU SANGAT BAIK” dan terjadi peningkatan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), serta nilai kinerja organisasi dengan predikat “ISTIMEWA” dapat dipertahankan.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian indikator dengan kriteria “CUKUP” menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Hal yang perlu dilakukan adalah:

- a. Melakukan reviu dan mengusulkan perubahan target akhir periode renstra 2020 – 2024 (Tahun 2024) agar lebih realistis dan dapat dicapai (*attainable*) khususnya untuk indikator kinerja yang targetnya sangat tinggi ataupun sejak dua tahun terakhir tidak pernah tercapai
- b. Melakukan reviu dan mengusulkan perubahan target indikator kinerja yang realisasinya di tahun 2023 telah melampaui target tahun 2024 atau target akhir periode Renstra.
- c. Melakukan tindaklanjut terhadap seluruh rekomendasi perbaikan kinerja/rencana aksi yang telah dipaparkan pada Analisis Akuntabilitas masing-masing indikator kinerja.





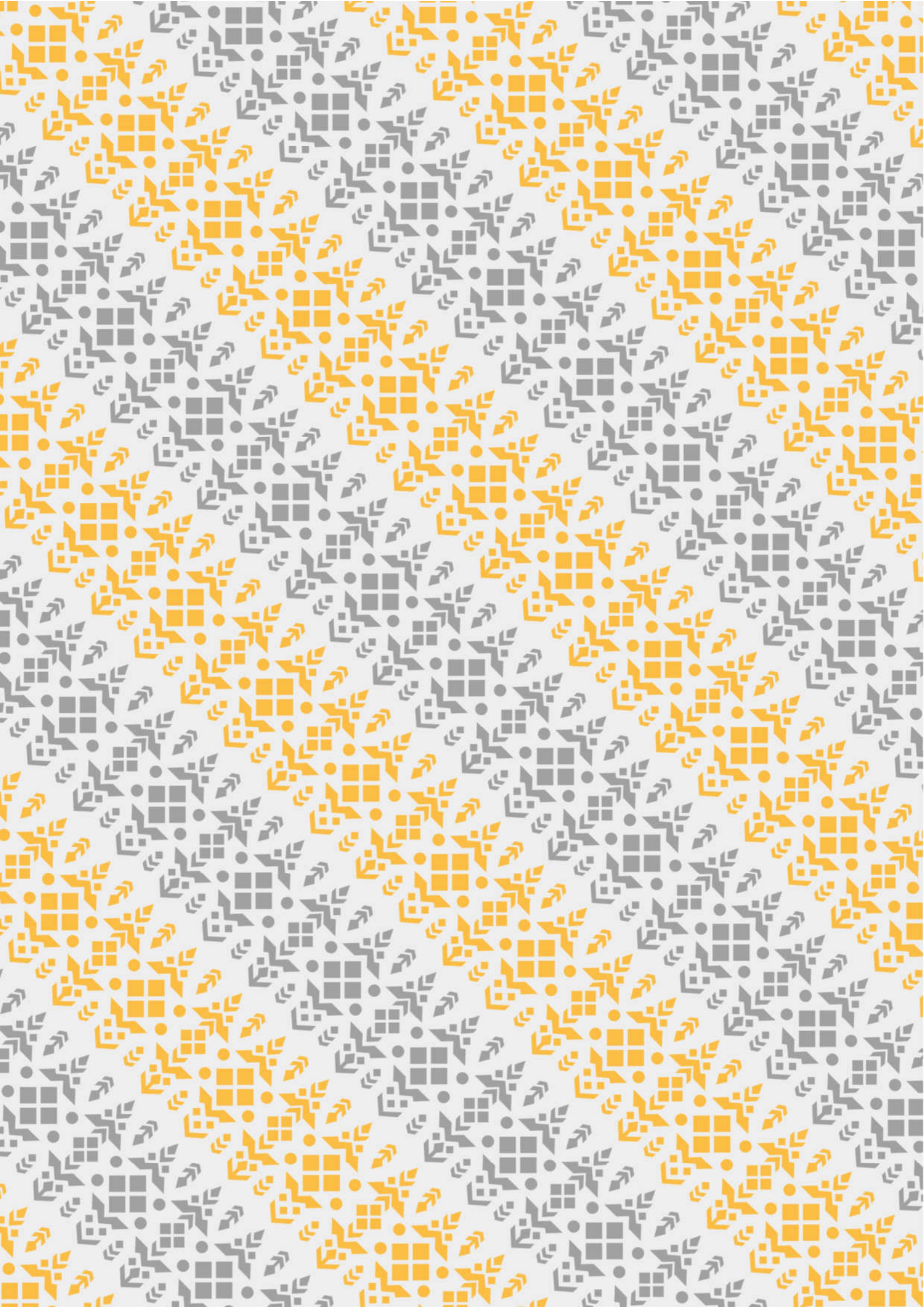


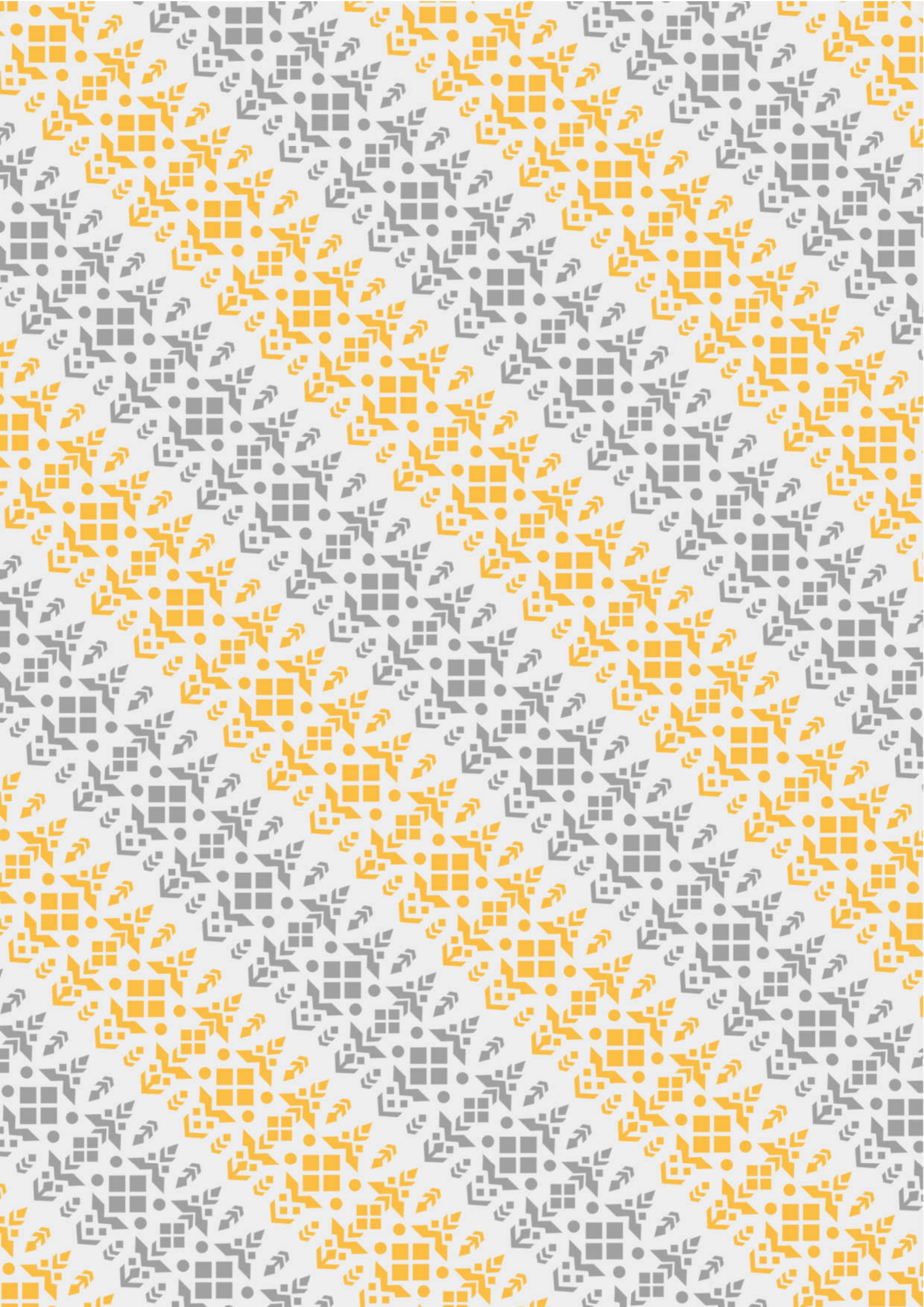
BBPOM
Di Mataram

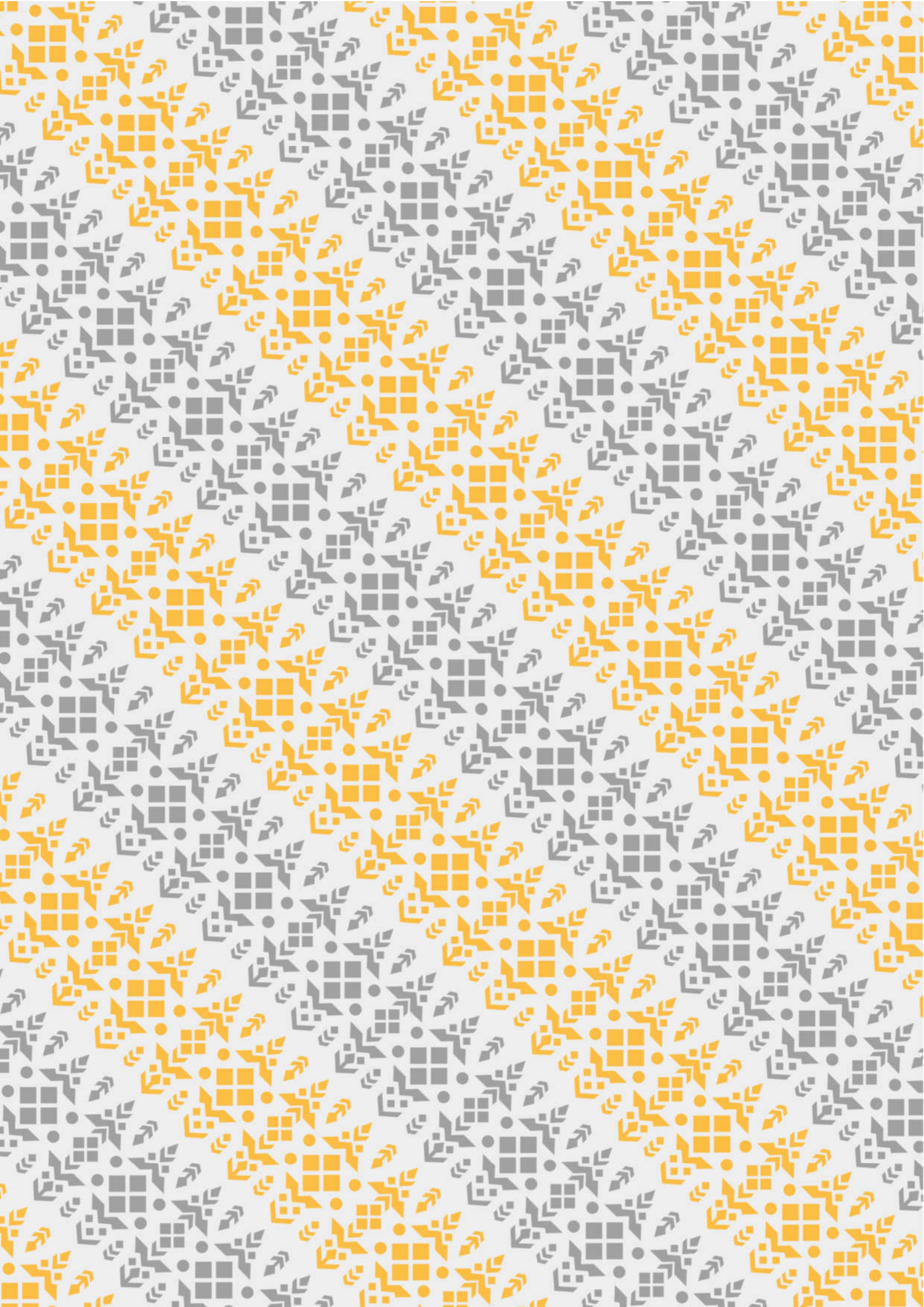
Dinas LHK
Prov. NTB

BADAN POM
**BPOM Net Zero
Carbon Programme**
Kolaborasi BBPOM Mataram dan Pemangku Kepentingan Obat
dan Makanan dalam Mewujudkan Net Zero Carbon di
Indonesia melalui Inisiatif **Mangrove**

LAMPIRAN









PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BBPOM di Mataram BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Mataram
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 20 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Mataram

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89.8
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78.75
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	94
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
makanan serta pelayanan publik		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.40
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.3
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	84
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
dan Makanan		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	89
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	92
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	97
Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Anggaran : Rp. 23,995,139,000.00

Mataram, 20 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

2. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2022



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Mataram
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	784.044.750, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	261.348.250, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	525.309.000, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	175.103.000, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	59.371.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												82	258.720.500, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												89.8	76.210.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												78.75	258.720.500, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												94	258.720.500, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	90.687.000, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	90.687.000, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	104.898.000, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	164.860.000, 00



**PENDAHULUAN****PERENCANAAN
KINERJA****AKUNTABILITAS
KINERJA****PENUTUP**

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	971.245.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	1.790.370.500,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4	16	31	40	47	53	59	66	74	83	90	79	81.795.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	135.660.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	10	20	20	25	25	30	42.5	60	62.5	65	80	84	552.344.100,00
19.	Jumlah desa pangan aman	10	20	25	40	48	66	66	71	83	85	95	25	730.725.100,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	8	15	25	40	50	55	60	70	80	90	100	1.052.038.200,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	8	15	25	40	50	55	60	70	80	90	100	501.706.200,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	99	1.060.812.000,00
23.	Indeks RB UPT												89	7.891.693.500,00
24.	Nilai AKIP UPT												82	1.168.088.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												84	3.413.620.200,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												92	113.783.400,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	208.904.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		50	55	62	65	67	69	71	73	75	80	97	1.038.360.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	20	25	55	55	75	75	85	100	100	8	175.314.300,00





PENDAHULUAN



**PERENCANAAN
KINERJA**



**AKUNTABILITAS
KINERJA**



PENUTUP

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
Total															23.995.139.000, 00

Mataram, 20 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Mataram

Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

3. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

NOMOR HK.02.02.18A.18A5.07.22.112 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

Jl. Catur Warga No. Mataram 83121 Nusa Tenggara Barat
Telp. (0370) Ka. 622297, TU/ULPK : 621926, Fax. (0370) 628033
e-mail : bpom_mtrm@yahoo.com

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

Jl. Catur Warga No. Mataram 83121 Nusa Tenggara Barat
Telp. (0370) Ka. 622297, TU/ULPK : 621926, Fax. (0370) 628033
e-mail : bpom_mtrm@yahoo.com

- 3 -

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor HK.02.02.18A.18A5.07.22.112 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM TAHUN 2023.





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

Jl. Catur Warga No. Mataram 83121 Nusa Tenggara Barat
Telp. (0370) Ka. 622297, TU/ULPK : 621926, Fax. (0370) 628033
e-mail : bpom_mtrm@yahoo.com

- 4 -

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 12 Juli 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MATARAM,

I GUSTI AYU ADHI ARYAPATNI





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

Jl. Catur Warga No. Mataram 83121 Nusa Tenggara Barat
Telp. (0370) Ka. 622297, TU/ULPK : 621926, Fax. (0370) 628033
e-mail : bpom_mtrm@yahoo.com

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

NOMOR HK.02.02.18A.18A5.07.22.112 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MATARAM TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,8





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

Jl. Catur Warga No. Mataram 83121 Nusa Tenggara Barat
Telp. (0370) Ka. 622297, TU/ULPK : 621926, Fax. (0370) 628033
e-mail : bpom_mtrm@yahoo.com

- 6 -

	Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,75
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Mataram	94
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Indeks Pelayanan Publik	4,55
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

Jl. CaturWarga No. Mataram 83121 Nusa Tenggara Barat
Telp. (0370) Ka. 622297, TU/ULPK : 621926, Fax. (0370) 628033
e-mail : bpom_mtrm@yahoo.com

- 7 -

5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,3
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	84
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB BBPOM di Mataram	89
		Nilai AKIP BBPOM di Mataram	82
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Mataram	84
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	92
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Mataram yang optimal	2,5





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

Jl. CaturWarga No. Mataram 83121 Nusa Tenggara Barat
Telp. (0370) Ka. 622297, TU/ULPK : 621926, Fax. (0370) 628033
e-mail : bpom_mtrm@yahoo.com

- 8 -

11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Mataram	97,0
----	--	---	------

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MATARAM

I GUSTI AYU ADHI ARYAPATNI





4. MATRIKS PERUBAHAN SASARAN STRATEGIS DAN TARGET INDIKATOR KINERJA BALAI BESAR POM DI MATARAM TAHUN 2020-2024

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (SEMULA)				TARGET KINERJA (MENJADI)				KETERANGAN		
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
SS1-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram											
IK1-Persentase Obat yang memenuhi syarat (%)	80,8	83,6	86,6	90	92,3	80,8	84	86,6	90	92,3	
IK2-Persentase makanan yang memenuhi syarat (%)	78	80	82	84	86	78	80	82	84	83,81	Ada perubahan Target Tahun 2024
IK3-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (%)	80	82	84	86	88	80	82	84	86	84,7	Ada perubahan Target Tahun 2024
IK4-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (%)	50	52	54	56	58	50	70	72	76	83,17	Ada perubahan Target Tahun 2023-2024
IK5-Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (%)	-	-	-	-	-	-	78	80	85	90	Indikator baru yang mulai berlaku 2021-2024. Ada Perubahan Target Tahun 2023-2024
SS2-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram											
IK6-Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram (Indeks)	70	73	76	79	82	70	77	79	82	82	Ada perubahan Target Tahun 2024
SS3-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram											
IK7-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan	83	85	87	88,5	90	83	87,6	88,7	89,8	97,9	Ada perubahan Target





SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (SEMULA)					TARGET KINERJA (MENJADI)					KETERANGAN
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Obat dan Makanan (Indeks)											Tahun 2024
IK8-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (Indeks)	71	74	77	80	83	71	76,24	77,50	78,75	79,7	Ada perubahan Target Tahun 2024
IK9-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Mataram (Indeks)	88	89,5	90,5	91	92	88	92	93	94	99	Ada perubahan Target Tahun 2024
SS4-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram											
IK10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (%)	85	87	89	91	93	85	87	89	91	99,2	Ada perubahan Target Tahun 2024
IK11-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (%)	49,5	58,4	67,2	76,1	85	49,5	58	67	76	88,5	Ada perubahan Target Tahun 2024
IK12-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (Indeks)	85	87	89	91	93	85	99,5	100	100	100	
IK13-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (%)	50	55	60	65	70	50	55	60	65	70	
IK14-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (%)	55	57	59	61	63	55	63	66	68	76,1	Ada perubahan Target Tahun 2024
IK15-Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Mataram (Indeks)	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51	3,51	4,45	4,51	4,4	4,95	Ada perubahan Target Tahun 2023 dan 2024



SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (SEMULA)					TARGET KINERJA (MENJADI)					KETERANGAN
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IK 16-Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (%)	-	-	-	-	-	-	-	77	79	97	Indikator baru yang mulai berlaku 2022-2024, Ada perubahan Target Tahun 2024
SS5-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram											
IK17-Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan (Nilai)	72	75	78	81	85	72	93,5	94,9	96,3	97,6	Ada perubahan Target Tahun 2024
IK18-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (Sekolah)	20	40	60	82	102	20	40	62	84	106	
IK19-Jumlah desa pangan aman (Desa)	6	12	18	25	31	6	12	18	25	31	
IK20-Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (pasar)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perubahan nomenklatur
IK20-Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (pasar)	-	4	6	8	10	-	4	6	8	10	
SS6-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram											
IK21-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (%)	90	91	92	93	94	90	100	100	100	100	
IK22-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (%)	90	91	92	93	94	90	100	100	100	100	
SS7-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram											





SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (SEMULA)					TARGET KINERJA (MENJADI)					KETERANGAN
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IK23-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (%)	91	92	93	94	95	91	97	98	99	100	
SS8-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Mataram yang optimal											
IK24-Indeks RB Balai Besar POM di Mataram (Indeks)	88	90	93	94	95	88	87	88	89	90,45	Ada perubahan Target Tahun 2024
IK25-Nilai AKIP Balai Besar POM di Mataram (Nilai)	81	85	90	91	92	81	80	81	82	85,25	Ada perubahan Target Tahun 2024
SS9-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Mataram yang berkinerja optimal											
IK26-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Mataram (Indeks)	75	77	80	82	85	75	83,5	83,75	84	90,65	Ada perubahan Target Tahun 2024
SS10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan											
IK27-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (%)	80	82	84	86	88	80	82	87	92	95	Ada perubahan Target Tahun 2024
IK28-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Mataram yang optimal (Nilai)	1,51	2	2,26	2,5	3	1,51	2	2,25	2,5	3	
SS11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Mataram secara Akuntabel											
IK29-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Mataram (Nilai)	93	94	95	96	97	93	95,0	96,0	97,0	91,15	Ada perubahan Target Tahun 2024
IK30-Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Mataram (Nilai)	EFISI EN (92%)	EFISI EN (92%)	EFISI EN (92%)	EFISI EN (92%)	EFISI EN (92%)	EFISI EN (92%)	EFISI EN (92%)	-	-	-	Indikator hanya berlaku pada 2020-2021



5. NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS), NILAI PERSPEKTIF (NP) DAN NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS) TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN IKU	NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)/NILAI PERSPEKTIF (NP)/NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)	KATEGORI NSS/NP/NPSS
Nilai Kinerja Organisasi								
Stakeholder Perspective								
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase Obat yang memenuhi syarat Persentase Makanan yang memenuhi syarat Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90 84 86	90,48 78,57 84,65	100,53 93,54 98,43	Sangat Baik Cukup Cukup	100,53 93,54 98,43	Sangat Baik Cukup
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76 85 82	78,90 85,09 9,81	103,81 100,10 97,33	Sangat Baik Sangat Baik Cukup	103,81 100,10 97,33	Cukup





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN IKU	NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)/NILAI PERSPEKTIF (NP)/NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)	KATEGORI NSS/NP/NPSS
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Mataram	89,8 78,75 94	97,80 79,61 98,09	108,91 101,09 104,35	Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik	108,91 101,09 104,35	Sangat Baik
Internal Process Perspective							109,27	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	91 76 100 65	99,11 88,43 100,00 69,77	108,91 116,36 120,00 107,33	Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik	108,91 116,36 120,00 107,33	Sangat Baik Sangat Baik



PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN IKU	NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)/NILAI PERSPEKTIF (NP)/NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)	KATEGORI NSS/NP/NPSS
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	76,06	111,85	Sangat Baik	111,85	Sangat Baik
		Indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Mataram	4,4	4,86	110,45	Sangat Baik	110,45	
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	93,33	118,14	Sangat Baik	118,14	
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	96,3	96,72	100,44	Sangat Baik	100,44	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	84	93,00	110,71	Sangat Baik	110,71	Sangat Baik
		Jumlah desa pangan aman	25	25,00	100,00	Baik	100,00	
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8	8,00	100,00	Baik	100,00	
		Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,00	120,00	Sangat Baik	120,00	
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,00	120,00	Sangat Baik	120,00	





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN IKU	NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)/NILAI PERSPEKTIF (NP)/NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)	KATEGORI NSS/NP/NPSS
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99	100,00	101,01	Sangat Baik	101,01	101,01
Learning and Growth Perspective							104,57	Sangat Baik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Mataram yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Mataram	89,00	87,99	98,87	Cukup	98,87	100,54
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Mataram	82,00	83,81	102,21	Sangat Baik	102,21	
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Mataram yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Mataram	84,00	90,11	107,27	Sangat Baik	107,27	107,27
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	92,00	93,43	101,55	Sangat Baik	101,55	116,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Mataram yang optimal	2,5	2,90	116,00	Sangat Baik	116,00	
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Mataram secara Akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Mataram	97	91,65	94,48	Cukup	94,48	94,48
								Cukup





PENDAHULUAN



PERENCANAAN KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA



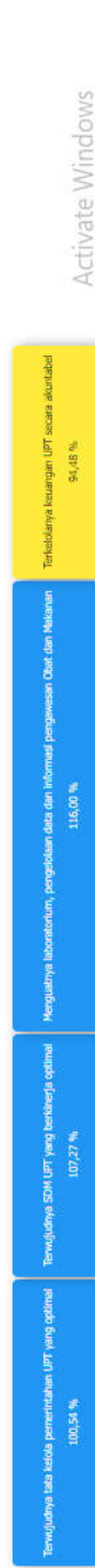
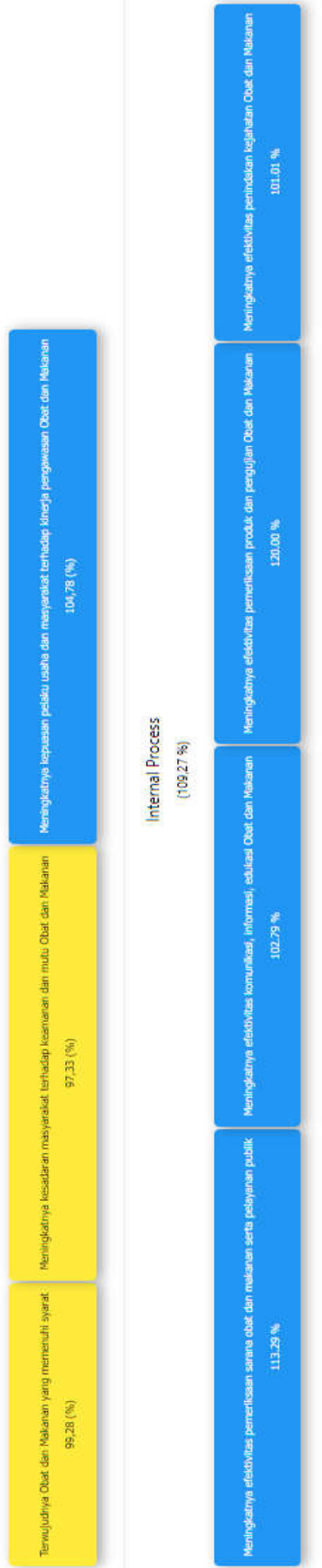
PENUTUP

6. NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS), NILAI PERSPEKTIF (NP) DAN NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS) PADA APLIKASI SIMETRIS MENU EPERFORMANCE TAHUN 2023

Unit Kerja : BBPOM di Mataram
Nama Pejabat : Yusuf Dwi Erwan Prakasa S., S.Si., Apt.
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Mataram

NPSS : 104,77 %
Pagu : Rp. 0,00
Realisasi Anggaran : Rp. 0,00
Realisasi Anggaran (%) : nan %

Stakeholder
(100,47 %)



Activate Windows





7. PERHITUNGAN EFISIENSI INDIKATOR KINERJA MASING-MASING SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja		Output		Input (anggaran)			IE	TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram			99,28	1.805.176.000	1.804.794.807	99,97	0,993	-0,007	
		90	90,48	100,53	790.546.500	790.486.140	99,99			
		84	78,57	93,54	263.515.500	263.495.380	99,99			
		86	84,65	98,43	524.949.000	524.737.538	99,96			
		76	78,9	103,81	174.983.000	174.912.513	99,96			
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	85	85,09	100,10	51.182.000	51.163.236	99,96	1,001	0,001	
				97,33	237.904.200	236.823.279	99,55	0,978	-0,022	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	82	79,81	97,33	237.904.200	236.823.279	99,55	0,978	-0,022	
				104,78	531.753.400	529.439.658	99,61	1,052	0,052	





No.	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja			Output			Input (anggaran)			IE	TE
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		
		89,8	97,8	108,91	55.945.000	55.793.100	99,73	1,092	0,092			
		78,75	79,61	101,09	237.904.200	236.823.279	99,55	1,015	0,015			
		94	98,09	104,35	237.904.200	236.823.279	99,55	1,048	0,048			
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	113,29			3.242.328.700	3.237.806.513	99,54	1,138	0,138			
		91	99,11	108,91	119.557.800	119.499.144	99,95	1,090	0,090			
		76	88,43	116,36	119.557.800	119.499.144	99,95	1,164	0,164			
		100	120	120,00	125.163.000	121.957.330	97,44	1,232	0,232			
		65	69,77	107,33	156.907.000	156.860.080	99,97	1,074	0,074			
		68	76,06	111,85	838.872.000	838.304.480	99,93	1,119	0,119			
		4,4	4,86	110,45	1.800.476.100	1.800.273.235	99,99	1,105	0,105			
		79	93,33	118,14	81.795.000	81.413.100	99,53	1,187	0,187			





No.	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			IE	TE
			T	R	%	T	R	%		
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	baik 1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PIAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas								
			96,3	96,72	100,44	1.448.329.400	1.441.389.026	99,58	1,032	0,032
			84	93	110,71	490.779.100	487.834.213	99,40	1,114	0,114
			25	25	100,00	667.856.700	664.760.289	99,54	1,005	0,005
			8	8	100,00	154.033.600	153.804.154	99,85	1,002	0,002
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120	120,00	1.115.341.800	1.114.431.249	99,92	1,201	0,201
			100	120	120,00	501.706.200	501.253.936	99,91	1,201	0,201
						883.652.000	882.899.952	99,91	1,011	0,011
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99	100	101,01	883.652.000	882.899.952	99,91	1,011	0,011
						8.929.032.900	8.923.512.064	99,95	1,006	0,006
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Mataram yang optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Mataram	89	87,99	98,87	7.775.402.500	7.770.243.212	99,93	0,989	-0,011





No.	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja		Output			Input (anggaran)			IE	TE
		T	R	%	T	R	%				
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Mataram yang berkinerja optimal	82	83,81	102,21	1.153.630.400	1.153.268.852	99,97	1,022	0,022		
		84	90,11	107,27	3.420.619.800	3.419.392.051	99,96	1,073	0,073		
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Terintegrasi dan Adaptif	92	93,43	101,55	360.000.000	359.999.055	100,00	1,016	0,016		
		2,5	2,9	116,00	326.721.200	326.667.283	99,98	1,160	0,160		
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Mataram secara Akuntabel	97	91,65	94,48	1.047.059.400	1.046.700.407	99,97	0,945	-0,055		
				104,77	23.849.625.000	23.825.109.279	99,90	1,049	0,049		





PENDAHULUAN



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA



PENUTUP

8. CAPAIAN RINCIAN OUTPUT (RO) DAN ANGGARAN MASING-MASING RINCIAN OUTPUT TAHUN 2023

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e= (d/c*100)	f	g	h= (g/f*100)
1	QDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman	969	1162	119,92	193.800.000	92.843.386	99,70
2	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	28	43	153,57	81.795.000	81.413.100	99,53
3	EBA.962 Layanan Umum	1	1	100,00	256.749.000	255.890.658	99,67
4	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	1.020.298.000	1.017.814.035	99,76
5	BMB.001 Laporan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	44	54	122,73	124.000.000	123.642.242	99,71
6	QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	84	93	110,71	701.113.000	696.906.019	99,40
7	QDB.002 Desa Pangan Aman	25	25	100,00	954.081.000	949.657.556	99,54
8	QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya	8	8	100,00	220.048.000	219.720.220	99,85
9	EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	100,00	14.017.606.000	14.013.763.617	99,97
10	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	1.672.354.000	1.670.846.453	99,91
11	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00	184.968.000	184.405.736	99,70
12	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	593	1443	243,34	181.108.000	177.750.430	98,15
13	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	360.000.000	359.999.055	99,76
14	CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	180.000.000	179.993.070	100,00
15	CAN.001 Perangkat pengolahan data dan komunikasi	15	15	100,00	193.100.000	193.050.000	99,97
16	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	571	571	100,00	699.932.000	699.650.050	99,96
17	QIA.005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	1542	1554	100,78	1.054.062.000	1.053.981.520	99,99





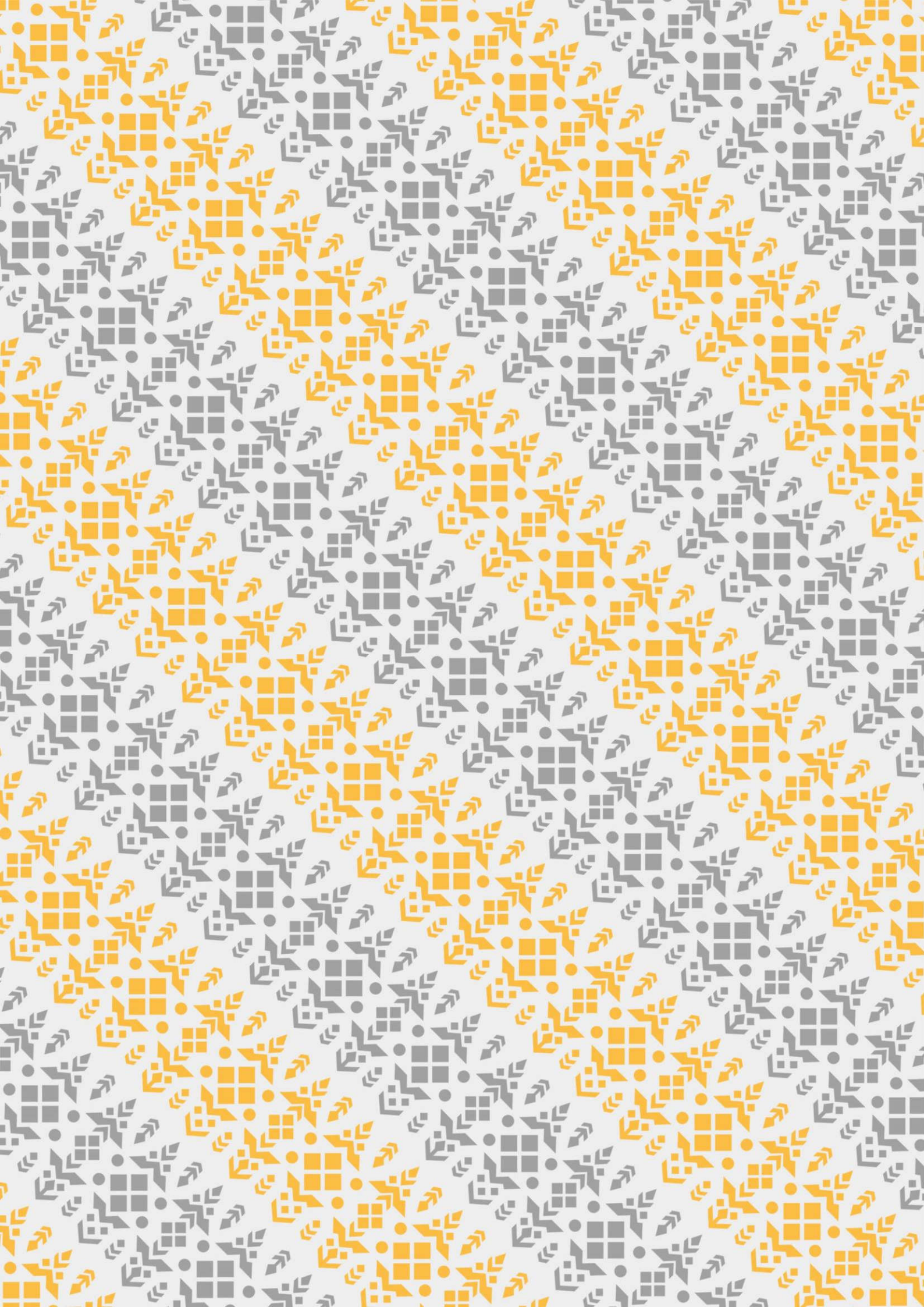
No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e= (d/c*100)	f	g	h= (g/f*100)
18	oleh BB/BPOM Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	105	114	108,57	51.182.000	51.163.236	99,96
19	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	109	129	118,35	156.907.000	156.860.080	99,97
20	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	577	685	118,72	847.838.000	847.264.600	99,93
21	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MATARAM	8	11	137,50	698.684.000	698.494.216	99,97





9. PERHITUNGAN EFISIENSI MASING-MASING RINCIAN OUTPUT (RO) TAHUN 2023

No	RINCIAN OUTPUT (RO)	Output			Input (anggaran)			IE	TE
		T	R	%	T	R	%		
1	QDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman	969	1162	119,92	193.800.000	192.843.386	99,51	1,205	0,205
2	BDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	28	43	153,57	81.795.000	81.413.100	99,53	1,543	0,543
3	EBA.962 Layanan Umum	1	1	100,00	256.749.000	255.890.658	99,67	1,003	0,003
4	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	1.020.298.000	1.017.814.035	99,76	1,002	0,002
5	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	44	54	122,73	124.000.000	123.642.242	99,71	1,231	0,231
6	QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	84	93	110,71	701.113.000	696.906.019	99,40	1,114	0,114
7	QDB.002 Desa Pangan Aman	25	25	100,00	954.081.000	949.657.556	99,54	1,005	0,005
8	QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya	8	8	100,00	220.048.000	219.720.220	99,85	1,001	0,001
9	EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	100,00	14.017.606.000	14.013.763.617	99,97	1,000	0,000
10	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	1.672.354.000	1.670.846.453	99,91	1,001	0,001
11	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00	184.968.000	184.405.736	99,70	1,003	0,003
12	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	593	1443	243,34	181.108.000	177.750.430	98,15	2,479	1,479
13	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	360.000.000	359.999.055	100,00	1,000	0,0000003
14	CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	180.000.000	179.993.070	100,00	1,000	0,000004
15	CAN.001 Perangkat pengolahan data dan komunikasi	15	15	100,00	193.100.000	193.050.000	99,97	1,000	0,000026
16	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	571	571	100,00	699.932.000	699.650.050	99,96	1,000	0,000040
17	QIA.005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	1542	1554	100,78	1.054.062.000	1.053.981.520	99,99	1,008	0,008
18	QIA.008 Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	105	114	108,57	51.182.000	51.163.236	99,96	1,086	0,086
19	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	109	129	118,35	156.907.000	156.860.080	99,97	1,184	0,184
20	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	577	685	118,72	847.838.000	847.264.600	99,93	1,188	0,188
21	QCD.U52 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MATARAM	8	11	137,50	698.684.000	698.494.216	99,97	1,375	0,375



**“Obat dan Makanan Aman, Bermutu dan Berdaya Saing
untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

